PEMERINTAH
KOTA BOGOR

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

KOTA BOGOR

2025 - 2045

Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor
Tahun 2024

SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembanguna Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Renccana Pembangunan Jangka Pajang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka Panjang daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; dan
c. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD meliputi:

a. visi pembangunan;
b. misi pembangunan;
c. arah kebijakan pembangunan; dan
d. sasaran pokok pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VI : PENUTUP

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 November 2024

PJ. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT (10/222/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kota Bogor merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kota Bogor akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJPD yang meliputi visi Pembangunan, misi Pembangunan, arah kebijakan Pembangunan, sasaran pokok Pembangunan, sistematika RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 163

PJ. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan Karunia-NYA-lah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025-2045 telah diselesaikan dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi, serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerahnya sesuai dengan amanat Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, dimana setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan berdurasi 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Kota Bogor 2025-2045 ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, dan penyusunan RPJMD Kota Bogor. Secara bertahap, diharapkan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud Visi Kota Bogor 2045: Kota Sains Kreatif, Maju, Berkelanjutan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Bogor dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelesaian dokumen akhir RJPD Kota Bogor 2025-2045.

Bogor, Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB 1. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 4
1.5. Sistematika Penulisan 5

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **8**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 8
2.1.1. Geografi 8
2.1.2. Demografi 36
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 44
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 44
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya 57
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 67
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah 67
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia 94
2.3.3. Daya Saing Infrastruktur 105
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi 120
2.4. Aspek Pelayanan Umum 126
2.4.1. Reformasi Birokrasi 126
2.4.2. Pelayanan Publik 128
2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 129
2.4.4. Inovasi Daerah 130
2.4.5. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 131
2.4.6. Kualitas Kebijakan 133
2.4.7. Kemandirian Daerah 133
2.4.8. Indeks Merit Sistem 135
2.4.9. Opini BPK 137

2.4.10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 138
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 140
2.5.1. Refleksi Pembangunan 140
2.5.1. Evaluasi Pencapaian RPJPD Periode Tahun 2005 - 2025 141
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 154
2.6.1. Proyeksi Demografi 154
2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana 157
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 167
2.7.1. Prespektif Nasional 167
2.7.2. Perspektif Provinsi Jawa Barat 173
2.7.3. Perspektif Aglomerasi Jabodetabek 174
2.7.4. Perspektif Kota Bogor 176

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 210
3.1. Permasalahan 210
3.1.1. Aspek geografi dan demografi 210
3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 214
3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 217
3.1.4. Aspek Pelayanan Umum 224
3.1.5. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 228
3.2. Isu Strategis 236
3.2.1. Isu Global 236
3.2.2. Isu Nasional 238
3.2.3. Isu Regional 241
3.2.4. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat 247
3.2.5. Modalitas Kota Bogor 249
3.2.6. Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Bogor 252
3.2.7. Isu Strategis Kota Bogor 256

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH 269
4.1. Visi 269
4.1.1. Visi RPJPN 269
4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 272
4.1.3. Visi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 274
4.2. Misi 285
4.2.1. Misi RPJPN 285
4.2.2. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 286
4.2.3. Misi RPJPD Kota Bogor 286
4.3. Upaya Transformasi Super Prioritas *(Game Changers)* 290

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 295

5.1. Arah Kebijakan 295
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 319
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah 319
5.2.2. Arah Kebijakan Transformatif 334

BAB 6. PENUTUP 343
6.1. Kaidah Pelaksanaan 343
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan 343
6.1.2. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Nasional dan Provinsi 343
6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 345
6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran 346
6.2. Sistem Insentif 346
6.3. Kerangka Pengendalian 347
6.4. Evaluasi Manajemen Risiko 349
6.5. Mekanisme Perubahan 350
6.6. Komunikasi Publik 350
6.7. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik 351
6.8. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non-Publik 351
6.9. Manajemen Investasi 352

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bogor, Tahun 2023 9
Tabel 2.2. Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan 11
Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Bogor 2019-2023 14
Tabel 2.4. Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bogor Tahun 2015-2023 16
Tabel 2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023 18
Tabel 2.6. Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor 19
Tabel 2.7. Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas di Kota Bogor 19
Tabel 2.8. Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor 27
Tabel 2.9. Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor 27
Tabel 2.10. Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor 28
Tabel 2.11. Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor 29
Tabel 2.12. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor 30
Tabel 2.13. Jumlah Produksi Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2016-2022 32
Tabel 2.14. TPS 3R di Kota Bogor Tahun 2023 32
Tabel 2.15. Fasilitas Pengelolaan Persampahan Kota Bogor 33
Tabel 2.16. Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP 34
Tabel 2.17. Total Emisi CO_2e di Kota Bogor Tahun 2013 - 2022 35
Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Jawa Barat Tahun 2012 - 2023. 40
Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bogor Tahun 2019-2023 41
Tabel 2.20. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022-2023 42
Tabel 2.21. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 62
Tabel 2.22. Predikat Kota Layak Anak di Kota Bogor tahun 2019-2023 63
Tabel 2.23. Emisi dan Serapan GRK Kota Bogor Berdasarkan Kategori Tahun 2013-2022 70
Tabel 2.24. Intensitas Energi Kota Bogor Tahun 2013-2022 71
Tabel 2.25. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 74
Tabel 2.26. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar=2010) Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 75
Tabel 2.27. Rasio Akomodasi Makanan dan Minuman Tahun 2014-2023 (persen) 78
Tabel 2.28. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kota Bogor 80
Tabel 2.29. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor 80

Tabel 2.30. Realisasi dan Target Investasi Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023 85
Tabel 2.31. Jumlah Tenaga Kerja dan Proyek di Kota Bogor Tahun 2019-2023 85
Tabel 2.32. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2011-2021 85
Tabel 2.33. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020-2023 88
Tabel 2.34. Sebaran UMKM di Kota Bogor Tahun 2022 92
Tabel 2.35. *Share* Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2023 94
Tabel 2.36. Indeks Pendidikan di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Tahun 2010-2022 95
Tabel 2.37. Kemampuan Literasi Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2023-2024 98
Tabel 2.38. Kemampuan Numerasi Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2023-2024 100
Tabel 2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2018-2023 102
Tabel 2.40. Angka Ketergantungan Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Tahun 2018-2023 104
Tabel 2.41. Indeks Infrastruktur Kota Bogor Tahun 2018-2023 105
Tabel 2.42. Panjang Jalan Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023 (km) 106
Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023 (km) 106
Tabel 2.44. Panjang Jalan Menurut Jenis Output di Kota Bogor Tahun 2023 (meter) 107
Tabel 2.45. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Bogor (Km) 107
Tabel 2.46. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bogor Tahun 2019-2022 (%) 107
Tabel 2.47. Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019-2023 111
Tabel 2.48. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN Kota Bogor Menurut Kawasan/ Rayon di Kota Bogor Tahun 2021-2022 113
Tabel 2.49. Daya Terpasang, Produksi Listrik dan Listrik Terjual Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023 113
Tabel 2.50. Daya terpasang, Produksi dan Distribusi PT.PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor 114
Tabel 2.51. Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2023 116
Tabel 2.52. Timbulan Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2022-2023 (Ton/Hari) 117
Tabel 2.53. Timbulan Sampah Per Kapita (kg/orang/hari) Tahun 2022-2023 .. 117
Tabel 2.54. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan 118
Tabel 2.55. Persentase Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan Kota Bogor Tahun 2020-2023 119
Tabel 2.56. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Zona Pelayanan di Kota Bogor Tahun 2021-2023 119
Tabel 2.57. Zona Pelayanan Perumda Pakuan Tirta Bogor 120

Tabel 2.58. Nilai IDSD Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 120
Tabel 2.59. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 Menurut Aspek 124
Tabel 2.60. Angka Tingkat Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2014-2023 (kejadian) 126
Tabel 2.61. Nilai Indeks Inovasi Daerah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 131
Tabel 2.62. Nilai Survei Penilaian Integritas Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 132
Tabel 2.63. Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023 (persen) 134
Tabel 2.64. Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2023 134
Tabel 2.65. Target dan Realisasi Sistem Merit Kota Bogor Tahun 2022 - 2024 136
Tabel 2.66. Capaian Indeks Sistem Merit Kota Bogor dan Beberapa Daerah Pembanding serta Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 137
Tabel 2.67. Opini BPK Kota Bogor dan Beberapa Daerah Pembanding serta Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 - 2023 138
Tabel 2.68. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bogor dan Beberapa Daerah Pembanding Tahun 2020 - 2024 139
Tabel 2.69. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bogor 154
Tabel 2.70. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bogor 155
Tabel 2.71. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bogor 155
Tabel 2.72. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kota Bogor 158
Tabel 2.73. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Kebutuhan Kota Bogor, Tahun 2023-2045 159
Tabel 2.74. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bogor, Tahun 2023-2045 160
Tabel 2.75. Kebutuhan Air di Kota Bogor 160
Tabel 2.76. Proyeksi Kebutuhan Air Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2045 161
Tabel 2.77. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Bogor, Tahun 2023-2045 163
Tabel 2.78. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bogor Tahun 2023-2045 163
Tabel 2.79. Jenis Fasilitas (Sarana/Prasarana Kesehatan) 165
Tabel 2.80. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Bogor, Tahun 2023-2045 166
Tabel 2.81. Jumlah Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi di Kota Bogor, Tahun 2013-2022 166
Tabel 2.82. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023-2045 167
Tabel 2.83. Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor 179
Tabel 2.84. Peruntukan kawasan lindung dan budidaya RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 181
Tabel 2.85. Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kota Bogor dan Lokasinya 190
Tabel 2.86. Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kota Bogor dan Lokasinya 201

Tabel 2.87. Indikasi Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis dalam RTRW Kota Bogor dan Lokasinya 207
Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019-2023 214
Tabel 3.2. Jumlah Sarana Pendidikan Kota Bogor Tahun 2024 221
Tabel 3.3. Penyelarasan Isu Strategis Global, Nasional, Regional Jawa-Bali, Provisi, dan KLHS RPJPD 257
Tabel 4.1. Penyelarasan sasaran Visi Kota Bogor 2025-2045 280
Tabel 4.2. Penyelarasan Misi Nasional, Provinsi, Kota Bogor 290
Tabel 5.1. Matriks Arah Kebijakan Kota Bogor Periode 2025-2045 303
Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045 319
Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 - 2045 321
Tabel 5.4. Persandingan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor 325
Tabel 5.5. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor 334

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya 5
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bogor 10
Gambar 2.2. Peta Geologi Regional Kota Bogor 12
Gambar 2.3. Peta Topografi Kota Bogor 13
Gambar 2.4. Rata - Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2020 - 2023 14
Gambar 2.5. Distribusi Penggunaan Lahan Tahun 2023 (%) 15
Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2023 17
Gambar 2.7. Peta Jasa Ekosistem Pangan di Kota Bogor 19
Gambar 2.8. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 - 2023 21
Gambar 2.9. Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2021 22
Gambar 2.10. Status Daya Dukung Air Kota Bogor Tahun 2021 22
Gambar 2.11. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kota Bogor 23
Gambar 2.12. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain terhadap PDRB di Kota Bogor Tahun 2020 - 2023 23
Gambar 2.13. Sebaran Lahan Sawah di Kota Bogor Per Kecamatan 24
Gambar 2.14. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Bogor Tahun 2013 - 2022 25
Gambar 2.15. Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2018 - 2023 26
Gambar 2.16. Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor 26
Gambar 2.17. Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor 28
Gambar 2.18. Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor 29
Gambar 2.19. Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor 30
Gambar 2.20. Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor 31
Gambar 2.21. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Bogor 2015-2023 35
Gambar 2.22. Jumlah Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2012- 2023 37
Gambar 2.23. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 - 2023 38
Gambar 2.24. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 - 2022 43
Gambar 2.25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 45
Gambar 2.26. Klassen Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/Kota sekitarnya, tahun 2023 46
Gambar 2.27. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 47
Gambar 2.28. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 47

Gambar 2.29. Klassen Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023 49
Gambar 2.30. Indeks Gini Kota Bogor dan Wilayah Pembanding tahun 2010-2023 50
Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Manusia (Secara Komposit) Kota Bogor Tahun 2005-2023 51
Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 52
Gambar 2.33. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023 53
Gambar 2.34. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023 54
Gambar 2.35. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023 55
Gambar 2.36. Klassen Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023 56
Gambar 2.37. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2010-2023 57
Gambar 2.38. Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2023 57
Gambar 2.39. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2015-2023 58
Gambar 2.40. Perkembangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor Tahun 2016-2023 59
Gambar 2.41. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Bogor Tahun 2019-2023 60
Gambar 2.42. Rata-Rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 61
Gambar 2.43. Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2018-2023 64
Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Tahun 2020-2023 64
Gambar 2.45. Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor dan Sekitarnya dan Indonesia, Tahun 2019-2023 66
Gambar 2.46. Rumah Tangga yang Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kota Bogor dengan Wilayah Pembanding, Tahun 2019-2023 (Persen) 67
Gambar 2.47. PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2020-2023 72
Gambar 2.48. Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB 17 Sektor Lapangan Usaha Kota Bogor, tahun 2023 76
Gambar 2.49. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2018-2023 77
Gambar 2.50. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2010 Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2018-2023 78
Gambar 2.51. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 81
Gambar 2.52. PDRB ADHB per Kapita Kota Bogor dan Pertumbuhan PDRB ADHB per Kapita Kota Bogor Tahun 2010-2023 82
Gambar 2.53. Pengeluaran per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 83
Gambar 2.54. Realisasi Investasi Kota Bogor Tahun 2014-2023 83
Gambar 2.55. Alokasi Realisasi Investasi Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun 2023 84

Gambar 2.56. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor 2023 Berdasarkan Indikator 89
Gambar 2.57. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2021..... 90
Gambar 2.58. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Bogor Tahun 2020 dan 2021 90
Gambar 2.59. Rasio Kewirausahaan Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2017 - 2023 93
Gambar 2.60. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023..... 97
Gambar 2.61. Proporsi Pekerja yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2017 - 2023..... 100
Gambar 2.62. Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2023..... 101
Gambar 2.63. Angka Ketergantungan Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023..... 103
Gambar 2.64. Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2022-2023 di Kota Bogor 106
Gambar 2.65. Trayek Angkutan Kota di Kota Bogor 108
Gambar 2.66. Koridor/Rute Pengoperasian BisKita Trans Pakuan 110
Gambar 2.67. Jumlah Perkembangan Pelanggan PLN Tahun 2014 - 2022 112
Gambar 2.68. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen) 116
Gambar 2.69. Klassen Nilai Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023 122
Gambar 2.70. Perkembangan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2011-2023 123
Gambar 2.71. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2023..... 125
Gambar 2.72. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2019-2023 127
Gambar 2.73. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2022 127
Gambar 2.74. Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023 129
Gambar 2.75. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019-2023..... 130
Gambar 2.76. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun 2023..... 130
Gambar 2.77. Alur Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Kota Bogor..... 136
Gambar 2.78. Refleksi Pembangunan Kota Bogor 2005-2025..... 140
Gambar 2.79. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada Renstra Periode 2005-2009.. 141
Gambar 2.80. Rekapitulasi Ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009..... 142
Gambar 2.81. Persentase Capaian Seluruh Indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 Pada Masing-Masing Misi..... 143
Gambar 2.82. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Periode 2010-2014.. 144
Gambar 2.83. Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014 144
Gambar 2.84. Persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada masing-masing misi 145
Gambar 2.85. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2015-2019..... 146
Gambar 2.86. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019..... 146

Gambar 2.87. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 Pada Masing-Masing Misi 147
Gambar 2.88. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024 149
Gambar 2.89. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2019-2024 150
Gambar 2.90. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Pada Masing-Masing Misi 151
Gambar 2.91. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 157
Gambar 2.92. Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2045 161
Gambar 2.93. Ketersediaan Air Kota Bogor 161
Gambar 2.94. Status Daya Dukung Air Tahun 2045 162
Gambar 2.95. Daya Dukung Air Tahun 2045 162
Gambar 2.96. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 164
Gambar 2.97. Tema pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat (Termasuk Kota Bogor) 173
Gambar 2.98. Rencana Struktur Ruang Kota Bogor 2011-2031 179
Gambar 2.99. Rencana Pola Ruang Kota Bogor 185
Gambar 2.100. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kota Bogor 189
Gambar 3.1. Kepadatan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2005 - 2023 214
Gambar 3.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota Bogor Tahun 2016 - 2023 219
Gambar 3.3. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2018-2023 (Persen) 230
Gambar 3.4. Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019-2023 .. 233
Gambar 3.5. Indeks Kualitas Air Tahun 2023 234
Gambar 3.6. Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 234
Gambar 3.7. Isu Global 236
Gambar 3.8. Isu Nasional 238
Gambar 3.9. Isu Regional Kawasan Jawa-Bali 241
Gambar 3.10. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat 247
Gambar 3.11. Isu strategis KLHS RPJPD Kota Bogor 2025-2045 253
Gambar 4.1. Visi RPJPN 2025-2045 269
Gambar 4.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 272
Gambar 4.3. Alur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045 274
Gambar 4.4. Elemen Pendukung Kota Bogor Sebagai Kota Sains Kreatif 276
Gambar 4.5. Keselarasan RPJPD dengan RTRW Kota Bogor 278
Gambar 4.6. Lima sasaran visi Kota Bogor 2025-2045 278
Gambar 4.7. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045 285
Gambar 4.8. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 286
Gambar 4.9. Sandingan Isu Strategis dan Misi Kota Bogor 2025-2045 287
Gambar 4.10. *Game Changers* (Upaya Transformasi Super Prioritas) RPJPD Kota Bogor 2025-2045 291
Gambar 6.1. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional 344
Gambar 6.2. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah - Rencana Pembangunan Turunannya 346
Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian RPJP Daerah 2025-2045 348

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bogor pernah menjadi pusat Kerajaan Pajajaran, menurut peta Kota Bogor pernah menjadi pusat Kerajaan Pajajaran, menurut peta Portugis, Kerajaan Pajajaran berada di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Kota Bogor. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prasasti Batu Tulis merupakan bukti otentik keberadaan Kerajaan Pajajaran yang berpusat di wilayah Kota Bogor. Pada periode 1745-1808, Buitenzorg (Bogor) menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda.

Sepuluh tahun terakhir pemerintahan banyak mengalami percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan jalan R3, pedestrian, pembangunan RTH Publik berupa lapangan olahraga, taman kota, alun-alun, jalur hijau, pembangunan sarana prasarana pendidik seperti pembangunan Sekolah Satu Atap dan rehabilitasi sekolah SD dan SMP, revitalisasi pasar tradisional seperti pasar jambu dua, pasar Sukasari, pasar Pamoyanan, pasar Tanah Baru, penataan transportasi berupa reduksi angkutan kota dan pelayanan transportasi massal melalui Bus Rapid Transportation (BisKita), pembangunan GOR di setiap Kecamatan. Selain itu juga Kota Bogor meraih dua kali Anugerah Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2023.

Kota Bogor dalam 20 tahun ke depan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Jabodetabek mempunyai posisi strategis akan menghadapi tantangan ke depan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Bonus demografi yang dimiliki Kota Bogor dalam 20 tahun ke depan sumberdaya manusia yang produktif harus disiapkan. Potensi Kota Bogor baik sebagai kota pusaka, kota sains, ekonomi kreatif, tujuan wisata, kota yang memiliki landscape hijau, menjadi modal dasar untuk pembangunan dalam rangka Kota Bogor lebih maju dan berkelanjutan di tahun 2045. Kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan masih menjadi isu yang harus dituntaskan.

Sebagai landasan pembangunan jangka panjang, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sampai saat ini Kota Bogor memiliki RPJPD Kota Bogor tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009, berakhir masa berlakunya pada tahun 2025, sehingga perlu disusun dokumen RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 - 2045 untuk mencapai cita-cita Kota Bogor di tahun 2045. Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 Kota Bogor ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih

jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Dokumen RPJPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat serta Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebagaimana amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJPD dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahunan dan dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan jangka waktu tahunan. Penjabaran ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan, kesinambungan, sinergitas serta keselarasan pembangunan.

Penyusunan RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dilakukan melalui beberapa proses atau tahapan yaitu tahapan Konsultasi Publik pada tanggal 29 Desember 2023, Musrenbang RPJPD pada tanggal 18 April 2024, rapat Pansus DPRD Kota Bogor pada bulan Juni 2024, kesepakatan dengan DPRD pada tanggal 8 Juli 2024 dan penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 pada tanggal 18 November 2024.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dan substansi, menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
d. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam 1 (satu) proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum

Dalam Proses Penyusunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD ke dalam Dokumen RPJPD/ RPJMD;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan dokumen RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yakni untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kota Bogor 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, adalah:

a. Tersusunnya gambaran umum daerah dan kinerja pembangunan periode 2005-2023;
b. Tersusunnya tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik;
c. Tersusunnya pengembangan pusat pertumbuhan dan arahan kebijakan kewilayahan Tahun 2025-2045;
d. Tersusunnya perumusan masalah dan isu strategis daerah;
e. Tersusunnya visi dan misi daerah; dan
f. Tersusunnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

1.4. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut.

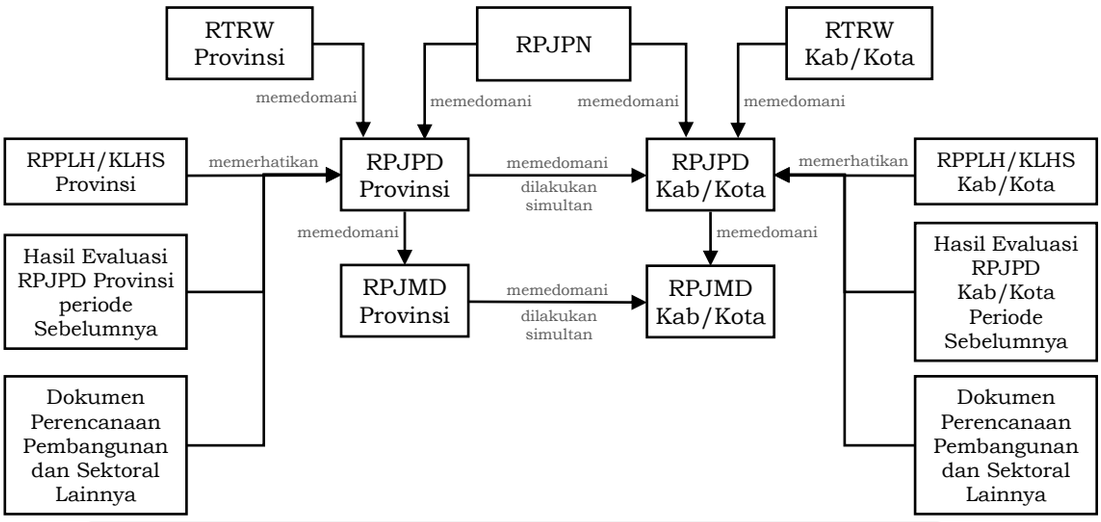

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

Berdasarkan **Gambar 1.1** bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai kerangka dasar pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun, yang disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Selain itu RPJPD ini mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat dan memperhatikan KLHS Kota Bogor, hasil evaluasi RPJPD Kota Bogor sebelumnya serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan hubungan antar dokumen (RPJPD dan dokumen rencana lainnya).

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum evaluasi RPJPD periode sebelumnya, tren demografi dan kebutuhan sarana pelayanan publik,

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan diuraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional),

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi daerah Tahun 2025-2045 serta upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*)

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, bab ini juga memuat sasaran pokok yang merupakan rincian

pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.

BAB 6. PENUTUP

Memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Bogor menjadi salah satu salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di wilayah Jawa Barat. Keberagaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasinya yang strategis di antara kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kesejahteraan masyarakat dan inovasi. Namun demikian, Kota Bogor juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dari masalah urbanisasi yang cepat hingga perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penting bagi Kota Bogor untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang yang komprehensif dan terarah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 menjadi panduan utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Bogor untuk merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam RPJPD ini, gambaran umum kondisi Kota Bogor akan menjadi landasan penting untuk memahami tantangan, peluang, dan arah pembangunan yang diinginkan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum kondisi daerah dengan cakupan tujuh aspek, yakni: (1) Aspek geografi dan demografi; (2) Aspek kesejahteraan masyarakat; (3) Aspek daya saing; (4) Aspek pelayanan umum; (5) Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025; (6) Tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografi dan demografi Kota Bogor merupakan 2 (dua) aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Bentuk geografi yang tidak cukup luas dan terbatas, namun memiliki dinamika demografi yang terus berubah, termasuk pertumbuhan penduduk yang cepat dan pola migrasi yang kompleks membentuk wajah Kota Bogor saat ini dan proyeksi masa depannya. Melalui analisis yang cermat dan proses konsultasi yang inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan, RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan demikian, strategi pembangunan yang dirumuskan dapat berfokus pada upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup penduduk, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1. Geografi

Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Relevansi aspek geografi dengan Kota Bogor digunakan untuk

melihat potensi dan risiko serta kondisi terkini permasalahan yang meliputi letak geografis; peran dan fungsi; kondisi geologi, topografi, tata guna lahan dan iklim; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); daya dukung penyediaan pangan dan air; potensi sumber daya alam; risiko bencana; serta risiko lingkungan hidup..

2.1.1.1. Posisi Strategis Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°43'30"BT - 106°51'00"BT dan 6°30'30"LS - 6°41'00"LS. Kota Bogor berada pada posisi yang strategis dari segi pengembangan wilayah karena berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor serta dekat dengan Provinsi DKI Jakarta sekaligus menjadi bagian dari Kawasan Aglomerasi Jabodetabek. Akses transportasi yang sangat memadai baik transportasi berbasis rel, bus maupun kendaraan pribadi menjadikan akses dari Kota Bogor ke Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat menjadi lebih mudah. Jarak Kota Bogor dengan DKI Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan Kota Bandung kurang lebih 120 kilometer. Aksesibilitas yang mudah dan keterkaitan yang erat antar penduduk di Kota Bogor dengan wilayah sekitarnya sangat strategis dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, pariwisata, transportasi, dan komunikasi serta industri.

Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 111,38 km² yang terdiri atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan, 802 RW, dan 3.644 RT. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bogor Selatan yang mencakup 27,38% dari luas Kota Bogor. Sedangkan wilayah dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Bogor Tengah yang mencakup 7,51% dari luas Kota Bogor. Secara karakteristik wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal lebih mempunyai corak sebagai wilayah urban yang dicirikan dengan infrastruktur lebih lengkap, menjadi pusat bisnis dan ekonomi, pusat layanan pendidikan dan kesehatan, serta aksesibilitas yang lebih mudah (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bogor, Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase (%)
1	Bogor Barat	23,32	20,93
2	Bogor Selatan	30,50	27,38
3	Bogor Tengah	8,37	7,51
4	Bogor Timur	10,46	9,39
5	Bogor Utara	18,14	16,28
6	Tanah Sareal	20,60	18,49
Jumlah		111,39	100,00

Sumber: Bogor Dalam Angka Tahun 2024

Sedangkan Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat memiliki karakteristik rural masih cenderung lebih dominan yang dicirikan diantaranya oleh jaringan jalan kecil, fasilitas perekonomian, kesehatan dan pendidikan lebih terbatas. Walaupun demikian, perkembangan kawasan perumahan tidak hanya terjadi di wilayah timur tetapi juga berkembang ke wilayah barat. Secara umum luas wilayah Kota Bogor relatif terbatas dan secara administratif Kota Bogor

dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, sehingga memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

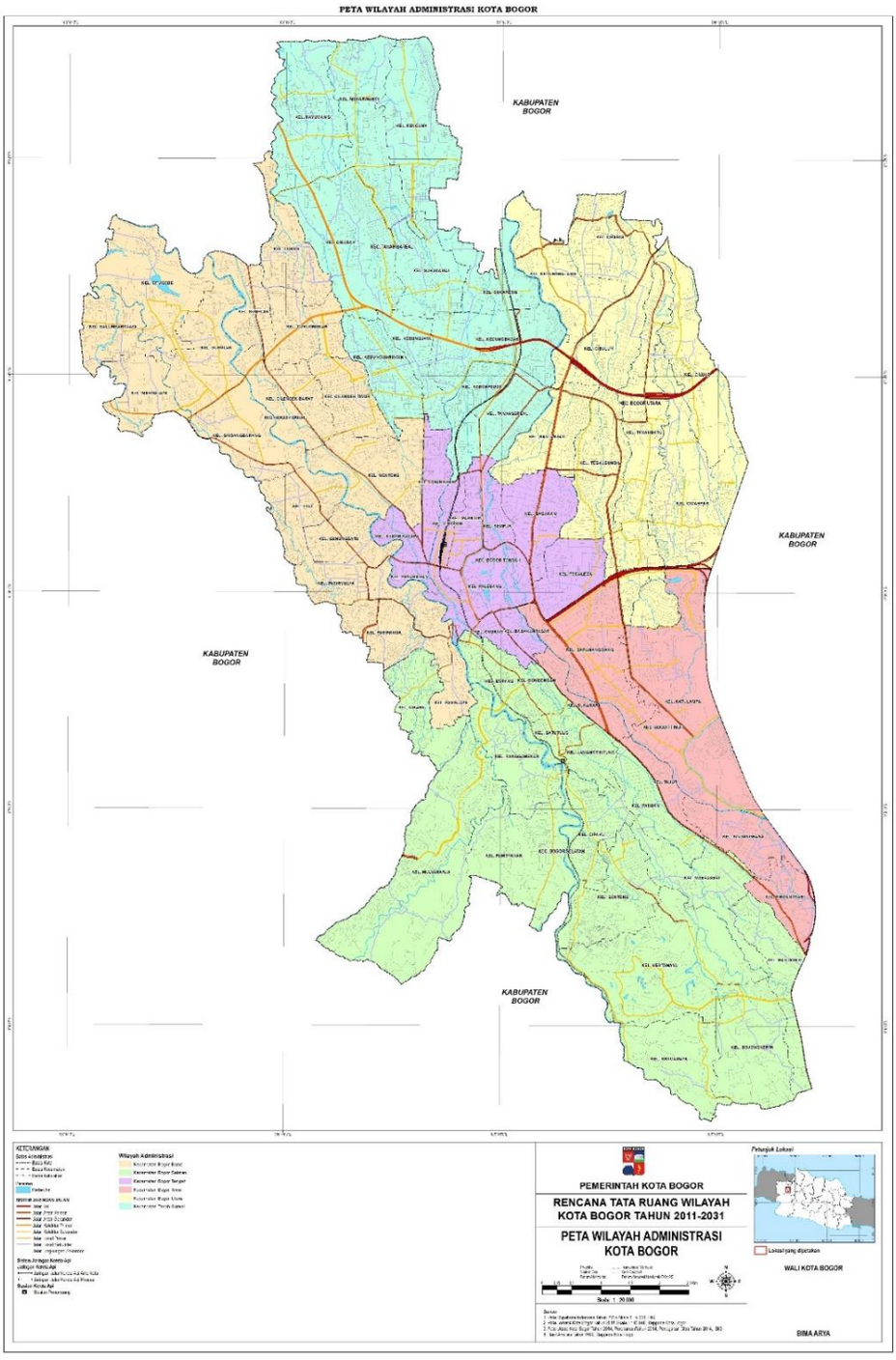

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bogor

Mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur terdapat dua kawasan perkotaan yaitu Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kota Bogor dalam hal ini masuk ke dalam kawasan perkotaan di sekitarnya.

Dalam lingkup Bogor Raya, Kota Bogor akan tetap menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat layanan transportasi dan pusat perdagangan khususnya terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Mengingat hal tersebut maka dalam perencanaan fasilitas pelayanan terutama di kawasan pinggiran penduduk kawasan pinggiran perlu diperhatikan serta akses menuju fasilitas dari kawasan pinggiran. Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki ketergantungan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.

2.1.1.2. Kondisi Geologi, Topografi, Iklim, dan Penggunaan Lahan di Kota Bogor

1. Geologi

Karakteristik Kota Bogor yang dekat dengan wilayah gunung berapa berpengaruh terhadap kondisi geologi. Berdasarkan aspek geologi, secara umum Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik. Mengacu kepada Menurut A.C. Efendi et.al (1998) Kota Bogor secara geologi tersusun umumnya oleh produk batuan vulkanik dari Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak serta endapan alluvium yang membentuk bentang alam kipas (Aluvial Fans). Bagian barat Kota Bogor didominasi oleh endapan lebih tua yang terdiri dari lahar dan lava dengan kandungan andesit basaltic (Qvpo). Batuan ini berasal dari Gunung Pangrango. Bagian timur disusun oleh batuan yang berasal dari Gunung Salak, terdiri dari lahar, breksi tufan, dan lapilli (Qvsb), aliran lava basal (qvsl), dan tuf batuapung pasiran (Qvst). Bagian utara didominasi oleh kipas alluvium yang merupakan pengendapan kembali dari batuan vulkanik, terdiri dari material endapan dengan ukuran lanau hingga kerikil (Qav) (Gambar 2.2).

Tabel 2.2. Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan

No	Jenis Batuan	Luas (ha)
1	Batuan Gunung Api Pangrango	3.338,88
2	Batuan Gunung Api Salak	1.812,90
3	Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo	49,42
4	Formasi Bojonmanik	42,09
5	Formasi Jatiluhur	39,21
6	Kipas Aluvium	5.855,92
Total		11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 - 2031

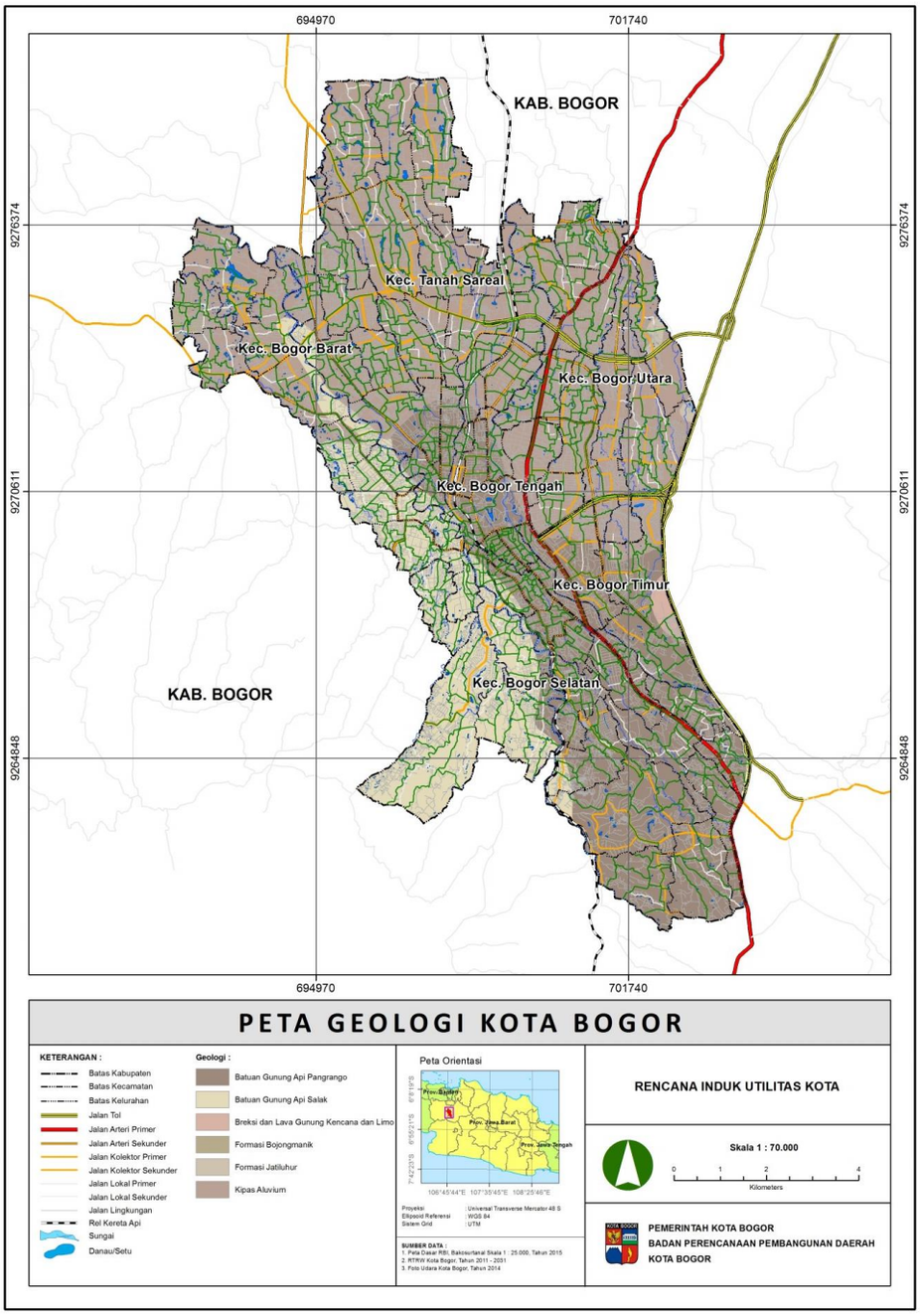

Sumber: Pemutakhiran Informasi Geospasial (Bapperida), 2023

Gambar 2.2. Peta Geologi Regional Kota Bogor

2. Topografi

Secara topografi, Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan ketinggian maksimum 330 mdpl. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0—2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2—15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15—25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25—40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Mengacu kepada kondisi topografi tersebut, Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang

tergolong sangat rawan terhadap bahaya longsor, karena mempunyai daerah dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat rawan terhadap bahaya longsor..

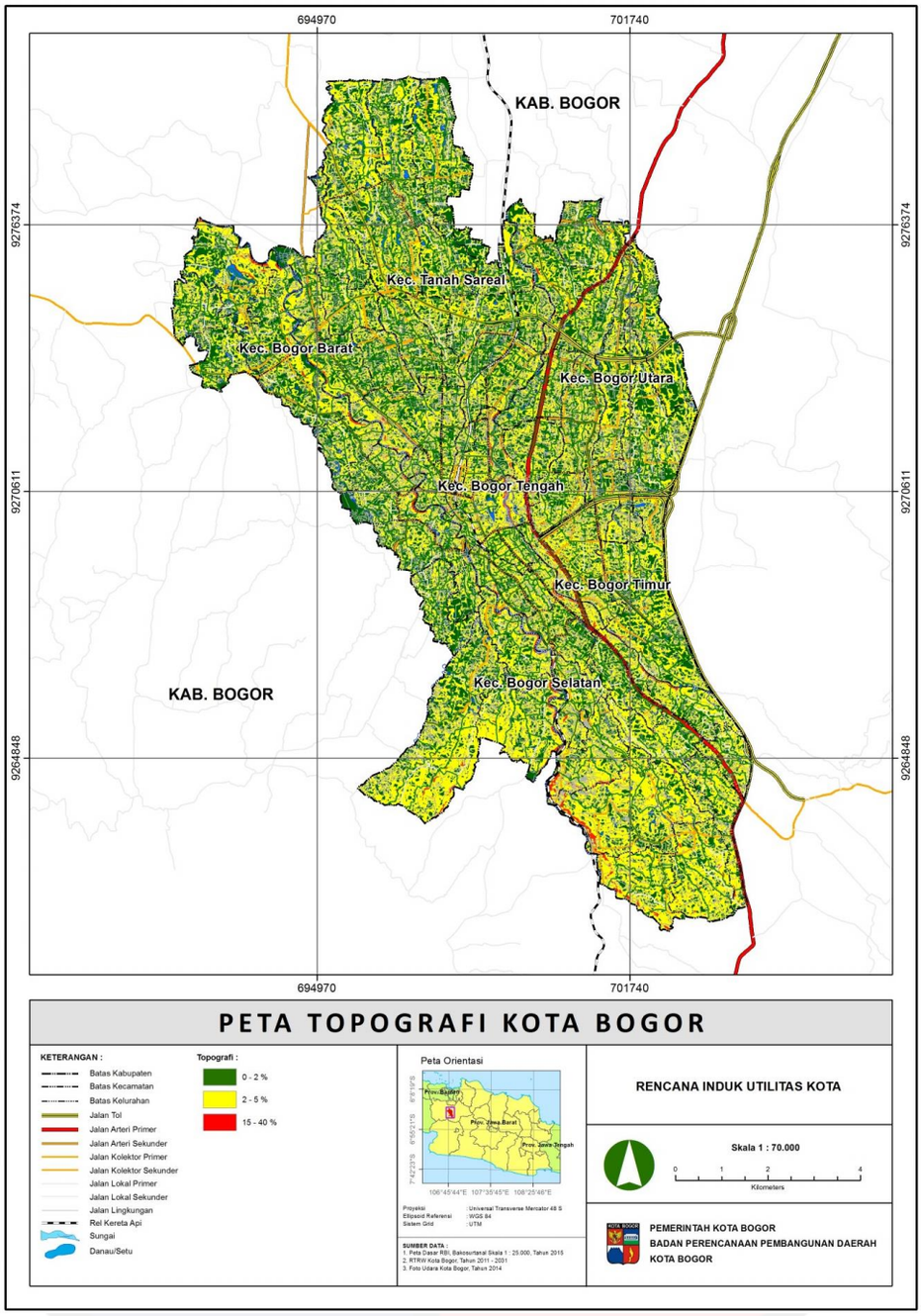

Sumber: Pemutakhiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

Gambar 2.3. Peta Topografi Kota Bogor

3. Iklim

Iklim berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Oleh karena itu informasi tentang faktor dan variasi iklim sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan dan perencanaan. Kota Bogor memiliki kondisi iklim yang bervariasi dengan rata - rata suhu udara di Kota Bogor sepanjang tahun 2023 adalah 25,5 - 27,7°C. Suhu minimum yang terjadi pada tahun 2023 adalah 19,5 - 22,20°C dan suhu maksimum sebesar 32,30 - 36,00°C. Selama empat tahun terakhir (2019 - 2023) rata - rata suhu di Kota Bogor berkisar antara 24,60 - 27,30°C. Suhu minimum biasanya terjadi di bulan Juni dan suhu tertinggi biasanya terjadi di

bulan Mei. Secara umum berdasarkan data terlihat adanya trend variabilitas suhu dalam empat tahun terakhir. Kondisi suhu merupakan salah satu isu yang penting terkait dengan perubahan iklim jangka panjang. Walaupun Kota Bogor bukan merupakan wilayah yang berada di kawasan pesisir tetapi peningkatan suhu ekstrim bisa berpengaruh terhadap aktivitas penduduk di Kota Bogor di masa mendatang.

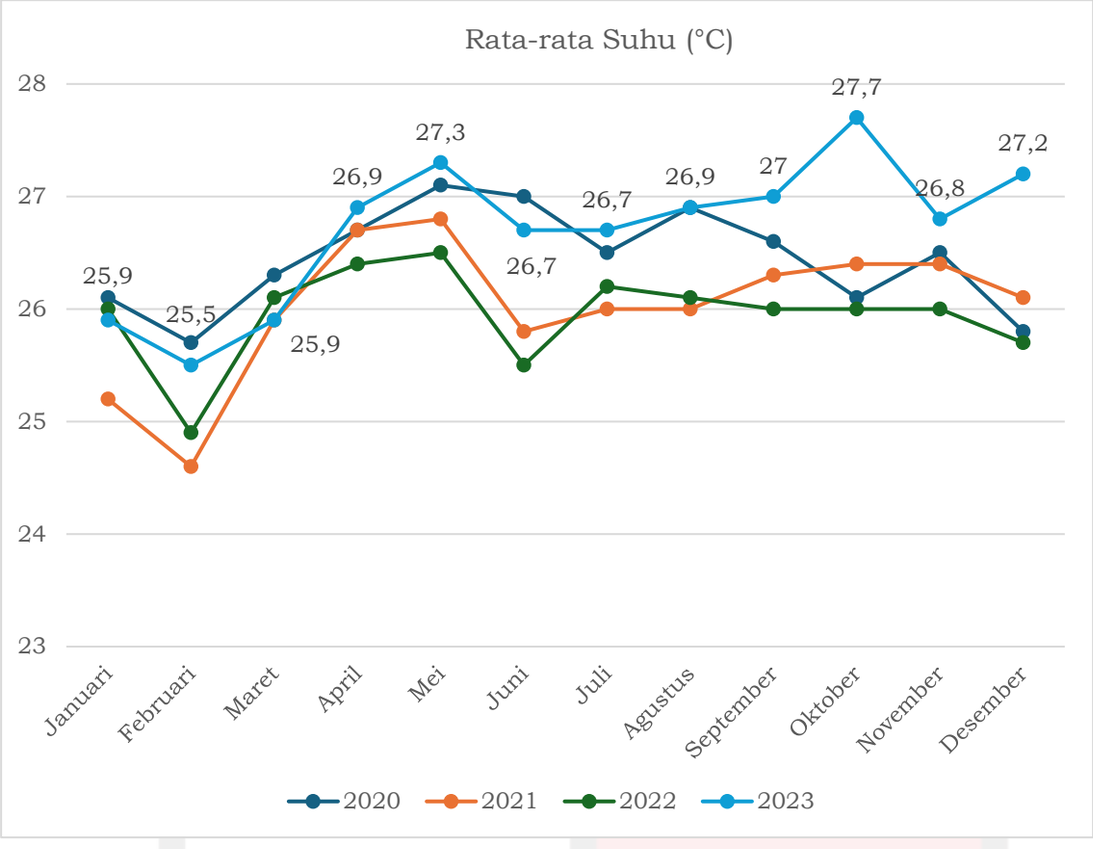

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.4. Rata - Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2020 - 2023

Kota Bogor terkenal dengan julukan kota hujan. Hal ini sesuai dengan data mengenai curah hujan dan hari hujan di Kota Bogor. Rata-Rata hari hujan di Kota Bogor adalah 18 hari hujan per bulan selama empat tahun terakhir. Curah hujan selama tahun 2019-2023 berkisar antara 30 - 567 mm. Tantangan terkait dengan iklim diantaranya adalah variabilitas iklim yang semakin meningkat di masa mendatang baik curah hujan ekstrem, kekeringan serta fenomena iklim lainnya seperti *el nino* dan *la nina.* Kondisi ini perlu diantisipasi di masa mendatang terutama berkaitan dengan ketahanan air dan kewaspadaan bencana.

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Bogor 2019-2023

Bulan	Curah Hujan di Stasiun Pengamatan Klimatologi Bogor Menurut Bulan (mm)									
	Jumlah Hari Hujan					Jumlah Curah Hujan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	19	14	18	30	21	288	208	304	107	211,1
Februari	21	18	20	23	24	277	337	487	150	258,3
Maret	21	19	20	28	26	231	293	233	113	325,8
April	20	19	17	29	17	671	271	505	317	312,8
Mei	13	15	16	25	14	312	292	510	229	294,2
Juni	10	5	17	27	20	138	30	311	464	310,7
Juli	5	7	8	29	9	53	64	116	358	134,4

Bulan	Curah Hujan di Stasiun Pengamatan Klimatologi Bogor Menurut Bulan (mm)									
	Jumlah Hari Hujan					Jumlah Curah Hujan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Agustus	6	4	16	31	12	170	42	400	385	144,7
September	7	7	19	29	9	152	88	317	354	62,2
Oktober	13	17	22	28	13	382	327	567	492	102,1
November	14	16	17	28	25	330	207	184	321	1068,0
Desember	24	16	20	28	20	553	262	279	224	563,6

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2022 dan Kota Bogor dalam Angka 2024

4. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan terbesar di Kota Bogor tahun 2023 berupa kategori lingkungan terbangun yang mencapai lebih dari setengah luas Kota Bogor, yaitu sekitar 55 persen. Sedangkan yang paling kecil berupa penggunaan untuk utilitas yaitu sekitar 0,19 persen. Untuk kategori vegetasi memiliki porsi sekitar 37% yang menjadi penyeimbang luasnya lingkungan terbangun. Penggunaan lahan tahun 2023 dengan distribusi setiap kategori sebagaimana disampaikan pada grafik dibawah ini.

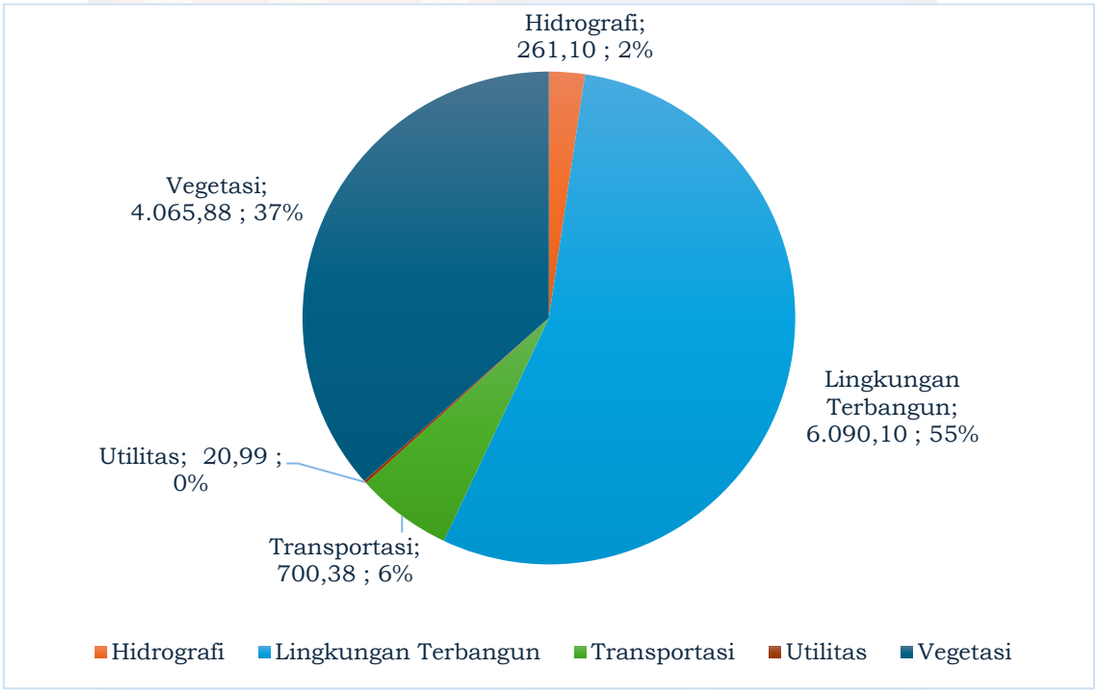

Sumber: Pemutakhiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

Gambar 2.5. Distribusi Penggunaan Lahan Tahun 2023 (%)

Penggunaan lahan Kota Bogor pada tahun 2023 pada kategori lingkungan terbangun terbesar merupakan penggunaan permukiman dan perumahan dengan luas masing-masing 3368.73 Ha (30,24%) dan 1218.09 Ha (10,94 %). Sedangkan penggunaan lahan paling kecil berupa bendungan yaitu kurang lebih seluas 0,22 Ha (0,002%). Perubahan penggunaan lahan Kota Bogor tahun 2015-2023 pada umumnya terjadi pada lahan-lahan yang belum terbangun menjadi lahan terbangun. Hal ini sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini yang menunjukkan perubahan penggunaan lahan Kota Bogor.

Berdasarkan tabel perubahan penggunaan lahan Kota Bogor tahun 2015-2023 dapat dilihat bahwa untuk unsur yang mengalami mengalami perubahan

terbesar dari yang belum terbangun menjadi terbangun yaitu permukiman seluas 180,24 hektar, perumahan seluas 162,32 hektar, Niaga seluas 65,05 hektar, dan tanaman bangunan seluas 60,20 hektar. Implikasi dari penambahan luas penggunaan lahan tersebut, adalah terjadinya pengurangan luas penggunaan lahan yang lain. Lahan berupa sawah merupakan penggunaan lahan yang mengalami pengurangan luas paling besar selama kurun waktu tersebut, yaitu sekitar 157,61 Ha, semak belukar berkurang 140,63 Ha dan ladang berkurang sekitar 65,01 Ha. Berikut adalah tabel perubahan penggunaan lahan di Kota Bogor tahun 2015-2023.

Tabel 2.4. Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bogor Tahun 2015-2023

Kategori	Sub kategori	Unsur	Tahun 2015		Tahun 2023		Perubahan	Keterangan
			Luas (ha)	%	Luas (ha)	%		
Hidrografi	Tubuh Air Daratan	Bendungan	0,22	0	0,22	0	0	Tetap
		Danau	7,31	0,07	7,31	0,07	0	Tetap
		Kolam	59,07	0,53	60,78	0,55	1,72	Bertambah
		Sungai	190,49	1,71	190,58	1,71	0,09	Bertambah
		Waduk	1,65	0,01	2,21	0,02	0,56	Bertambah
Lingkungan Terbangun	Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	1,47	0,01	1,59	0,01	0,12	Bertambah
		Rumah Sakit	29,18	0,26	32,43	0,29	3,25	Bertambah
	Kawasan Industri	Industri	163,67	1,47	161,2	1,45	-2,47	Berkurang
	Kawasan Perdagangan	Niaga	513,67	4,61	578,72	5,2	65,05	Bertambah
	Pariwisata dan Budaya	Arena Olahraga	57,79	0,52	60,96	0,55	3,17	Bertambah
		Daya Tarik Pariwisata	14,29	0,13	24,56	0,22	10,27	Bertambah
	Pemakaman	Makam	193,11	1,73	195,08	1,75	1,98	Bertambah
	Pemerintahan	Keamanan	100,92	0,91	100,92	0,91	0	Tetap
		Pemerintahan	126,3	1,13	122,5	1,1	-3,8	Berkurang
	Pendidikan	Pendidikan	180,36	1,62	193,39	1,74	13,03	Bertambah
	Peribadatan	Sarana Ibadah	28,72	0,26	31,92	0,29	3,2	Bertambah
	Permukiman	Permukiman	3.188,49	28,63	3.368,73	30,24	180,24	Bertambah
		Perumahan	1.055,78	9,48	1.218,09	10,94	162,32	Bertambah
Transportasi	Transportasi Darat	Jalan	610,24	5,48	669,64	6,01	59,4	Bertambah
		Terminal Bus	6,12	0,05	5,87	0,05	-0,26	Berkurang
	Transportasi Perkeretaapian	Daerah KA	12,98	0,12	19,01	0,17	6,03	Bertambah
		Stasiun KA	5,67	0,05	5,86	0,05	0,18	Bertambah
Utilitas	Instalasi dan Jaringan Air Bersih	Kantor Air Minum	8,99	0,08	8,99	0,08	0	Tetap
	Instalasi dan Jaringan Listrik	Kantor PLN	9,84	0,09	9,89	0,09	0,05	Bertambah
	Instalasi dan Jaringan Pembuangan Limbah	Air Limbah	0,99	0,01	0,99	0,01	0	Tetap
		Persampahan	0,59	0,01	0,34	0	-0,25	Berkurang
	Instalasi dan Jaringan Pos Penyiaran atau Komunikasi	Kantor Telepon	1,49	0,01	0,78	0,01	-0,71	Berkurang
Vegetasi	Vegetasi Alami	Semak Belukar	556,53	5	415,91	3,73	-140,63	Berkurang
	Vegetasi Dibudidayakan	Ladang	1.173,87	10,54	1.108,86	9,96	-65,01	Berkurang
		Sawah	348,82	3,13	191,22	1,72	-157,61	Berkurang
		Tanaman Bangunan	309,11	2,78	369,31	3,32	60,2	Bertambah
		Tanaman Campur	2.180,82	19,58	1.980,58	17,78	206,39	Bertambah
JUMLAH			11.138,55	100	11.138,56	100		

Sumber: Pemutakhiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

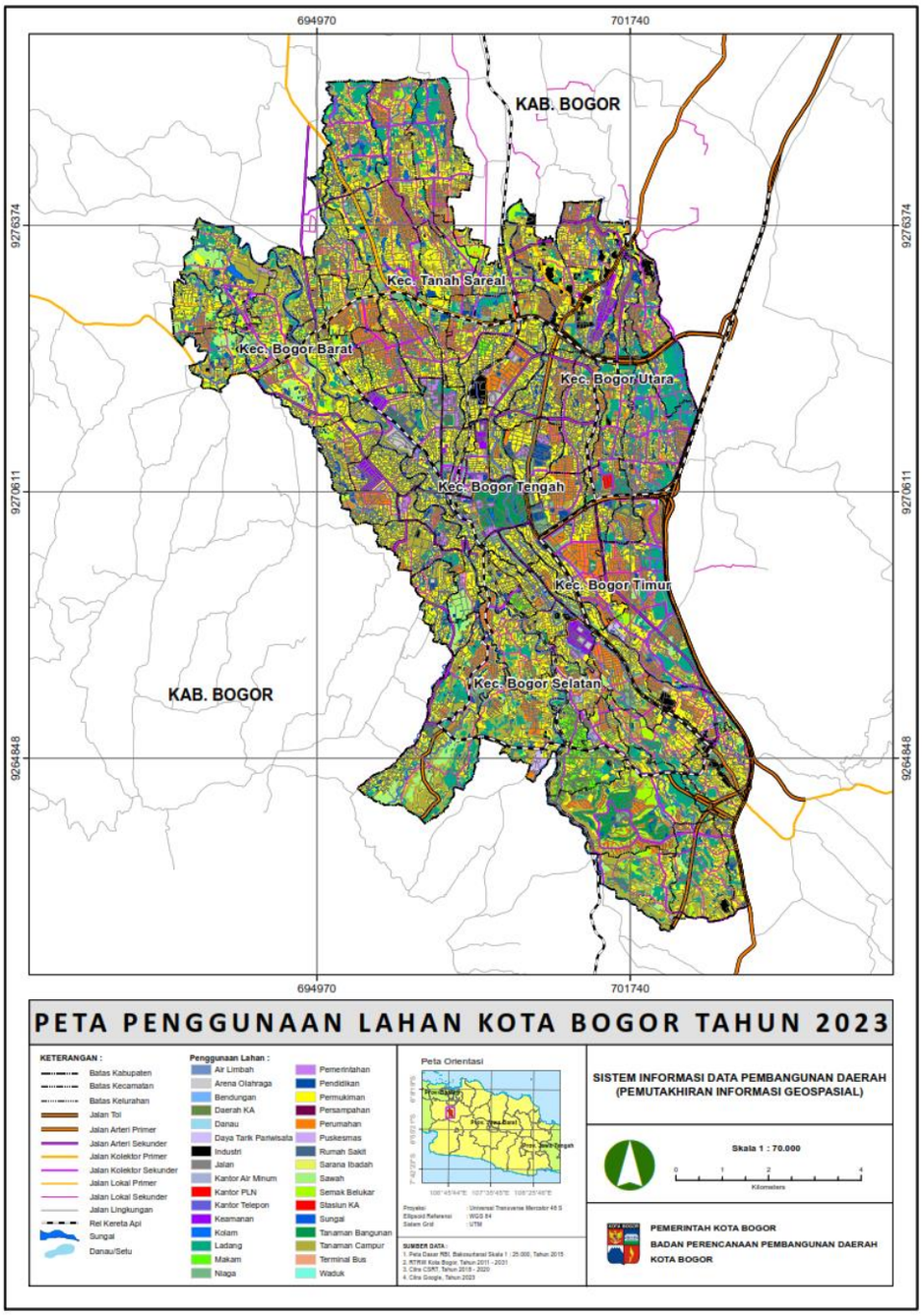

Sumber: Pemutakhiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2023

2.1.1.3. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH di Kota Bogor terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

IKA memberikan nilai tunggal yang mengekspresikan keseluruhan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Indeks ini digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang komplek

dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambil kebijakan dalam analisis lingkungan. Berdasarkan **Tabel 2.5**, Indeks Kualitas Air di Kota Bogor pada tahun rentang 2019-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 51,39 pada tahun 2022 menjadi 46,67 pada tahun 2023. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air harus bersinergi dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara hasil *monitoring* IKU Kota Bogor pada tahun 2019-2023 termasuk ke dalam kategori baik ($70 \leq x < 90$). IKU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Pada tahun 2023 indeks kualitas udara Kota Bogor sebesar 95,92 menurun dari tahun 2022 yang mencapai 98,36. Status mutu udara dilakukan dengan menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO2 (Sulfur Dioksida) dan NO2 (Nitrogen Dioksida) tahunan sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (%)	51,67	56,33	64,72	51,39	46,67
Indeks Kualitas Udara (%)	81,76	80,09	99,35	98,36	95,92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023

2.1.1.4. Daya Dukung Pangan dan Air

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pangan, air dan energi dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH).

1. Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan

Kota Bogor merupakan daerah perkotaan dengan luas kawasan yang terbatas. Selain itu Kota Bogor bukan menjadi daerah produsen pertanian, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Meskipun demikian, kondisi daya dukung pangan dibutuhkan sebagai *baseline* awal dalam menentukan kebijakan terkait dengan ketahanan pangan. Untuk melihat tingkat kebutuhan pangan maka dihitung kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk yang dibandingkan dengan ketersediaan pangan. Secara umum selisih ketersediaan pangan di Kota Bogor adalah defisit untuk seluruh wilayah kecamatan. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan yaitu mencapai 8.000 Juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 37.769 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sereal mencapai 80.000 juta Kkal.

Tabel 2.6. Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Juta Kkal)	Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)
Bogor Barat	233.637	91.673	8.477	-83.196
Bogor Selatan	204.030	80.056	8.073	-71.984
Bogor Tengah	96.258	37.769	-	-37.769
Bogor Timur	104.327	40.935	3.318	-37.617
Bogor Utara	186.724	73.266	775	-72.491
Tanah Sareal	218.094	85.575	3.052	-82.522

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 - 2045

Secara umum jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bogor termasuk kategori rendah karena Bogor bukan merupakan sentra produksi dengan keterbatasan lahan. Meskipun demikian, wilayah dengan luas jasa ekosistem penyediaan pangan yang paling besar ada di Bogor Barat dan di Bogor Selatan. Penyediaan pangan di Kota Bogor secara mandiri tidak dapat dilakukan karena neraca pangan di Kota Bogor defisit dimana ketersediaan lebih rendah daripada kebutuhan. Oleh karena itu kepastian penyediaan pangan dari daerah lain yang masuk ke Kota Bogor perlu dipastikan keberlanjutannya.

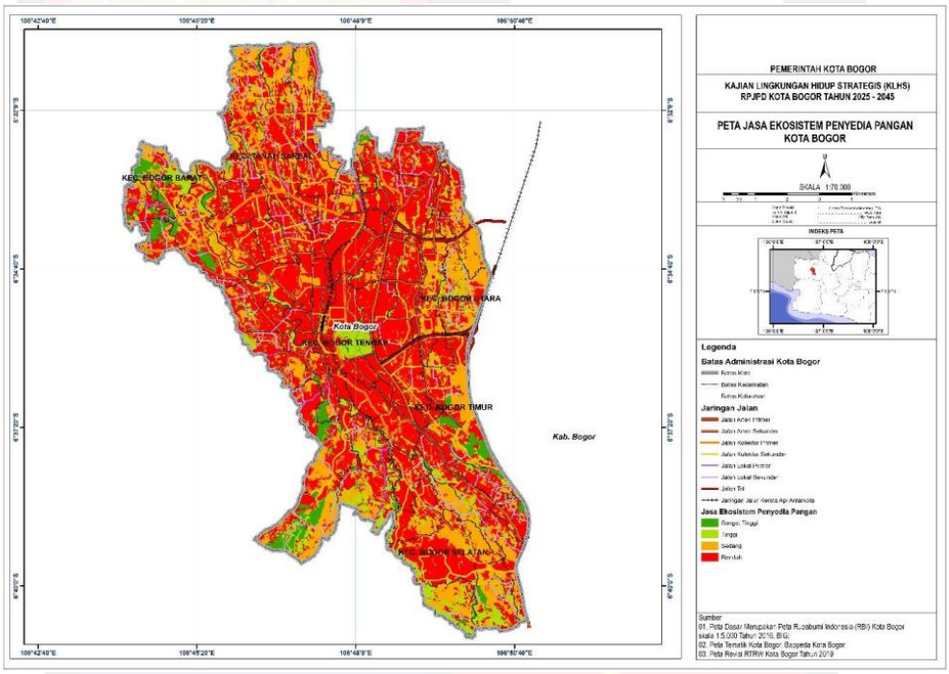

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.7. Peta Jasa Ekosistem Pangan di Kota Bogor

Tabel 2.7. Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Daya Dukung Pangan
Bogor Barat	233.637	21.605	-212.032	Terlampaui
Bogor Selatan	204.030	20.574	-183.456	Terlampaui
Bogor Tengah	96.258	-	-96.258	Terlampaui
Bogor Timur	104.327	8.456	-95.871	Terlampaui
Bogor Utara	186.724	1.975	-184.749	Terlampaui
Tanah Sareal	218.094	7.779	-210.315	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2025 – 2045, 2023

Keberlanjutan pasokan pangan dari luar sangat penting karena status daya dukung pangan Kota Bogor yang rendah. Berdasarkan jumlah penduduk dan ambang batas pangan di setiap kecamatan di Kota Bogor maka diperoleh bahwa seluruh kecamatan telah memiliki status daya dukung pangan terlampaui dengan nilai terlampaui terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian untuk memunculkan isu strategis yang akan dijadikan bahan penentu kebijakan. Beberapa hal tersebut diantaranya melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan Kota Bogor.

Selain dari konteks daya dukung untuk penyediaan pangan, aspek pangan juga dapat dilihat dari indikator ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan **Gambar 2.8** Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2023, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 83,78 atau meningkat sebesar 7,40 poin dari tahun 2022 yang mencapai 76,38. Indeks tahun 2023 ini meningkat pesat jauh lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat yang mencapai 82,19.

Terdapat sembilan (9) indikator sebagai dasar penentuan IKP yaitu (1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, (2) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, (3) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, (4) persentase rumah tangga tanpa akses listrik, (5) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, (6) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, (7) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, (8) persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan (9) angka harapan hidup pada saat lahir..

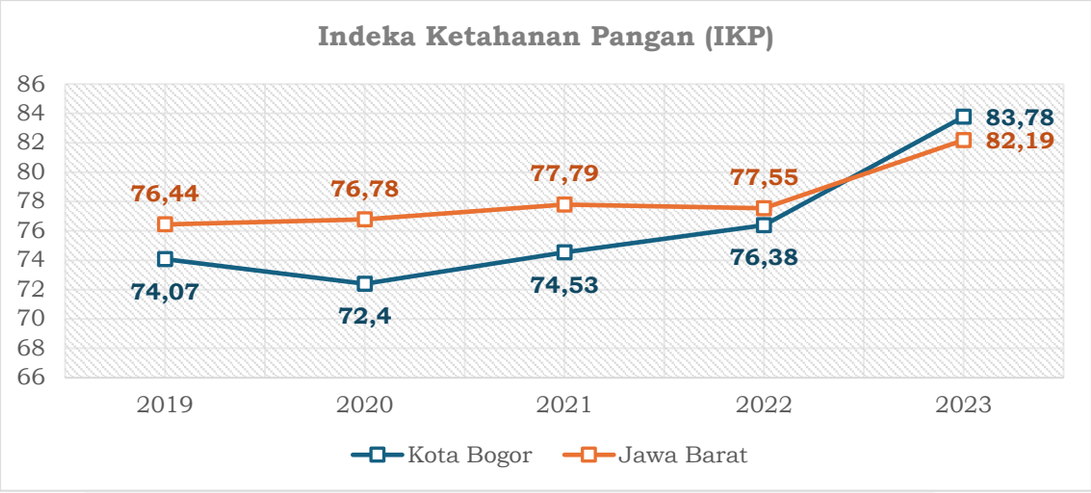

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 2.8. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 - 2023

2. Daya Dukung Penyediaan Air

Daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik. Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan air, diketahui bahwa Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan yang mempunyai kebutuhan air paling tinggi mencapai 29 juta m^3 per tahun. Hal ini karena secara populasi penduduk Kec. Bogor Barat adalah yang paling besar diantara kecamatan lain. Selain itu kebutuhan air yang besar diantaranya untuk kebutuhan non domestik dan adanya kehilangan air yang tinggi.

Ketersediaan air di Kota Bogor diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona DAS dan berbasis jasa ekosistem di Kota Bogor. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Bogor dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Bogor Selatan yaitu 42.120.077 m^3. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 11.690.708 m^3/tahun.

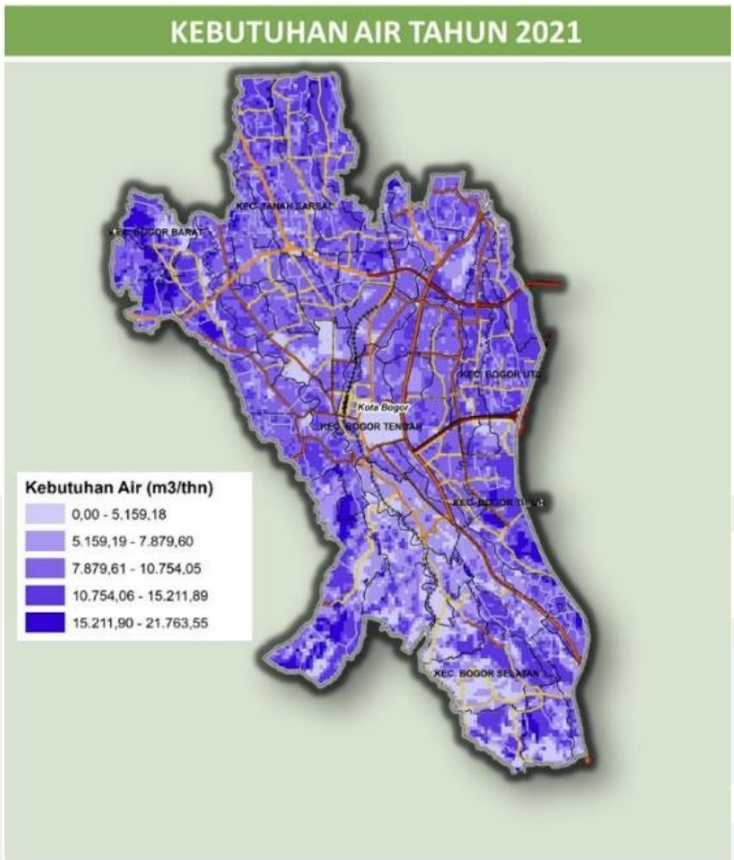

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.9. Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2021

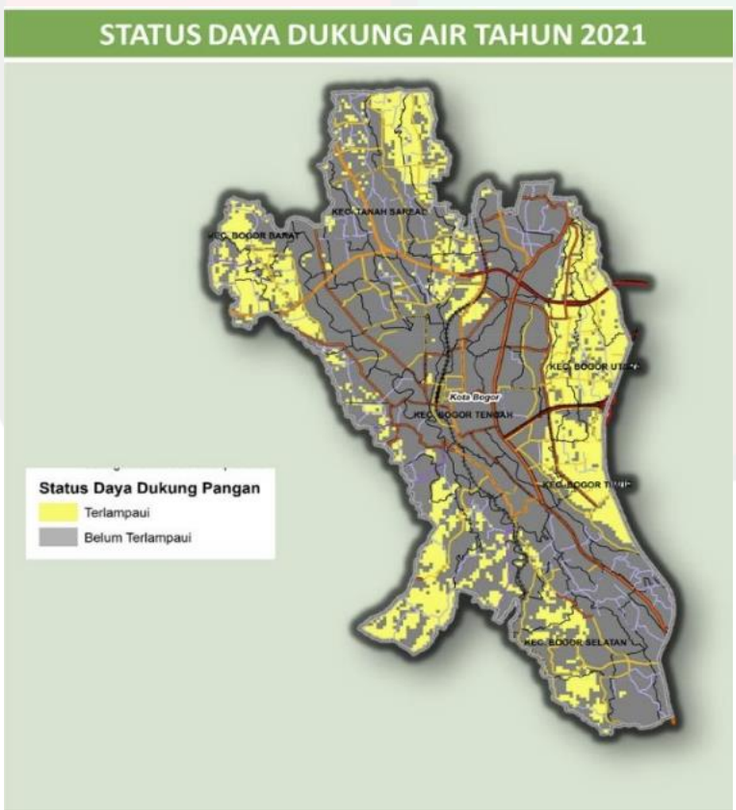

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.10. Status Daya Dukung Air Kota Bogor Tahun 2021

Salah satu upaya untuk memastikan kesediaan air adalah melalui upaya konservasi ekosistem penyediaan air bersih. Secara umum jasa ekosistem

penyediaan air di Kota Bogor sangat bervariasi dengan sebaran mayoritas berada pada kondisi rendah. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Meskipun terdapat potensi curah hujan yang sangat tinggi tetapi perlu dikelola dengan sistem penyediaan air agar tidak kelebihan saat musim penghujan dan kekurangan di musim kemarau. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan.

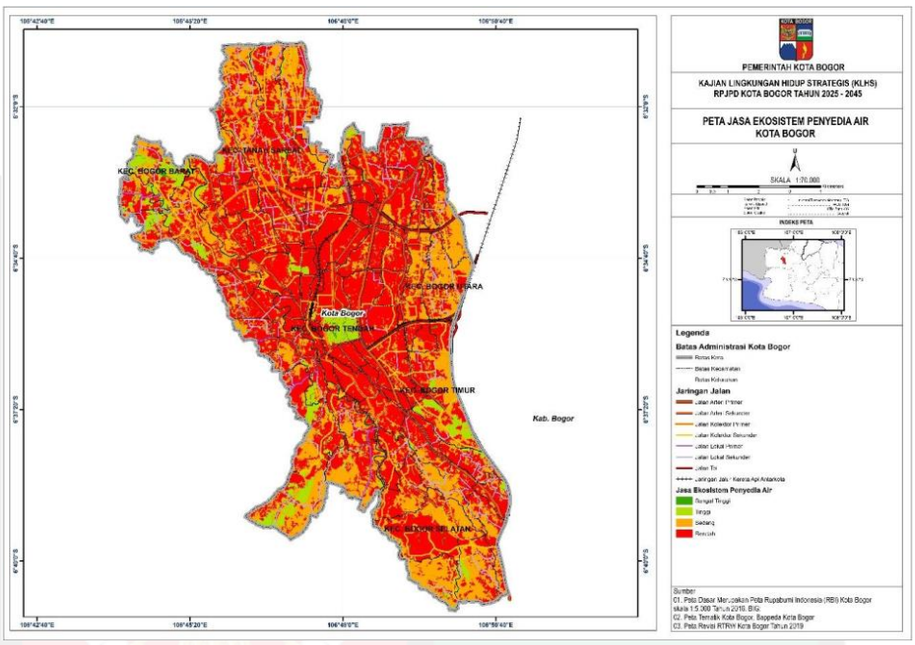

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.11. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kota Bogor

2.1.1.5. Potensi Sumber Daya Alam

1. Kondisi Pertanian

Gambar 2.12 menunjukkan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha. Kondisi sektor pertanian di Kota Bogor terlihat memiliki kontribusi relatif kecil yakni kurang dari satu persen dengan kecenderungan menurun. Sektor yang dominan kontribusinya relatif besar adalah perdagangan besar dan industri pengolahan, masing-masing sebesar 19,23 persen dan 18,7 persen.

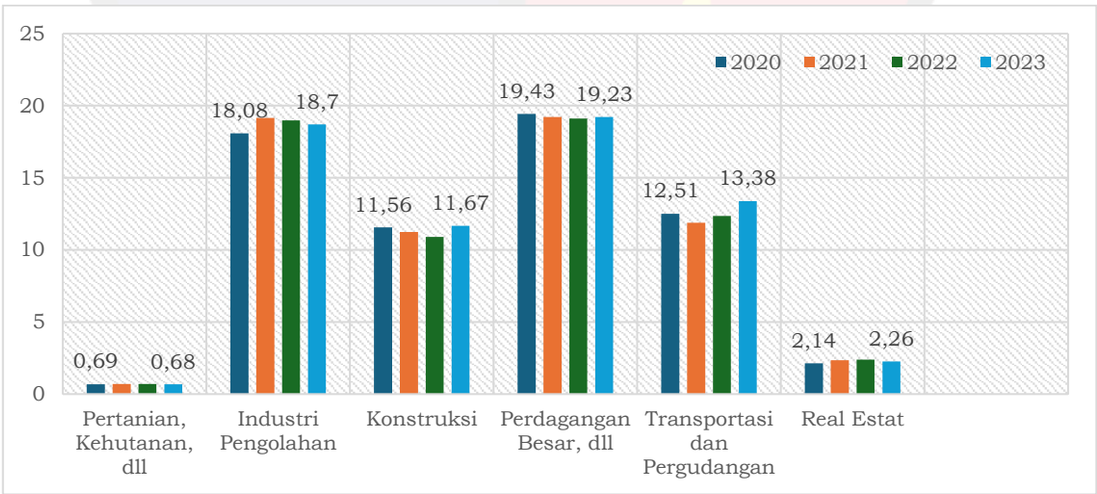

Sumber: BPS Kota Bogor, 2024 (diolah)

Gambar 2.12. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain terhadap PDRB di Kota Bogor Tahun 2020 - 2023

Rendahnya persentase kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman, fasilitas umum transportasi, infrastruktur publik, dll) di Kota Bogor yang semakin tinggi. Hal tersebut berimplikasi kepada produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahannya. Lahan pertanian (sawah) di Kota Bogor hingga saat ini tercatat hanya 127,42 hektar.

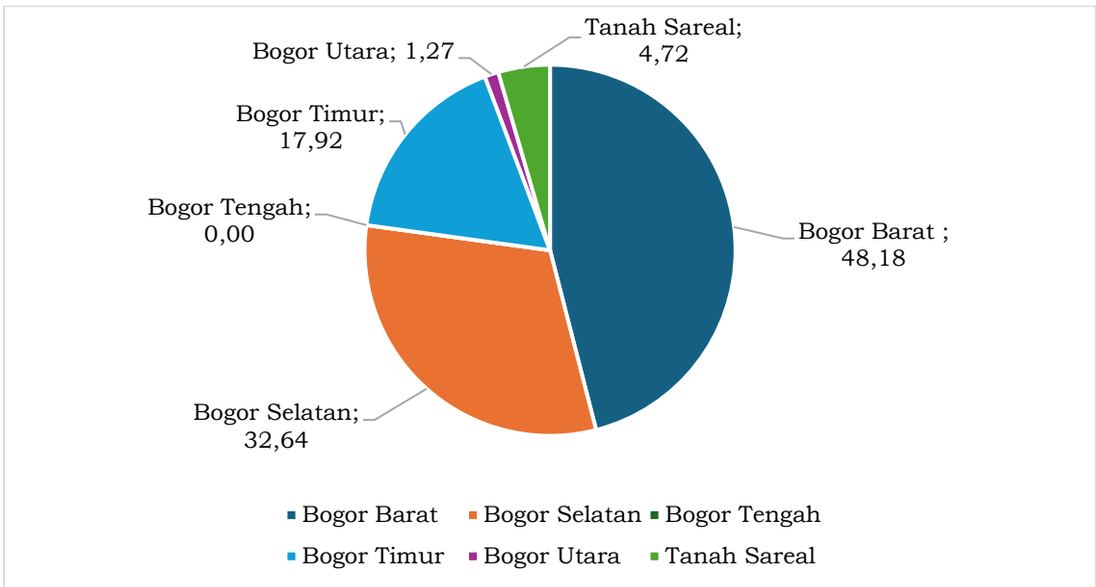

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.13. Sebaran Lahan Sawah di Kota Bogor Per Kecamatan

Selain itu, mengacu Gambar 2.13 di atas bahwa persentase sebaran lahan sawah di Kota Bogor hanya menyisakan di Kecamatan Bogor Barat seluas 77,99 hektar, Kecamatan Bogor Selatan seluas 37,8 hektar, Kecamatan Bogor Timur seluas 11,63 hektar. Sedangkan, Kecamatan Bogor Tengah sudah tidak memiliki area persawahan karena cenderung lahan telah digunakan untuk kegiatan aktivitas perekonomian (ruko, toko, bangunan lainnya).

2. Kondisi Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sektor perikanan menyediakan sumber pangan protein yang penting untuk masyarakat. Meskipun persentase sektor ini terhadap PDRB Kota Bogor tidak terlalu tinggi, namun dengan meningkatnya kegiatan penangkapan ikan, budidaya, dan pengolahan produk perikanan, sektor ini dapat juga memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan Masyarakat Kota Bogor.

Kegiatan produksi perikanan merupakan bagian dari industri yang di dalamnya termasuk kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan hasil perikanan lain. Hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Akan tetapi, wilayah Kota Bogor tidak memiliki hasil produksi perikanan laut dilihat dari kondisi geografisnya yang tidak memiliki wilayah lautan

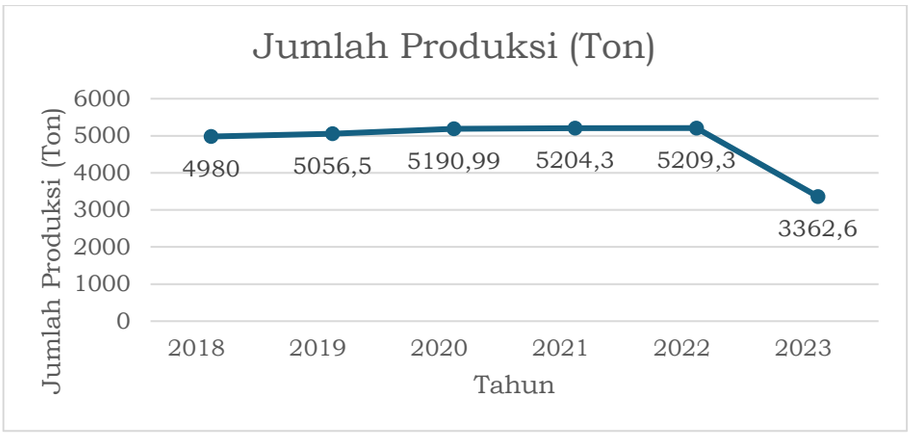

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.14. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Bogor Tahun 2013 - 2022

Berdasarkan **Gambar 2.14**, produksi perikanan budidaya di Kota Bogor selama 6 tahun terakhir memiliki tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan terjadi pada tahun 2023 dimana produksi perikanan budidaya di tahun tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah updating data secara mandiri diperoleh hasil penurunan yang signifikan. Perubahan kondisi ini terjadi karena beberapa faktor seperti alih fungsi lahan perikanan, alih profesi pelaku perikanan dan perubahan iklim yang cukup ekstrim pada tahun tersebut.

2.1.1.6. Risiko Bencana

Secara umum Kota Bogor tidak lepas dari berbagai potensi bencana yang ada, baik bencana yang berkaitan dengan aktivitas manusia (antropogenik) seperti banjir dan kebakaran tetapi juga dengan berbagai bencana alam lainnya seperti tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu dalam merencanakan pembangunan 20 tahun ke depan diperlukan adanya pembangunan yang berwawasan kebencanaan sehingga infrastruktur dan masyarakat menjadi tangguh terhadap potensi bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kajian terhadap risiko bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Berdasarkan hasil kajian, Kota Bogor secara umum selama periode 2015 - 2022 berada pada kelas risiko sedang. Pada level Provinsi Jawa Barat, kelas risiko yang ada di provinsi hanya ada risiko tinggi dan sedang. Nilai risiko bencana di Kota Bogor cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun yang artinya ini

menunjukkan ada upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk memastikan Kota Bogor aman siap terhadap bencana yang ada.

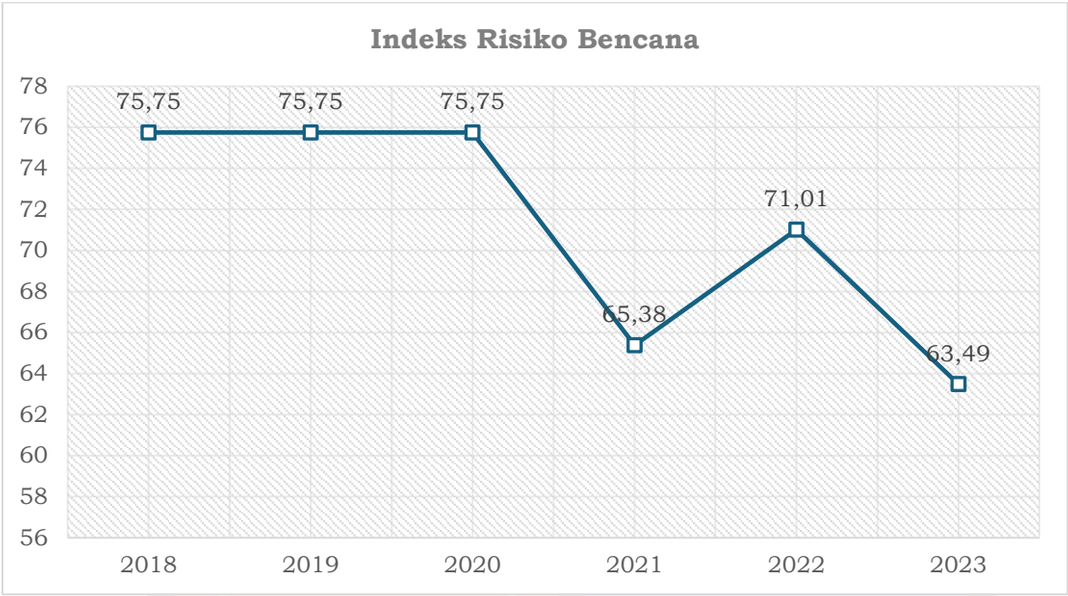

Sumber: Publikasi Indeks Risiko Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Gambar 2.15. Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2018 - 2023

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kota Bogor yang memiliki cakupan area terbangun yang cukup luas serta dilewati oleh aliran sungai mempunyai kerentanan terhadap bencana banjir. Wilayah dengan luas kerentanan banjir yang tinggi sebagian besar terdapat di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Barat. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah yang paling luas terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Tanah Sareal. Potensi variabilitas cuaca di masa mendatang dan kurangnya ruang terbuka hijau di masing-masing lokasi berpotensi memperparah kerentanan tersebut.

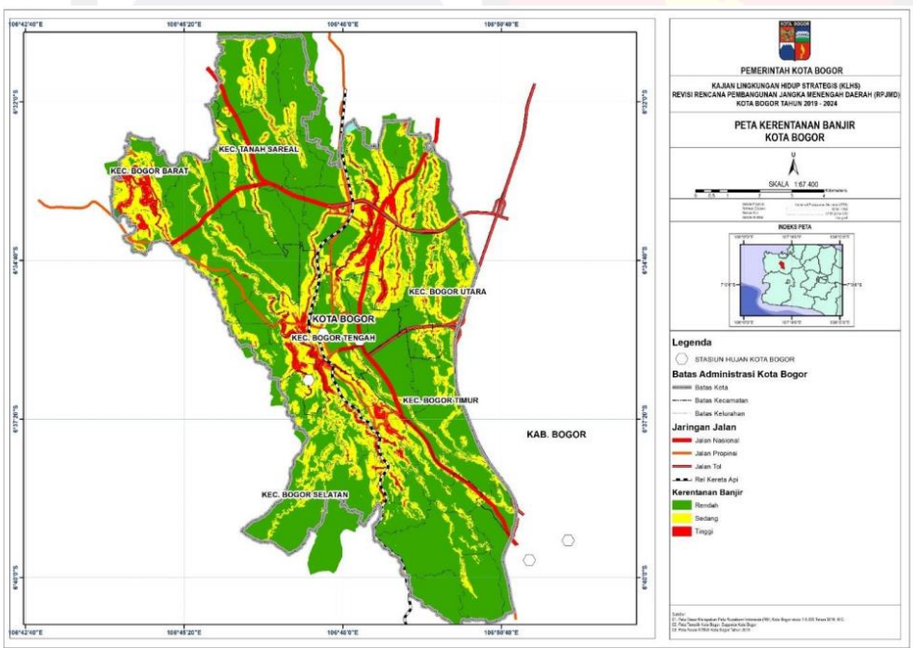

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.16. Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor

Berdasarkan data kerentanan terhadap banjir dari RTRW Kota Bogor, terdapat 596,82 Ha wilayah di Kota Bogor yang masuk dalam klasifikasi tinggi. Berikut merupakan data dan peta terkait kerentanan terhadap banjir di Kota Bogor. Sementara wilayah dengan kerentanan banjir sedang mencapai 3.373,43 hektar. Secara umum lebih banyak wilayah yang potensi banjir rendah di Kota Bogor.

Tabel 2.8. Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Bogor Barat	1.441,50	712,44	177,61	2.331,55
2	Bogor Selatan	2.127,53	817	105,52	3.050,05
3	Bogor Tengah	435,2	326,38	75,1	836,67
4	Bogor Timur	824,29	221,17	2,53	1.048,00
5	Bogor Utara	827,18	820,03	164,94	1.812,14
6	Tanah Sareal	1.512,47	476,41	71,14	2.060,01
Total		7.168,16	3.373,43	596,82	11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

2. Kawasan Rawan Bencana Longsor / Gerakan Tanah

Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan longsor seluas 806,79 ha, Wilayah dengan luas rawan longsor yang paling besar ada di wilayah Bogor Selatan disusul wilayah Bogor Timur. Kedua wilayah ini cenderung berbukit. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah terhadap gerakan tanah adalah wilayah Bogor Utara dan Tanah Sareal Potensi Gerakan tanah perlu diwaspadai terutama pada saat musim penghujan. Selain itu upaya mitigasi secara teknis maupun non teknis di masing-masing wilayah rawan gerakan tanah diperlukan.

Tabel 2.9. Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Longsor (ha)
1	Bogor Barat	137,5
2	Bogor Selatan	287,42
3	Bogor Tengah	59,77
4	Bogor Timur	284,2
5	Bogor Utara	16,87
6	Tanah Sareal	21,03
Total		806,79

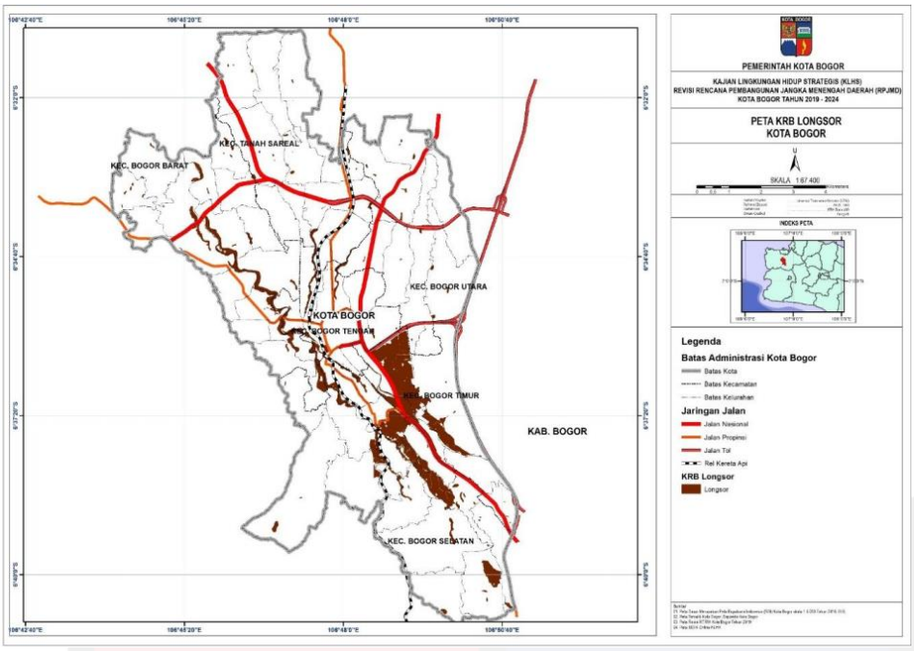

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.17. Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor

3. Kawasan Rawan Kebakaran

Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan kebakaran seluas 252,89 ha. Wilayah dengan luas rawan kebakaran yang paling besar ada di wilayah Bogor Barat disusul Tanah Sareal. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah terhadap Kebakaran adalah wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur. Potensi terjadinya kebakaran terutama berada pada wilayah yang mempunyai kepadatan bangunan yang cukup tinggi.

Tabel 2.10. Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Kebakaran (ha)
1	Bogor Barat	64,99
2	Bogor Selatan	21,82
3	Bogor Tengah	59,9
4	Bogor Timur	18,66
5	Bogor Utara	19,26
6	Tanah Sareal	68,26
Total		**252,89**

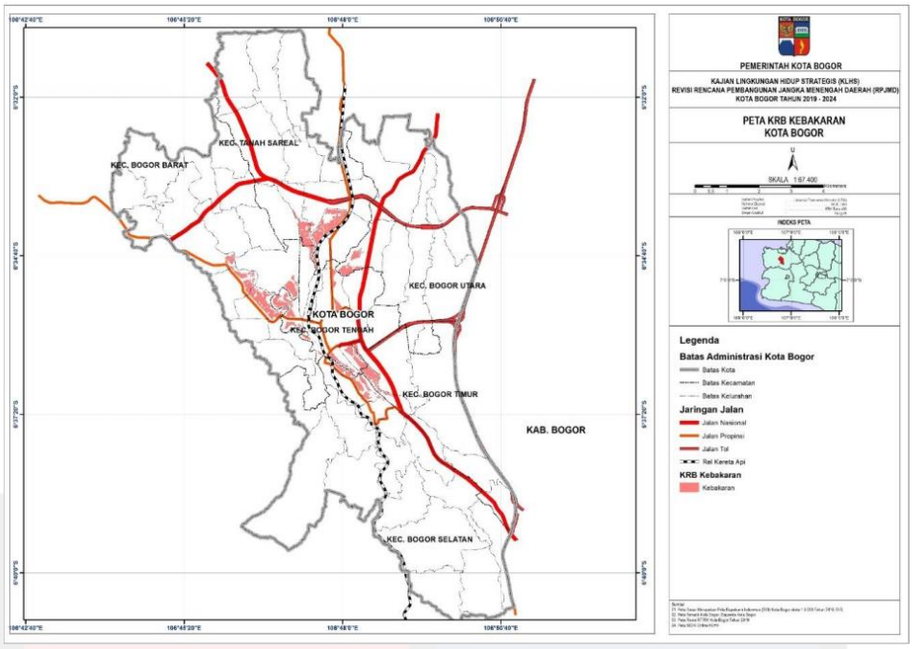

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.18. Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor

4. Kawasan Rawan Puting Beliung

Wilayah dengan kerentanan terhadap cuaca ekstrem (puting beliung) tersebar di hampir seluruh wilayah di Kota Bogor. Kerentanan yang paling rendah berada di Kecamatan Bogor Tengah. Antisipasi terhadap cuaca ekstrem perlu dilakukan dengan melakukan *update* terhadap informasi cuaca dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 2.11. Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor

No	Kecamatan	Resiko Puting Beliung (ha)		
		Rendah	Sedang	Total
1	Bogor Barat	10,38	593,19	603,57
2	Bogor Selatan	33,85	953,42	987,27
4	Bogor Timur	11,99	250,74	262,73
5	Bogor Utara	8,45	443,64	452,09
6	Tanah Sareal	13,47	532,5	545,97
Total		180,79	2.822,47	3.003,26

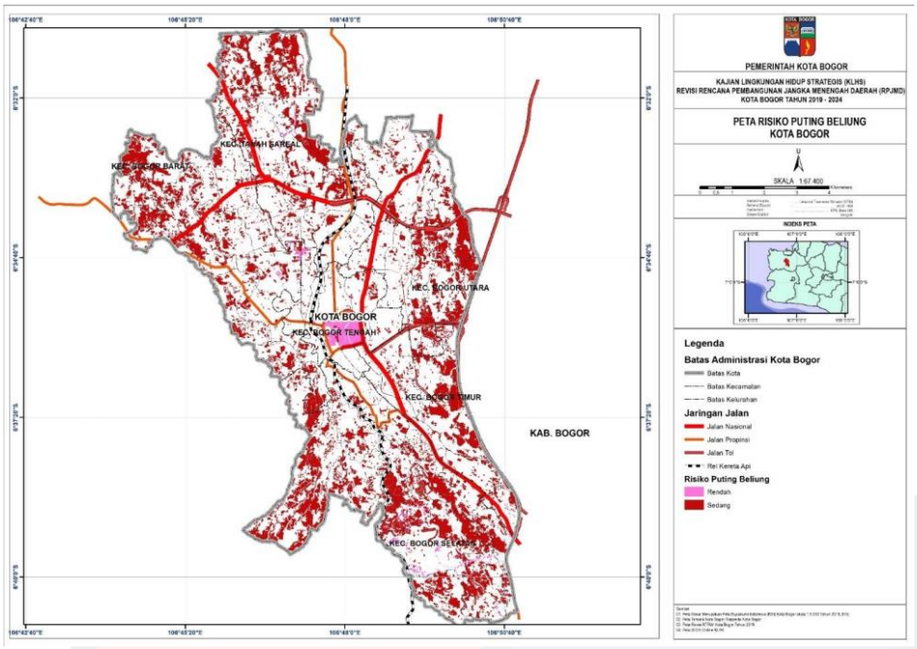

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor, 2023

Gambar 2.19. Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor

5. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api

Wilayah rawan bahaya gunung api paling banyak berada di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat yang dekat dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kelurahan dengan wilayah paling luas untuk potensi bahaya gunung api adalah Kelurahan Situ Gede.

Tabel 2.12. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor

No	Kelurahan	Luas (ha)
1	Situgede	50,29
2	Pasir Jaya	49,39
3	Balumbangjaya	46,49
4	Semplak	38,02
5	Ranggamekar	34,07
6	Bubulak	31,08
7	Cipaku	29,18
8	Menteng	25,95
9	Pamoyanan	25,65
10	Margajaya	25,17
11	Empang	24,92
12	Sindangbarang	24,48
13	Gunungbatu	23,07
14	Panaragan	20,8
15	Cilendek Barat	19,93
16	Batutulis	16,83
17	Kertamaya	16,69
18	Kebonkalapa	16,16
19	Genteng	14,63
20	Loji	14,47
21	Rancamaya	13,79
22	Paledang	9,24
23	Lawanggintung	2,83
Total		573,13

6. Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena yang nyata dan akan semakin berdampak ke depan. Oleh karena itu Kota Bogor juga perlu terus melakukan adaptasi baik secara struktural maupun non struktural untuk memastikan bahwa ketahanan iklim bisa terus dipertahankan. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan yang dirilis oleh KLHK pada tahun 2018, diketahui bahwa nilai indeks kapasitas adaptasi (IKA) terhadap perubahan iklim di Kota Bogor adalah 0,6960 dari nilai tertinggi 1. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bogor dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik berupa kekeringan dan banjir berada pada level/ tingkatan sedang. Sedangkan untuk nilai indeks kerentanan dan sensitivitas (IKS) di Kota Bogor terhadap perubahan iklim adalah 0,4980 dari nilai tertinggi 1, artinya tingkat kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap adanya perubahan iklim jika terjadi kekeringan dan banjir berada pada level sedang.

Kerentanan (*Vulnerability*) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati *batas toleransi dari sistem* maka sistem menjadi rentan karena perubahan iklim. Kerentanan dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi, yang selanjutnya dinyatakan dengan indeks sensitivitas dan keterpaparan. Kota Bogor memiliki empat klasifikasi tingkat kerentanan yaitu kerentanan sangat rendah, sedang, cukup tinggi, dan kerentanan tinggi. Jumlah kelurahan yang berada pada kerentanan sangat rendah berjumlah 19 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan sedang berjumlah 38 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan cukup tinggi berjumlah 10 kelurahan, dan untuk yang berada pada kerentanan tinggi berjumlah 1 kelurahan yaitu Kelurahan Bojongkerta..

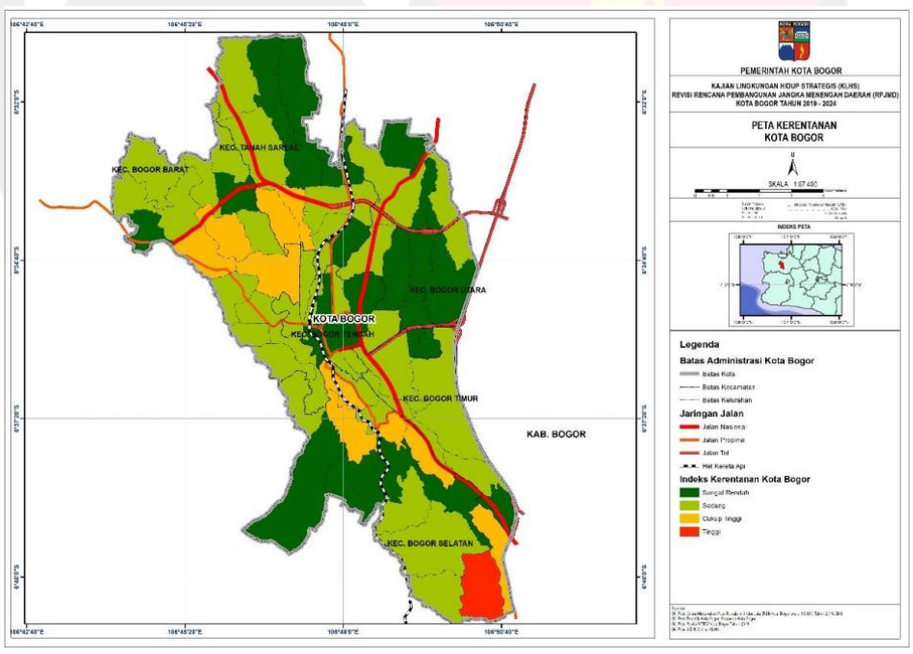

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor Tahun 2020 - 2045

Gambar 2.20. Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor

2.1.1.7. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

1. Risiko Timbulan Sampah

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa menyebabkan masalah ketika volume sampah semakin meningkat. Apalagi Kota Bogor sangat bergantung kepada TPA yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yaitu TPA Galuga dan TPA Nambo. Oleh karena itu upaya-upaya proaktif untuk mengurangi sampah dari sumbernya perlu terus dipertahankan.

Kota Bogor memiliki permasalahan sampah yang perlu masih menjadi perhatian khusus. Meskipun dari tahun 2016 hingga 2022 jumlah produksi sampah Kota Bogor terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 2.225.49 ton/hari menjadi 744.46 ton/hari di tahun 2022. Jumlah produksi sampah terkecil yaitu pada tahun 2020 sebesar 567 ton/hari kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 hingga 2022. Bila dibandingkan wilayah sekitarnya, produksi sampah Kota Bogor masih lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.13. Jumlah Produksi Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2016-2022

Wilayah	Jumlah Produksi Sampah Per Hari (Ton)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Barat	20.969,27	20.969,27	22.772,92	24.490,56	25.333,00	15.735,36	24.000	
Kota Bogor	2.225,49	991,93	1.069,41	620,55	567	719,72	744,46	
Kota Bekasi	4.804,77	2.387,08	2.858,6	2.060,7	1.923	1.500,77	1.830,63	
Kota Depok	3.901,4	1.844,3	2.272,07	1.469,77	1.516	1.418,87	NA	
Kab Bogor	2.229,42	1.511,15	1.716,8	2.914,65	2.977	971,59	NA	
Kab Bekasi	1.464,87	1.228,6	1.600,71	2.590,00	2.258	1.193,76	2.250,35	

Sumber: Open data Jabar, 2023

Dari total sampah yang ada, saat ini baru 70% sampah yang dapat diangkut ke pembuangan sampah akhir. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah terbanyak berasal dari sampah rumah tangga (62,44%), perniagaan (19,48%), fasilitas publik (6,17%), pasar (4,89%), kawasan (2,84%), perkantoran (3,25%) dan lainnya (0,93%). Dalam pengelolaan sampah, Kota Bogor mengirim sampah setiap harinya ke TPA Galuga. Pada tahun 2022 jumlah sampah dari Kota Bogor yang masuk ke TPA Galuga mencapai 195.787,10 Ton dan sisanya sekitar 75.940 Ton tidak masuk TPA. Kota Bogor sudah memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) sebanyak 30 TPS3R yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Bogor.

Tabel 2.14. TPS 3R di Kota Bogor Tahun 2023

No.	Nama	Penduduk Terlayani	No.	Nama	Penduduk Terlayani
1	TPS 3R Citra Mandiri	± 601 KK	16	TPS 3R Benteng Hijau	± 483 KK
2	TPS 3R Mutiara Bogor Raya	± 1000 KK	17	TPS 3R Anugerah	1 SMKN + 1 RW
3	TPS 3R Darmais	± 409 KK	18	TPS 3R Griya Melati	± 215 KK
4	TPS 3R Bhakti Warghana	± 755 KK	19	TPS 3R Rangga Mekar	± 451 KK
5	TPS 3R Taruna Kompos	± 1286 KK	20	TPS 3R Paledang	-
6	TPS 3R Ciparigi 2	± 560 KK	21	TPS Griya Katulampa	± 782 KK

No.	Nama	Penduduk Terlayani	No.	Nama	Penduduk Terlayani
7	TPS 3R Mutiara Kayumanis	± 402 KK	22	TPS 3R Bumi Indraprasta	-
8	TPS 3R Kembang Setaman BCC	± 1151 KK	23	TPS 3R Asri Bubulak	± 158 KK
9	TPS 3R Kayumanis 2	± 400 KK	24	TPS Taman Sari Persada	± 650 KK
10	TPS 3R Ciparigi 1	± 800 KK	25	TPS Kayu Manis 3	± 350 KK
11	TPS 3R Ceremai Cipaku	± 705 KK	26	TPS 3R Rusunawa Tanah Baru	± 412 KK
12	TPS 3R Kencana BKP	± 217 KK	27	TPS 3R Melati Warban-5	270 KK
13	TPS 3R Tunas Rancamaya	± 856 KK	28	Rumah Kompos Cipaku	-
14	TPS 3R Cibadak	± 350 KK	29	TPS 3R Gerbang Mulia Berseri	238 KK
15	TPS 3R Rusunawa Menteng	± 377 KK	30	TPS 3R Mekar Mandiri	207 KK

Selain itu juga terdapat 107 Bank Sampah Unit (BSU) yang juga tersebar di beberapa wilayah. Sampah yang terkelola di TPS3R dan Bank Sampah Unit sekitar 35 ribu ton/tahun. Peningkatan jumlah penduduk Kota Bogor berdampak pada jumlah sampah yang semakin bertambah, sehingga pengelolaan sampah di Kota Bogor menjadi isu yang semakin mendesak. Peningkatan jumlah sampah perlu didukung dengan adanya inovasi teknologi pengolahan sampah karena lahan yang semakin terbatas. Introduksi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan perlu di inisiasi (PLTSa). Perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu terus dilakukan melalui edukasi formal maupun internal.

Tabel 2.15. Fasilitas Pengelolaan Persampahan Kota Bogor

Nama Fasilitas	Sampah terkelola (kg/thn)	Nama Fasilitas	Sampah terkelola (ton/thn)
TPS 3R Tunas Rancamaya	755	BSU Marllin	333
TPS 3R Benteng Hijau	1.591	BSU Sedap Malam	89
TPS 3R Cibadak	2.251	BSU Cendana Loji	19
TPS 3R Griya Katulampa	1.216	BSU Narabas	129
TPS 3R Kembang Setaman (Bukit Cimanggu City)	5.604	BSU Azalea	200
TPS 3R Melati (Warban 5)	7.073	BSU Baskom Grika	41
TPS 3R Rangga Mekar	4.462	BSU Cendana cimanggu	62
TPS 3R Taruna Kompos	2.916	BSU Bangkit	235
TPS 3R Asri Bubulak (Griya Wanakarya)	5.780	BSU Situ Bagar/ FARMING BHAGAR	12
TPS 3R Ceremai Cipaku	3.208	BSU Gede	241
Total	34.856	Total	1.361

2. Risiko Timbulan Air Limbah

Salah satu permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi di wilayah perkotaan adalah terkait dengan air limbah. Air limbah bisa berasal dari domestik (rumah tangga) maupun dari sektor lainnya seperti jasa dan industri. Parameter pencemar pada limbah cair yang dianalisis dalam kajian ini adalah Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total nitrogen (TN) dan total posfor (TP). Dasar analisis perhitungan terhadap parameter pencemar limbah cair berdasarkan jumlah penduduk sehingga diperoleh bahwa Kecamatan Bogor Barat memiliki potensi yang besar dibandingkan kecamatan lain dalam menghasilkan limbah cair. Pada tahun 2020 beban pencemar di Kecamatan

Bogor Barat merupakan yang terbesar untuk semua parameter. Sedangkan Kecamatan Bogor Tengah memiliki tingkat potensi beban pencemar lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2045 rata-rata peningkatan beban pencemar untuk masing-masing parameter adalah 2,29%. Peningkatan ini perlu diantisipasi terutama karena kualitas air akan semakin menurun di masa mendatang jika tidak dilakukan upaya pencegahan.

Tabel 2.16. Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	BOD (Kg/Tahun)	COD (Kg/Tahun)	Total Nitrogen (Kg/Tahun)	Total Posfor (Kg/Tahun)
Bogor Barat	233.637	4.519.708	8.664.195	1.935.799	324.055
Bogor Selatan	204.030	3.946.960	7.566.249	1.690.491	282.990
Bogor Tengah	96.258	1.862.111	3.569.632	797.546	133.510
Bogor Timur	104.327	2.018.206	3.868.862	864.401	144.702
Bogor Utara	186.724	3.612.176	6.924.473	1.547.102	258.986
Tanah Sareal	218.094	4.219.028	8.087.798	1.807.018	302.496

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 - 2045

3. Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bogor

Salah satu penyebab adanya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat, informasi mengenai Gas Rumah Kaca diperlukan untuk memetakan sektor-sektor mana yang menjadi penyumbang GRK di Kota Bogor. Sehingga nantinya dapat dilakukan upaya mitigasi pengurangan GRK pada sektor - sektor tersebut. Berdasarkan hasil inventarisasi GRK di Kota Bogor, pada tahun 2022 total emisi GRK adalah 2.870.822,84 Ton CO_2e. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 6,27% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2.701.324,46 on CO_2e. Jumlah emisi CO_2e dan persentase dari masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

a. Sektor energi adalah sekitar 2.634.695,51 Ton CO_2e atau sekitar 91,77% dari total emisi
b. Sektor peternakan dan pertanian adalah sekitar 12.110,93 Ton CO_2e atau sekitar 0,42% dari total emisi
c. Sektor limbah adalah sekitar 224.016,40 Ton CO_2e atau sekitar 7,80% dari total emisi.

Hasil perhitungan total emisi dari tahun 2013-2022 menunjukkan rata-rata kenaikan emisi GRK di Kota Bogor adalah 2,50% per tahun. Emisi GRK Kota Bogor dari tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adanya tren kenaikan emisi CO_2e khususnya di sektor energi dari tahun ke tahun salah satunya bersumber dari adanya kenaikan jumlah penggunaan listrik dari tahun 2013 hingga tahun 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,1% per tahun. Selain itu, jumlah penggunaan BBM dan penggunaan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari konteks pertumbuhan ekonomi hal ini merupakan sesuatu yang positif karena artinya aktivitas perekonomian terus berjalan dan bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun demikian dalam jangka panjang dampak negatif dari penggunaan energi ini perlu dikurangi baik dari hulu melalui penggunaan sumber

listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) atau di hilir (masyarakat) melalui upaya penghematan penggunaan energi agar efisien.

Tabel 2.17. Total Emisi CO_2e di Kota Bogor Tahun 2013 - 2022

Tahun	Sektor Energi (ton)	Sektor Peternakan dan Pertanian (ton)	Sektor Limbah (ton)	Total Emisi CO_2e (ton)
2013	2.110.180,92	11.943,32	208.559,75	2.330.683,99
2014	2.149.794,82	13.313,57	209.702,27	2.372.810,66
2015	2.059.429,55	10.792,64	214.674,63	2.284.896,82
2016	2.153.186,65	11.045,60	219.535,83	2.383.768,08
2017	2.193.730,02	11.610,09	228.717,16	2.434.057,27
2018	2.254.624,31	12.560,21	236.818,09	2.504.002,61
2019	2.472.669,78	12.521,92	234.756,93	2.719.948,63
2020	2.224.809,18	12.401,73	231.015,07	2.468.225,97
2021	2.467.400,25	12.320,93	221.603,28	2.701.324,46
2022	2.634.695,51	12.110,93	224.469,40	2.870.822,84

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2025 - 2045

2.1.1.8. Ketahanan Pangan

Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian untuk memunculkan isu strategis yang akan dijadikan bahan penentu kebijakan. Beberapa hal tersebut diantaranya melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan Kota Bogor.

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 2.21. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Bogor 2015-2023

Skor pola pangan harapan (PPH) merupakan salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan **Gambar 2.21** Skor Pola Pangan Harapan Kota Bogor mengalami penurunan sejak tahun 2018-2021,

dan meningkat kembali pada tahun 2022 dan 2023. Capaian skor pola pangan harapan Kota Bogor diharapkan dapat meningkat sehingga capaian konsumsi pangan yang berkualitas bagi masyarakat dapat tercapai.

2.1.2. Demografi

Aspek demografi dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kota Bogor dalam merancang kebijakan yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan untuk mempromosikan kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat. Beberapa variabel untuk menjelaskan aspek demografi diantaranya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; penduduk berdasarkan jenis kelamin; serta rasio ketergantungan.

2.1.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proses perencanaan, karena penduduk merupakan subjek utama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu proses perencanaan fasilitas penunjang dan pembuatan sistem layanan seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, perumahan, aksesibilitas, lapangan pekerjaan, ruang terbuka, dan berbagai kebutuhan lainnya akan sangat bergantung kepada jumlah penduduk dan proyeksinya di masa mendatang. Dalam kurun waktu 2012-2023 jumlah penduduk Kota Bogor meningkat sekitar 6,56% dari 1.004 ribu penduduk pada tahun 2005 menjadi 1.071 jiwa penduduk pada tahun 2023, yang terdiri dari 542.408 orang laki-laki (50,66% dari penduduk Kota Bogor). Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kota Bogor sebanyak 528.311 orang, atau 49,34 persen dari penduduk Bogor. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Bogor sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Kota Bogor pada tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk selama periode tersebut sekitar 1,4% per tahun merupakan yang terendah dibandingkan wilayah lainnya. Apabila dibandingkan dengan wilayah Jabodetabek, Kota Bogor merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit diantara Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

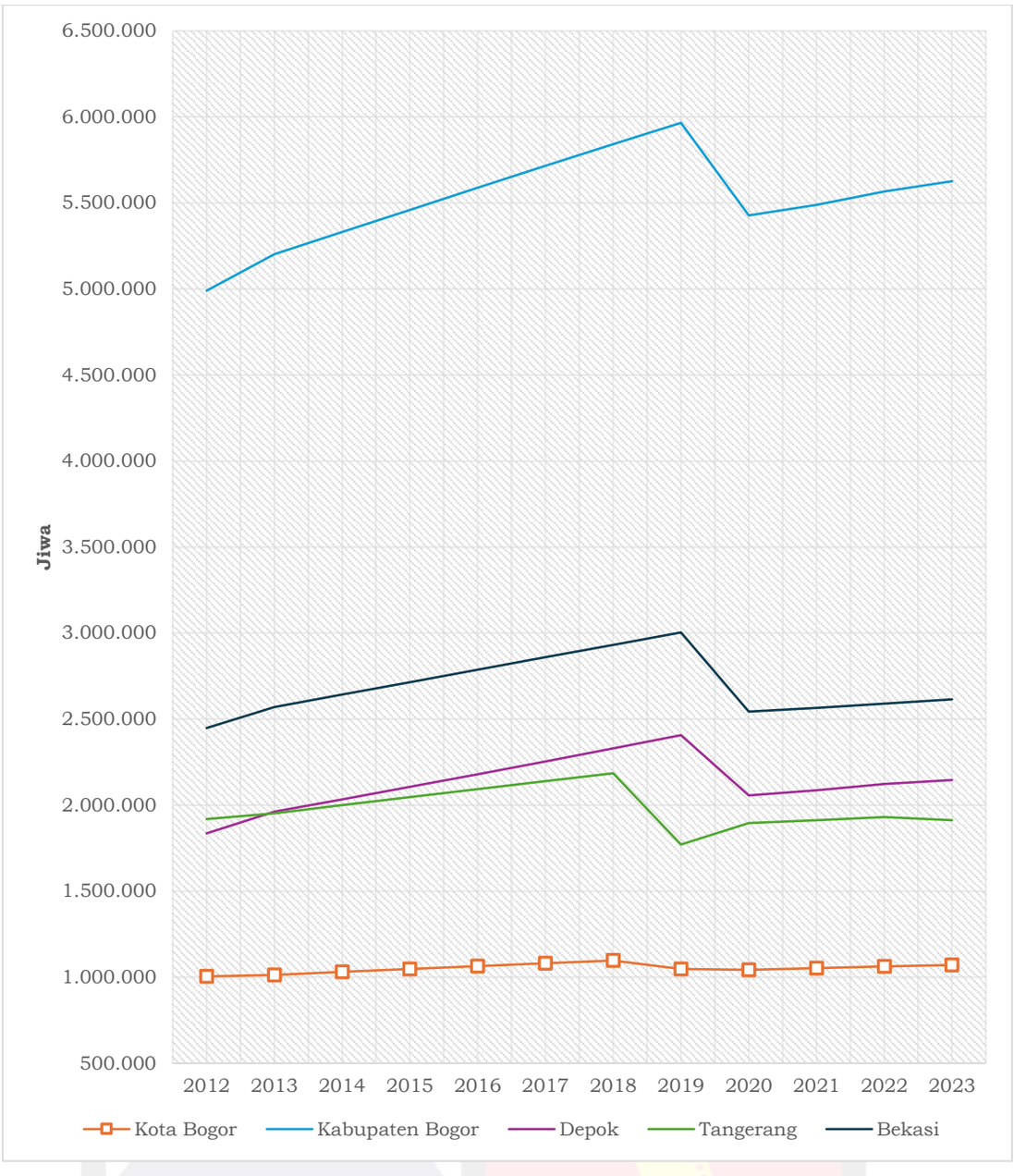

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.22. Jumlah Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2012- 2023

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Tingkat laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sumber daya suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor banyaknya imigran yang datang, tingginya tingkat fertilitas, dan rendahnya tingkat mortalitas. Pada tahun 2011, LPP tertinggi berada di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 4,23% hingga tahun 2022 Kabupaten Bekasi masih menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Selain Kabupaten Bekasi, wilayah lainnya di Jabodetabek dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi adalah Kota Depok. Pada tahun 2011 LPP Kota Depok sebesar 3,85%, sedangkan pada tahun 2023 LPP menjadi sebesar 1,55%.

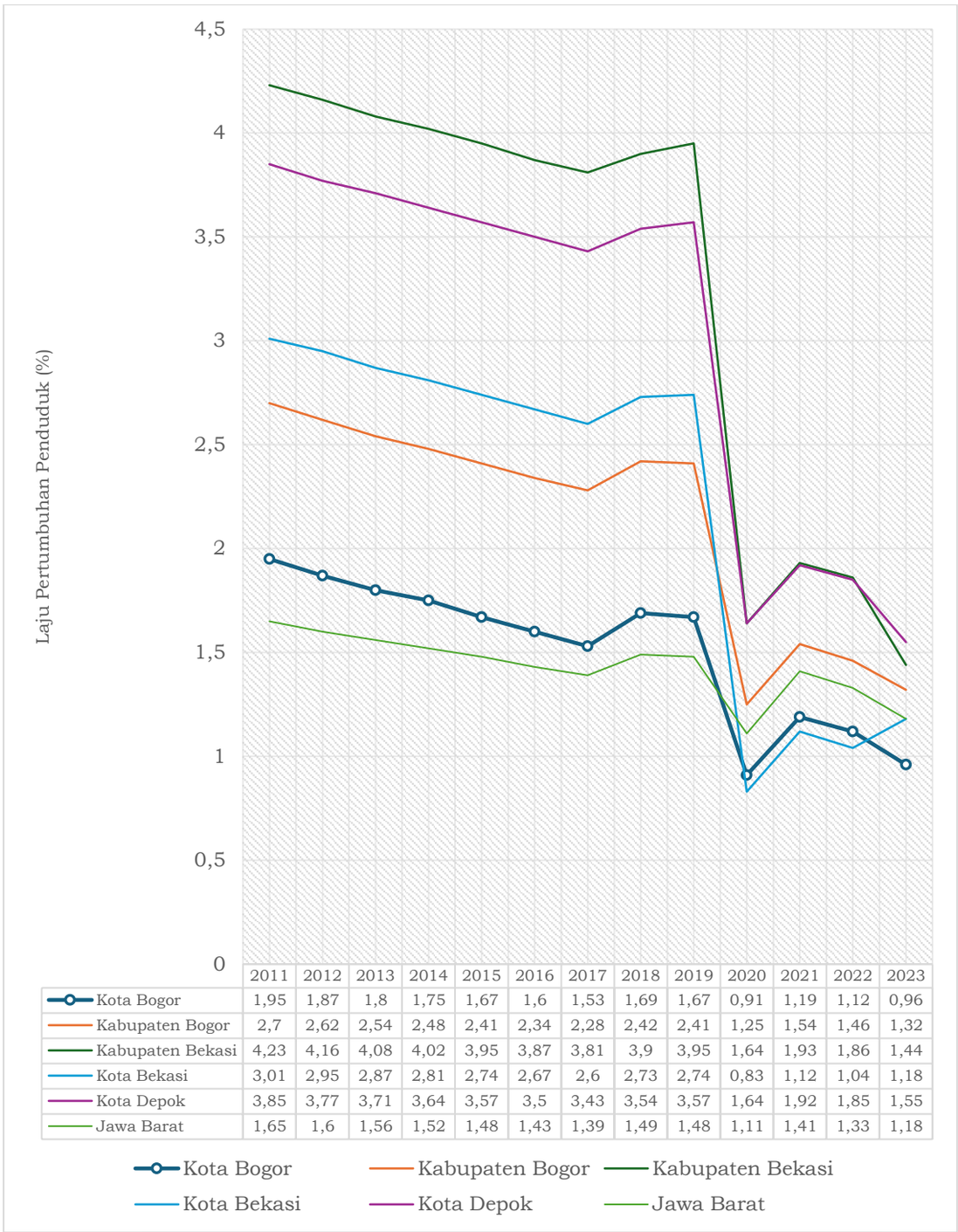

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	1,95	1,87	1,8	1,75	1,67	1,6	1,53	1,69	1,67	0,91	1,19	1,12	0,96
Kabupaten Bogor	2,7	2,62	2,54	2,48	2,41	2,34	2,28	2,42	2,41	1,25	1,54	1,46	1,32
Kabupaten Bekasi	4,23	4,16	4,08	4,02	3,95	3,87	3,81	3,9	3,95	1,64	1,93	1,86	1,44
Kota Bekasi	3,01	2,95	2,87	2,81	2,74	2,67	2,6	2,73	2,74	0,83	1,12	1,04	1,18
Kota Depok	3,85	3,77	3,71	3,64	3,57	3,5	3,43	3,54	3,57	1,64	1,92	1,85	1,55
Jawa Barat	1,65	1,6	1,56	1,52	1,48	1,43	1,39	1,49	1,48	1,11	1,41	1,33	1,18

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.23. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 - 2023

Adapun untuk Kota Bogor laju pertumbuhan penduduknya merupakan yang rendah di wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk Kota Bogor sebesar 1,95% per tahun dan menurun menjadi 0,96% per tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor hanya sedikit lebih tinggi dari Kota Bekasi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor walaupun tergolong rendah di Jabodetabek tetapi masih lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat selama periode 2011 - 2019. Setelah tahun 2019 hingga tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor menjadi lebih rendah daripada provinsi.

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dilihat dari jenis kelamin, rata-rata jumlah penduduk laki-laki di Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata jumlah populasi laki-laki lebih tinggi sebesar 2,68% dibandingkan perempuan. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 bahwa rasio jenis kelamin penduduk Indonesia mencapai 103 yang artinya, dalam setiap populasi berisi 100 orang perempuan, terdapat sekitar 103 orang laki-laki. Perubahan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini bertujuan untuk memudahkan analisis demografi dan perencanaan pembangunan berdasarkan pemberdayaan gender, analisis ketenagakerjaan, dan dinamika sosial.

Rasio jenis kelamin di Kota Bogor sebesar 103, artinya dari 103 penduduk laki-laki, terdapat 100 jiwa penduduk perempuan. Pada wilayah Kota Bogor, penduduk berjenis kelamin laki-laki relatif turun sebesar 4,8% dan perempuan sebesar 4,9%. Pada Kota Depok penduduk relatif turun sebesar 14% pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Di Kota Tangerang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2020 yang mana penduduk laki-laki turun sebesar 13,9% dan perempuan turun sebesar 12,5%. Sedangkan di Bekasi penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sekitar 12% dari tahun 2018-2021. Penurunan tertinggi dirasakan oleh Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk terbesar. Di Kota Jakarta, penurunan hanya dialami oleh jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 0,8%. Sedangkan laki-laki justru mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,9%. Kabupaten Bogor mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 19,2% untuk penduduk jenis kelamin laki-laki dan 19,9% untuk jenis kelamin perempuan. Tingginya angka penurunan ini berkaitan dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang mencakup hingga lebih dari 400 desa/kelurahan. Provinsi jawa barat menjadi wilayah dengan tingkat penurunan jumlah penduduk yang cukup rendah yaitu sebesar 1,8% untuk jenis kelamin laki-laki dan 2,4% untuk jenis kelamin Perempuan tersaji dalam **Tabel 2.18.**

Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Jawa Barat Tahun 2012 - 2023.

Kota/ Kabupaten	Jenis Kelamin	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	Laki-laki	523.479	532.018	540.288	548.196	555.995	563.426	529.236	533.774	539.25	542.408
	Perempuan	507.241	515.904	524.399	532.813	540.833	548.655	513.834	518.585	524.263	528.311
Kota Depok	Laki-laki	1.025.784	1.061.889	1.098.473	1.135.539	1.173.102	1.210.887	1.038.056	1.052.652	1.071.173	1.080.541
	Perempuan	1.007.724	1.044.211	1.081.340	1.118.974	1.157.231	1.195.929	1.018.279	1.033.283	1.052.176	1.064.859
Kota Tangerang	Laki-laki	1.021.298	1.045.113	1.068.606	1.091.787	1.114.613	1.136.898	959.009	966.808	975.709	961.354
	Perempuan	978.596	1.001.992	1.025.100	1.048.104	1.070.691	1.093.003	936.477	945.106	954.847	951.325
Kota Bekasi	Laki-laki	1.333.772	1.369.600	1.405.380	1.441.137	1.476.810	1.512.233	1.281.692	1.291.982	1.304.296	1.316.941
	Perempuan	1.308.736	1.345.200	1.381.830	1.418.493	1.455.090	1.491.690	1.261.984	1.272.959	1.285.961	1.298.633
Kab. Bogor	Laki-laki	2.728.381	2.792.900	2.856.530	2.920.288	2.983.278	2.410.405	2.789.738	2.820.924	2.859.683	2.886.662
	Perempuan	2.602.768	2.666.800	2.730.860	2.794.721	2.857.629	2.288.877	2.637.330	2.668.612	2.707.155	2.740.359
Jawa Barat	Laki-laki	23.345.033	23.680.927	24.011.261	24.335.331	24.652.609	24.962.701	24.508.885	24.758.980	25.067.226	
	Perempuan	22.684.635	23.028.642	23.368.128	23.702.496	24.031.252	24.354.011	23.765.277	24.023.422	24.338.582	

Sumber: BPS Jawa Barat, Banten 2014-2023

2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Pada tahun 2023, penduduk Kota Bogor dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) sebesar 24,99%, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,47%, dan jumlah penduduk lansia (≥65 tahun) hanya sebesar 5,54%. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kota Bogor apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna, karena mayoritas penduduknya dalam usia produktif.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang peluang ekonomi yang tersedia.

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	2019		2020		2021		2022		2023	
	Laki- laki	Perem-puan	Laki- laki	Perem-puan	Laki- laki	Perem-puan	Laki- laki	Perem-puan	Laki- laki	Perem-puan
75+	906	10.106	6.014	8.379	6.426	8.945	8.375	11.289	34.728	32.785
70-74	7.172	7.570	7.323	7.786	7.929	8.427	9.377	9.770	50.335	47.020
65-69	13.823	13.043	13.860	14.413	14.563	15.220	15.271	16.001	50.879	47.275
60-64	19.342	19.212	19.242	19.564	20.000	20.504	21.303	22.309	42.938	40.653
55-59	24.385	24.814	25.153	25.046	25.913	25.950	27.719	27.884	47.430	45.412
50-54	31.629	30.944	31.116	30.924	31.817	31.727	36.329	36.038	46.103	45.046
45-49	37.472	36.719	36.117	35.166	36.780	35.858	40.034	39.922	44.567	43.656
40-44	41.339	40.864	40.083	38.880	40.425	39.148	45.047	44.816	42.598	41.109
35-39	44.813	43.898	41.629	40.113	41.901	40.293	42.598	41.109	45.047	44.816
30-34	41.981	40.161	44.084	42.049	44.265	42.100	44.567	43.656	40.034	39.922
25-29	43.523	42.925	44.826	43.079	44.963	43.109	46.103	45.046	36.329	36.038
20-24	43.281	42.504	44.018	42.639	43.983	42.403	47.430	45.412	27.719	27.884
15-19	37.242	36.407	44.880	42.135	44.681	41.894	42.938	40.653	21.303	22.309
10-14	46.885	43.783	44.926	42.087	44.345	41.613	50.879	47.275	15.271	16.001
5-9	48.985	45.383	42.456	40.014	42.158	39.746	50.335	47.020	9.377	9.770
0-4	40.955	38.434	43.509	41.560	43.625	41.648	34.728	32.785	8.375	11.289
Jumlah	523.733	516.767	529.236	513.834	533.774	518.585	563.033	550.985	563.033	550.985

Sumber: BPS Kota Bogor, 2019-2023

3. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk pada enam kecamatan di Kota Bogor tahun 2022 dan 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Bogor Utara mencapai 200.200 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 11.037,97 jiwa per km², sedangkan Bogor Selatan mencatat angka 216.501 jiwa dengan kepadatan 7.097,9 jiwa per km². Kecamatan Bogor Barat menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah penduduk 252.433 jiwa dan kepadatan 10.826,83 jiwa per km², diikuti oleh Bogor Tengah, yang memiliki 109.331 jiwa dan kepadatan 13.067,4 jiwa per km². Selain itu, Bogor Timur dan Tanah Sareal masing-masing memiliki jumlah penduduk 108.212 jiwa dan 227.341 jiwa dengan kepadatan 10.341,36 jiwa per km² dan 11.035,92 jiwa per km².

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Bogor Utara meningkat menjadi 204.454 jiwa dengan kepadatan 11.273 jiwa per km². Kecamatan Bogor Selatan juga mengalami kenaikan menjadi 219.309 jiwa dengan kepadatan 7.190 jiwa per km². Bogor Barat kembali menunjukkan angka tertinggi dengan 254.629 jiwa dan kepadatan 10.921 jiwa per km². Sementara itu, jumlah penduduk di Bogor Tengah sedikit menurun menjadi 109.057 jiwa dengan kepadatan 13.035 jiwa per km², sedangkan Bogor Timur dan Tanah Sareal masing-masing mencatat 108.919 jiwa dan 231.040 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan 10.409 jiwa per km² dan 11.215 jiwa per km². Secara keseluruhan, total jumlah penduduk di Kota Bogor meningkat dari 1.114.018 jiwa pada 2022 menjadi 1.127.408 jiwa pada 2023.

Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar kecamatan di Kota Bogor mengalami pertumbuhan penduduk yang positif, menunjukkan bahwa kawasan ini semakin menarik bagi penduduk baru. Peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Barat, yang merupakan kecamatan dengan fasilitas yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih tinggi, juga mencerminkan pergeseran pola migrasi ke daerah perkotaan. Walaupun beberapa kecamatan mengalami penurunan atau stagnasi, seperti Bogor Tengah, implikasi terhadap perencanaan infrastruktur dan penyediaan layanan publik menjadi lebih penting, agar dapat mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk dengan efektif. Selain itu, peningkatan kepadatan penduduk di wilayah tertentu menunjukkan perlunya strategi yang lebih baik dalam pengelolaan ruang dan penyediaan layanan dasar untuk mencegah masalah perkotaan seperti kemacetan dan kurangnya fasilitas.

Tabel 2.20. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022-2023

Kecamatan	2022				2023			
	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah		Laki Laki	Perempuan	Jumlah	
Bogor Utara	101.358	98.842	200.200	11.037,97	103.966	100.488	204.454	11.273
Bogor Selatan	110.492	106.009	216.501	7.097,9	111.894	107.415	219.309	7.190
Bogor Barat	127.171	125.262	252.433	10.826,83	128.328	126.301	254.629	10.921
Bogor Tengah	54.785	54.546	109.331	13.067,4	54.680	54.377	109.057	13.035
Bogor Timur	54.501	53.711	108.212	10.341,36	54.831	54.088	108.919	10.409
Tanah Sareal	114.726	112.615	227.341	11.035,92	116.634	114.406	231.040	11.215
Total	**563.033**	**550.985**	**1.114.018**	**10.001,44**	**570.333**	**557.075**	**1.127.408**	**10.122**

Sumber: BPS Kota Bogor, 2019-2023

Dari enam kecamatan, Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk terbesar yakni 254.629 jiwa (22,59%) dan terkecil adalah Kecamatan Bogor Timur tercatat sebesar 109.057 jiwa (9,67%). Kepadatan Penduduk pada enam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dengan kepadatan sebesar 13.035 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bogor Selatan sebesar 7.190 jiwa/km2.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk Kota Bogor tahun 2022 sebesar 42,62 % artinya 100 penduduk Kota Bogor usia produktif menanggung sekitar 42 atau 43

penduduk Kota Bogor yang usianya tidak produktif. Angka ini lebih rendah dibandingkan rasio ketergantungan penduduk Kota Bogor tahun 2011 yaitu sebesar 44,29 %. Namun selama 12 tahun, rasio ketergantungan penduduk Kota Bogor memiliki nilai terendah di tahun 2020 yaitu sebesar 41,91 %. Pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan wilayah lain di sekitar Kota Bogor, maka rasio ketergantungan penduduk Kota Bogor memiliki nilai yang paling tinggi, dengan demikian Kota Bogor proporsi penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia) relatif besar dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Kondisi ini dapat membebani perekonomian dan menghambat pembangunan. Dengan demikian Kota Bogor perlu memperhatikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan perekonomian wilayah.

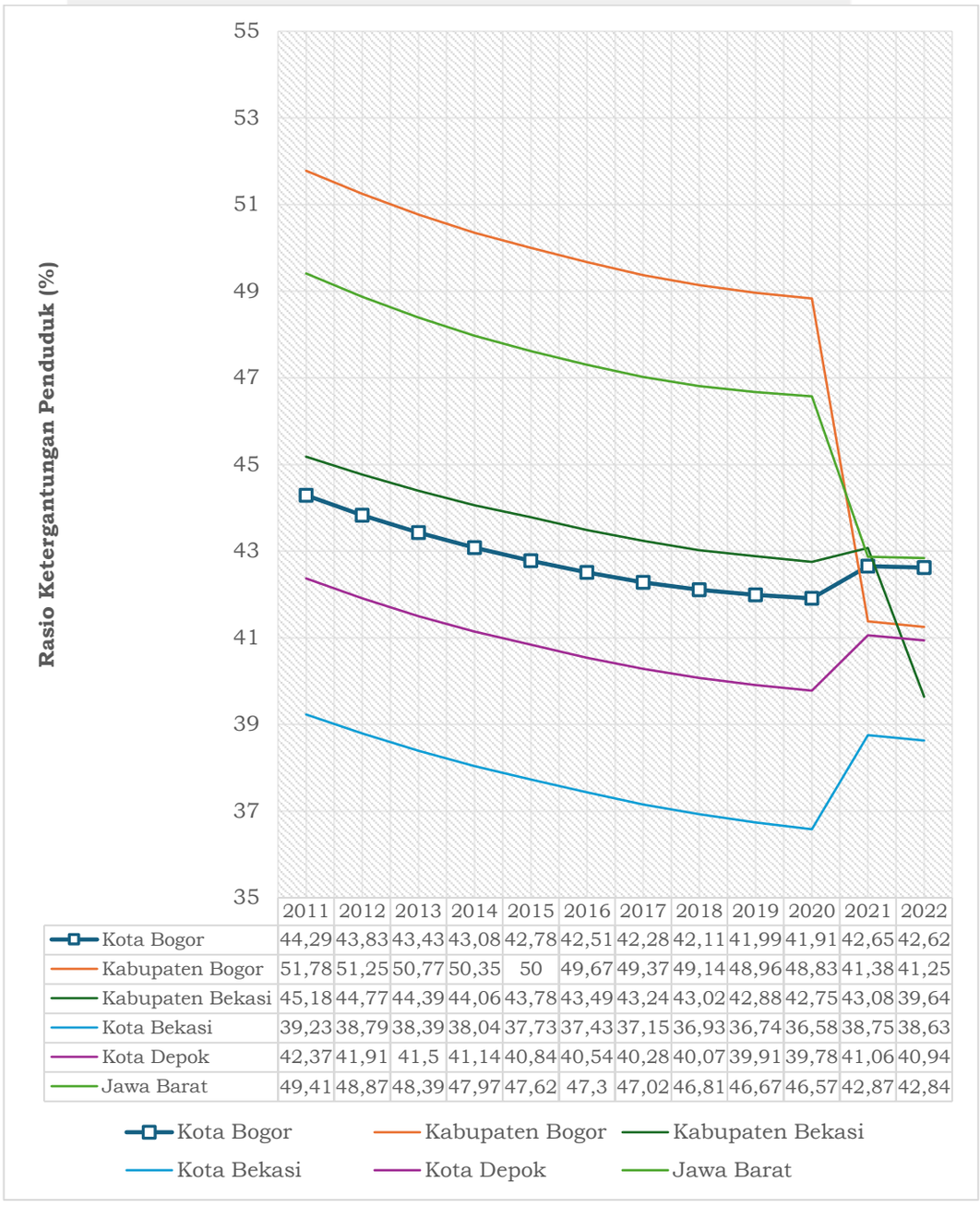

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	44,29	43,83	43,43	43,08	42,78	42,51	42,28	42,11	41,99	41,91	42,65	42,62
Kabupaten Bogor	51,78	51,25	50,77	50,35	50	49,67	49,37	49,14	48,96	48,83	41,38	41,25
Kabupaten Bekasi	45,18	44,77	44,39	44,06	43,78	43,49	43,24	43,02	42,88	42,75	43,08	39,64
Kota Bekasi	39,23	38,79	38,39	38,04	37,73	37,43	37,15	36,93	36,74	36,58	38,75	38,63
Kota Depok	42,37	41,91	41,5	41,14	40,84	40,54	40,28	40,07	39,91	39,78	41,06	40,94
Jawa Barat	49,41	48,87	48,39	47,97	47,62	47,3	47,02	46,81	46,67	46,57	42,87	42,84

Gambar 2.24. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 - 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025-2045 juga memberikan perhatian mendalam terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, mengintegrasikan dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dalam perspektif ekonomi, RPJPD Kota Bogor bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memastikan distribusi manfaatnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran ini diperkuat dengan pendekatan sosial budaya, dimana rencana pembangunan menciptakan pondasi kuat untuk penguatan identitas lokal, pelestarian warisan budaya, dan pengembangan keterlibatan sosial. Dengan menggagas kesejahteraan melalui keseluruhan spektrum ekonomi dan nilai-nilai budaya, RPJPD Kota Bogor bertujuan untuk membentuk sebuah kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan keberagaman sosial budaya, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya saing untuk seluruh warganya.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi menunjukkan kondisi Masyarakat Kota Bogor melalui perspektif ekonomi. Indikator-indikator yang akan disajikan dalam sub bab kesejahteraan masyarakat diantaranya: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam hal ini dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Berdasarkan PDRB atas harga konstan Kota Bogor didapatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen, sedangkan tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor hanya 5,10 persen. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan dalam 13 tahun terakhir.

Laju pertumbuhan Kota Bogor sempat mengalami nilai negatif di tahun 2020, yaitu pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bogor pada saat itu mengalami penurunan, salah satu penyebabnya diduga adalah kondisi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor perekonomian mengalami hambatan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah pembandingnya memang tidak jauh berbeda. Setiap wilayah mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, bahkan mencapai angka negatif. Hal ini diakibatkan adanya krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 dimana arus perekonomian mengalami hambatan dalam beberapa hal. Namun pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berada pada posisi ke-2 yaitu sebesar 5,65 persen setelah Kota Tangerang yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Kota Bogor tahun 2022, maka telah terjadi penurunan sebesar 0,55 persen. Hal ini menjadikan Kota Bogor (5,10) menjadi

urutan kelima setelah Kota Tangerang (5,57); Kota Bekasi (5,43); Tangerang (5,18); dan Bogor (5,11). Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.25.

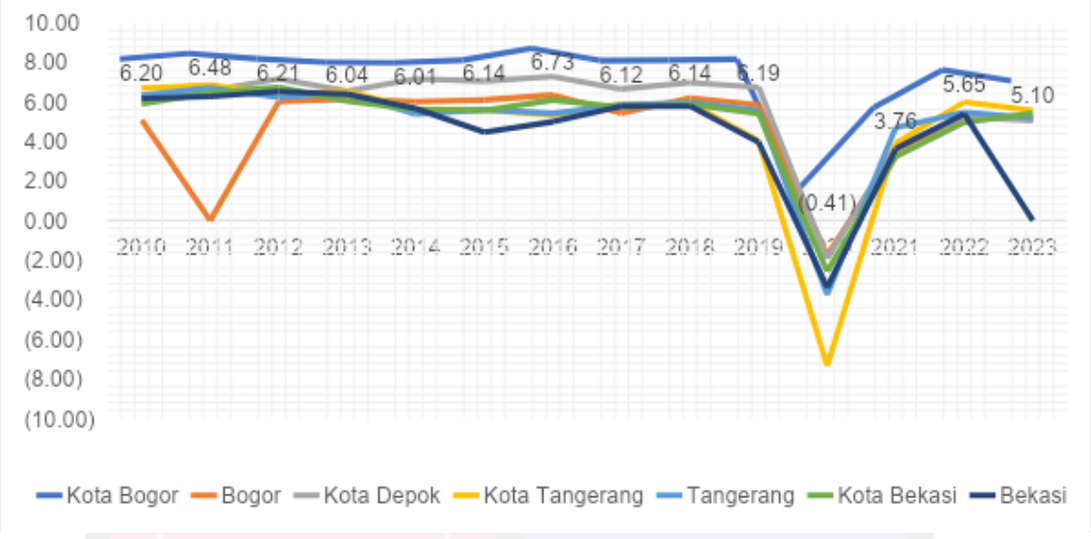

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

2.2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Kemiskinan itu sendiri mengukur standar hidup masyarakat yang rendah yang tercermin dari tingkat pendapatan yang rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan. Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya kemiskinan, diantaranya akibat dorongan faktor internal maupun eksternal. Minimnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan relasi, serta minimnya akses pada sumber daya yang tidak berimbang semakin memperparah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun hal yang paling menakutkan tetapi nyata terjadi yaitu adanya lingkaran setan kemiskinan. *Vicious Circle of Poverty* atau lingkaran setan kemiskinan menunjukkan serangkaian kekuatan yang saling memengaruhi sehingga menimbulkan banyak permasalahan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Dengan minimnya pendapatan, tabungan menjadi rendah dan kekurangan modal, serta ketertinggalan dalam persaingan pasar. Pada akhirnya, produktivitas rendah serta berlanjut pada pendapatan yang rendah dan seterusnya berulang secara melingkar. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus masih menjadi prioritas bagi pemerintah pusat maupun daerah, tidak terkecuali bagi Kota Bogor.

Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara wilayah, dimana keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, dan urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan (Hasan dan Quibria, 2002). Terdapat 2 (dua) kemungkinan hubungan dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong

kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012).

Gambar 2.26 menunjukkan hubungan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor serta kabupaten/kota sekitarnya di tahun 2023. Kota Bogor jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berada di bawah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Namun demikian, jika disandingkan dengan tingkat kemiskinannya, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor merupakan 2 (dua) kabupaten/ kota yang juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bogor belum dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinannya. Hal ini juga dapat terjadi akibat masih belum meratanya tingkat pendapatan antar kalangan masyarakat Kota Bogor.

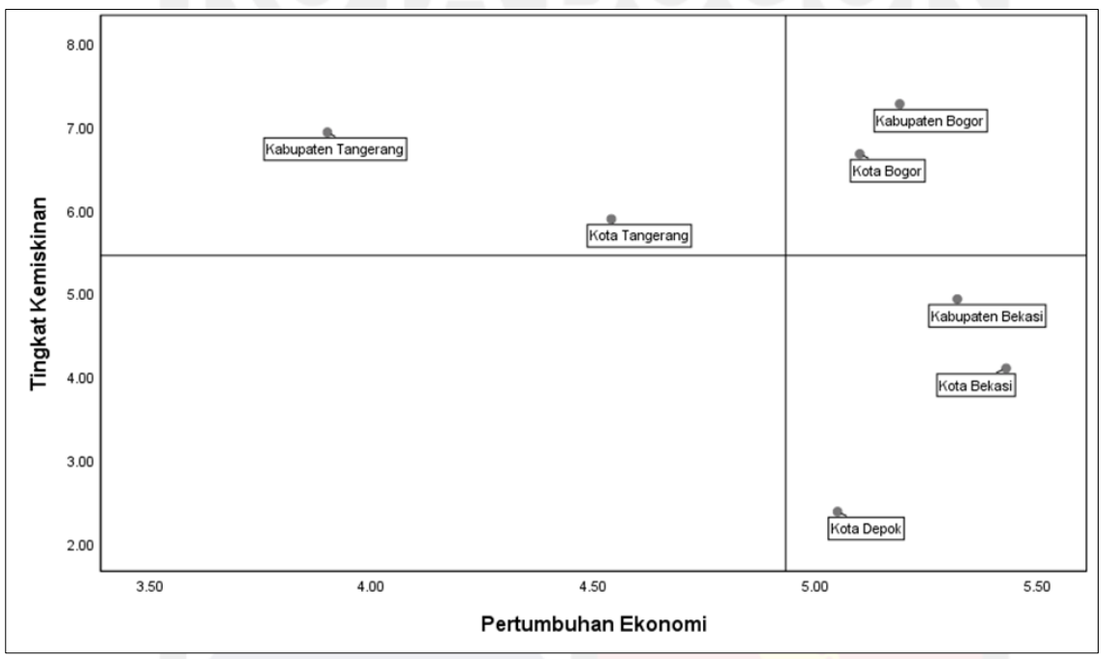

Sumber: BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.26. Klassen Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/Kota sekitarnya, tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.27 terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Bogor selama tahun 2010 hingga 2023 berfluktuasi. Demikian halnya dengan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Bogor juga cukup fluktuatif, dimana tahun 2023 mencapai angka 75 ribu jiwa. Dalam kurun waktu 128 tahun ini, jumlah penduduk miskin paling rendah berada di tahun 2019 yaitu sebanyak 63,97 ribu jiwa, namun penurunan ini tidak berlanjut melainkan meningkat kembali di tahun 2020 hingga 2022 yang salah satu faktornya karena pandemi Covid-19 dan masa pemulihan yang belum optimal.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mencapai 75 ribu jiwa menurun dari 79,5 ribu jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin yang paling sedikit diantara 7 wilayah kota/kabupaten tersebut dimiliki oleh Kota Depok, yaitu sebanyak 61,95 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2023 dimiliki oleh Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 453,76 ribu jiwa.

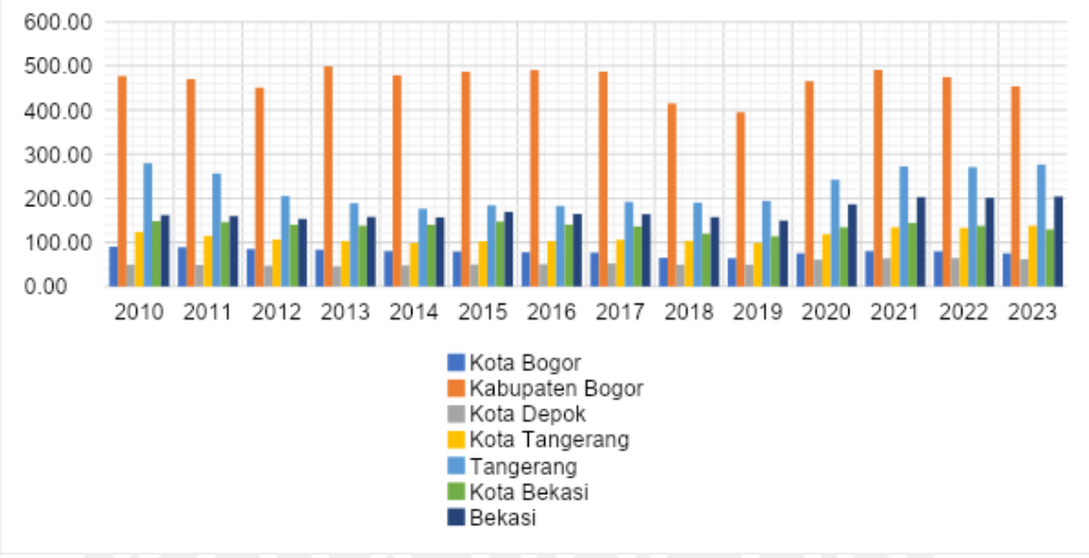

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 2.27. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

Meskipun demikian, selain melihat jumlah penduduk miskin harus diperhatikan juga melalui indikator persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin Kota Bogor di tahun 2023 sebanyak 6,67 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 9,41 persen. Apabila dibandingkan *year-on-year* (y-o-y) maka persentase penduduk miskin tahun 2023 menurun sebesar 0,43 persen dari tahun 2022. Penurunan persentase penduduk miskin ini mengindikasikan bahwa Kota Bogor telah berhasil dan berkomitmen mengurangi jumlah penduduk miskin, diantara pertumbuhan penduduk yang ada. Posisi persentase jumlah penduduk miskin tahun 2023 terendah dimiliki oleh Kota Depok yaitu sebesar 2,38 persen. Selanjutnya disusul oleh Kota Bekasi (4,10); Kabupaten Bekasi (4,93); Kota Tangerang (5,89); Kota Bogor (6,67); Kabupaten Tangerang (6,93); dan Kabupaten Bogor (7,27).

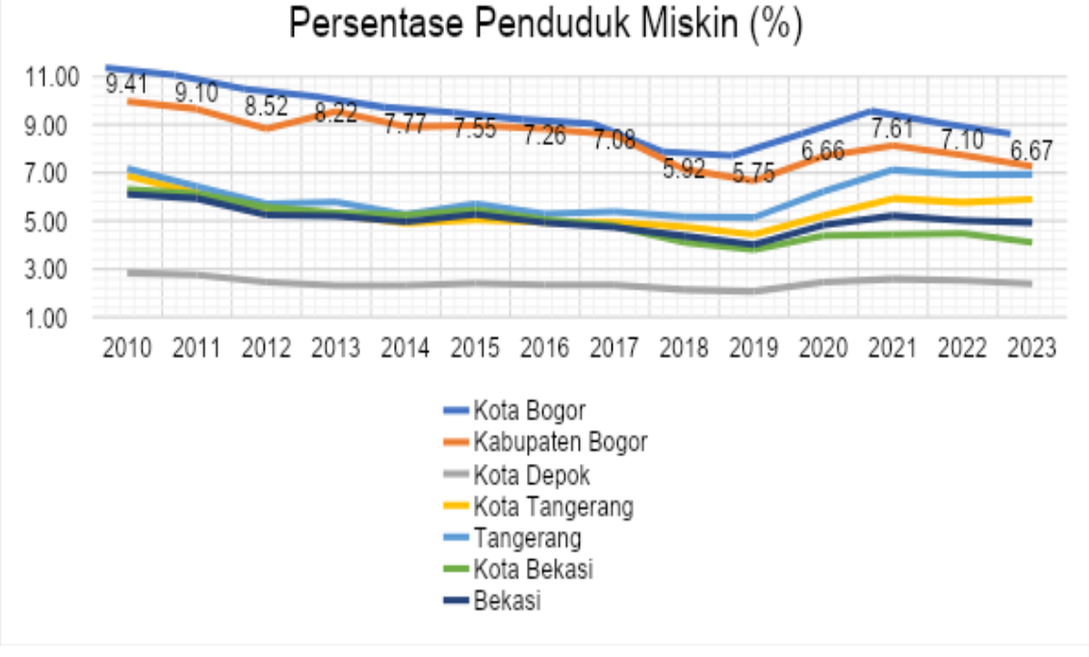

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 2.28. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

2.2.1.3. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan pendapatan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi fokus pemerintah Indonesia sebagai indikator kemajuan ekonomi. Hal ini juga tidak terkecuali bagi kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Bogor dan beberapa kabupaten/ kota lainnya yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, perkembangan perekonomian daerah yang mengesankan tersebut tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan. Kemajuan ekonomi tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga ketimpangan pendapatan masih tinggi dan cenderung meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan terdapat keterkaitan antara pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Kumara (2015) menunjukkan bahwa kualitas dari pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari kemampuannya untuk memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat, seperti ketimpangan pendapatan. Namun demikian, seringkali terdapat *trade off* antara pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum optimal. Gambar 2.29 menunjukkan perbandingan hubungan antara ketimpangan pendapatan (indeks gini) dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dan kabupaten/ kota sekitarnya tahun 2022. Kota Bogor, merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersama dengan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Akan tetapi, Kota Bogor jika dibandingkan 4 kabupaten/ kota tersebut menjadi kota yang memiliki indeks gini paling tinggi dan berada pada kuadran kanan atas. Pada kuadran kanan atas tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Bogor masih belum dapat memeratakan ketimpangan pendapatan yang ada. Sehingga gap pendapatan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih cukup tinggi. Harapan kedepannya, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bogor, ketimpangan pendapatan juga akan semakin kecil.

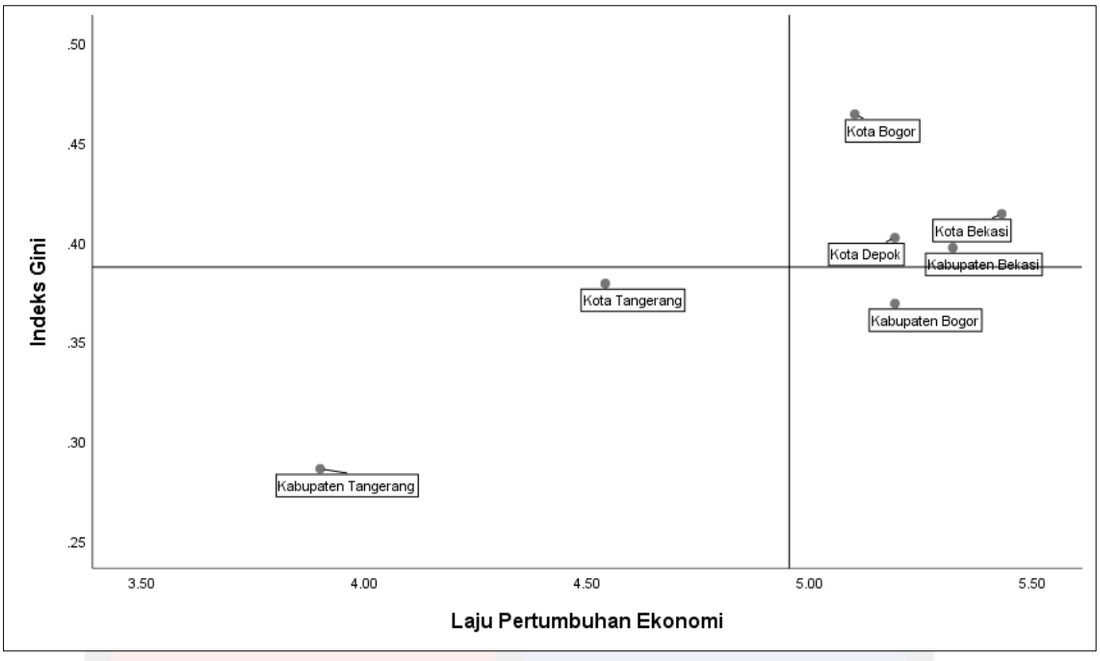

Sumber: BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.29. Klassen Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023

Berdasarkan **Gambar 2.30** dapat dilihat bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Bogor tahun 2022 sebesar 0,43 (ketimpangan moderat), dimana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 0,34, meskipun berada dalam kategori ketimpangan yang sama yaitu ketimpangan moderat. Indeks Gini Kota Bogor dari tahun 2010-2022 mengalami fluktuasi, dimana ketimpangan pendapatan terbesar terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,47 sedangkan ketimpangan paling rendah terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 0,34. Namun melihat perkembangan Indeks Gini yang berada pada kategori ketimpangan moderat, pemerintah Kota Bogor harus dapat memperhatikan distribusi pendapatan Masyarakat Kota Bogor agar dapat menurunkan Indeks Gini menjadi berada dalam ketimpangan yang rendah, bahkan hingga tidak terdapat lagi ketimpangan pendapatan diantara penduduknya.

Jika dibandingkan dengan indeks gini wilayah kota/kabupaten sekitarnya, Kota Bogor memiliki indeks gini paling tinggi pada tahun 2023 yakni 0,46. Artinya, Kota Bogor dibanding kabupaten/kota sekitarnya relatif memiliki ketimpangan yang tinggi pada range sedang, disusul kemudian oleh Kota Bekasi dan Kota Tangerang serta Kabupaten Bekasi masing-masing sebesar 0,414 dan 0,379. Sementara wilayah dengan gini rasio paling rendah adalah Kabupaten Tangerang yakni sebesar 0,279. Artinya, Kabupaten Tangerang yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan masyarakatnya rendah.

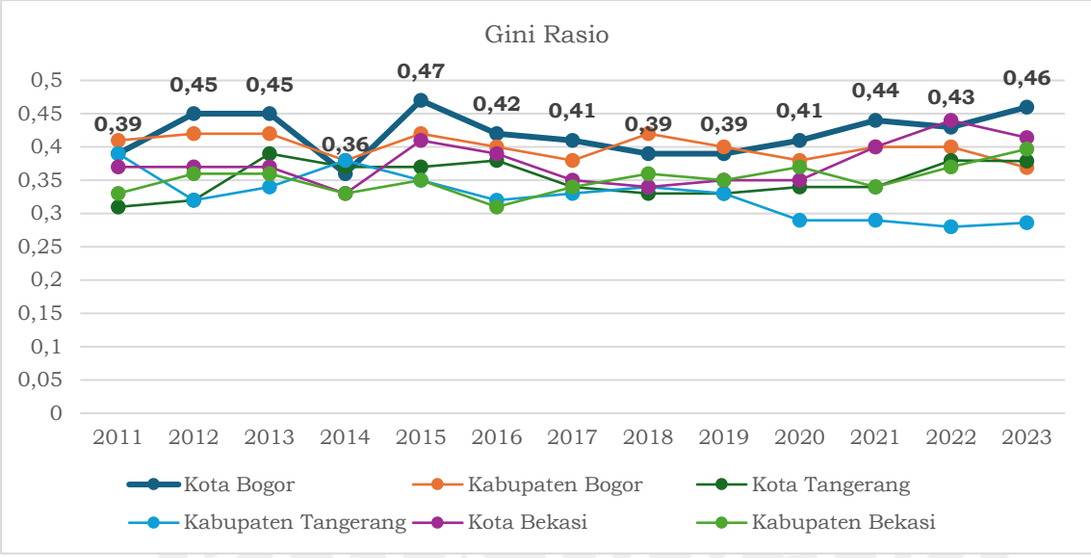

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024
*Keterangan: *Indeks Gini Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang tahun 2010-2017 Not Available (NA)*

Gambar 2.30. Indeks Gini Kota Bogor dan Wilayah Pembanding tahun 2010-2023

2.2.1.4. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan pengukuran IPM terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); dan 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. Berdasarkan Gambar 2.31, IPM Kota Bogor memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2005-2023. Penurunan IPM hanya terjadi di tahun 2010-2012 saja. Pada tahun 2013-2023 mengalami peningkatan pesat hingga capaian di tahun 2023 sebesar 78,36 menjadi skor IPM tertinggi yang pernah dicapai Kota Bogor. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka IPM tahun 2023 mengalami kenaikan 0,68 poin indeks. Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan skor IPM demi mewujudkan peradaban manusia yang semakin maju dan memiliki penghidupan layak.

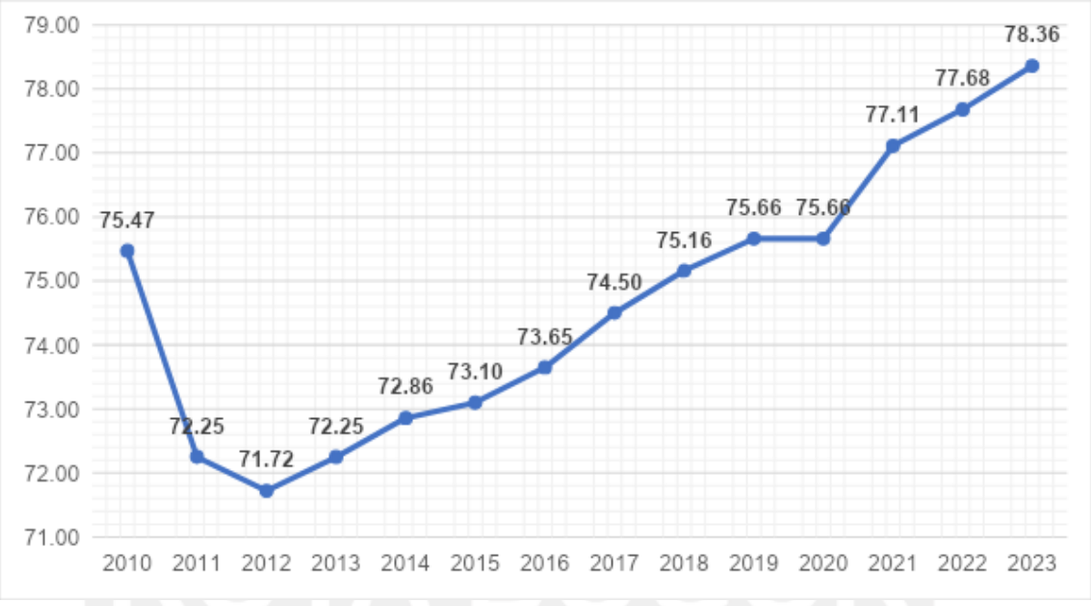

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023

Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Manusia (Secara Komposit) Kota Bogor Tahun 2005-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran atas ketercapaian Pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup dimana pengkategorian status IPM yaitu bernilai 35 - 54,9 masuk dalam kategori "rendah", nilai 55 - 69,9 masuk dalam kategori "sedang", nilai 70 - 79,9 masuk dalam kategori "tinggi", dan nilai 80 - 100 masuk dalam kategori "sangat tinggi". IPM Kota Bogor tahun 2023 sebesar 78,36 dimana angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 75,47. Meskipun demikian, IPM Kota Bogor ini masih berada dalam status IPM yang tinggi (70 - 79,9). IPM Kota Bogor selama 12 tahun terakhir paling rendah berada di tahun 2012 sebesar 71,72. Nilai IPM Kota Bogor yang berada di rentang status IPM tinggi menunjukkan bahwa penduduk Kota Bogor dapat mengakses dengan baik hasil pembangunan Kota Bogor dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Dengan kata lain, Kota Bogor telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup penduduknya. Pada tahun 2023, nilai IPM Kota Bogor berada di posisi ke-4 jika dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten sekitarnya. Nilai IPM yang lebih besar dibandingkan Kota Bogor secara berurutan dari yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Bekasi (83,06); Kota Depok (82,53); dan Kota Tangerang (80,98). Lain halnya dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, nilai IPM yang dimiliki pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan IPM Kota Bogor.

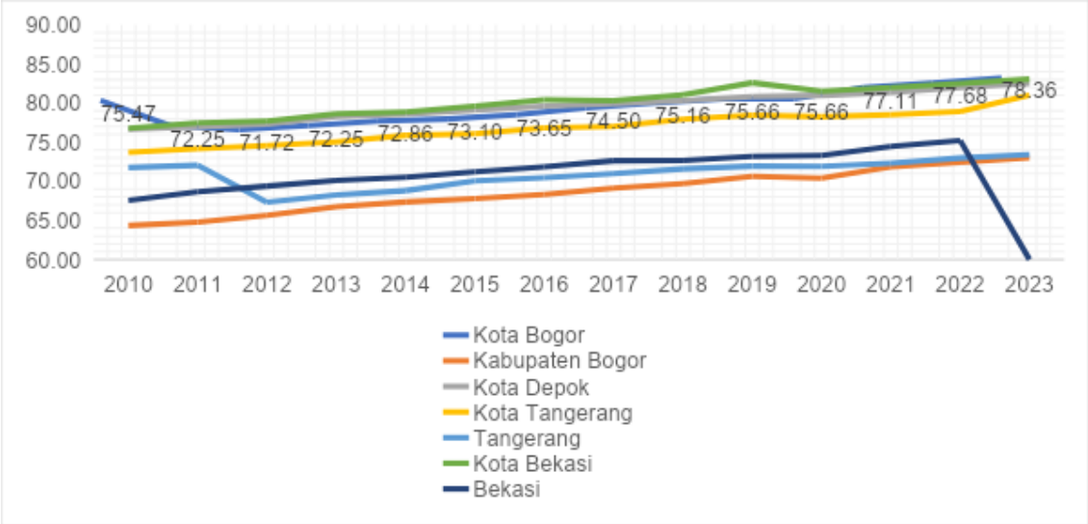

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

Menurut BPS (2023), sejak tahun 2010, IPM dihitung menggunakan metode baru. Komponen IPM metode baru mempertimbangkan Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita. Beberapa komponen penyusun akan diuraikan di bawah ini.

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani suatu pendidikan formal. Capaian RLS Kota Bogor tahun 2023 sebesar 10,64 tahun dengan peningkatan hanya sebesar 0,01 tahun dibandingkan capaian tahun 2022. RLS Kota Bogor tahun 2023 relatif lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi (11,66) dan Kota Depok (11,58), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat (8,83), Kabupaten Bekasi (9,57) dan Kabupaten Bogor (8,37).

Kota Bogor memiliki RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat dan beberapa kabupaten lainnya, menunjukkan kinerja pendidikan yang relatif lebih baik di wilayah ini. Namun, dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Jawa Barat seperti Kota Bekasi dan Kota Depok, Kota Bogor masih tertinggal. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Bogor perlu melakukan upaya lebih dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan untuk mencapai RLS yang lebih tinggi. Peningkatan yang sangat minimal dalam RLS Kota Bogor (hanya 0,01 tahun) menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong peningkatan pendidikan yang lebih signifikan.

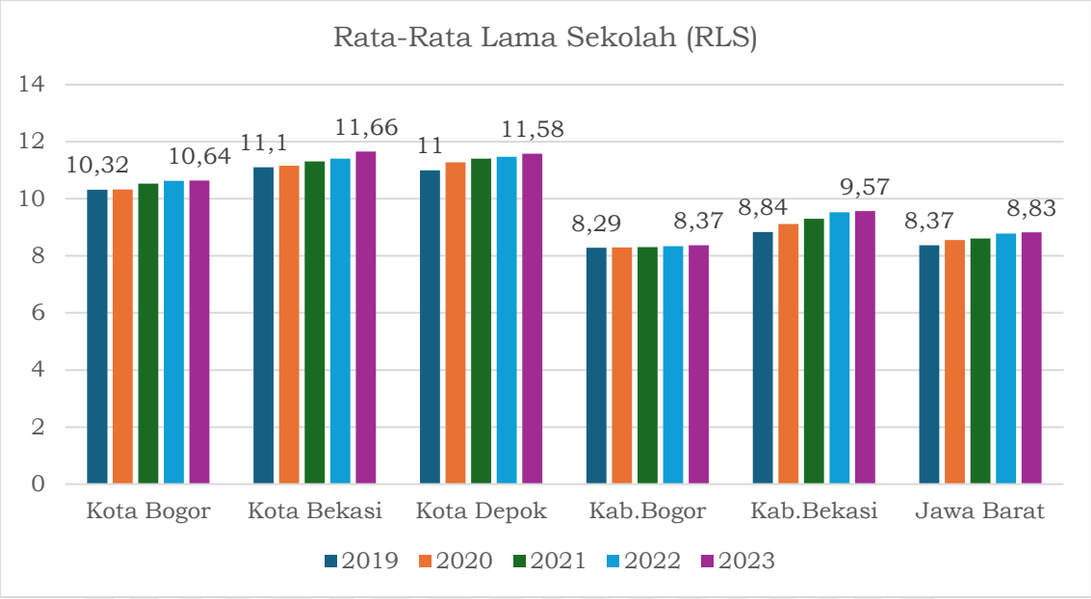

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.33. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai RLS dihitung mulai dari usia 25 tahun dikarenakan pada umumnya penduduk usia 25 tahun ke atas tidak bersekolah kembali. Angka RLS Kota Bogor adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Indonesia seperti yang terlihat pada gambar di bawah, akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah di Jabodetabek maka nilai RLS Kota Bogor tahun 2023 berada dibawah Kota Depok dan Kota Bekasi. RLS Kota Bogor pada periode 2019-2023 sebesar 10,64 tahun, yang artinya penduduk di Kota Bogor yang berusia 25 tahun secara rata-rata telah mengenyam pendidikan hingga kelas 10 dan 11 SMA.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS Kota Bogor tahun 2023 sebesar 13,45 tahun dengan peningkatan sebesar 0,02 tahun dari tahun 2022. HLS Kota Bogor tahun 2023 menempati posisi keempat jika dibandingkan dengan wilayah pembanding seperti Kota Bekasi (14,12); Kota Depok (13,96); dan Kota Tangerang (13,89).

Peningkatan HLS di Kota Bogor sebesar 0,02 tahun menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam harapan lama sekolah, tetapi peningkatan ini masih sangat kecil. Dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang, HLS Kota Bogor masih lebih rendah, menempatkannya di posisi keempat. Kota Bogor perlu melakukan upaya yang lebih signifikan untuk meningkatkan HLS agar bisa bersaing dengan kota-kota lain di sekitarnya yang memiliki capaian lebih tinggi.

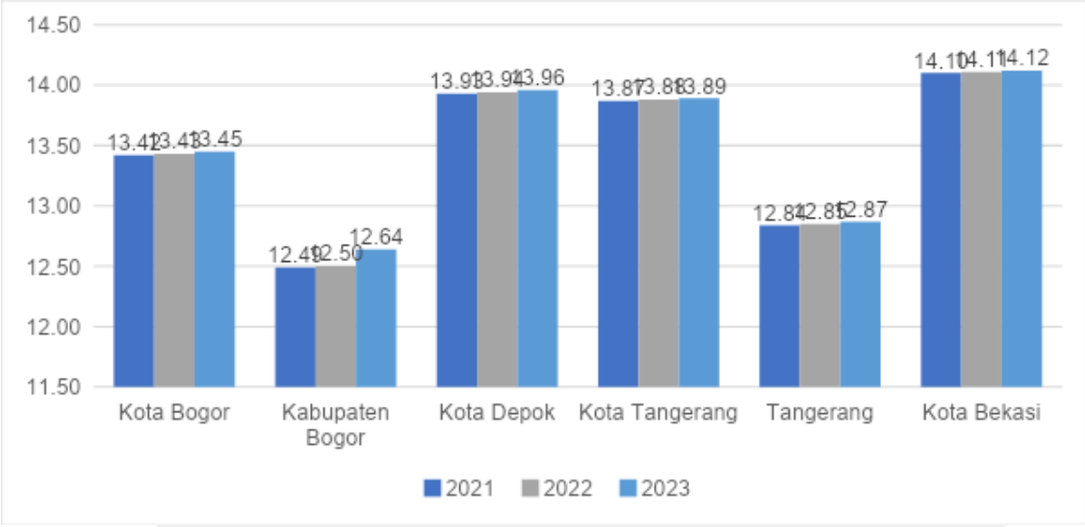

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.34. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023

3. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian (mortalitas) pada masa tertentu yang cenderung tidak berubah terlalu dinamis di masa mendatang. Menurut BPS (2023), UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi UHH maka semakin baik kesempatan hidup di kota tersebut. UHH menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Capaian UHH Kota Bogor tahun 2023 sebesar 75,52 tahun dengan peningkatan 0,31 tahun dibandingkan capaian tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan wilayah lain, maka UHH Kota Bogor menempati posisi kedua setelah Kota Bekasi (75,86 tahun).

Peningkatan UHH di Kota Bogor sebesar 0,31 tahun menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan dalam kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Kota Bekasi, menunjukkan bahwa meskipun Kota Bogor memiliki pencapaian yang baik, Kota Bekasi masih unggul dengan selisih kecil sebesar 0,34 tahun. Kota Bogor menempati posisi kedua dalam hal UHH menunjukkan bahwa Kota Bogor berada di atas rata-rata dalam hal kualitas hidup jika dibandingkan dengan banyak wilayah lainnya, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan

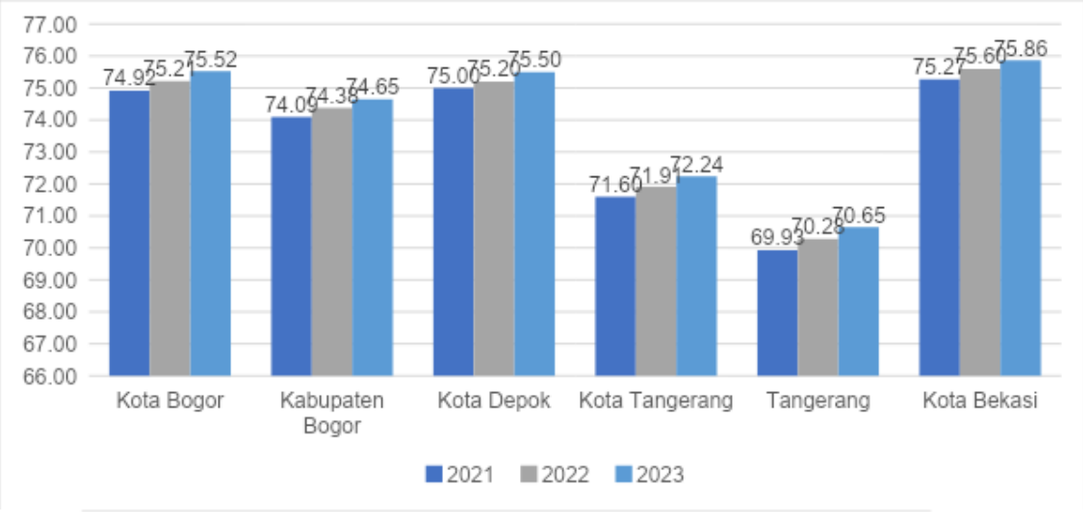

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.35. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023

2.2.1.5. Pengangguran

Pengangguran telah lama menjadi permasalahan ekonomi di level pusat sampai level daerah. Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Berdasarkan teori klasik, masalah pengangguran dapat diatasi dengan market clearing, penyesuaian harga dan upah di pasar bebas, hingga kondisi full employment tercapai. Akan tetapi, pada kenyataannya upah dan harga cenderung lambat dalam melakukan penyesuaian akibat adanya guncangan ekonomi. Oleh karena itu, seringkali kondisi full employment tidak dapat tercapai.

Teori lainnya, yaitu teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran dapat diatasi melalui peningkatan permintaan agregat. Dimana untuk meningkatkan permintaan agregat, maka perlu didorong kinerja sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan output. Dengan demikian, tenaga kerja akan lebih banyak diserap dan pengangguran menurun. Hal ini juga didukung dengan konsep Hukum Okun, dimana terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Gambar 2.36 menunjukkan klasterisasi hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor serta Kabupaten/ kota lainnya di tahun 2023. Terlihat bahwa, Kota Bogor memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Bahkan jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya, tingkat pengangguran Kota Bogor merupakan yang tertinggi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bogor untuk semakin serius dalam menetapkan kebijakan yang pro pada penciptaan lapangan kerja, kemudahaan berusaha agar penurunan tingkat pengangguran dapat terus dilakukan.

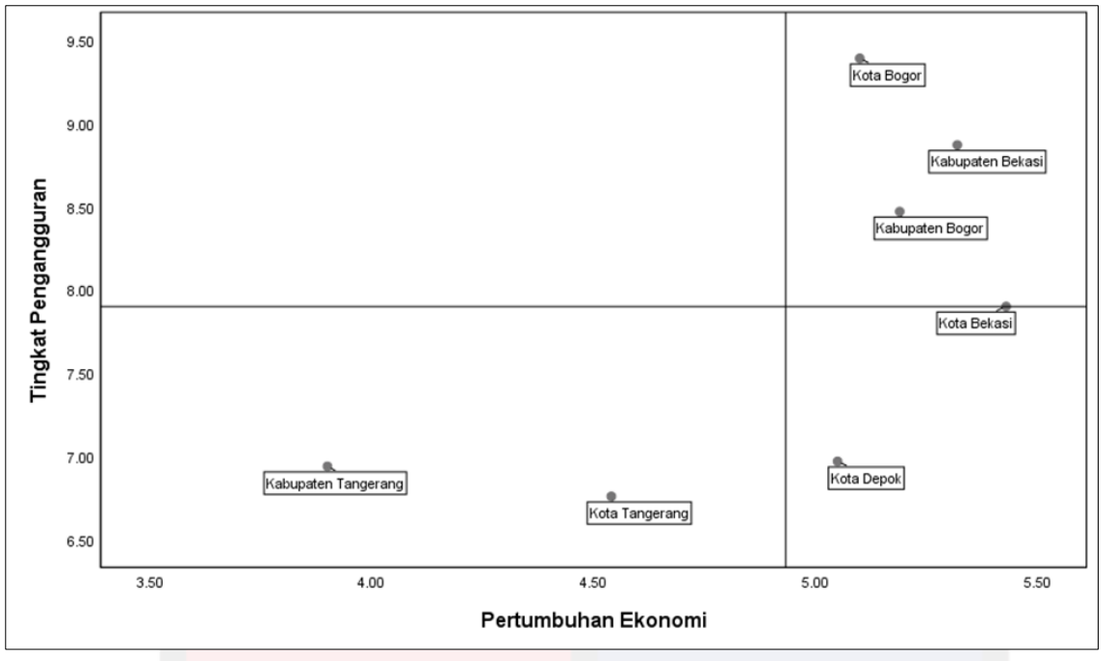

Sumber: BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.36. Klassen Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja pada suatu daerah/ wilayah tertentu. Dengan kata lain, TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya suplai tenaga kerja. Berdasarkan **Sumber:** BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 2.37, perkembangan TPT Kota Bogor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2023. Hal ini menunjukkan kondisi yang relatif baik, dimana tahun 2010 TPT Kota Bogor sebesar 17,02 persen menjadi hanya sebesar 9,39 persen pada tahun 2023. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menurunkan tingkat pengangguran diantara penduduk pada usia angkatan kerja.

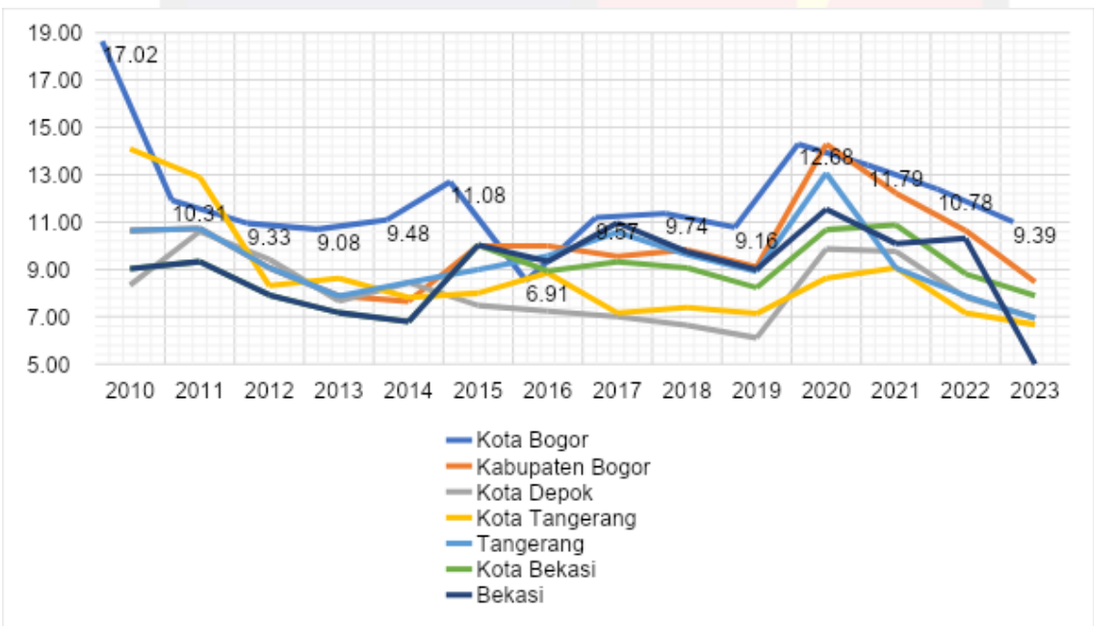

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 2.37. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2010-2023

Jika dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten lain di sekitarnya, tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor menduduki posisi terakhir atau memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi diantara wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih perlu memperhatikan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran di wilayahnya. Posisi persentase tingkat pengangguran terbuka terendah dimiliki oleh Kota Tangerang (6,67 persen); Kabupaten Tangerang (6,94 persen); Kota Depok (6,97 persen); Kota Bekasi (7,90 persen); Kabupaten Bogor (8,47 persen); dan Kota Bogor (9,39 persen).

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi Masyarakat dari perspektif sosial budaya. Indikator-indikator yang disajikan dalam sub bab Kesejahteraan Sosial Budaya yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2.2.2.1. Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Kesehatan Masyarakat dimana pada IKS terdapat 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka Kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan akan meningkat. Nilai IKS dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8; Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS berada diantara 0,5 - 0,8; dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5 sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.38.

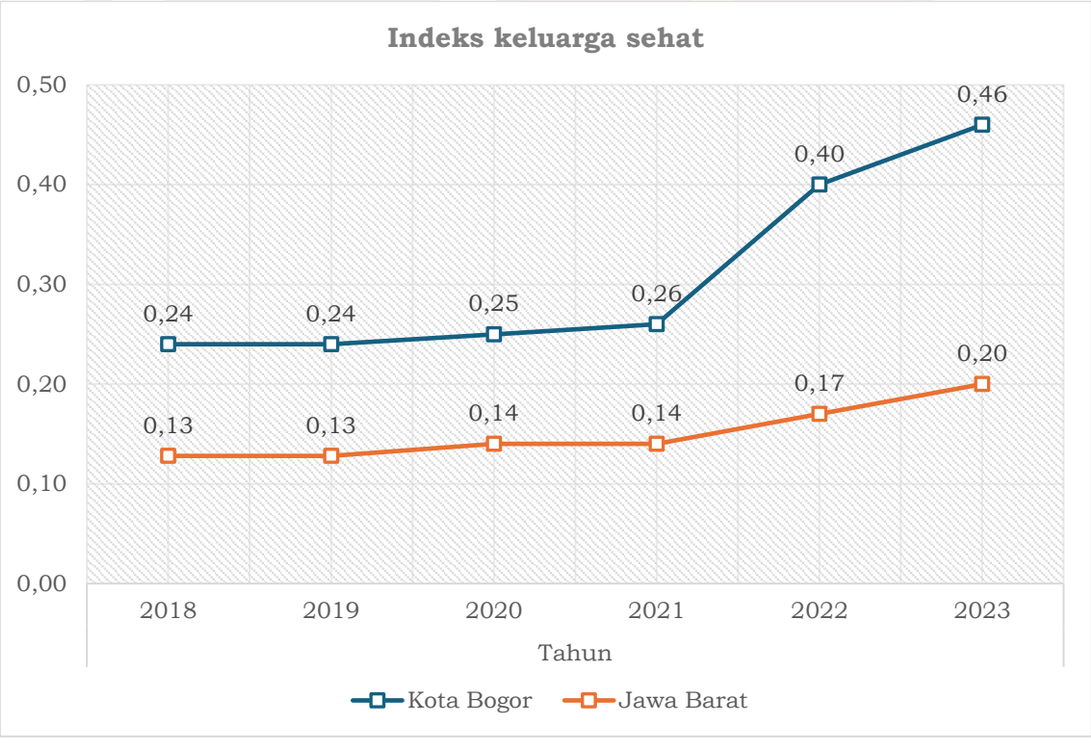

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2023

Gambar 2.38. Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2023

Nilai IKS Kota Bogor dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 terlihat terus mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan di Jawa Barat. IKS Kota Bogor tahun 2018 sebesar 0,24, terus meningkat menjadi 0,46 tahun 2023. Sementara di Jawa Barat dari 0,13 pada tahun 2018 menjadi 0,20 di tahun 2023. Nilai IKS ini meningkat namun jika dikelompokkan ke dalam kategori IKS maka kondisi rata-rata kesehatan keluarga di Kota Bogor berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam penyediaan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Kota Bogor. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan nilai IKS Provinsi Jawa Barat, maka nilai IKS Kota Bogor masih lebih tinggi.

Pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) didukung oleh 3 (tiga) program prioritas diantaranya yaitu:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan indikator yang meliputi jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan dan masa nifas. Menurut definisi WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

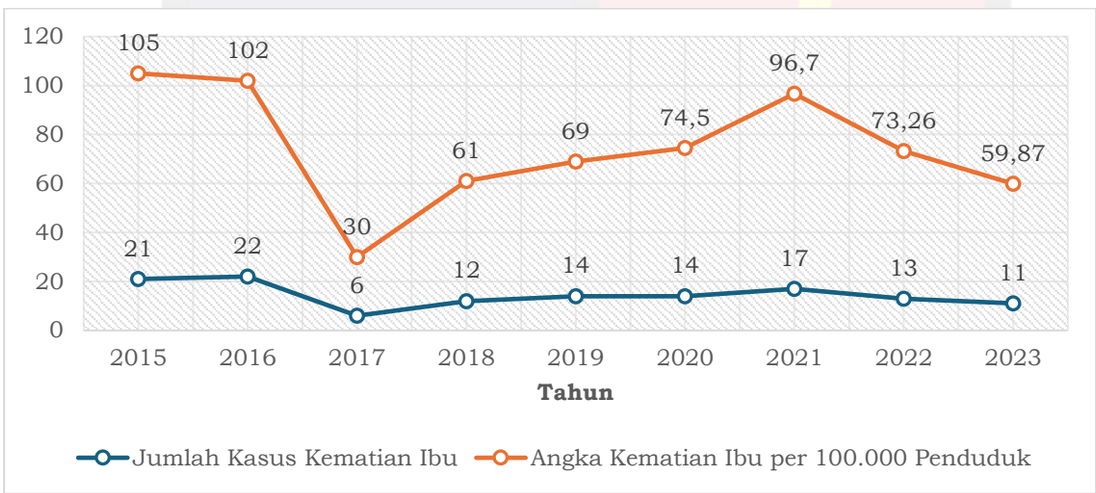

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.39. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2015-2023

Berdasarkan **Gambar 2.39** di atas, terlihat bahwa angka kematian ibu di Kota Bogor masih berfluktuasi. Pada tahun 2023, AKI di Kota Bogor mencapai 11

kasus atau 59,87 per 100.000 penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 dan lebih rendah dibandingkan dengan AKI di level nasional sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Berikut ini adalah gambaran perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bogor (2023), kematian ibu di Kota Bogor disebabkan oleh perdarahan sebesar 55%, gangguan hipertensi sebesar 18%, infeksi sebesar 18% dan lainnya 9%.

2. Insidensi HIV/AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi/sindrom yang timbul karena menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. *Human Immunodeficiency Virus* (atau disingkat HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berhubungan dengan aktivitas penemuan baik melalui survei maupun VCT yang dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan (LP) Paledang kelas II Kota Bogor dan LSM.

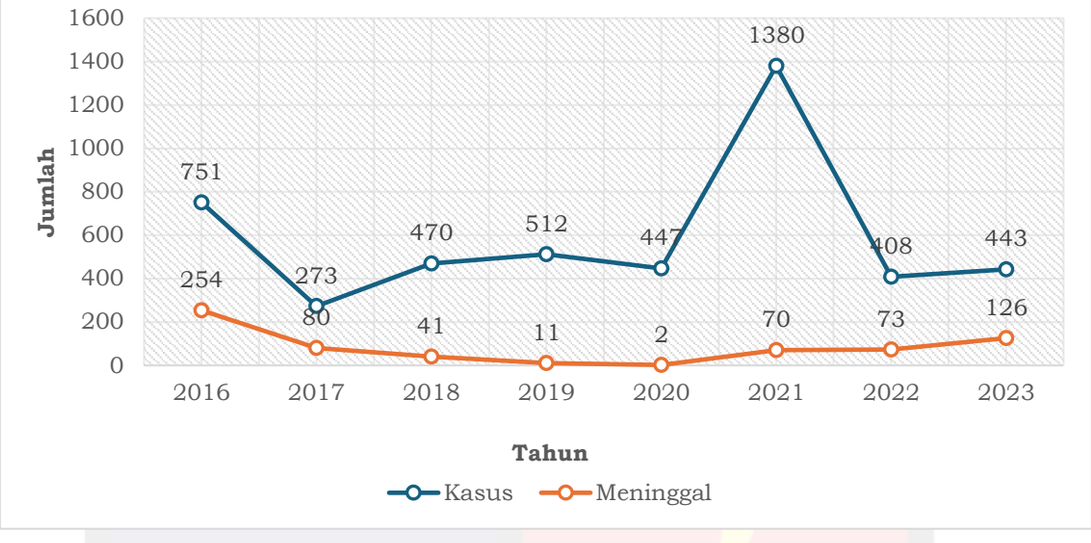

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.40. Perkembangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor Tahun 2016-2023

Berdasarkan **Gambar 2.40** di atas, pada tahun 2023 ditemukan jumlah kasus baru HIV positif sebanyak 443 kasus meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 408 kasus dengan proporsi jenis kelamin Laki-laki (83,1%) lebih tinggi dibanding Perempuan (16,9%). Kasus positif HIV tertinggi terdapat pada kelompok umur 25 hingga 49 tahun sebesar 289 kasus (65,4%), sedangkan kasus terendah sebesar 1,8% atau 8 kasus pada kelompok umur 5 - 14 tahun. Dari 443 kasus baru yang ditemukan, 341 kasus mendapatkan pengobatan ARV (76,98%). Sedangkan untuk angka kematian karena HIV/AIDS pada tahun 2023 di Kota Bogor berjumlah 126 orang yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022.

3. Insidensi TBC

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang bagian paru-paru manusia, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Berikut angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan *treatment success rate* dari penderita TBC di Kota Bogor. Berikut rincian Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kota Bogor Tahun 2019-2023.

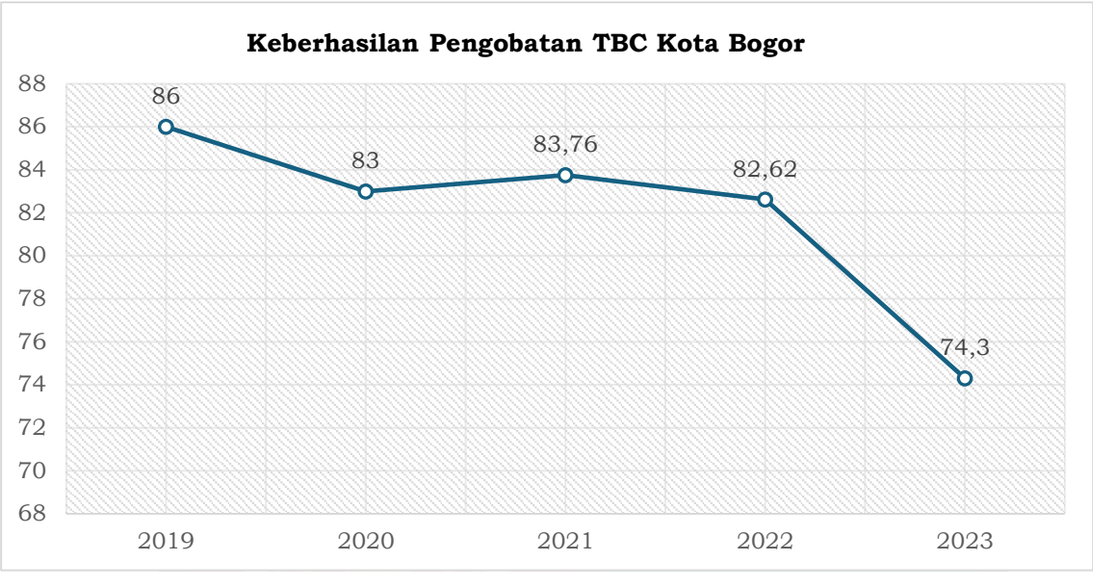

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2024

Gambar 2.41. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar di atas, terjadi penurunan angka keberhasilan penangan TBC di Kota Bogor tetapi hal ini tidak menjadi indikasi buruk, karena jumlah kasus TBC yang terjadi di Kota Bogor terus menurun diantaranya: 2020 (3.833 kasus); 2021 (1.191 kasus); dan 2022 (1.074 kasus).

4. Kesehatan Mental (*mental health*)

Kesehatan mental merupakan bagian penting dari definisi kesehatan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Tercatat bahwa terdapat sebanyak 1.141 kasus kecemasan (*anxiety*) di Kota Bogor sepanjang Januari hingga september pada tahun 2020 atau meningkat 116 persen dari tahun 2019 yakni sebanyak 528 kasus. Dinas Kesehatan Kota Bogor juga menemukan sebanyak 216 kasus depresi atau meningkat sebanyak 24 persen dibandingkan tahun 2019 yakni sebanyak 164 kasus. Kesehatan mental tidak hanya menjadi isu di Kota Bogor namun juga di tingkat Nasional. Di Indonesia menunjukkan sebanyak 6,1% penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental di tahun 2023.

2.2.2.2. Indeks Ketahanan Keluarga

Berdasarkan Hasil analisis terhadap data Survei Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor Tahun 2020 menunjukkan bahwa indeks ketahanan keluarga

Kota Bogor adalah 85,2. Berdasarkan kategori BPS (2016), indeks ketahanan keluarga Kota Bogor termasuk kategori sangat tinggi (≥75), demikian juga untuk semua wilayah kecamatan. Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan maka empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Timur, Tanah Sareal, Bogor Barat dan Bogor Utara memiliki nilai Indeks Ketahanan Keluarga di atas rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan masih dibawah rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor. Indeks ketahanan keluarga tertinggi adalah Kecamatan Bogor Timur (87,4) dan terendah adalah Kecamatan Bogor Tengah (83,6).

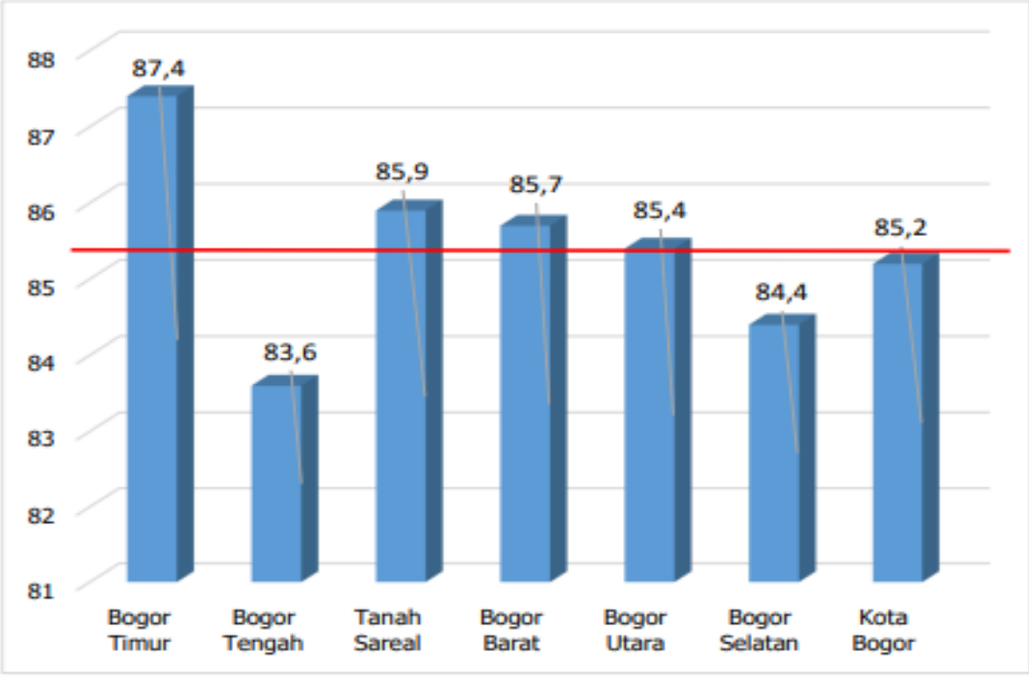

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Gambar 2.42. Rata-Rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak

Tingginya kasus-kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang digagas oleh Kemen PPPA bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima (5) klaster mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. Capaian IPA Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 66,5, capaian IPHA sebesar 63,88 dan capaian IPKA sebesar 81,50. Adapun capaian empat klaster pembentuk IPA pada tahun 2022 yaitu Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) sebesar 46,76; Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)

sebesar 89,30;), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) sebesar 76,49; Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) sebesar 39,69; dan Klaster V (Perlindungan Khusus) sebesar 39,69.

Tabel 2.21. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kota Bekasi	47,68	92,32	86,03	59,7	81,39	73,98	71,76	86,02
2	Kota Depok	50,84	89,98	84,72	62,53	75,15	73	72,28	82,24
3	Kota Cimahi	49,91	90,65	82,4	46,19	83,1	71,35	67,93	85,98
4	Kota Cirebon	51,4	89,72	85,46	39,63	76,46	69,36	67,26	78,88
5	Bekasi	48,6	87,2	77,39	44,27	82,91	69,04	65,03	85,89
6	Kota Bandung	48,27	91,54	77,05	46,3	72,44	67,93	66,55	77,54
7	Kota Banjar	49,25	80,76	80,49	32,16	87,4	67,12	61,33	88,06
8	**Kota Bogor**	**46,76**	**89,3**	**76,49**	**39,69**	**75,63**	**66,55**	**63,88**	**81,5**
9	Kota Tasikmalaya	50,63	85,51	76,25	32,34	81,32	66,38	62,08	83,85
10	**Provinsi Jawa Barat**	**50,8**	**81,75**	**76,68**	**36,13**	**78,59**	**65,74**	**62,04**	**80,13**
11	Kuningan	56,16	78,34	78,84	30,1	80,14	65,71	61,6	83,3
12	Kota Sukabumi	48	86,95	74,12	41,13	73,77	65,7	63,33	77,18
13	Cirebon	49,73	84,07	80,21	29,78	79,12	65,64	61,77	78,45
14	Sumedang	54,92	76,59	80,8	33,49	76,53	65,24	62,01	79,69
15	Ciamis	56,61	74,31	79,58	29,06	80,73	64,98	60,51	81,54
16	Pangandaran	56,73	69,16	82,24	34,96	77,36	64,68	61,07	80,45
17	Indramayu	53,78	74,1	79,22	31,31	80,01	64,56	60,15	80,31
18	Karawang	49,35	79,75	80,96	31,51	76,27	64,44	61,03	79,76
19	Bandung	48,24	78,42	77,4	31	78,26	63,63	59,43	78,28
20	Subang	53,19	73,54	78,58	30,14	77,13	63,36	59,43	79,45
21	Purwakarta	50,39	73,47	73,17	33,5	78,3	62,67	58,21	79,7
22	Majalengka	53,05	73,69	76,7	28,12	74,56	62,09	58,53	77,44
23	Bogor	4,33	81,45	71,22	31,64	75,38	61,88	57,99	77,57
24	Bandung Barat	48,44	71,17	70,71	28,69	78,35	60,48	55,39	80,42
25	Tasikmalaya	53,01	71	70,6	30,14	72,5	60,31	56,83	72,89
26	Sukabumi	47,72	66,76	73,82	27,79	78,45	59,78	54,47	78,21
27	Garut	45,84	69,31	66,05	26,59	72,72	57,09	52,63	74,28
28	Cianjur	52,18	61,56	69,71	26,56	71,69	57,08	52,95	70,64

Sumber: Kemen PPA dan BPS (2022)

2.2.2.4. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan penghargaan yang diberikan kepada kota/kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan program-program pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban anak. Predikat Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bogor menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun antara 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, Kota Bogor mendapatkan predikat "Madya," yang menandakan bahwa kota tersebut telah memenuhi sejumlah kriteria dalam mendukung hak anak. Namun, pada tahun 2020, tidak ada penilaian yang dilakukan, sehingga tidak ada predikat yang diberikan. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Kota Bogor kembali meraih predikat "Madya," menandakan upaya pemkot dalam meningkatkan kualitas lingkungan bagi anak-anak mulai membuahkan hasil.

Memasuki tahun 2022, Kota Bogor menunjukkan kemajuan yang lebih baik dengan status "Nindya," yang mencerminkan prestasi yang lebih tinggi dalam

upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Keberlanjutan upaya ini terbukti pada tahun 2023, ketika Kota Bogor kembali mendapatkan predikat "Nindya." Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah kota dalam menyediakan lingkungan yang ramah anak, serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kota Bogor dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Tabel 2.22. Predikat Kota Layak Anak di Kota Bogor tahun 2019-2023

Tahun	Predikat Kota Layak Anak
2019	Madya
2020	Tidak ada Penilaian Kota Layak Anak
2021	Madya
2022	Nindya
2023	Nindya

Sumber: DP3A Kota Bogor

2.2.2.5. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dideteksi melalui dua indikator yaitu indeks ketimpangan dan indeks pembangunan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Indeks ini memiliki sistem skor dengan rentang skala 0 hingga 1, dengan skor 0 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar dan skor 1 menunjukkan tercapainya kesetaraan.

Berdasarkan **Gambar 2.43**, IKG di Kota Bogor mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2022 meningkat dari 0,375 (2021) menjadi 0,434 di tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,343 pada tahun 2023. Penurunan ketimpangan gender pada tahun 2023 menunjukkan ketimpangan gender di Kota Bogor semakin membaik. Padahal, sementara IKG di Provinsi Jawa Barat menunjukkan relatif stagnan 0,490 di tahun 2022 menjadi 0,482, menurun sedikit dibanding tahun 2022.

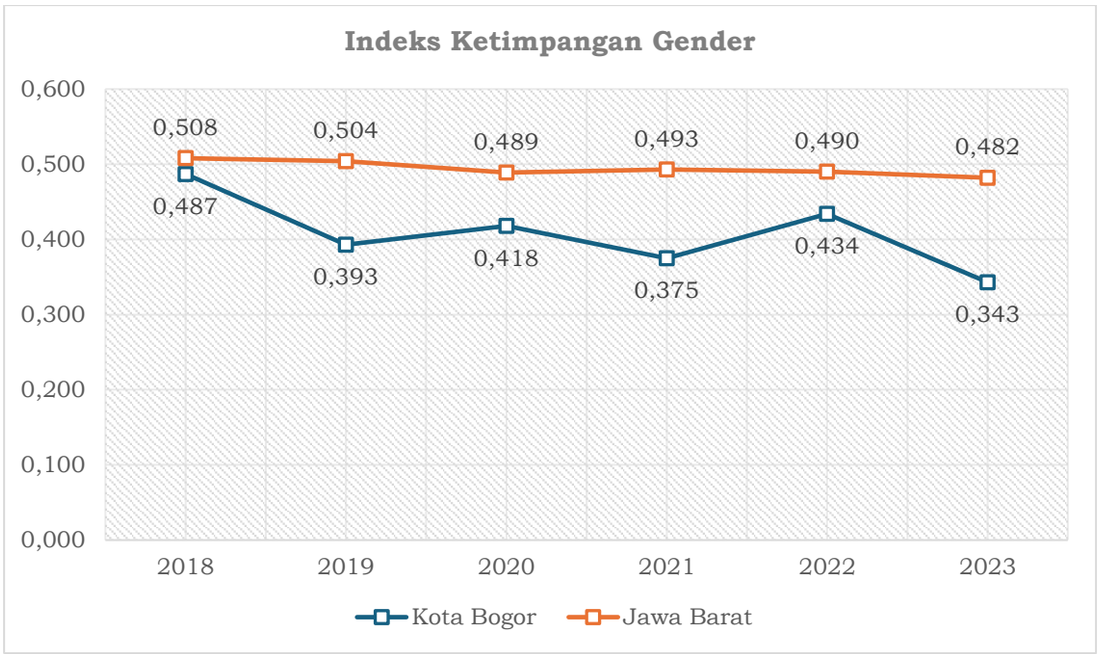

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Gambar 2.43. Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2018-2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG dapat mengukur tingkat ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Interpretasi IPG yaitu semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara Pembangunan antara Perempuan dengan laki-laki. Namun jika semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan Pembangunan antara Perempuan dan laki-laki.

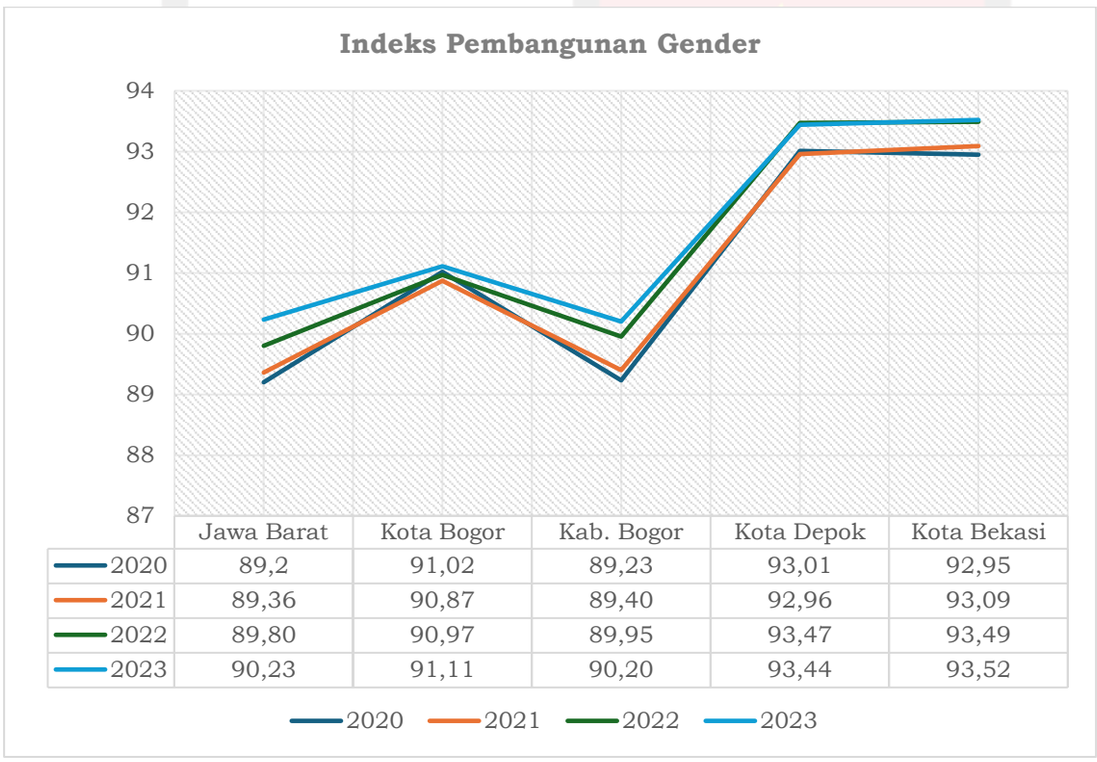

	Jawa Barat	Kota Bogor	Kab. Bogor	Kota Depok	Kota Bekasi
2020	89,2	91,02	89,23	93,01	92,95
2021	89,36	90,87	89,40	92,96	93,09
2022	89,80	90,97	89,95	93,47	93,49
2023	90,23	91,11	90,20	93,44	93,52

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Tahun 2020-2023

Berdasarkan **Gambar 2.44** capaian IPG Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 91,11 meningkat dari tahun 2022 yang mencapai 90,97. Nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Jawa Barat yang mencapai 90,23 pada tahun 2023. Artinya pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik di Kota Bogor. Namun demikian apabila dibandingkan dengan nilai IPG di Kota Depok dan Bekasi, maka nilai IPG Kota Bogor masih relatif lebih rendah. Kota Bekasi dan Depok pada tahun 2023 masing-masing mencapai 93,52 dan 93,44.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. IDG dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan, khususnya bidang ekonomi dan politik. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan, maka akan tercipta keadilan dan kesetaraan gender yang lebih baik. Selain itu, IDG juga dapat membantu dalam memantau kemajuan yang dicapai dalam mencapai kesetaraan gender.

Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah (IDG<50); sedang (50≤IDG<60); tinggi (60≤IDG≤80); sangat tinggi (IDG>80). Pada tahun 2023, nilai IDG Kota Bogor sebesar 71,13 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, peran perempuan di Kota Bogor dalam kehidupan ekonomi dan politik cukup besar. Sementara nilai IDG Provinsi Jawa Barat relatif lebih tinggi yakni 71,74. Kota Depok menunjukkan indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yakni mencapai 76,82 pada tahun 2023.

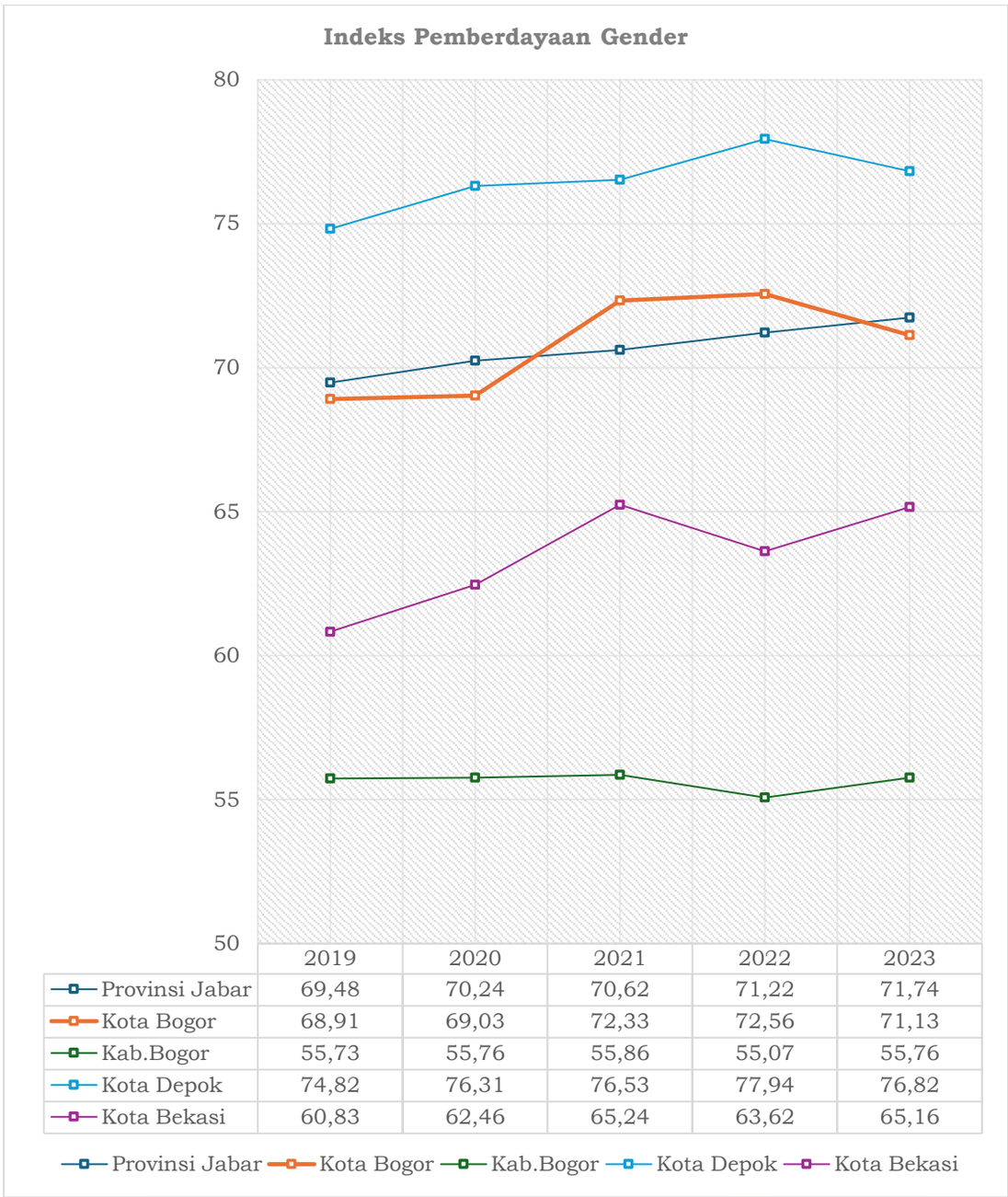

	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jabar	69,48	70,24	70,62	71,22	71,74
Kota Bogor	68,91	69,03	72,33	72,56	71,13
Kab.Bogor	55,73	55,76	55,86	55,07	55,76
Kota Depok	74,82	76,31	76,53	77,94	76,82
Kota Bekasi	60,83	62,46	65,24	63,62	65,16

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.45. Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor dan Sekitarnya dan Indonesia, Tahun 2019-2023

2.2.2.6. Rumah Tangga Layak

Pada **Gambar 2.46** disajikan akses hunian yang layak dan terjangkau di wilayah Kota Bogor dengan beberapa wilayah pembanding, terlihat bahwa Kota Bogor di tahun 2023 memiliki persentase yang rendah sebesar 49,3 persen dibandingkan Rata-rata Provinsi Jawa Barat (54,17%), Kota Depok (50,79%), Kota Bekasi (61,61%) dan Kabupaten Bekasi. (65,49). Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Sementara Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam kerangka kerja monitoring SDGs menggunakan lima kriteria yaitu (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses sanitasi layak; dan (5) keamanan bermukim.

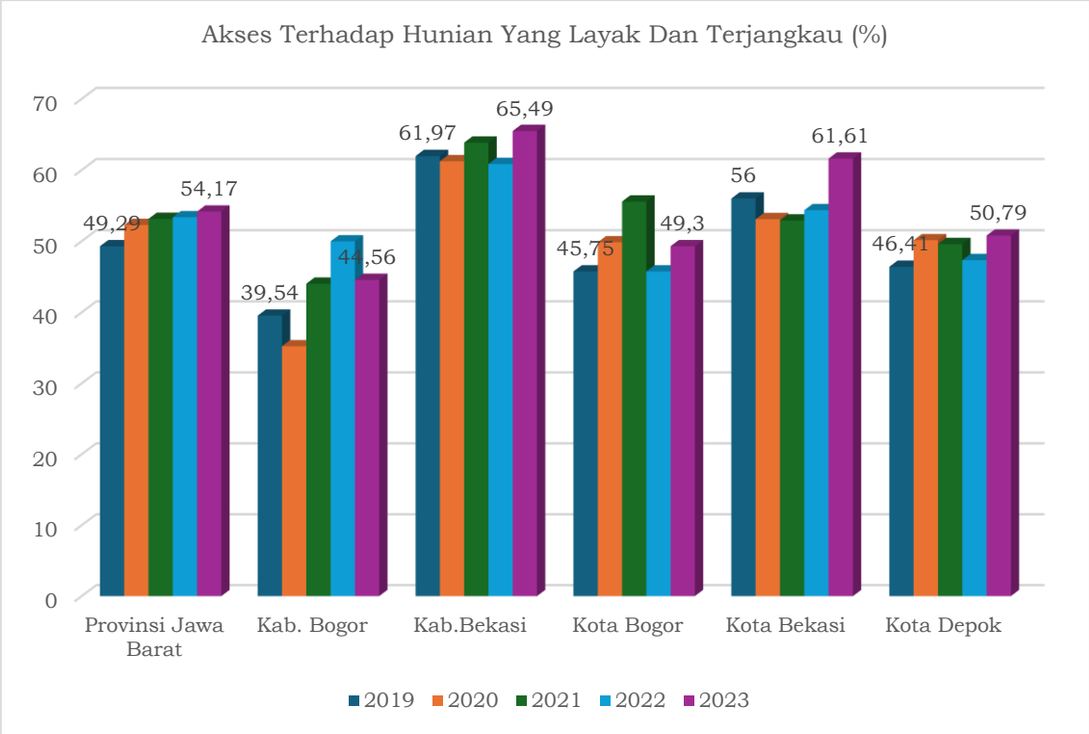

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Gambar 2.46. Rumah Tangga yang Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kota Bogor dengan Wilayah Pembanding, Tahun 2019-2023 (Persen)

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Terdapat empat (4) indikator yang dapat menggambarkan aspek daya saing daerah, yakni: (1) daya saing ekonomi daerah yang menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan, (2) daya saing SDM yang menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, (3) daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah yang menjelaskan kondisi fasilitas/ infrastruktur di daerah, dan (4) daya saing iklim daerah yang menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan investasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah. Indeks ekonomi hijau Indonesia memberikan hasil adanya peningkatan dan sinergitas antar pilar, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6,1 hingga 6,5 persen per tahun hingga tahun 2050, serta laju penurunan intensitas emisi hingga 68 persen di tahun 2045. Adanya perhitungan indeks ekonomi hijau ini baiknya dapat diadopsi oleh seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Kota Bogor walaupun belum memiliki perhitungan secara detail tentang indeks ekonomi hijau, namun jika dilihat dari indikator yang ada, maka terdapat peningkatan dari setiap pilar.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah didekati dengan beberapa indikator seperti indeks ekonomi inklusif, indeks ekonomi hijau dan jumlah UMKM yang

mencerminkan jumlah wirausaha di suatu daerah. Indeks ekonomi inklusif Kota Bogor dan kota pembanding lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah, sedangkan indeks ekonomi hijau hanya mengukur pada tingkat nasional. Indeks Ekonomi Hijau Indonesia menghitung skor Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan melihat perbandingan kemajuan dari indikator terhadap nilai minimal dan target maksimal, yang ingin dicapai.

Terdapat 15 indikator dalam *Green Economy Index* (GEI) Indonesia, yang mencakup tiga pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi terdiri atas tiga indikator, antara lain, intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial mencakup empat indikator, yakni tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, pilar lingkungan meliputi lima indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

Pada konteks Kota Bogor, pengukuran ekonomi hijau hanya difokuskan pada pilar ekonomi. Gambaran indikator pada pilar ekonomi kota Bogor adalah sebagai berikut:

a. Intensitas emisi

Intensitas emisi adalah besaran emisi yang dilepaskan per satuan aktivitas tertentu. Intensitas emisi juga dapat diukur dengan membandingkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dengan emisi kotor. Rekapitulasi emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) di Kota Bogor dari tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam total emisi, yang tercatat mencapai 2.871.481,97 Ton pada tahun 2022, meningkat dari 2.328.520,19 ton di tahun 2013. Kategori energi mendominasi sumber emisi terakumulasi dengan kontribusi terbesar, menunjukkan pola peningkatan penggunaan energi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013 hingga 2022, emisi dari sektor energi bertumbuh dari 2.110.180,92 Ton menjadi 2.634.695,51 ton. Hal ini mencerminkan kecenderungan meningkatnya kebutuhan energi seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Sektor pengolahan dan transportasi menunjukkan dinamika yang cukup berbeda, terutama sektor industri pengolahan gas alam yang mengalami penurunan emisi dari 1.130.472,86 Ton pada tahun 2013 menjadi 691.690,53 Ton pada tahun 2022. Penurunan ini mungkin mencerminkan perubahan kebijakan atau peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sementara sektor transportasi mengalami fluktuasi dengan peningkatan emisi dari 80.943,11 Ton pada tahun 2013 menjadi 407.763,65 Ton pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi signifikan terhadap emisi total, terutama pada tahun-tahun setelah 2018, ketika terjadi peningkatan substantial.

Pengelolaan limbah juga menjadi faktor penting dalam analisis ini, dengan total emisi dari limbah padat dan pengolahan limbah cair yang menunjukkan sedikit peningkatan tetapi tetap stabil dalam rentang waktu tersebut. Sementara itu, net emisi, yang menghitung total emisi dikurangi kemampuan serapan karbon dari berbagai kategori, juga menunjukan peningkatan dari 1.950.750,97 Ton

menjadi 2.493.335,29 ton. Ini menandakan perlunya strategi pengurangan emisi yang lebih efektif serta peningkatan dalam praktek serapan karbon untuk mencapai keberlanjutan lingkungan di Kota Bogor. Dengan demikian, analisis emisi dan serapan GRK di Kota Bogor harus dipandang sebagai indikator penting dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim di masa depan. Berikut adalah data emisi dan serapan GRK di Kota Bogor berdasarkan Kategori pada tahun 2013-2022.

Tabel 2.23. Emisi dan Serapan GRK Kota Bogor Berdasarkan Kategori Tahun 2013-2022

Kategori	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENERGI	**2.110.180,92**	**2.149.794,82**	**2.059.429,55**	**2.153.186,65**	**2.193.730,02**	**2.254.624,31**	**2.472.669,78**	**2.224.809,18**	**2.467.400,25**	**2.634.695,51**
Industri Pengolahan (gas alam)	1.130.472,86	1.087.043,32	942.887,88	903.591,20	821.761,22	736.885,33	732.662,90	641.030,36	699.665,32	691.690,53
Transportasi	80.943,11	94.955,00	104.857,25	219.752,23	325.348,46	332.500,65	307.447,71	239.123,42	341.607,10	407.763,65
Lainnya (LPG rumah tangga)	53.235,04	53.414,55	110.811,89	119.103,73	123.321,78	126.235,77	131.609,01	135.061,20	125.686,55	133.974,03
Listrik	845.529,92	914.381,95	900.872,52	910.739,49	923.298,56	1.059.002,56	1.300.950,15	1.209.594,20	1.300.441,28	1.401.267,30
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN	**9.779,52**	**13.313,57**	**10.792,64**	**11.045,60**	**11.610,09**	**12.560,21**	**12.521,92**	**12.401,73**	**12.320,93**	**12.317,26**
Ternak	8.593,25	8.705,28	8.487,32	8.574,18	8.989,86	9.894,76	9.914,45	10.005,10	10.083,83	10.224,78
Lahan	-377769,22	-377769,22	-377769,22	-377769,22	-364.420,93	-363342,48	-377769	-377769,22	-378065,8	-378146,68
Sumber Emisi Agregat	1.186,27	4.608,29	2.305,32	2.471,42	2.665,45	2.665,45	2.607,47	2.396,63	2.237,10	2.092,48
Pembakaran Biomassa	36,7	83,85	33,2	33,45	47,40	47,4	26,12	25,95	0	0
Aplikasi Urea	73,18	71,55	51,68	58,92	76,94	76,94	91,07	104,04	48,2	34,94
N2O langsung dari pengolahan tanah	2.061,50	2.061,50	1.218,30	1.351,60	1.261,70	1.261,70	1.275,10	1.284,60	1.402,30	1.308,61
N2O tak langsung dari pengolahan tanah	102,3	102,3	55,8	62,3	62,00	62	57,18	65,32	30,27	21,94
Pengolahan Sawah	1.076,39	2.289,09	946,34	965,15	1.217,41	1.217,41	1.158,00	916,72	756,33	727
PENGELOLAAN LIMBAH	**208.559,75**	**209.702,27**	**214.674,63**	**219.535,83**	**236.818,09**	**236.818,09**	**234.756,93**	**231.015,07**	**221.603,28**	**224.016,40**
Limbah Padat (TPA)	150.294,47	151.448,79	153.168,69	155.242,75	173.392,53	173.392,53	175.444,53	173.080,52	172.158,45	174.597,37
Pengolahan Biologi	996,14	1.013,55	1.030,58	1.047,03	1.078,57	1.078,57	526,11	585,4	558,09	466,92
Insinerasi dan Pembakaran terbuka	9.769,20	8.910,00	9.059,40	9.154,80	9.485,80	9.485,80	8.983,90	9.120,80	0	0
Pengolahan Limbah Cair	47.499,94	48.329,93	51.415,96	54.091,25	52.861,19	52.861,19	49.802,39	48.228,35	48.886,75	49.404,90
Total Emisi (ton)	2.328.520,19	2.372.810,66	2.284.896,82	2.383.768,08	2.504.002,61	2.504.002,61	2.719.948,63	2.468.225,97	2.701.324,46	2.871.481,97
Net Emisi (ton)	1.950.750,97	1.995.041,44	1.907.127,60	2.005.998,86	2.140.660,13	2.140.660,13	2.342.179,63	2.090.456,75	2.323.258,66	2.493.335,29

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RAD GRK Kota Bogor,2023

b. Intensitas energi

Intensitas energi adalah rasio antara penggunaan energi dengan output yang dihasilkan. Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan energi. Intensitas energi di Kota Bogor dalam periode 2013 hingga 2022 menunjukkan pola perubahan yang mencerminkan dinamika konsumsi energi seiring dengan perkembangan sosial ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa kategori energi secara keseluruhan mengalami fluktuasi dalam penggunaan energi, di mana pada tahun 2013, konsumsi energi mencapai 2.110.180,92 Ton, dan angka ini cenderung meningkat hingga mencapai 2.634.695,51 Ton pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan pertumbuhan kebutuhan energi yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi dan aktivitas kegiatan ekonomi yang berlangsung di kota tersebut.

Sektor energi listrik menampilkan tren yang signifikan, dengan konsumsi yang meningkat dari 845.529,92 ton di tahun 2013 menjadi 1.401.267,30 Ton pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan pergeseran dalam struktur konsumsi energi, di mana pemanfaatan listrik dalam berbagai sektor termasuk sektor industri, komersial, dan perumahan menjadi semakin dominan. Peningkatan ini juga dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses listrik dan perbaikan infrastruktur energi di Kota Bogor, yang semakin memperkuat ketergantungan pada sumber energi yang bersih dan efisien.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan gas alam menunjukkan tren penurunan yang mencolok, di mana emisi dari kategori ini berkurang dari 1.130.472,86 Ton pada tahun 2013 menjadi 691.690,53 Ton pada tahun 2022. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak positif dari peningkatan efisiensi energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Aspek ini menunjukkan adanya potensi dan kebutuhan untuk mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan energi, khususnya dalam sektor industri, untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem. Secara keseluruhan, analisis intensitas energi di Kota Bogor selama periode ini menciptakan wawasan penting untuk perumusan kebijakan yang mendukung pengelolaan energi secara berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari aktivitas konsumsi energi. Berikut adalah data intensitas energi di Kota Bogor Tahun 2013-2022.

Tabel 2.24. Intensitas Energi Kota Bogor Tahun 2013-2022

Kategori	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Energi	2.110.180,92	2.149.794,82	2.059.429,55	2.153.186,65	2.193.730,02	2.254.624,31	2.472.669,78	2.224.809,18	2.467.400,25	2.634.695,51
Industri Pengolahan (gas alam)	1.130.472,86	1.087.043,32	942.887,88	903.591,20	821.761,22	736.885,33	732.662,90	641.030,36	699.665,32	691.690,53
Transportasi	80.943,11	94.955,00	104.857,25	219.752,23	325.348,46	332.500,65	307.447,71	239.123,42	341.607,10	407.763,65
Lainnya (LPG rumah tangga)	53.235,04	53.414,55	110.811,89	119.103,73	123.321,78	126.235,77	131.609,01	135.061,20	125.686,55	133.974,03
Listrik	845.529,92	914.381,95	900.872,52	910.739,49	923.298,56	1.059.002,56	1.300.950,15	1.209.594,20	1.300.441,28	1.401.267,30

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RAD GRK Kota Bogor,2023

c. PDRB per kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapatkan dari hasil membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduknya. PDRB sendiri adalah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 44,1 juta rupiah. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan PDRB per kapita mencapai 45,92 juta rupiah pada tahun 2021 dan 49,76 juta rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas ekonomi dan adanya upaya peningkatan aktivitas ekonomi di dalam kota.

Memasuki tahun 2023, PDRB per kapita Kota Bogor kembali meningkat menjadi 53,24 juta rupiah, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini menandakan pemulihan dan penguatan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi selama pandemi. Dengan pertumbuhan yang konsisten, Kota Bogor menunjukkan potensi ekonomi yang terus berlanjut dan dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pengembangan infrastruktur di masa mendatang. Berikut adalah PDRB Per Kapita Kota Bogor tahun 2020-2023.

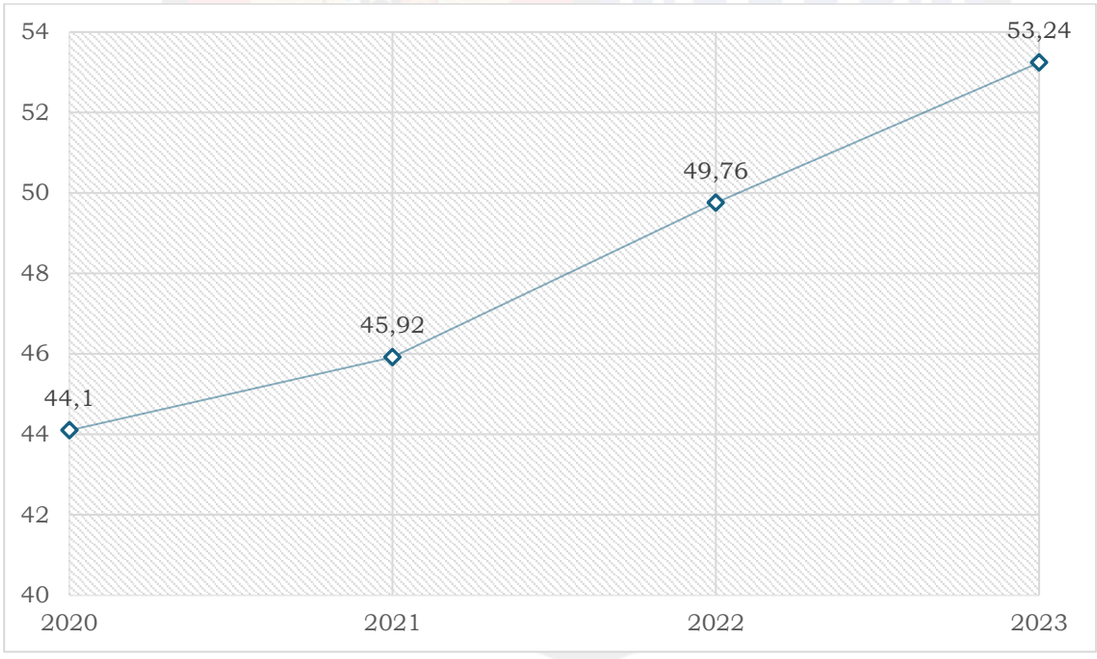

Sumber: BPS Kota Bogor, 2024

Gambar 2.47. PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2020-2023

2.3.1.1. Lapangan Usaha Unggul dan Potensial

Nilai PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku pada 2023 mencapai 57.003,76 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 4.089,16 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022, yang mencapai 52.914,60 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pada seluruh kategori usaha dan juga faktor inflasi harga.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki nilai terbesar dalam PDRB tahun 2023 di Kota Bogor. Sektor unggulan kedua terbesar yaitu industri pengolahan. Sektor lapangan usaha potensial adalah sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi serta jasa keuangan dan asuransi.

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, pada PDRB atas dasar harga konstan juga memiliki nilai terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan. Kota Bogor dikenal sebagai kota jasa, sehingga tidak heran jika sektor perdagangan menjadi yang paling besar nilainya dalam PDRB baik PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dipengaruhi oleh peningkatan nilai PDRB di seluruh kategori PDRB. Nilai PDRB Kota Bogor 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 37,06 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1,80 triliun rupiah dari 35,26 triliun rupiah pada 2022.

Tabel 2.25. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	241.575,71	253951,95	269.243,76	280.254,86	2.937.00,7	305.493,20	317.861,00	337.588,40	373.750,86	386.770
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	5.393.074,47	5.998.600,6	6.538.497,43	7.064.824,32	7.840.380,2	8.370.600,10	8.298.889,61	9.256.855,50	10.045.536,00	10.658.480
Pengadaan Listrik dan Gas	1.960.761,41	1.925.046,85	1.970.649,85	1.949.764,98	1.917.407,3	1.925.050,10	1.840.664,00	2.072.324,40	2.365.294,98	2.381.770
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.821,37	31.953,59	36.037,1	40.954,36	46.135,5	50.770,90	57.628,30	64.440,20	70.046,50	84.330
Konstruksi	3.280.102,82	3.647.802,34	3.937.651,67	4.381.382,34	4.937.626,3	5.615.544,00	5.306.735,70	5.429.667,40	5.769.602,94	6.652.460
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.476.574,46	7.088.063,38	7.643.843,99	8.168.746,73	8.697.451,7	9.388.980,40	8.919.697,20	9.287.189,20	10.109.475,60	10.961.340
Transportasi dan Pergudangan	3.151.053,52	3.776.163,74	4.210.072,72	4.638.128,31	5.252.716,1	5.985.705,32	5.743.779,00	5.741.132,20	6.538.056,65	7.624.700
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.294.452,08	1.421.383,4	1.586.007,85	1.749.963,32	2.008.792,5	2.199.470,40	2.269.202,60	2.351.864,80	2.706.181,20	2.797.200
Informasi dan Komunikasi	1.284.855,52	1.521.416,21	1.710.356,52	1.967.765,18	2.063.111,8	2.157.434,00	2.947.044,50	2.907.944,90	3.004.885,92	3.203.250
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.975.033,74	2.145.643,26	2.475.163,85	2.748.406,76	3.075.475,1	3.346.217,51	3.325.974,30	3.486.572,51	3.727.399,41	3.823.050
Real Estat	653.307,73	716.268,71	782.754,92	846.549,44	919.284,1	1.010.806,60	984.525,60	1.129.313,10	1.263.588,43	1.289.360
Jasa Perusahaan	593.665,21	675.244,69	746.138,04	799.337,68	890.568,6	1.046.281,00	935.529,42	939.524,90	1.105.062,70	1.118.700
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	880.975,97	955.878,4	1.019.031,66	1.080.886,89	1.174.496,7	1.239.619,00	1.202.430,41	1.270.505,30	1.241.162,13	1.275.170
Jasa Pendidikan	798.190,62	907.452,16	997.674,59	1.072.300,65	1.266.508,7	1.435.963,50	1.619.798,50	1.721.282,70	1.908.968,76	1.965.060
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	318.087,37	374.124,9	425.778,6	490.454,37	558.376,94	641.408,90	663.087,20	781.427,10	863.525,64	897.620
Jasa Lainnya	816.656,4	925.906,78	1.051.908,75	1.198.753,54	1.318.988,5	1.478.412,20	1.479.016,80	1.548.012,00	1.822.060,72	1.884.480
Jumlah	**29.147.188,4**	**32.364.901,00**	**35.400.811,30**	**38.478.473,7**	**42.261.020,7**	**46.197.757,10**	**45.911.864,10**	**48.325.644,60**	**52.914.598,40**	**57.003.760**

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Tabel 2.26. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar=2010) Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	220.689,88	225.137,69	230.145,03	233.033,72	238.277,20	239.771,40	245.164,10	258.713,80	267.405,73	275.950
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Industri Pengolahan	4.564.569,82	4.843.786,77	5.109.363,13	5.351.637,97	5.737.431,30	6.065.723,10	6.015.391,84	6.283.630,90	6.602.998,62	6.864.580
Pengadaan Listrik dan Gas	1.025.049,18	898.231,83	903.130,58	831.948,74	808.244,40	771.588,30	725.407,20	813.132,22	893.010,19	869.600
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.940,03	27.361,22	28.518,60	29.203,05	30.703,90	32.725,60	36.051,00	39.770,90	42.443,50	47.060
Konstruksi	2.696.289,52	2.848.754,78	3.011.149,21	3.237.681,86	3.493.782,50	3.829.210,20	3.604.700,20	3.659.258,00	3.672.500,88	4.094.470
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.367.108,86	5.650.090,63	5.972.855,53	6.306.048,04	6.494.415,50	6.744.719,90	6.210.448,40	6.379.299,80	6.722.524,91	6.973.020
Transportasi dan Pergudangan	2.637.721,22	2.893.357,49	3.133.215,64	3.366.504,80	3.622.762,60	3.933.690,10	3.850.155,50	3.961.652,00	4.352.348,40	4.744.100
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.059.403,07	1.119.753,25	1.209.844,24	1.304.027,34	1.422.342,40	1.503.114,80	1.530.332,90	1.550.682,62	1.734.174,05	1.825.380
Informasi dan Komunikasi	1.270.614,21	1.506.674,81	1.692.958,81	1.919.815,29	2.095.540,80	2.253.816,00	3.047.811,20	3.182.270,70	3.344.926,07	3.563.350
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.606.764,74	1.676.548,86	1.847.070,71	1.951.351,83	2.083.321,70	2.187.588,80	2.214.258,50	2.245.471,00	2.223.681,42	2.246.720
Real Estat	525.977,17	555.976,80	601.018,99	639.844,81	684.186,50	736.540,90	719.168,81	821.058,20	877.629,11	896.550
Jasa Perusahaan	477.357,37	516.834,82	560.209,59	590.797,04	632.731,10	691.035,50	617.578,20	598.727,40	666.389,86	673.100
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	643.234,24	660.730,22	675.927,01	683.605,54	697.658,80	726.854,50	721.132,20	746.399,20	730.750,28	745.610
Jasa Pendidikan	656.814,29	718.858,00	772.597,46	826.602,02	887.107,40	967.826,80	1.041.697,50	1.096.423,00	1.195.603,40	1.241.040
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279.823,32	313.143,35	341.269,24	381.436,63	434.265,60	479.727,41	485.700,00	540.877,00	595.552,79	606.700
Jasa Lainnya	777.953,83	843.363,78	912.977,72	1.001.432,26	1.050.802,90	1.131.796,10	1.097.744,80	1.195.107,70	1.336.930,80	1.388.120
Jumlah	**23.835.310,80**	**25.298.604,30**	**27.002.251,50**	**28.654.971,00**	**30.413.574,60**	**32.295.729,40**	**32.162.742,40**	**33.372.476,40**	**35.258.870,00**	**37.055.360**

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Implikasi bagi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah yaitu kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu, penting juga untuk mengetahui sektor dalam wilayah yang paling berkontribusi pada pembangunan yang terlihat dari distribusi PDRB. Distribusi PDRB menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor yang memiliki peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Gambar 2.48 menunjukkan klasterisasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi PDRB 17 sektor lapangan usaha Kota Bogor di tahun 2023. Sebagai salah satu kota jasa, sektor transportasi dan pergudangan menjadi satu-satunya sektor dengan laju pertumbuhan di atas rata-rata sektor lainnya dan distribusi (kontribusi) yang tinggi juga (kuadran kanan atas). Sektor ini merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan di Kota Bogor, dimana pada beberapa masa yang akan datang sektor tersebut masih/ akan berpotensi untuk menjadi sektor unggulan Kota Bogor (Panjaitan *et al*, 2023). Sektor lainnya seperti penyediaan akomodasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, pengadaan listrik, pengadaan air, real estate, dan jasa lainnya juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun *share* masih rendah.

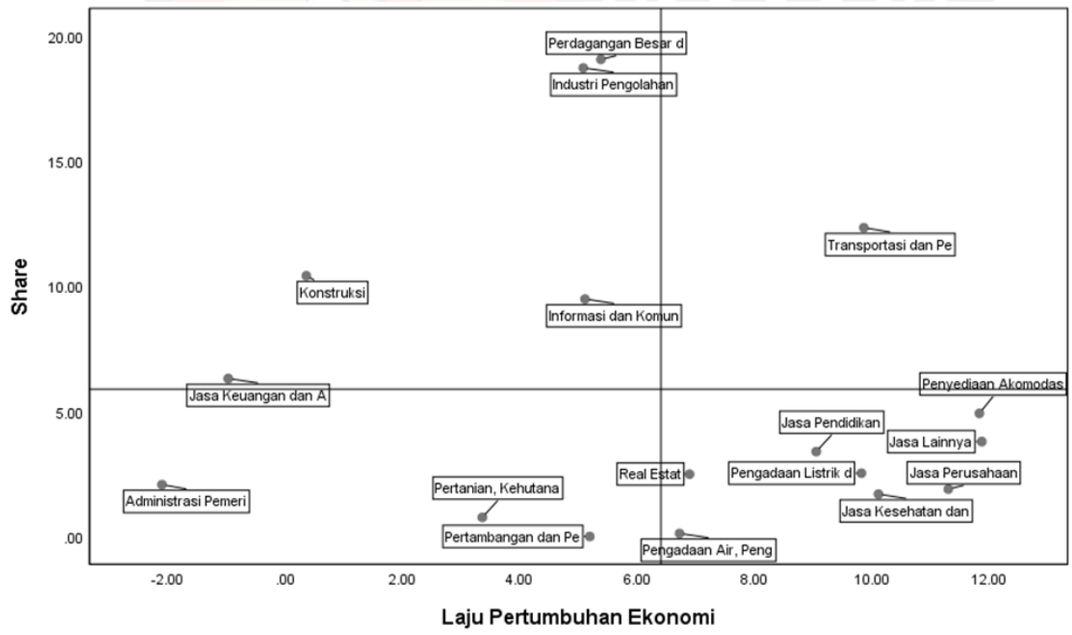

Sumber: BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.48. Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB 17 Sektor Lapangan Usaha Kota Bogor, tahun 2023

Perkembangan PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku dapat dibandingkan dengan wilayah kota/ kabupaten di sekitarnya (Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Selama periode 2010-2023, PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 42.261,02 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 57.003,76 miliar pada tahun 2023. Meskipun perkembangan PDRB Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan, namun nilai ini masih rendah dibandingkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di beberapa wilayah. Nilai PDRB Kota Bogor

relatif paling kecil diantara wilayah pembandingnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang tertinggi pada tahun 2023 secara berurutan yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dengan nilai masing-masing, Rp 393.822,98 miliar, Rp 289.106,15 miliar, Rp 118.963,02 miliar, dan Rp 87.568,62 miliar. Perkembangan PDRB atas harga berlaku kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.49.

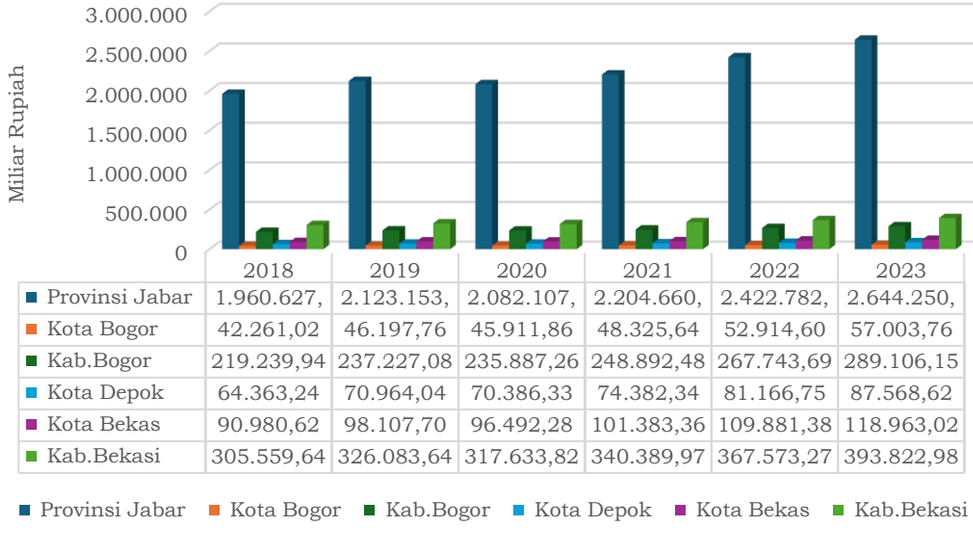

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jabar	1.960.627,	2.123.153,	2.082.107,	2.204.660,	2.422.782,	2.644.250,
Kota Bogor	42.261,02	46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60	57.003,76
Kab.Bogor	219.239,94	237.227,08	235.887,26	248.892,48	267.743,69	289.106,15
Kota Depok	64.363,24	70.964,04	70.386,33	74.382,34	81.166,75	87.568,62
Kota Bekas	90.980,62	98.107,70	96.492,28	101.383,36	109.881,38	118.963,02
Kab.Bekasi	305.559,64	326.083,64	317.633,82	340.389,97	367.573,27	393.822,98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.49. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2018-2023

Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang cenderung mengalami peningkatan dari mulai tahun 2010 hingga 2023, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2018, PDRB atas dasar harga konstan Kota Bogor adalah sebesar Rp 30.413,57 miliar, meningkat menjadi Rp 37.055,36 miliar pada tahun 2023, atau mengalami peningkatan sebesar Rp 6.641,79 miliar atau meningkat sebesar 21,9 persen. Di tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari Rp 32.295,72 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 32.083,51 miliar tahun 2020. Meskipun perkembangan PDRB Kota Bogor atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan, namun nilai ini masih rendah dibandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan di beberapa wilayah terutama Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok, masing-masing sebesar Rp 77.241,79 miliar dan Rp 55.221,82 miliar pada tahun 2023. Perkembangan PDRB atas harga konstan Kota Bogor dan wilayah pembandingnya selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.50.

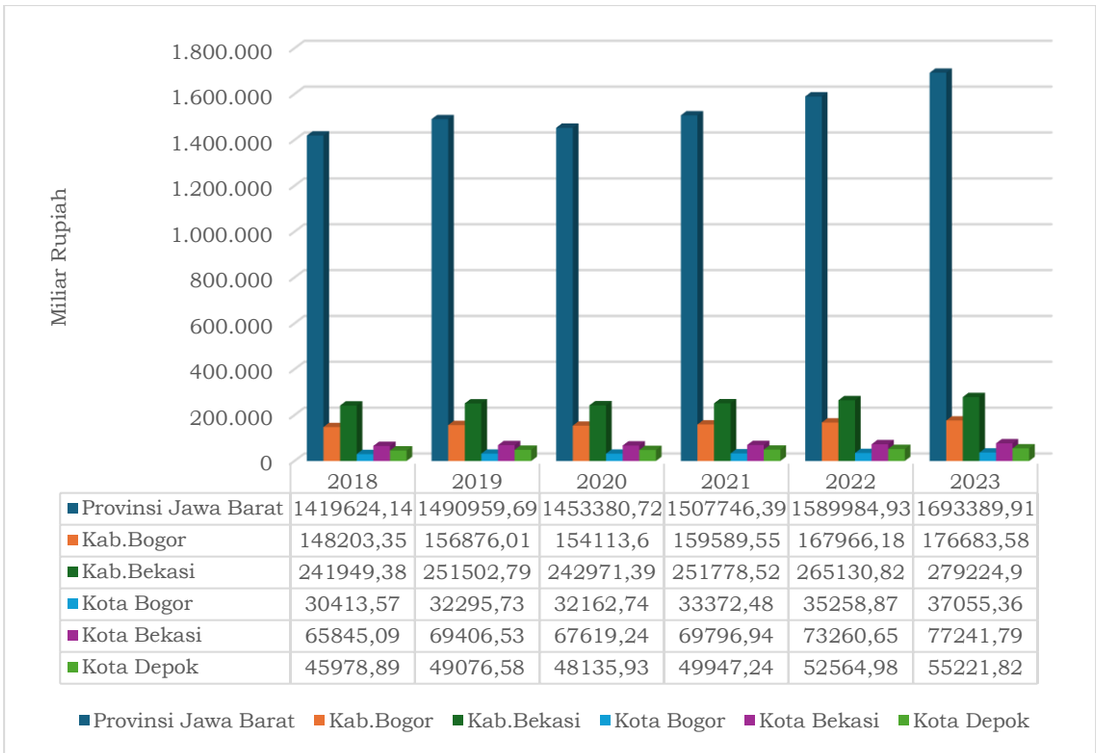

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	1419624,14	1490959,69	1453380,72	1507746,39	1589984,93	1693389,91
Kab.Bogor	148203,35	156876,01	154113,6	159589,55	167966,18	176683,58
Kab.Bekasi	241949,38	251502,79	242971,39	251778,52	265130,82	279224,9
Kota Bogor	30413,57	32295,73	32162,74	33372,48	35258,87	37055,36
Kota Bekasi	65845,09	69406,53	67619,24	69796,94	73260,65	77241,79
Kota Depok	45978,89	49076,58	48135,93	49947,24	52564,98	55221,82

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.50. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2010 Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2018-2023

Salah satu sektor PDRB potensial Kota Bogor adalah Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman. Akomodasi makanan dan minuman menyumbang sebesar 4,9 persen pada PDRB Kota Bogor tahun 2023. Rasio penyediaan makanan dan minuman terhadap PDRB Kota Bogor dari tahun ke tahun cenderung stabil pada kisaran 4 hingga 5 persen. Pada tahun 2023 rasio penyediaan makanan dan minuman sebesar 4,91 persen lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Akomodasi makanan dan minuman menjadi salah satu sumber potensial untuk pemasukan pendapatan daerah karena banyaknya usaha makanan dan minuman yang tumbuh di Kota Bogor. Hal ini perlu terus didorong oleh pemerintah daerah agar menjadi salah satu sektor unggulan pendapatan daerah Kota Bogor.

Tabel 2.27. Rasio Akomodasi Makanan dan Minuman Tahun 2014-2023 (persen)

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	4,44	4,39	4,48	4,55	4,75	4,76	4,94	4,87	5,11	4,91
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	4,44	4,43	4,48	4,55	4,68	4,65	4,76	4,65	4,92	4,93

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan oleh UNDP (2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya.

Rumusan ekonomi kreatif menurut UNDP (2008) Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek. Departemen Perdagangan

(2008) mengidentifikasi setidaknya 14 sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu: (1) Periklanan, (2) Arsitektur, (3) Pasar barang seni, (4) Kerajinan (handicraft), (5) Desain, (6) Fashion, (7) Film, video, dan, fotografi, (8) Permainan interaktif, (9) Musik, (10) Seni pertunjukan, (11) Penerbitan dan percetakan, (12) Layanan komputer dan piranti lunak, (13) Radio dan televisi, dan (14) Riset dan pengembangan,

Ada tiga sub sektor unggulan bagi Kota Bogor yang bisa dipilih, yakni Kuliner, Kriya dan Fashion. Perkembangan industri kreatif khususnya bidang fashion, dan kuliner di Kota Bogor tidak dapat dipungkiri akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif diharapkan dapat memfasilitasi pelaku industri kreatif, industri kecil dan UMKM baik dalam pengembangan kapasitas sumberdaya pelaku, maupun mengembangkan fasilitas pendukung seperti permodalan, sentra industri kecil menengah dan lain-lain. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah terancamnya keberlangsungan usaha pelaku industri akibat produk impor.

Berdasarkan hasil analisis LQ terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis serta diharapkan tetap menjadi basis ekonomi Kota Bogor di masa yang akan datang. Sektor basis terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor jasa seperti sektor perusahaan, keuangan, transportasi, kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ terbesar dengan nilai sebesar 6,89, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi sektor penggerak utama Kota Bogor dengan daya saing yang tinggi di wilayah Jawa Barat. Hal ini sebagai akibat dari adanya pengelolaan fasilitas listrik dan jaringan gas alam di Kota Bogor. Keberadaan pelayanan dan pengelolaan energi listrik Kota Bogor menghasilkan daya listrik sebesar 2.147.779 VA dan tersambung kepada pelanggan bukan hanya penduduk Kota Bogor namun juga wilayah lain di Jawa Barat dengan jumlah sebesar 1.149.126 pelanggan, salah satu yang terbesar di Jawa Barat. Di samping itu, Kota Bogor juga adalah kota yang telah memiliki jaringan gas alam sehingga Kota Bogor menjadi pemasok untuk 22.690 pelanggan dengan total volume gas yang tersalurkan sebesar 358.120.226 m^3 (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, 2019).

Di sisi lain, masih terdapat 3 sektor non basis di Kota Bogor antara lain, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; dan sektor Industri Pengolahan. Khusus bagi sektor Industri Pengolahan, Kota Bogor memang tidak memiliki keunggulan karena sektor tersebut disumbang oleh pemerintahan kabupaten/kota lain di wilayah Jawa Barat. Sektor tersebut merupakan sektor usaha yang membutuhkan lahan yang relatif lebih luas sehingga cenderung tidak berkembang di wilayah perkotaan. Terkhusus untuk Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Barat memang memiliki kawasan-kawasan yang merupakan sentra industri. Dari total 145 kawasan industri berdasarkan data Kementerian perindustrian, tercatat terdapat 50 kawasan industri terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah terbanyak dan terbesar di Kabupaten Bekasi (21 lokasi) dan Kabupaten Karawang (18 lokasi).

Tabel 2.28. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kota Bogor

Sektor Lapangan Usaha	Nilai LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0,11	NonBasis
Pertambangan & Penggalian	-	NonBasis
Industri Pengolahan	0,44	NonBasis
Pengadaan Listrik dan Gas	6,89	Basis
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1,31	Basis
Konstruksi	1,31	Basis
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,32	Basis
Transportasi & Pergudangan	2,6	Basis
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,82	Basis
Informasi & Komunikasi	1,55	Basis
Jasa Keuangan & Asuransi	2,59	Basis
Real Estate	1,72	Basis
Jasa Perusahaan	4,39	Basis
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	1,28	Basis
Jasa Pendidikan	1,17	Basis
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2	Basis
Jasa Lainnya	1,7	Basis

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, 2023

Berdasarkan profil pertumbuhan sektor ekonomi Kota Bogor dan hasil dari analisis LQ, terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial di Kota Bogor terlihat masih adanya 4 sektor yang berada di kuadran IV yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Sektor-sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Selain itu terdapat 4 sektor yang berada di kuadran III yaitu sektor Industri Pengolahan; sektor Transportasi & Pergudangan; sektor Informasi & Komunikasi; serta sektor Jasa Perusahaan yang memiliki pertumbuhan baik namun daya saingnya kurang baik. Diperlukan strategi agar sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan agar lebih berdaya saing.

Tabel 2.29. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor

Sektor Lap Usaha	PP	PPW	Kuadran
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-1,046	-1,04	IV
Pertambangan & Penggalian	-5,812	-	IV
Industri Pengolahan	1,549	-1,92	III
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,036	4,4	II
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	-2,86	4,12	II
Konstruksi	-5,915	0,82	II
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-1,238	1,16	II
Transportasi & Pergudangan	5,637	-1,23	III
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,829	0,55	I
Informasi & Komunikasi	0,637	-0,98	III
Jasa Keuangan & Asuransi	-6,149	-0,28	IV
Real Estate	-1,102	2,54	II
Jasa Perusahaan	7,282	-1,44	III
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	-7,242	-0,31	IV
Jasa Pendidikan	-2,662	6,25	II
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,365	4,29	I
Jasa Lainnya	4,619	1,79	I

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, 2023

2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi penduduk suatu wilayah dan digunakan sebagai parameter makro dalam mengevaluasi pertumbuhan ekonomi rata-rata individu di suatu wilayah. Selain itu, PDRB per kapita juga menjadi komponen utama untuk menghitung indeks ketimpangan antarwilayah yaitu Indeks Williamson. Dengan demikian, tingginya keragaman PDRB per kapita antarwilayah secara tidak langsung menunjukkan adanya disparitas pendapatan antarwilayah. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang dihitung dengan membagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu.

PDRB Per kapita Kota Bogor dan wilayah pembandingnya dapat dilihat pada **Gambar 2.51**, dimana PDRB per kapita ini menunjukkan PDRB atas harga konstan per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2010, PDRB per kapita sebesar Rp 19.540.161, meningkat menjadi Rp 33.153.210 per orang pada tahun 2022. Selama 12 tahun terakhir PDRB per kapita Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2020, yang sempat turun menjadi Rp 28.469.910 per orang dari Rp 29.040.798 per orang di tahun 2019. Meskipun memiliki pertumbuhan PDRB per kapita yang cenderung meningkat. Namun pada tahun 2023 PDRB per kapita Kota Bogor berada pada posisi ketiga, setelah Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang dengan nilai PDRB per kapita secara berurutan masing-masing sebesar Rp 86.249.205, Rp 61.038.430, dan Kota Bogor sebesar Rp 34.607.922.

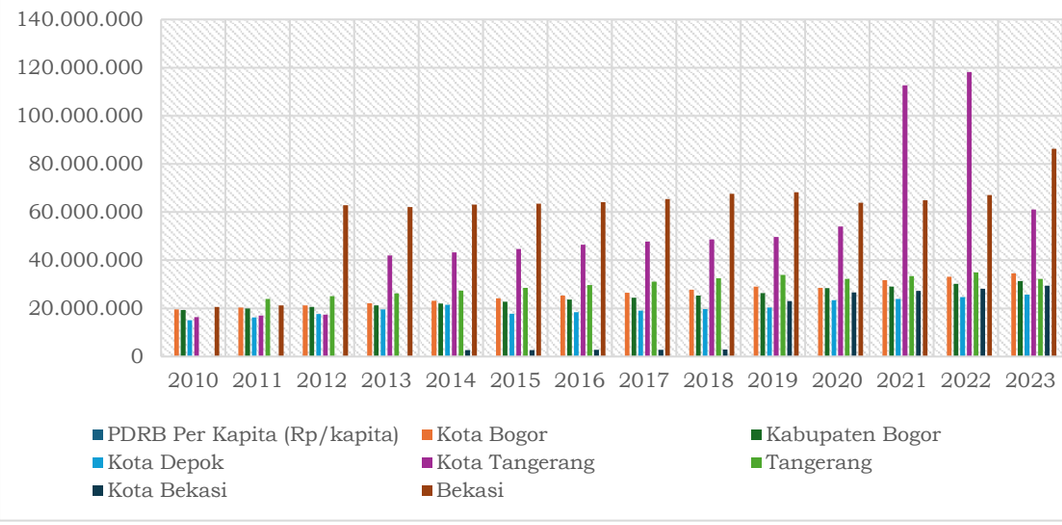

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten Tahun 2024

Gambar 2.51. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

Gambar 2.57 menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kota Bogor selama periode 2010 - 2023 mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2010 (Rp 19,60 juta) hingga tahun 2019 (Rp 38,53 juta). Ditemukan terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp 35,59 juta yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, setelah tahun

2020, PDRB per kapita Kota Bogor meningkat kembali dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 53,24 juta.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bogor secara tahunan menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode yang diobservasi. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2011 dengan 9,93 persen, diikuti oleh pertumbuhan signifikan lainnya pada tahun 2013 sebesar 10,17 persen. Setelah tahun 2013, pertumbuhan PDRB per kapita cenderung menurun dan mencapai angka pertumbuhan terendah pada tahun 2020 dengan -1,93 persen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, terjadi pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 45,92 persen, namun kemudian kembali turun menjadi 12,72 persen pada tahun 2022 dan 8,35 persen pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan tren positif dalam jangka panjang meskipun ada beberapa tahun dengan pertumbuhan negatif atau rendah. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sangat nyata, tetapi pemulihan pasca-pandemi terlihat jelas dari peningkatan signifikan dalam PDRB per kapita pada tahun-tahun berikutnya. Ketidakstabilan pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan keseluruhan dalam ekonomi lokal, ada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi fluktuasi tahunan dalam pertumbuhan ekonomi.

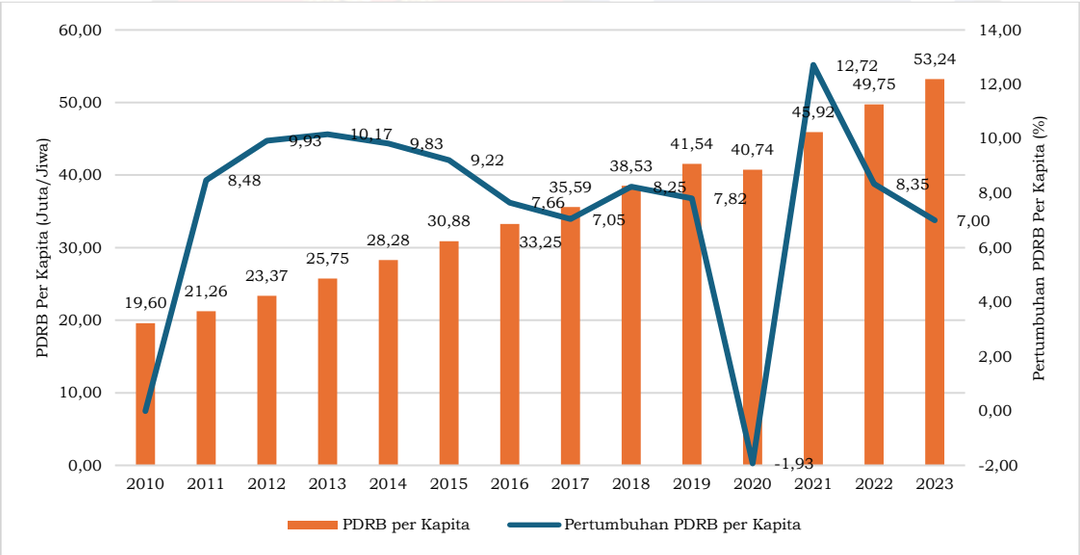

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.52. PDRB ADHB per Kapita Kota Bogor dan Pertumbuhan PDRB ADHB per Kapita Kota Bogor Tahun 2010-2023

2.3.1.3. Pengeluaran Per Kapita

Gambar 2.53 menunjukkan pengeluaran per kapita di Kota Bogor dan beberapa wilayah pembanding. Ditemukan tren pendapatan per kapita yang terus meningkat dari ketujuh daerah yang diamati. Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2023 tersebut, terlihat bahwa Kota Bandung secara konsisten menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi. Sementara itu, Kabupaten Bandung ditemukan menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita teredah pada kurun waktu tersebut.

Kota Bogor sendiri secara konsisten menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita yang selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata dari ketujuh daerah. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata pengeluaran per kapita Kota Bogor sebesar Rp11.087.000 dengan pengeluaran per kapita tertinggi dan terendah sebesar Rp12.656.000 (2023) dan Rp10.148.000 (2010). Jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, pengeluaran per kapita di Kota Bogor selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

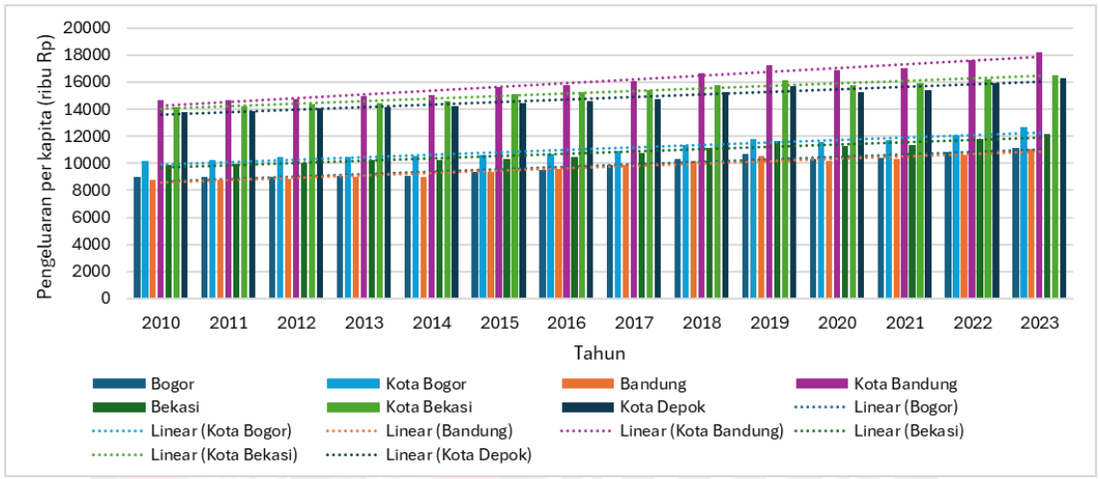

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.53. Pengeluaran per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

2.3.1.4. Investasi

Realisasi investasi di Kota Bogor cenderung berfluktuasi selama periode 2014-2023, namun memiliki kecenderungan selalu berada diatas target investasi kecuali pada tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan iklim investasi turun untuk semua sektor dan wilayah tidak terkecuali Kota Bogor, begitu pula pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, walaupun belum mencapai target yang diinginkan, namun realisasi investasi lebih tinggi dari tahun 2021. Artinya setelah pandemi covid iklim investasi di Kota Bogor semakin membaik.

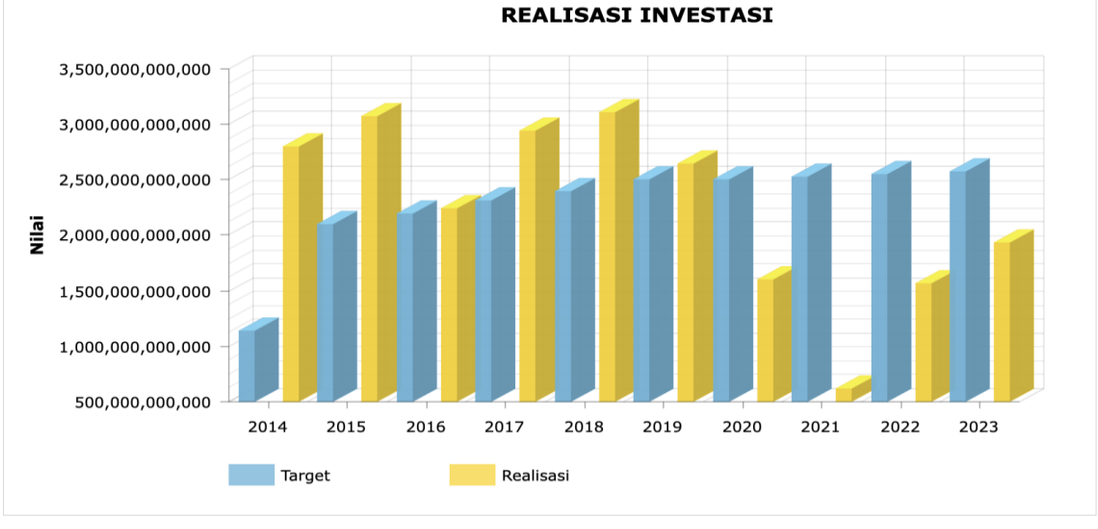

Sumber: DPMPTSP Kota Bogor, 2024

Gambar 2.54. Realisasi Investasi Kota Bogor Tahun 2014-2023

Secara kumulatif, investasi di Kota Bogor belum masuk pada daftar lima daerah dengan nilai investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023 realisasi investasi Kota Bogor mencapai Rp 1.934,97 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3.766 orang dan 2.890 proyek, sementara alokasi investasinya sebagian besar (88,28%) merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 11,72% merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi, penyerapan tenaga kerja dan jumlah proyek tahun 2023 ini relatif meningkat dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp 1.571 miliar, 2.283 orang dan 1.574 proyek. Sementara realisasi investasi di Kabupaten Bogor jauh relatif lebih besar yakni sebesar Rp 15.185,02 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebesar 29.977 orang dan 11.298 proyek, dengan alokasi sebesar 71,61% adalah PMDN dan 28,39% adalah PMA.

Berdasarkan Gambar 2.55 secara umum baik di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi alokasi investasi berupa PMDN relatif lebih besar dibandingkan PMA. Namun hal yang menarik adalah di Kabupaten Bekasi yang terjadi adalah yang sebaliknya, PMA relatif jauh besar dibandingkan PMDN yakni masing-masing sebesar 66,10% dan 33,90%.

Sumber: Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.55. Alokasi Realisasi Investasi Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun 2023

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sementara penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Apabila dilihat persentase pencapaian investasi dari yang ditargetkan, dari lima (5) wilayah di Jawa Barat yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, terlihat bahwa realisasi pencapaian investasi di Kota Bogor pada tahun 2023 berada pada dua wilayah paling tinggi mencapai 120,94 persen, setelah Kabupaten Bekasi yang mencapai 121,21 persen,

sedangkan empat (3) daerah lainnya pencapaiannya kurang dari 100 persen (< 100%). Daerah yang paling rendah pencapaiannya adalah Kota Bekasi yang mencapai 86,20 persen.

Tabel 2.30. Realisasi dan Target Investasi Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023

Wilayah	Realisasi (miliar)	Target (miliar)	Pencapaian (%)
Kab.Bogor	15,19	16,52	91,91
Kab.Bekasi	61,21	50,50	121,21
Kota Bogor	1,93	1,60	120,94
Kota Bekasi	12,38	14,36	86,20
Kota Depok	4,03	4,31	93,56

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat, 2023

Realisasi investasi di daerah tentunya sejalan dengan jumlah proyek dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Berdasarkan **Tabel 2.31** jumlah tenaga kerja yang terserap di Kota Bogor terus mengalami peningkatan terutama sejak tahun 2021 dari 1634 orang naik menjadi 3766 orang pada tahun 2023. Demikian halnya dengan jumlah proyek juga terus meningkat selama tahun 2019-2023 dari 350 proyek pada tahun 2019 meningkat menjadi 2890 proyek atau meningkat sebanyak 700 persennya.

Tabel 2.31. Jumlah Tenaga Kerja dan Proyek di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Tenaga Kerja Yang Terserap (orang)	Jumlah Proyek (unit)
2019	1.347	350
2020	1.717	547
2021	1.634	1.011
2022	2.283	1.574
2023	3.766	2.890

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat, 2023

Indeks ekonomi inklusif merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan daya saing ekonomi daerah yakni alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan baik pada level nasional, provinsi maupun kabupaten. Indeks pembangunan ekonomi inklusif diukur melalui tiga aspek yaitu aspek ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Kriteria penilaian indeks ekonomi inklusif yang digunakan untuk menilai suatu provinsi atau kota/kabupaten adalah (Maryam, et al, 2022):

1. Jika besarnya indeks yang dicapai 1-3 maka termasuk dalam kategori tidak memuaskan
2. Jika besarnya indeks yang dicapai 4-7 maka termasuk dalam kategori memuaskan
3. Jika besarnya indeks yang dicapai 8-10 maka termasuk dalam kategori sangat memuaskan.

Tabel 2.32. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2011-2021

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bogor	5,47	5,98	5,60	5,68	5,68	5,77	5,82	5,94	5,99	5,86	5,98

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bogor	5,01	5,65	5,13	5,21	5,34	5,48	5,59	5,57	5,78	5,54	5,71
Bekasi	5,42	6,03	5,60	5,66	5,74	5,9	5,93	5,97	6,14	5,91	6,17
Kota Bekasi	5,68	6,34	5,89	5,92	5,72	5,85	5,81	5,93	6,01	5,90	5,96
Kota Depok	5,62	6,18	5,64	5,8	5,78	5,87	5,97	5,93	5,99	5,90	6,13
Tangerang	5,02	5,61	5,22	5,27	5,31	5,43	5,5	5,61	5,65	5,55	5,73
Kota Tangerang	5,34	5,87	5,48	5,51	5,55	5,6	5,6	5,81	5,80	5,71	6,01
Jawa Barat	4,99	4,94	5,28	5,45	5,69	5,89	5,96	6,02	6,18	5,63	6,02

Berdasarkan **Tabel 2.32** diketahui bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor selama periode 2011 hingga 2021 berada pada kategori memuaskan. Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor dari tahun 2011 hingga 2021 berfluktuasi dengan nilai paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 5,99 dan nilai kedua tertinggi pada tahun 2021 yaitu 5,98. Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif yang tinggi disebabkan oleh tingginya nilai pada tiga pilar pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pada tahun 2021, nilai PDRB per kapita Kota Bogor meningkat dibandingkan tahun 2020 serta nilai indeks pembangunan manusia juga meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor lebih tinggi pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dan memiliki tren yang meningkat.

2.3.1.5. Daya Saing Digital

Indeks Daya Saing Digital tahun 2023 dihitung atas tiga sub indeks yaitu input, output dan penunjang. Masing-masing sub indeks terdiri dari tiga pilar, sehingga terdapat Sembilan pilar yang membentuk indeks daya saing digital. Berikut merupakan daftar indikator dari indeks daya saing digital tahun 2023 berdasarkan *East venture* (2023):

1. Input
   a) Sumber Daya Manusia
      (1) Jumlah mahasiswa berkemampuan digital
      (2) Pertumbuhan mahasiswa berkemampuan digital
      (3) Jumlah dosen program studi terkait digitalisasi
      (4) Jumlah program studi terkait digitalisasi
      (5) Indeks literasi digital
   b) Penggunaan TIK
      (1) Rasio penduduk yang memiliki handphone
      (2) Rasio rumah tangga yang memiliki komputer
      (3) Rasio penduduk yang memiliki akses internet
      (4) Rasio penduduk yang mengakses internet dari rumah
      (5) Rasio penduduk yang mengakses internet dari kantor
      (6) Rasio penduduk yang mengakses internet dari sekolah
      (7) Rasio penduduk yang mengakses internet dengan laptop

(8) Rasio penduduk yang mengakses internet dengan handphone

c) Pengeluaran untuk TIK

(1) Rasio rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk TIK

(2) Pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk TIK

(3) Balas jasa dan upah pekerja sektor informasi dan komunikasi

(4) Balas jasa dan upah pekerja sektor informasi dan komunikasi per kapita

2. Output

a) Perekonomian

(1) PDRB sektor informasi dan komunikasi

(2) Kontribusi PDRB sektor informasi dan komunikasi

(3) Pertumbuhan PDRB sektor informasi dan komunikasi

(4) PDRB sektor pergudangan, penunjang angkutan, pos dan kurir

(5) Kontribusi PDRB sektor pergudangan, penunjang angkutan, pos dan kurir

(6) Pertumbuhan PDRB sektor pergudangan, penunjang angkutan, pos dan kurir

(7) PDRB sektor jasa keuangan

(8) Kontribusi PDRB sektor jasa keuangan

(9) Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan

b) Kewirausahaan dan Produktivitas

(1) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan utama

(2) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk komunikasi

(3) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk promosi

(4) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk via media sosial

(5) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk penjualan via *website/e-commerce*

(6) Pinjaman menggunakan teknologi finansial

c) Ketenagakerjaan

(1) Jumlah tenaga kerja sektor terkait digitalisasi

(2) Rasio tenaga kerja sektor terkait digitalisasi

(3) Pertumbuhan tenaga kerja sektor terkait digitalisasi

(4) Jumlah tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik)

(5) Rasio tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik)

(6) Pertumbuhan tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik)

3. Penunjang

a) Infrastruktur

(1) Tingkat gangguan listrik (indikator terbalik)

(2) Rasio desa yang mendapat sinyal kuat dan sangat kuat

(3) Rasio desa yang mendapat sinyal 3G

(4) Rasio desa yang mendapat sinyal 4G
(5) Rasio rumah tangga dengan sambungan telepon tetap

b) Keuangan
(1) Indeks inklusi keuangan (komposit)
(2) Jumlah agen laku pandai
(3) Adopsi e-wallet sebagai metode pembayaran

c) Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah
(1) Angka partisipasi kasar SMA/SMK
(2) Angka partisipasi kasar D1-S1
(3) Pertumbuhan angka harapan hidup
(4) Penurunan tingkat kemiskinan (indikator terbalik)

Berdasarkan tabel indeks daya saing digital di bawah, terlihat bahwa Kota Bogor pada tahun 2023 menempati urutan ke 22 dari 157 kota/kabupaten dengan skor sebesar 51. Peringkat dan skor Kota Bogor masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi yang menempati urutan ke 5 dan 8, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang hanya menempati urutan ke-69.

Peringkat Kota Bogor pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang berhasil menempati urutan ke-11 dengan skor sebesar 54,4. Dalam perjalannya, indeks daya saing digital Kota Bogor mulai tahun 2020 hingga 2023 memiliki nilai yang semakin meningkat kecuali pada tahun 2023 memiliki nilai yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan ada beberapa indikator yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.33. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020-2023

Kota/Kabupaten	2020		2021		2022		2023	
	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat
Kota Bogor	44,1	16	52,6	20	54,4	11	51	22
Bogor	43,4	18	45,1	60	46	58	44,1	69
Bekasi	41,7	29	47	47	46	56	45,7	57
Kota Bekasi	49,5	6	61,5	3	60,3	4	55,8	8
Kota Depok	49,8	5	58,4	7	59,5	5	58	5
Tangerang	40,9	38	45,6	57	46	57	44,2	67
Kota Tangerang	49,2	7	57,8	8	53	19	52,9	16

Sumber: East Venture 2023

Berdasarkan indikator yang dihitung dalam indeks daya saing digital, pada indikator input pengeluaran untuk TIK memiliki skor yang tertinggi dan sumberdaya manusia memiliki skor yang terendah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada indikator input penggunaan TIK memiliki skor yang paling tinggi. Pada indikator output, kewirausahaan dan produktivitas memiliki skor tertinggi, sedangkan perekonomian memiliki skor yang teredah. Pada tahun 2022, pada indikator output, ketenagakerjaan yang memiliki skor terendah. Pada indikator penunjang, infrastruktur menempati posisi pertama dengan skor 86, sedangkan regulasi dan kapasitas pemerintah daerah merupakan yang terendah. Hal ini berbeda pada tahun 2022 dimana keuangan menjadi bagian dari indikator penunjang yang memiliki skor paling rendah.

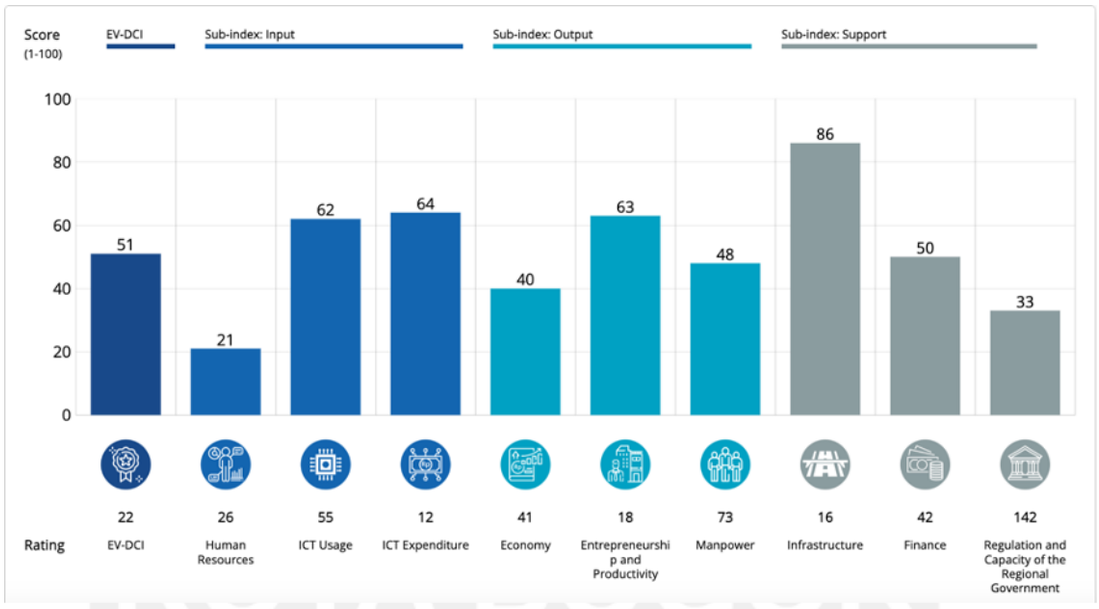

Sumber: East Venture 2023

Gambar 2.56. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor 2023 Berdasarkan Indikator

2.3.1.6. Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi dan BUMD

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor memiliki kecenderungan yang menurun sejak tahun 2019 hingga 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah UMKM di Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah cukup tinggi sejak tahun 2019, walaupun pada tahun 2021 menurun. Banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Bogor disebabkan Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki UMKM terbanyak.

Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM dengan berbagai cara diantaranya adalah bekerjasama dengan pelaku usaha besar, bekerjasama dalam hal memasarkan produk UMKM dengan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bogor, membantu dalam memperoleh sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan, minuman, dan kosmetik, mengadakan berbagai kegiatan pelatihan seperti kewirausahaan, *digital marketing*, desain, teknologi dan pemasaran. Saat ini produk UMKM Kota Bogor telah dipasarkan tidak hanya di dalam negeri melainkan juga sudah merambah dunia internasional seperti Jepang, Korea dan Selandia Baru.

Pada tahun 2021 jumlah UMKM sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi yang menyebabkan banyak warga yang tinggal di rumah dan bekerja dari rumah, sehingga banyak warga yang menawarkan produk yang dihasilkan dari usaha rumahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak dari orang sekitar serta lebih efisien karena dapat mengurangi mobilitas. Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan jumlah UMKM dengan merapikan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pemasaran produk UMKM.

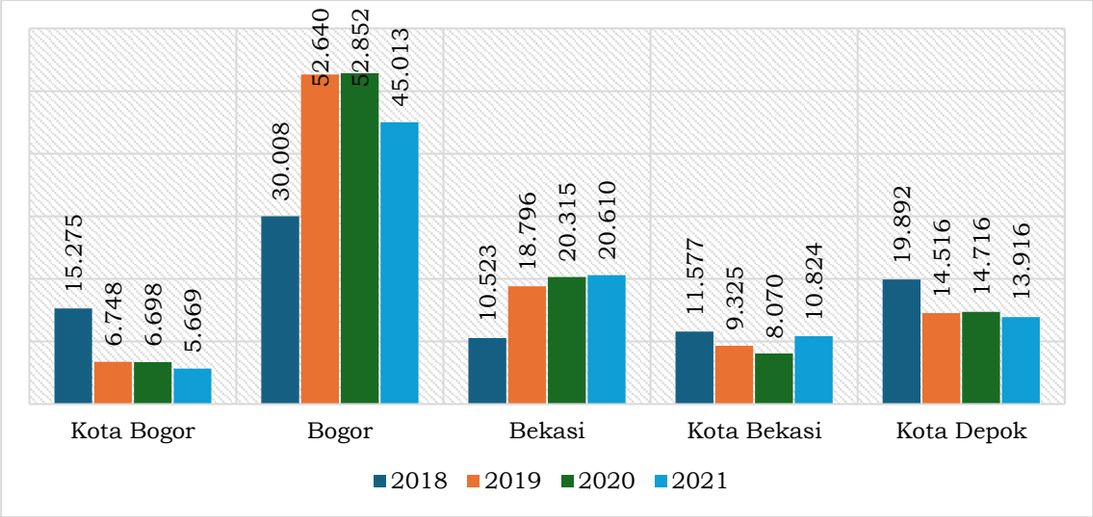

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Gambar 2.57. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2021

Gambar 2.57, dalam hal ini menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah di Kota Bogor selama tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021. Pada dua periode pengamatan tersebut, terlihat bahwa untuk industri kecil didominasi oleh industri pangan, dengan share masing-masing sebesar 69,51 persen dan 68,73 persen pada tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, untuk industri menengah, juga ditemukan dominasi oleh industri pangan, meskipun pangsanya tidak sebesar pada industri kecil. Proporsi industri pangan menengah pada tahun 2020 dan 2021 secara berurutan sebesar 35 persen dan 30 persen. Untuk keseluruhan total industri kecil dan menengah ditemukan bahwa pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif (pengurangan jumlah usaha) sebesar -5,93 persen. Penurunan jumlah usaha tersebut ditemukan terjadi pada usaha skala kecil dari 1.204 usaha pada tahun 2020 menjadi 1.129 pada tahun 2021, sementara jumlah usaha menengah tidak berubah.

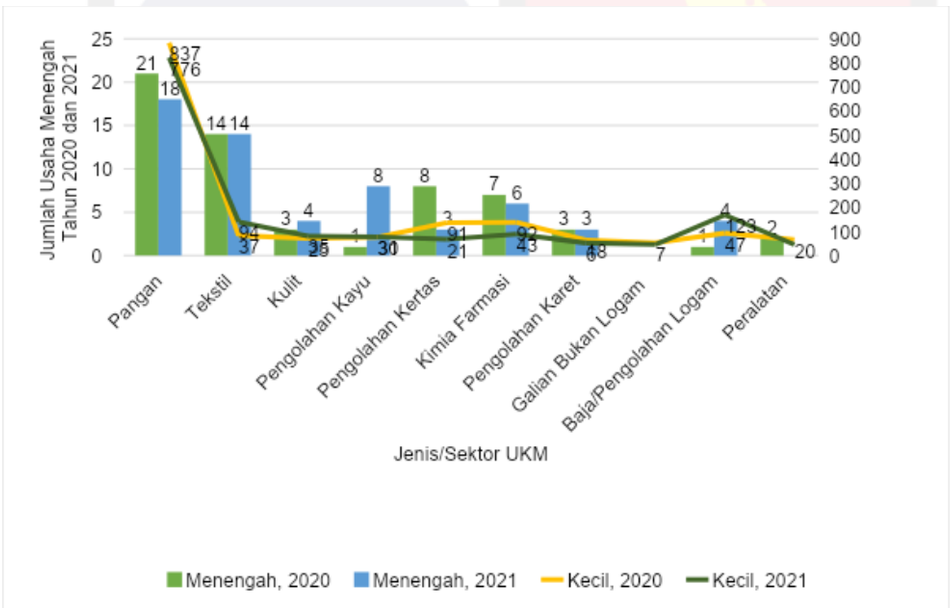

Sumber: Open Data Kota Bogor (2024)

Gambar 2.58. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Bogor Tahun 2020 dan 2021

Di tahun 2022, terlihat bahwa UMKM di Kota Bogor kembali mengalami peningkatan dari segi jumlah secara keseluruhan. Berdasarkan persebaran wilayahnya, diketahui bahwa Sebagian besar UMKM berada di Kecamatan Bogor Selatan yang mencapai 21,89 persen dari keseluruhan jumlah UMKM di Kota Bogor. Sementara itu, Kecamatan Tanah Sareal menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM paling rendah di Kota Bogor. Sejalan dengan temuan pada Gambar 2.58, pada Tabel 2.34 juga terlihat bahwa di seluruh kecamatan, komposisi UMKM-nya didominasi oleh sektor makanan. Dalam hal ini, sebagian besar UMKM pangan berada di wilayah Kecamatan Tanah Sareal.

Tabel 2.34. Sebaran UMKM di Kota Bogor Tahun 2022

Jenis UMKM	2022						2023					
	Bogor Selatan	Bogor Timur	Bogor Tengah	Bogor Barat	Bogor Utara	Tanah Sareal	Bogor Selatan	Bogor Timur	Bogor Tengah	Bogor Barat	Bogor Utara	Tanah Sareal
Makanan	174	45	172	225	148	230	0	181	50	239	160	236
Pangan	5	6	9	20	7	16	5	7	10	22	7	16
Gas	5	0	1	2	0	2	5	0	1	2	0	2
Kendaraan	1	0	0	2	2	1	1	0	0	2	2	1
Kerajinan	87	15	16	58	40	59	87	15	16	59	40	61
Fashion	29	19	30	39	33	31	31	19	30	39	34	32
Kantin Sekolah	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0
Kuliner	58	32	40	71	67	0	59	34	46	76	77	68
Otomotif	3	4	1	3	1	1	3	5	1	3	1	1
Pendidikan	2	0	2	0	1	2	2	0	2	0	1	2
PKL	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	2	0
Teknologi Internet	9	2	6	6	6	7	9	2	6	6	6	8
Rumah/Warung Makan	32	6	20	28	10	22	33	6	21	28	10	23
Agrobisnis	0	3	1	c	7	2	0	3	1	5	7	4
Minuman	11	3	3	16	13	14	12	4	4	19	15	15
Jasa	22	4	3	23	24	25	22	5	5	24	26	28
Kesehatan	2	1	5	7	3	2	3	1	5	8	3	2
Warung Sembako	1	0	0	2	2	2	1	0	0	2	4	2
Lainnya	1.647	887	1.903	1.141	1.357	351	1.649	888	1.903	1.142	1.357	351
Jumlah UMKM	**2.088**	**1.027**	**2.213**	**1.644**	**1.725**	**767**	**1.923**	**1.170**	**2.104**	**1.677**	**1.754**	**852**

Sumber: Solusi Kota Bogor, 2023

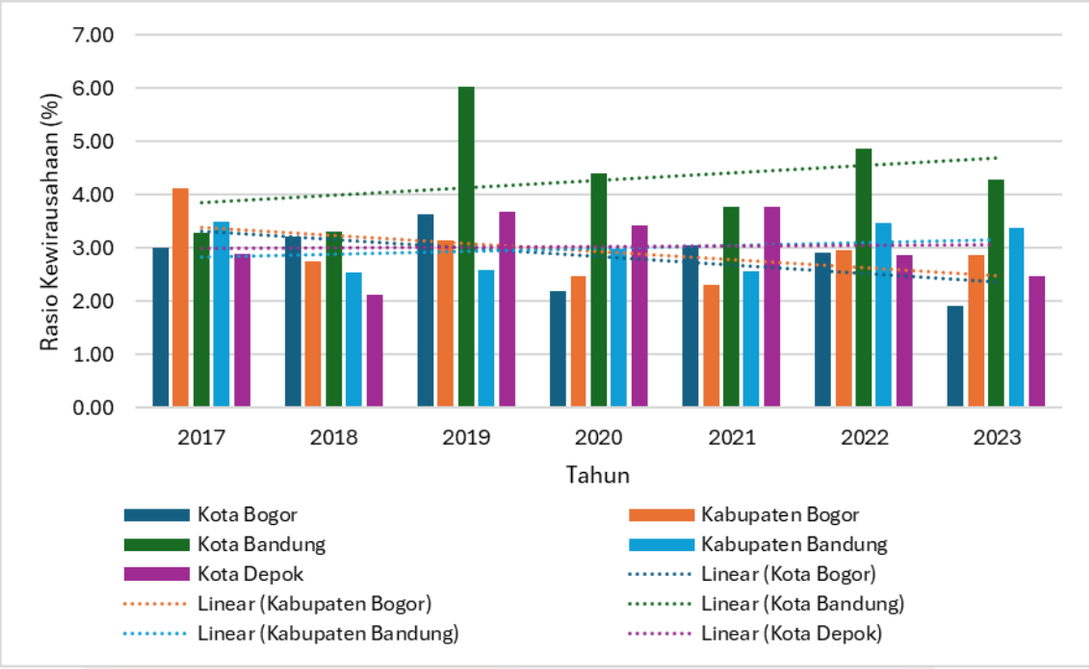

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kab. Bogor, BPS Kota Bandung, BPS Kab. Bandung, BPS Kota Depok (2024, diolah)

Gambar 2.59. Rasio Kewirausahaan Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2017 - 2023

Rasio kewirausahaan dihitung dengan menjumlahkan total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Gambar 2.59 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023, rasio kewirausahaan Kota Bogor mengalami tren menurun. Penurunan rasio kewirausahaan juga ditemukan pada Kabupaten Bogor, sementara Kota Depok dan Kabupaten Bandung menunjukkan tren stagnan. Hanya Kota Bandung yang menunjukkan peningkatan rasio kewirausahaan pada kurun waktu tersebut.

Rata-rata rasio kewirausahaan di Kota Bogor pada kurun waktu tersebut sebesar, 2.85 persen. Artinya, hanya ada sebesar 285 orang wirausahawan dari 1000 orang penduduk Kota Bogor yang termasuk dalam angkatan kerja. Rasio kewirausahaan Kota Bogor tertinggi dan terendah masing-masing sebesar 3,63 persen dan 1,92 persen, yang masing-masing terdapat di tahun 2019 dan 2023. Menurunnya rasio kewirausahaan di Kota Bogor perlu menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat semakin tingginya kebutuhan terhadap lapangan kerja seiring dengan meningkatnya penduduk usia produktif yang masuk dalam angkatan kerja. Ketersediaan lapangan kerja tersebut salah satunya dapat diperluas melalui peningkatan rasio kewirausahaan di Kota Bogor. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bogor dapat melakukan *benchmarking* terhadap upaya yang dilakukan di Kota Bandung yang secara konsisten menunjukkan rasio kewirausahaan paling tinggi dengan tren meningkat. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan iklim wirausaha dan kemudahan melakukan usaha di Kota Bogor.

2.3.1.7. Ekspor Barang dan Jasa

Dibandingkan dengan beberapa kota pembanding yang dianalisis dalam laporan, terlihat bahwa Kota Bogor secara konsisten menjadi kota dengan *share*

ekspor terhadap PDRB ADHB paling rendah kedua setelah Kota Bekasi selama periode 2013 - 2023. Dalam hal ini, *share* ekspor Kota Bogor dan Bekasi bernilai negatif terhadap PDRB ADHB tahun pengamatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2023, baik Kota Bogor maupun Kota Bekasi lebih banyak melakukan impor dibandingkan ekspor. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kedua kota, mengingat tingginya impor yang dilakukan menunjukkan bahwa ada potensi pasar yang makin lama makin besar namun belum dapat dipenuhi oleh produksi lokal, Pengembangan industri maupun usaha berorientasi ekspor maupun substitusi impor dapat perlu makin diperhatikan.

Tabel 2.35. *Share* Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2023

Wilayah	Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	-46,26	-46,75	-49,74	-49,70	-52,12	-51,64	-50,28	-46,06	-42,66	-42,67	-44.88
Kabupaten Bogor	1,38	1,55	0,82	1,94	2,99	3,87	4,36	8,07	9,90	9,84	9,03
Kota Tangerang	9,56	15,49	17,23	18,03	17,61	15,23	13,36	-2,29	-3,24	4,47	7.91
Kabupaten Tangerang	16,88	21,02	22,35	2,32	2,58	2,85	3,26	3,11	4,86	5,76	17.86
Kota Bekasi	-61,10	-61,08	-60,79	-60,31	-59,42	-59,36	-59,60	-55,14	-50,30	-49,39	-49.76
Kabupaten Bekasi	35,69	34,92	34,06	32,22	32,62	32,03	32,33	37,51	37,76	37,00	NA

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pondasi pembangunan perekonomian daerah karena terlibat dalam menghubungkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan sektor-sektor produktif dalam perekonomian. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu upaya peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha secara konsisten berupaya meningkatkan SDM melalui jalur pendidikan.

Keterlibatan sumber daya manusia dapat langsung berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Daya saing sumber daya manusia didekati dengan beberapa indikator seperti indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan literasi masyarakat, daya serap tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan angka ketergantungan.

2.3.2.1. Pendidikan

Indeks pendidikan adalah cerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indeks pendidikan mencerminkan pembangunan manusia di suatu wilayah yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sebelumnya indikator yang digunakan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, namun mengikuti perhitungan yang dilakukan oleh BPS dalam menghitung komponen pembentuk IPM pada aspek pendidikan, maka angka melek huruf telah diganti menjadi harapan lama sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS 2015). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pada tahun 2022 di Kota Bogor persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,95 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 94,82 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SMA/MA) sebesar 64,79 persen. Masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,05 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan 5,18 persen pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.

Berdasarkan data indeks pendidikan pada **Tabel 2.36**, diketahui bahwa indeks pendidikan Kota Bogor pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota Bekasi dan Kota Depok yaitu sebesar 72,74. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin baik kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, nilai indeks pendidikan Kota Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2010 hingga 2022 dengan tren yang meningkat.

Tabel 2.36. Indeks Pendidikan di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Tahun 2010-2022

Wilayah	Indeks Pendidikan												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	63,41	64,34	65,28	66,81	67,33	68,35	70,41	71,44	71,50	71,62	71,68	72,38	72,74
Bogor	51,55	52,50	54,53	57,11	58,60	58,68	59,57	60,66	60,82	62,27	62,33	62,39	62,52
Bekasi	54,31	56,72	58,21	59,53	60,51	62,02	63,34	64,48	65,72	65,80	66,76	67,39	68,18
Kota Bekasi	67,26	69,09	69,41	71,64	72,04	72,80	73,35	73,96	75,19	75,86	76,09	76,87	77,33
Kota Depok	68,11	68,68	69,04	71,53	72,21	73,31	74,37	74,66	74,78	75,31	76,27	76,89	76,96

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Tren indeks pendidikan yang meningkat dapat dioptimalkan dengan menjalankan beberapa strategi yaitu melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Jalur pendidikan formal dapat ditingkatkan dengan peningkatan infrastruktur pendidikan serta penuntasan program wajib belajar yang diusung oleh pemerintah pusat. Sementara itu jalur pendidikan informal dapat dilakukan melalui pembangunan jalur alternatif sebagai akselerator yaitu dengan membuka program kejar Paket A, Paket B dan Paket C. Sementara strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah pada pos

pendidikan, sehingga dapat memeratakan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan.

2.3.2.2. Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks pembangunan literasi masyarakat diperlukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi perpustakaan
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi
7. Anggota perpustakaan

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" dengan sasaran strategis, yaitu (Perpustakaan Nasional, 2020):

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
   a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;

b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (i) pengembangan mitra perpustakaan (library supporter); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Indeks pembangunan literasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang diturunkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat dan menyediakan akses terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Peningkatan literasi masyarakat dilakukan melalui kunjungan ke perpustakaan, oleh karena itu perpustakaan memiliki strategi agar peningkatan literasi dapat terwujud. Program perpustakaan dan literasi merupakan strategi dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan ditandai dengan meningkatnya nilai berbudaya literasi. Maka dimensi pembangunan bidang perpustakaan dibangun dalam dua dimensi yaitu peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi masyarakat, yang diukur melalui: (1) ketersediaan infrastruktur layanan perpustakaan yang cukup; (2) ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (3) ekstensifikasi dan perluasan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah dalam upaya menjamin ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan perpustakaan di semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia; (4) ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan. baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan dan seluruh wilayah Indonesia; (5) kampanye dan promosi perpustakaan dan keterlibatan masyarakat di perpustakaan. Melalui pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran yang integratif, komprehensif, tematik, dan spasial diharapkan akan terwujud pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta perwujudan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sehingga terbentuk masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Berdasarkan **Gambar 2.60** dapat terlihat bahwa indeks literasi masyarakat di Kota Bogor tahun 2023 mencapai 52,00, berada dalam kategori rendah, dibawah rata-rata Jawa Barat (60,02) dan Kota Depok (74,44). Hal ini berarti literasi masyarakat di Kota Bogor masih relatif rendah. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan literasi ini terutama kepada para Gen Z.

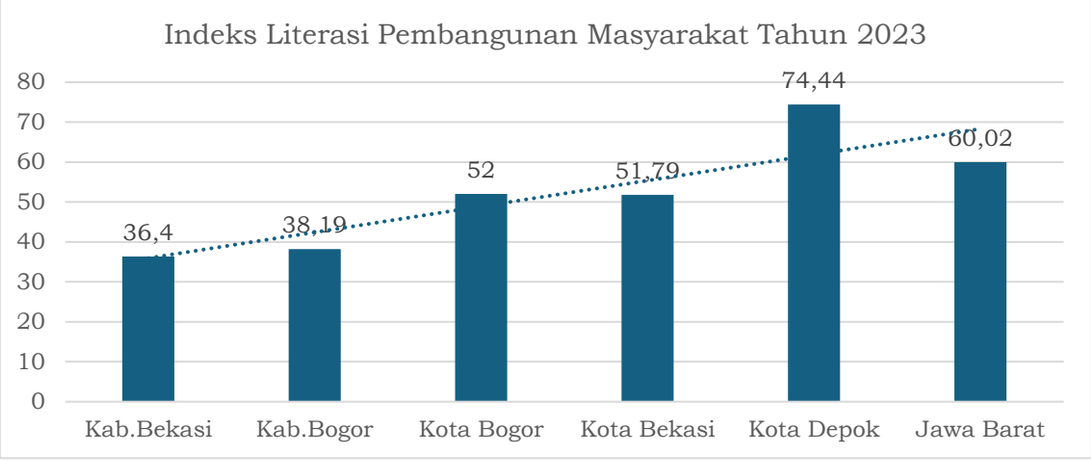

Sumber: Perpustakaan Nasional 2023

Gambar 2.60. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023

2.3.2.3. Indeks Kemampuan Literasi

Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Kemampuan literasi murid di Kota Bogor untuk tahun ajaran 2023-2024 menunjukkan variasi yang menarik menurut jenjang pendidikan, mencerminkan perbedaan dalam kualitas pembelajaran dan akses terhadap sumber daya edukatif. Pada tahap pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik negeri maupun swasta, angka kemampuan literasi yang tercatat adalah 74,86 pada tahun 2023 dan menurun menjadi 70,93 pada tahun 2024, dengan kategori "Sedang." Penurunan ini dapat menjadi indikasi perlunya evaluasi dan penguatan kurikulum serta metode pengajaran yang diterapkan di institusi pendidikan pada usia dini yang mungkin mempengaruhi perkembangan literasi anak.

Di tingkat pendidikan dasar, baik SD Umum maupun SD Kesetaraan menunjukkan performa yang lebih baik, dengan SD Umum mencatatkan angka literasi 74,79 di tahun 2023 dan meningkat menjadi 84,32 pada tahun 2024, tergolong dalam kategori "Baik." Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Di sisi lain, SD Kesetaraan terlihat mengalami peningkatan yang lebih moderat, dari 61,82 menjadi 69,75, masih tergolong dalam kategori "Sedang," menunjukkan bahwa tantangan dalam memenuhi standar literasi masih ada, meskipun ada perkembangan yang positif.

Sementara itu, jenjang pendidikan menengah, khususnya SMP dan SMA, juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. SMP Umum mencapai 77,84 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 83,34 pada tahun 2024, serta SMA Umum yang melesat dari 81,81 menjadi 87,98, keduanya masuk dalam kategori "Baik." Sebaliknya, SMA Kesetaraan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 31,21 menjadi 51,81, meskipun tetap dalam kategori "Sedang." Kemampuan literasi di SMK juga menunjukkan perbaikan dari 55,7 menjadi 71,06, mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi mulai menampakkan hasil. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kemajuan dalam kemampuan literasi di Kota Bogor, meskipun tantangan tersisa yang perlu diatasi di sektor pendidikan non-formal dan pendidikan kesetaraan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata. Berikut adalah data kemampuan literasi murid berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Bogor tahun 2023-2024.

Tabel 2.37. Kemampuan Literasi Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2023-2024

Jenjang Pendidikan	Tahun		Kategori
	2023	2024	
PAUD Negeri dan Swasta	74,86	70,93	Sedang
SD Umum Negeri & Swasta	74,79	84,32	Baik
SD Kesetaraan Negeri & Swasta	61,82	69,75	Sedang
SMP Umum Negeri & Swasta	77,84	83,34	Baik
SMP Kesetaraan Negeri & Swasta	61,11	59,71	Sedang

SMA Umum Negeri & Swasta	81,81	87,98	Baik
SMA Kesetaraan Negeri & Swasta	31,21	51,81	Sedang
SMK Umum Negeri & Swasta	55,7	71,06	Baik

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, 2024

2.3.2.4. Indeks Kemampuan Numerasi

Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemampuan numerasi murid di Kota Bogor untuk tahun ajaran 2023-2024 menunjukkan variasi yang mencolok di antara berbagai jenjang pendidikan, mencerminkan kualitas pembelajaran yang berbeda dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam penguasaan keterampilan matematika. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) Umum, baik negeri maupun swasta, terdapat peningkatan yang signifikan dari angka numerasi 56,7 pada tahun 2023 menjadi 73,25 pada tahun 2024, yang tergolong dalam kategori "Baik." Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dalam kompetensi numerasi di tingkat pendidikan dasar, serta penekanan pada keterampilan dasar matematika yang esensial untuk perkembangan kemampuan akademik siswa selanjutnya.

Di sisi lain, SD Kesetaraan menunjukkan performa yang lebih modis dengan kenaikan dari 52,72 menjadi 69,87, yang juga masuk dalam kategori "Sedang." Meskipun ada peningkatan, angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam metode pengajaran untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa yang mengikuti jalur pendidikan kesetaraan. Selain itu, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), data menunjukkan dinamika yang serupa. Kemampuan numerasi SMP Umum mengalami kenaikan pesat dari 57,34 menjadi 77,09, yang menjadikannya dalam kategori "Baik." Hal ini menyiratkan bahwa siswa di jenjang ini mendapatkan lebih banyak perhatian dalam meningkatkan kompetensi numerasi mereka.

Namun, untuk SMP Kesetaraan, angka kemampuan numerasi meningkat dari 41,92 menjadi 53,5, masih dalam kategori "Sedang." Hal ini menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan kurikulum serta metode pengajaran di jalur pendidikan kesetaraan ini. Pada jenjang pendidikan menengah atas, SMA Umum menunjukkan kinerja yang positif dengan lonjakan dari 70,21 menjadi 83,48, yang jelas mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam pembelajaran numerasi. Sebaliknya, SMA Kesetaraan mengalami peningkatan yang lemah dari 29,28 menjadi 53,45 dan masih tergolong "Sedang." Begitu pula, SMK Umum menunjukkan peningkatan dari 46,85 menjadi 64,31, yang menunjukkan perkembangan yang baik meskipun masih perlu perhatian lebih. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi numerasi harus terus ditingkatkan, terutama dalam jalur pendidikan kesetaraan, untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan fondasi yang kuat dalam kemampuan numerasi yang esensial untuk kehidupan dan pendidikan mereka di masa depan. Berikut adalah data kemampuan numerasi murid berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Bogor tahun 2023-2024.

Tabel 2.38. Kemampuan Numerasi Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2023-2024

Jenjang Pendidikan	Tahun		Kategori
	2023	2024	
SD Umum Negeri & Swasta	56,7	73,25	Baik
SD Kesetaraan Negeri & Swasta	52,72	69,87	Sedang
SMP Umum Negeri & Swasta	57,34	77,09	Baik
SMP Kesetaraan Negeri & Swasta	41,92	53,5	Sedang
SMA Umum Negeri & Swasta	70,21	83,48	Baik
SMA Kesetaraan Negeri & Swasta	29,28	53,45	Sedang
SMK Umum Negeri & Swasta	46,85	64,31	Sedang

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, 2024

2.3.2.5. Kualitas Pendidikan Pekerja

Proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi dihitung dengan menjumlahkan total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas/kejuruan dan perguruan tinggi dan kemudian dibagi dengan jumlah pekerja. Gambar 2.61 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023, proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Bogor maupun empat wilayah lainnya mengalami tren menurun. Selama lima tahun terakhir, Kota Depok menunjukkan proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi tertinggi dibandingkan keempat daerah lain.

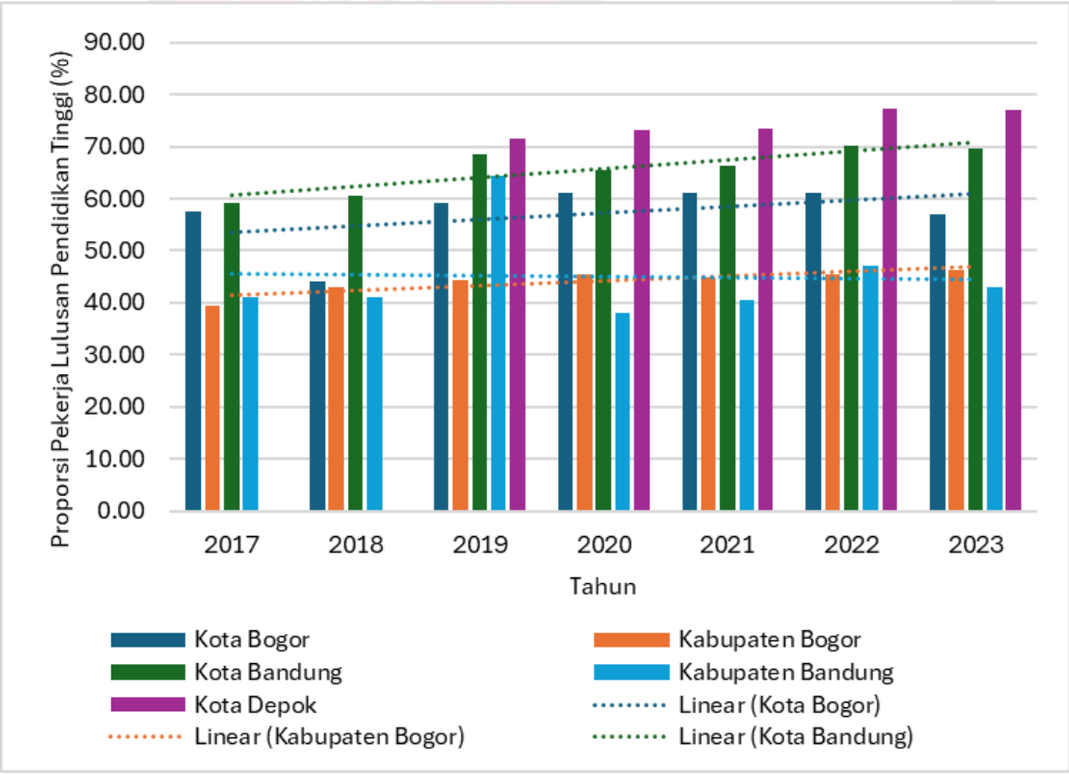

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kab. Bogor, BPS Kota Bandung, BPS Kab. Bandung, BPS Kota Depok

Gambar 2.61. Proporsi Pekerja yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2017 - 2023

Rata-rata proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi Kota Bogor selama tujuh terakhir sebesar 57,26 persen. Hal tersebut berarti bahwa hanya sekitar 5.726 orang pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi untuk setiap 10.000 orang total pekerja di Kota Bogor. Rata-rata Kota Bogor tersebut jauh tertinggal

dibanding Kota Depok dengan rata-rata sebesar 74,42 persen maupun Kota Bandung dengan rata-rata sebesar 65,65 persen. Dalam hal ini, upaya peningkatan kualitas pekerja harus dilakukan, mengingat kualitas pekerja merupakan salah satu faktor utama penentu produktivitas. Terlebih lagi, Kota Bogor merupakan salah satu kota yang kemudian masuk sebagai wilayah aglomerasi dengan peluang pengembangan dan prospek ekonomi yang tinggi. Jika pekerja di Kota Bogor memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang makin besar, hal tersebut tentu akan mendorong daya saing pekerja Kota Bogor.

2.3.2.6. Tenaga Kerja

Pada **Gambar 2.62**, terlihat bahwa daya serap tenaga kerja di Kota Bogor adalah yang terendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia di tahun 2023. Daya serap tenaga kerja tahun 2023 di Kota Bogor sebesar 90,61 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 87,32 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 adalah masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa penyesuaian untuk kembali kepada kondisi semula.

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan seperti tampak pada **Gambar 2.62**, bahwa daya serap tenaga kerja mengalami tren penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 daya serap tenaga kerja menurun cukup tajam. Pada tahun 2021 dan 2022 daya serap tenaga kerja kembali meningkat seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik di semua sektor.

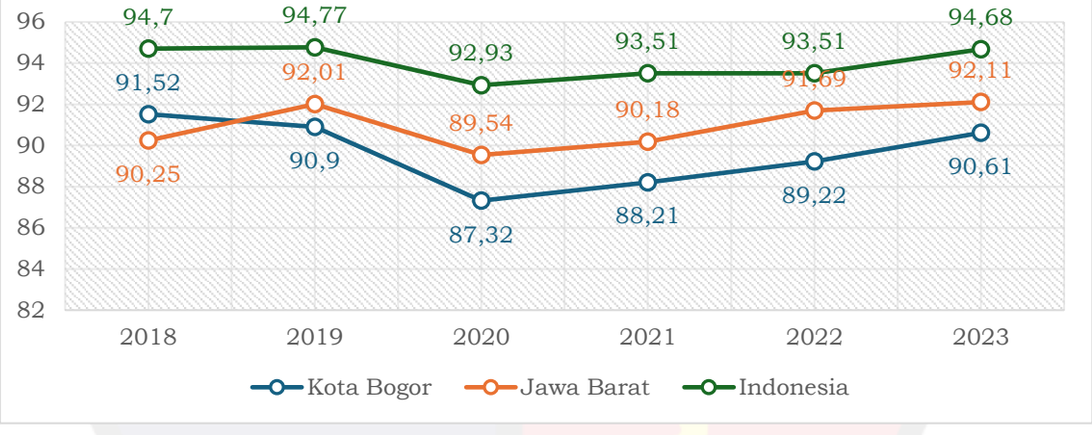

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.62. Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2023

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data pada **Tabel 2.39**, TPAK Kota Bogor pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan juga merupakan nilai TPAK

kedua tertinggi setelah Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 64,81. Nilai TPAK Kota Bogor memiliki tren yang meningkat walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemi, namun kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023. Tingginya nilai TPAK mencerminkan bahwa penawaran tenaga kerja di Kota Bogor cukup tinggi untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2018-2023

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	63,11	63,68	60,81	61,77	64,21	64,81
Bogor	62,75	65,41	62,65	62,55	63,75	64,22
Bekasi	61,43	64,02	64,23	65,87	65,41	65,00
Kota Bekasi	65,23	65,66	64,74	64,76	65,33	64,65
Kota Depok	62,51	64,96	63,96	62,62	63,35	62,76
Tangerang	63,01	66,07	65,43	63,94	67,05	66,87
Kota Tangerang	63,01	64,95	64,97	64,52	66,08	63,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

2.3.2.7. Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun) (BPS, 2020). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Gambar 2.63 menunjukkan angka ketergantungan penduduk Kota Bogor pada tahun 2023 menurut kecamatan. Angka ketergantungan penduduk secara total di Kota Bogor mencapai 42,1 persen, dimana Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka ketergantungan paling tinggi (43,7%), sedangkan terendah adalah Kecamatan Bogor Utara sebesar 40,3 persen. Ketergantungan penduduk muda mencapai 32,9 persen, Kecamatan Bogor Barat terbesar (32,9%) dan Kecamatan Bogor Timur relatif paling rendah yakni sebesar 29,4 persen. Sementara ketergantungan penduduk tua sebesar 9,3 persen , dimana Bogor Barat dengan

angka terbesar (13,6%) dan Kecamatan Bogor Utara terendah yang mencapai 8 persen.

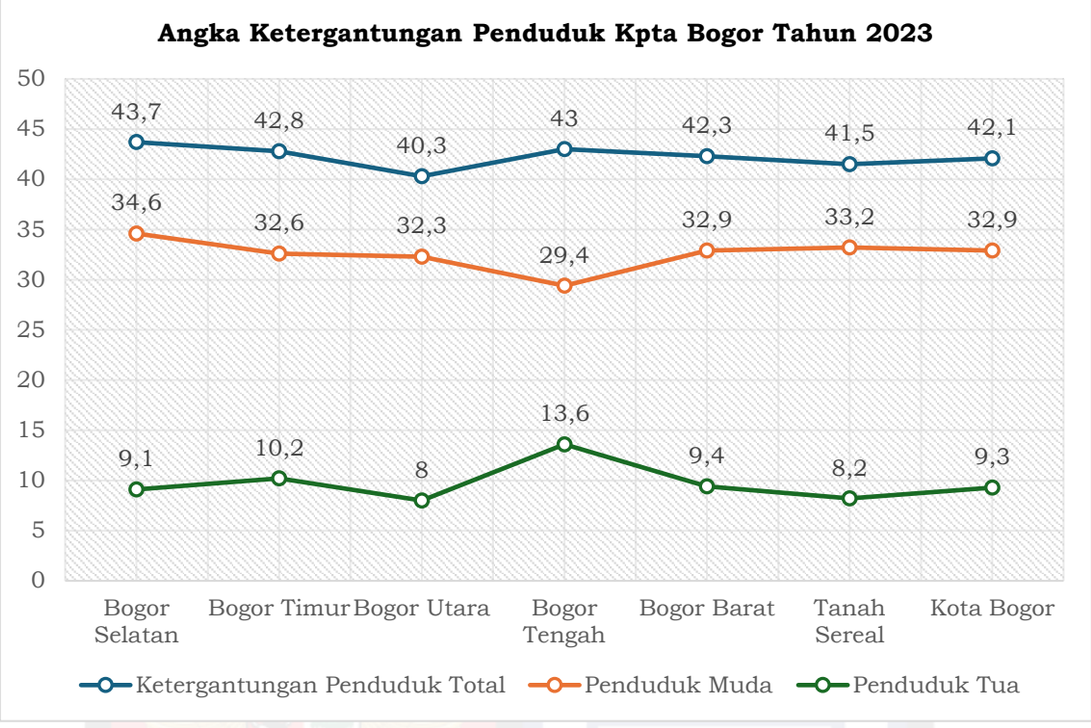

Sumber: Bogor Dalam Angka 2024

Gambar 2.63. Angka Ketergantungan Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

Sementara apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota sekitarnya sebagai pembanding, dapat dilihat pada **Tabel 2.40** yang menunjukkan angka ketergantungan Kota Bogor dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, maka angka ketergantungan Kota Bogor masih lebih tinggi. Turunnya angka ketergantungan berarti beban penduduk usia produktif untuk menanggung usia non produktif semakin rendah. Pada tahun 2023, angka ketergantungan Kota Bogor sebesar 42,1. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Bogor mempunyai beban tanggungan sebanyak 42 jiwa penduduk non produktif. Turunnya angka ketergantungan berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat sebagai dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk terus mengurangi nilai angka ketergantungan dengan pengendalian jumlah penduduk dan membuka lapangan kerja, perbaikan fasilitas kesehatan, serta perbaikan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.40. Angka Ketergantungan Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	Angka Ketergantungan Menurut Kab/Kota													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	52,34	51,78	51,25	50,77	50,35	50,00	49,67	49,37	49,14	48,96	48,83	41,38	41,25	41,26
Bekasi	45,62	45,18	44,77	44,39	44,06	43,78	43,49	43,24	43,04	42,88	42,75	39,82	39,64	39,81
Kota Bogor	44,77	44,29	43,83	43,43	43,08	42,78	42,51	42,28	42,11	41,99	41,91	42,65	42,62	42,10
Kota Bekasi	39,69	39,23	38,79	38,39	38,04	37,73	37,43	37,15	36,93	36,74	36,58	38,75	38,63	39,29
Kota Depok	42,84	42,37	41,91	41,50	41,14	40,84	40,54	40,28	40,07	39,91	39,78	41,06	40,94	40,75
Tangerang	47,00	46,58	46,19	45,86	45,61	45,42	45,26	45,13	45,06	45,00	44,91	41,12	41,08	42,68
Kota Tangerang	39,81	39,44	39,09	38,79	38,54	38,34	38,14	37,97	37,84	37,72	37,58	41,47	41,47	41,98

2.3.3. Daya Saing Infrastruktur

Infrastruktur merupakan bagian penting bagi pembangunan suatu wilayah maupun negara. Infrastruktur adalah sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Infrastruktur ini bisa berupa infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, maupun infrastruktur finansial.

Daya saing Infrastruktur diukur dari Indeks Infrastruktur, yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di wilayah. Penilaian terhadap infrastruktur menjadi hal penting karena infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menarik investasi. Indeks infrastruktur berikut ini diperoleh dari bahan perhitungan IDSD Kota Bogor yang bersumber dari BRIN. Perhitungan indeks infrastruktur mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur utilitas air minum. Pada tahun 2018 hingga 2023, nilai indeks infrastruktur Kota Bogor mengalami fluktuasi. Semula, indeks infrastruktur Kota Bogor sebesar 3,125 pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 5,00 pada tahun 2019. Setelah mengalami penurunan hingga tahun 2022, pada tahun 2023 nilainya meningkat kembali hingga mencapai 4,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas infrastruktur di daerah tersebut relatif tinggi. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur, semakin baik pula kualitas dan ketersediaan sarana serta prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum.

Tabel 2.41. Indeks Infrastruktur Kota Bogor Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Infrastruktur	3,125	5,00	3,33	N/A	2,15	4,05

Sumber: BRIN 2024

2.3.3.1. Panjang dan Kondisi Jalan

Jalan merupakan urat nadi perekonomian karena jalan menghubungkan pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat distribusi. Jalan memiliki keistimewaan karena aksesnya langsung masuk ke wilayah tempat tinggal, dapat mengakselerasi kecepatan dan mengurangi waktu tempuh, mempunyai pilihan-pilihan alternatif rute yang sangat banyak, serta tidak diperlukan biaya untuk menggunakannya. Daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah Kota Bogor didekati dengan beberapa indikator seperti panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah dan persentase panjang jalan menurut kondisi jalan.

Tabel 2.42 menjelaskan panjang jalan Kota Bogor dan wilayah sekitarnya pada tahun 2023, dimana secara total panjang jalan di Kota Bogor mencapai 221,196 km yang meliputi jalan beraspal sepanjang 183,749, tidak beraspal sepanjang 35,277 km dan lainnya 2,17 km. Apabila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Kota Depok dan Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jalan

terpanjang, masing-masing sepanjang 2.014,82 km dan 1.895,67 km, sedangkan Kota Bogor merupakan daerah dengan panjang jalan terpendek.

Tabel 2.42. Panjang Jalan Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023 (km)

Wllayah	Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Total
Kab.Bogor	1.815,46	12,4	47,807	**1.895,67**
Kab.Bekasi	67,193	130,13	911,809	**1.109,13**
Kota Bogor	183,749	35,277	2,17	**221,196**
Kota Bekasi	168,47	178,1	10,02	**356,59**
Kota Depok	2.013,52	0	1,3	**2.014,82**
Jawa Barat	19.711,78	2.650,14	3.955,91	**26.317,82**

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2024

Apabila dilihat dari kondisinya, maka jalan terdiri dari jalan yang baik, sedang, rusak dan rusak berat. Pada tahun 2023, maka kondisi jalan di Kota Bogor sebagian besar masuk dalam kategori "sedang" yakni sepanjang 141,998 km, disusul dengan kondisi jalan yang baik (57,955 km), rusak (21,242 km), hanya sedikit sekali yang rusak berat (0,001 km). Sementara Kota Depok dan Kabupaten Bogor yang merupakan daerah dengan panjang jalan terbesar, sebagian besar kondisi jalannya berada pada kondisi "baik", masing-masing sebesar 1.401,127 km (Kota Depok) dan sepanjang 1.222,240 km (Kabupaten Bogor).

Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2023 (km)

Wilayah	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Kab.Bogor	1.222,24	381,301	126,71	165,409
Kab.Bekasi	272,958	477,769	96,96	261,439
Kota Bogor	57,955	141,998	21,242	0,001
Kota Bekasi	321,12	21,7	7,4	6,33
Kota Depok	1.401,13	353,13	137,093	78,32
Jawa Barat	14.007,75	5.712,04	2,097,927	2.827,79

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2024

2.3.3.2. Kemantapan Jalan

Jalan merupakan salah satu bagian infrastruktur yang memiliki arti penting dalam konektivitas antar wilayah. Jalan mantap merupakan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang. Berdasarkan gambar dibawah, jalan berkondisi mantap pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 88,95 persen. Hal ini disebabkan karena adanya upaya pemerintah dalam merawat serta membangun jalan.

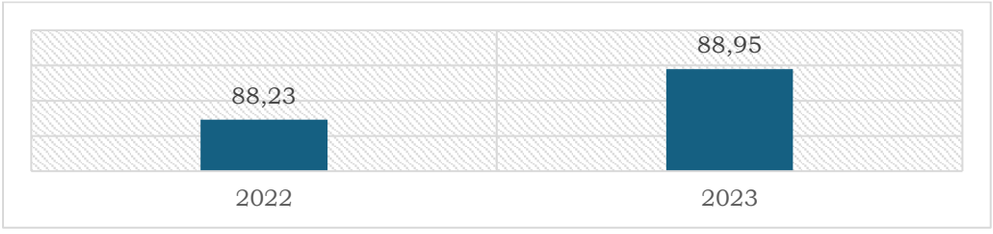

Sumber: Dinas PUPR Kota Bogor 2023

Gambar 2.64. Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2022-2023 di Kota Bogor

Kondisi jalan baik dan sedang di Kota Bogor yang meningkat persentasenya pada tahun 2023 dikarenakan adanya jalan yang dibangun,

ditingkatkan, direkonstruksi dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2023. Berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah, panjang jalan yang dibangun yaitu 425 meter, ditingkatkan kualitasnya sehingga berada pada kondisi yang baik sepanjang 3.034 meter dan panjang jalan yang dipelihara sebesar 548.057 meter.

Tabel 2.44. Panjang Jalan Menurut Jenis Output di Kota Bogor Tahun 2023 (meter)

Dibangun	Ditingkatkan	Direkonstruksi	Dipelihara
425	3.034	18.545	548.057

2.3.3.3. Konektivitas Antar Wilayah

Berdasarkan dari kewenangannya pada tahun 2022 sekitar 821.401 km menjadi kewenangan Kota Bogor dan sisanya menjadi kewenangan negara serta provinsi yang menghubungkan antar provinsi seperti Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Berdasarkan **Tabel 2.45**, tren panjang jalan yang diampu oleh Kota Bogor memiliki tren meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.45. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Bogor (Km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Negara	29.020	29.019	29.019	29.019
Provinsi	10.510	10.508	8.989	9.559
Kabupaten/Kota	758.910	758.912	820.963	821.401,84
Jumlah	798.430	798.439	858.971	859.979,84

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023

Upaya perbaikan kualitas jalan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Bogor, karena kualitas jalan sangat memengaruhi waktu tempuh dan keselamatan. Kondisi jalan berdasarkan **Tabel 2.46** di Kota Bogor dalam kategori sedang sebanyak 48,7 persen pada tahun 2022, akan tetapi masih terdapat jalan dengan kondisi rusak walaupun dalam persentase yang kecil yaitu 2,12 persen. Kondisi jalan yang masih rusak perlu untuk segera diperbaiki agar perjalanan menjadi lebih lancar. Selama periode tahun 2019 hingga 2022, tren kondisi jalan yang baik cenderung menurun dan hal ini perlu segera diperbaiki. Sementara itu, kondisi jalan yang sedang mengalami tren peningkatan setiap tahunnya sedangkan kondisi jalan rusak mengalami tren penurunan yang mengindikasikan semakin sedikitnya kondisi jalan yang rusak di Kota Bogor.

Tabel 2.46. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bogor Tahun 2019-2022 (%)

Status	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Baik	48,91%	48,91%	40,02%	39,53%
Sedang	40,99%	40,99%	48,19%	48,70%
Rusak	10,10%	10,10%	2,15%	2,12%
Rusak Ringan	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023

Konektivitas di Kota Bogor ditunjang dengan tersedianya angkutan perkotaan (angkot) dengan trayek yang menjangkau hampir seluruh wilayah. Dapat dikatakan bahwa angkot merupakan konektivitas di Kota Bogor. Trayek dari angkot menghubungkan wilayah-wilayah yang berbeda, mulai dari pusat kota

hingga kawasan perumahan dan industri. Keberadaannya memudahkan akses warga terhadap berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar, serta mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Ongkos yang terjangkau dan rute yang luas menjadikan angkot sebagai pilihan transportasi yang ideal bagi warga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Secara umum, trayek angkot yang beroperasi di Kota Bogor ditunjukkan pada Gambar 2.65 berikut.

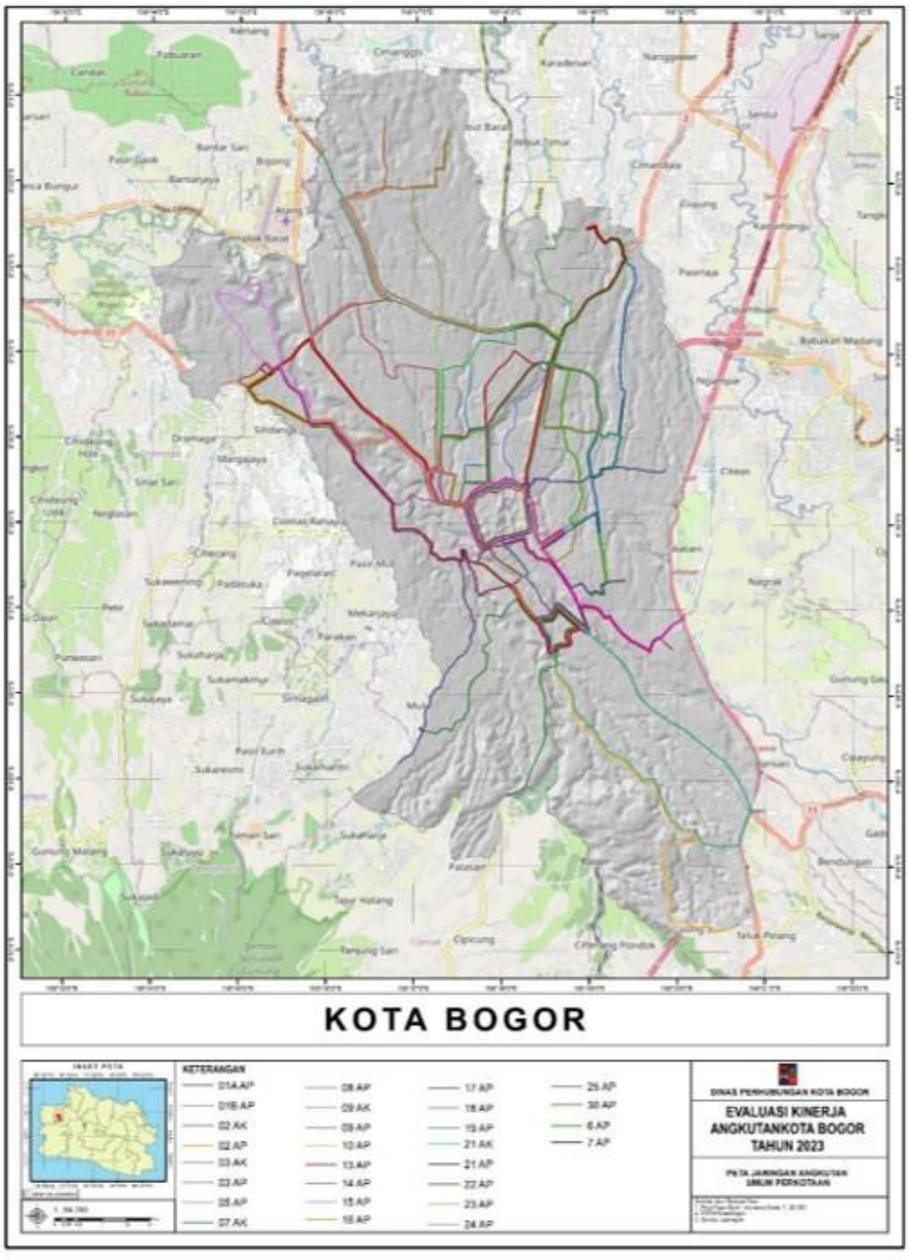

Gambar 2.65. Trayek Angkutan Kota di Kota Bogor

Trayek angkutan kota di Kota Bogor cukup beragam, melayani berbagai wilayah dan menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah sekitarnya. Beberapa trayek yang umum dan penting yang menghubungkan dan menunjang konektivitas antarwilayah di Kota Bogor adalah sebagai berikut.

Trayek Pusat Kota - Perumahan:

- Trayek 01 (Bogor - Cibinong): Menghubungkan pusat kota dengan wilayah Cibinong, melewati jalan utama seperti Jalan Pajajaran dan Jalan Sholeh Iskandar.

- Trayek 02 (Bogor - Ciawi): Menghubungkan pusat kota dengan daerah Ciawi dan sekitarnya, melewati Jalan Pajajaran, Jalan Sholeh Iskandar, dan Jalan Raya Bogor-Ciawi.
- Trayek 03 (Bogor - Dramaga): Menghubungkan pusat kota dengan daerah Dramaga dan sekitarnya, melewati Jalan Pajajaran, Jalan Sholeh Iskandar, dan Jalan Raya Bogor-Ciawi.
- Trayek 05 (Bogor - Ciseeng): Menghubungkan pusat kota dengan daerah Ciseeng dan sekitarnya, melewati Jalan Pajajaran, Jalan Sholeh Iskandar, dan Jalan Raya Bogor-Ciseeng.

Trayek Pusat Kota - Kawasan Industri:

- Trayek 06 (Bogor - Citeureup): Menghubungkan pusat kota dengan wilayah industri Citeureup, melewati Jalan Pajajaran, Jalan Sholeh Iskandar, dan Jalan Raya Bogor-Citeureup.
- Trayek 07 (Bogor - Jonggol): Menghubungkan pusat kota dengan wilayah Jonggol, melewati Jalan Pajajaran, Jalan Sholeh Iskandar, dan Jalan Raya Bogor-Jonggol.
- Trayek 08 (Bogor - Cibinong): Menghubungkan pusat kota dengan wilayah industri Cibinong, melewati Jalan Pajajaran, Jalan Sholeh Iskandar, dan Jalan Raya Bogor-Cibinong.

Trayek Antar-Wilayah:

- Trayek 10 (Cibinong - Ciawi): Menghubungkan wilayah Cibinong dengan Ciawi, melewati Jalan Raya Bogor-Ciawi.
- Trayek 11 (Cibinong - Dramaga): Menghubungkan wilayah Cibinong dengan Dramaga, melewati Jalan Raya Bogor-Ciawi dan Jalan Raya Dramaga.
- Trayek 12 (Citeureup - Cibinong): Menghubungkan wilayah Citeureup dengan Cibinong, melewati Jalan Raya Bogor-Citeureup dan Jalan Raya Bogor-Cibinong.

Trayek Angkutan Perbatasan:

- Trayek 13 (Bogor - Sukabumi): Menghubungkan Kota Bogor dengan daerah Sukabumi, melewati Jalan Raya Bogor-Sukabumi.
- Trayek 14 (Bogor - Depok): Menghubungkan Kota Bogor dengan daerah Depok, melewati Jalan Raya Bogor-Depok.

Meskipun dapat dikatakan menjangkau dan menunjang konektivitas di hampir seluruh wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, angkot di Bogor masih menghadapi beberapa kendala, seperti kondisi kendaraan yang kurang terawat, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya integrasi antar moda transportasi. Namun, potensi pengembangan sangat besar dengan upaya peningkatan kualitas layanan, seperti integrasi dengan moda transportasi lain, penerapan teknologi, dan optimasi trayek. Dengan demikian, angkutan kota di Bogor dapat menjadi solusi transportasi yang lebih baik bagi warga dan mendukung kemajuan kota secara menyeluruh.

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah adalah dengan menyediakan layanan transportasi umum seperti BisKita. BisKita Trans Pakuan adalah layanan angkutan umum berbasis bus raya terpadu di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, yang menerapkan mekanisme subsidi BTS (Buy The Service) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dan diselenggarakan oleh operator PT Kodjari Tata Angkutan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bus ini mirip dengan Transjakarta, berhenti di setiap halte/bus stop; namun yang membedakan, bus ini tak menggunakan jalur khusus. Layanan BisKita Trans Pakuan yang mulai resmi beroperasi pada tanggal 2 November 2021.

BisKita Trans Pakuan mengoperasikan 49 Unit bus ukuran sedang berbodi Nucleus 5 yang diproduksi oleh karoseri Laksana. Masing-masing bus dapat mengangkut hingga 35 penumpang, terdiri dari 20 penumpang duduk dan 15 penumpang berdiri. Bus juga sudah dilengkapi pengondisi udara, kamera pengawas, alat pemadam api ringan, dan pintu darurat. Unit bus BisKita Trans Pakuan juga dilengkapi dengan peralatan Internet of Things (IoT) seperti *passenger counting*, GPS *tracking*, dan *camera surveillance*. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengetahui headway kedatangan atau keberangkatan antar unit bus.

BisKita Trans Pakuan melayani setidaknya enam koridor/rute perjalanan di sepanjang Kota Bogor hingga Kabupaten Bogor (Kecamatan Ciawi). Koridor/rute yang dilalui oleh BisKita Trans Pakuan sebagaimana yang terlihat pada **Gambar 2.66** berikut.

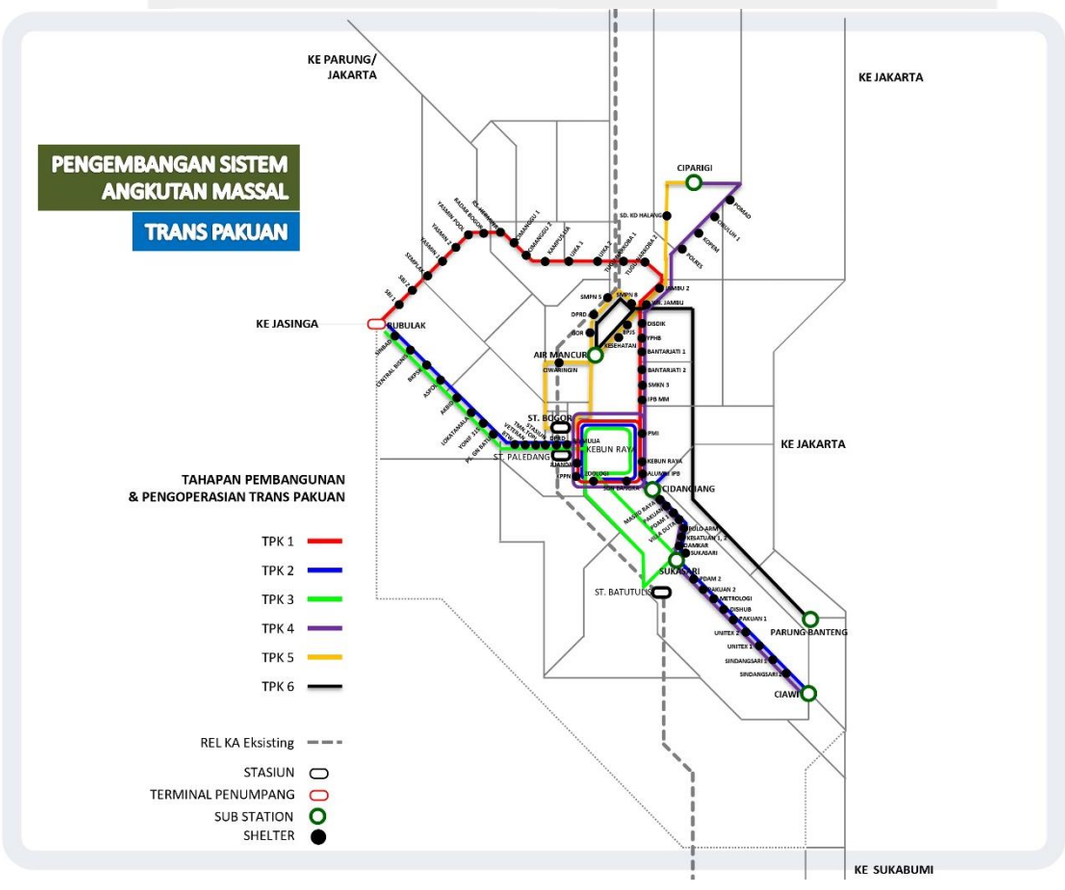

Gambar 2.66. Koridor/Rute Pengoperasian BisKita Trans Pakuan

Sejak 20 Mei 2023, BisKita mengenakan tarif untuk penumpang umum sebesar Rp 4.000, sementara untuk anak sekolah, tarif khusus yang lebih murah, yakni Rp 2.000. Pada awal pengoperasiannya, BisKita Trans Pakuan tidak menarik biaya kepada penumpang yang naik. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan - Buy The Service (BTS) di Kementerian Perhubungan. Tarif tersebut dikenakan kepada penumpang per satu kali naik Biskita Trans Pakuan. Dengan begitu, jika dalam perjalanan penumpang perlu berpindah koridor atau rute maka penumpang akan dikenakan tarif lagi. Untuk menahan tarif pada kisaran tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menyiapkan dana Rp58 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk mengelola 49 Biskita Trans Pakuan Bogor. Dana Rp58 miliar tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

2.3.3.4. Telekomunikasi

Dalam menjalankan pemerintahan terutama pada urusan komunikasi dan informatika, pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi agar dapat mewujudkan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat digunakan untuk mengukur usaha pemerintah mencapai digitalisasi yang baik.

Tabel 2.47. Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	100	
Persentase keterbukaan informasi publik	100	98	77,5	79,80	
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon dalam 3 bulan terakhir	NA	NA	NA	97,34	
Persentase Rumah Tangga kepada Akses Laptop dan Komputer	NA	NA	NA	28,33	
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon Rumah	NA	NA	NA	4,11	
Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	78,3	79,97	86,73	84,77	88,25
Proporsi Individu yang terlayani *mobile broadband* (%)	70,08	72,02	80,5	81,49	84,01
Proporsi Individu yang menggunakan internet (%)	70,08	72,02	80,5	81,49	84,01

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, 2023

Berdasarkan Tabel diatas secara keseluruhan cakupan layanan telekomunikasi di Kota Bogor mencapai 100 persen. Adapun, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kota Bogor pada tahun 2021 sebesar 3,11 dengan predikat baik. Namun demikian, tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 0,36 poin menjadi hanya 2,75 dengan predikat baik. Selain itu, persentase keterbukaan informasi publik Kota Bogor telah mencapai 79,80 persen pada tahun 2022, namun belum mencapai target 100 persen seperti yang ditargetkan.

Selanjutnya, peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Secara umum jumlah rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah hanya sebesar 4,19 persen di tahun 2022. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Pada tahun 2022 persentase penduduk Kota Bogor berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir mencapai 97,34 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai akses terhadap komputer dan laptop pada tahun 2022 sebesar 28,33 persen dari total penduduk di Kota Bogor. Kemudian, di tahun 2022 untuk proporsi telepon genggam, *mobile broadband*, dan pengguna internet mengalami kenaikan daripada tahun 2021.

2.3.3.5. Pemanfaatan Energi

1. Listrik

Jumlah pelanggan PLN Kota Bogor tahun 2014 - 2022 dapat dilihat pada **Gambar 2.67.** Jumlah pelanggan PLN Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan listrik juga meningkat. Jumlah pelanggan PLN Kota Bogor tahun 2022 sebanyak 1.389.587 pelanggan dengan kebutuhan listrik sebesar 2.659.761.246 VA.

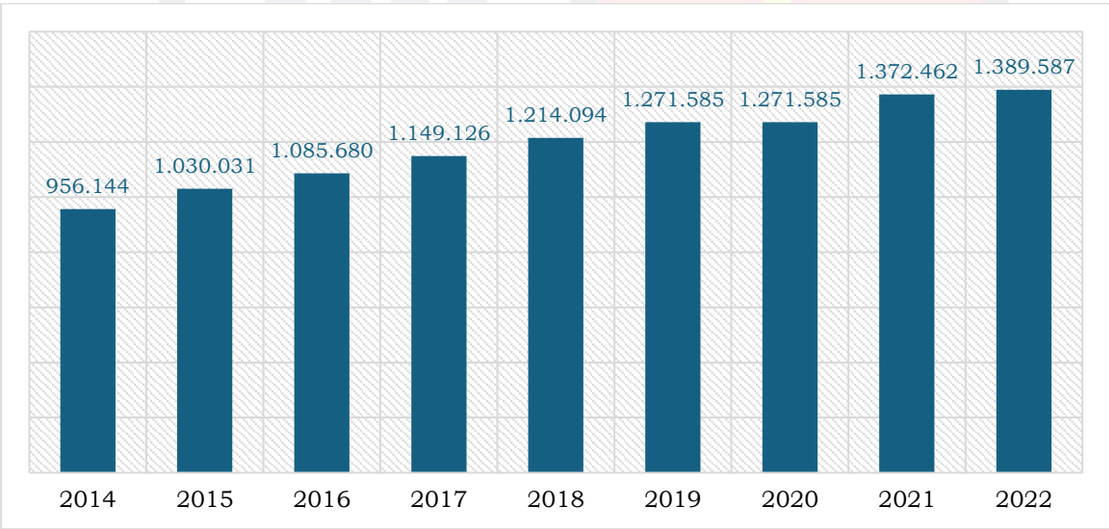

Gambar 2.67. Jumlah Perkembangan Pelanggan PLN Tahun 2014 - 2022

Berdasarkan data PLN Cabang Bogor jumlah pelanggan tertinggi berasal dari kawasan/ rayon Bogor Kota sebesar 300,054 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 417.387.675 VA. Secara rinci daya tersambung dan jumlah pelanggan listrik dapat dilihat pada **Tabel 2.39.**

Tabel 2.48. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN Kota Bogor Menurut Kawasan/ Rayon di Kota Bogor Tahun 2021-2022

Cabang PLN	Daya Tersambung (VA)		Jumlah Pelanggan	
	2021	2022	2021	2022
Cipayung	283.469.980	277.566.170	214.345	215.130
Bogor Timur	391.527.320	381.788.302	220.252	222.142
Pakuan	433.790.595	922.078.080	298.347	475
Bogor Kota	**291.402.619**	**417.387.675**	**210.292**	**300.054**
Bogor Barat	208.845.880	288.719.466	252.998	212.805
Leuwiliang	158.058.070	205.505.197	175.751	254.375
Jasinga	962.127.000	166.716.356	477	184.606
Total	2.729.221.464	2.659.761.246	1.372.462	1.389.587

Sumber: PLN Cabang Bogor, 2023

Berdasarkan data Jawa Barat Dalam Angka 2024, daya terpasang listrik Kota Bogor pada tahun 2023 mencapai 2860,83 MVA, produksi listrik sebanyak 5744,27 GWh dan listrik terjual sebesar 5400,71 GWh, jauh lebih tinggi dibandingkan Bekasi dan Depok. Keterangan lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.49. Daya Terpasang, Produksi Listrik dan Listrik Terjual Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023

Wilayah	Daya Terpasang (MVA)	Produksi Listrik (GWh)	Listrik Terjual (GWh)
Bekasi	2.344,57	5.086,07	4.040,04
Bogor	2.860,83	5.744,27	5.400,71
Depok	2.128,30	3.796,98	3,496,78

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2024

Sementara apabila dilihat seberapa besar pelanggan listrik di Kota Bogor selama tahun 2019-2023 terus meningkat. Pada tahun 2023 pelanggan listrik di Bogor mencapai 1.485.499 orang, terus meningkat dari 1.271.585 pada tahun 2019.

Tabel 2.50. Daya terpasang, Produksi dan Distribusi PT.PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor

Cabang PLN	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor (KWh)									
	Daya Terpasang		Produksi Listrik		Listrik Terjual		Dipakai Sendiri		Susut/Hilang	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Bogor Timur	186.788.290	184.459	0	41.965.780	556.111.559	38.730.430	3.099.233	289.938	59.846.225	2.945.413
Pakuan	258.507.175	168.194	0	168.689.294	604.940.553	168.689.294	3.529.701	0	70.932.582	0
Bogor Kota	104.931.149	249.584	0	62.427.328	429.332.895	57.088.579	2.142.802	469.330	60.824.353	4.869.418
Bogor Barat	208.845.880	105.138	0	19.501.074	351.092.159	17.109.321	1.987.368	150.109	51.875.274	2.241.644

Sumber : PLN Cabang Bogor ; Dikutip dari Kota Bogor Dalam Angka 2023
Source Url : https://bogorkota.bps.go.id/indicator/7/278/1/daya-terpasang-produksi-dan-distribusi-pt-pln-persero-pada-cabang-ranting-pln-menurut-kecamatan-di-kota-bogor.html
Access Time : May 6, 2024, 12:05 am

2.3.3.6. *Smart City*

Berdasarkan data yang diperoleh, level kematangan *smart city* Kota Bogor sejak tahun 2020 hingga 2023 berada pada level *integrative* (Diskominfo Kota Bogor 2023). Level integratif adalah level 3 dalam tatanan parameter kematangan smart city. Pada level *integrative* telah tercapai beberapa hal untuk tiga bagian yaitu *smart economy, smart society dan smart environment*. Pada level *smart economy* telah tercapai pertumbuhan ekonomi tinggi, dukungan layanan TIK yang memulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem. Pada bagian *smart society* telah tercapai kehidupan sosial layak, aman dan nyaman dan bagian *smart environment* telah tercapai lingkungan yang layak huni dengan permasalahan lingkungan yang menerapkan prinsip *tolerable*.

2.3.3.7. Pemenuhan Utilitas Dasar

Pemenuhan utilitas dasar tercermin dari beberapa hal seperti sanitasi, sampah dan air. Utilitas dasar menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sebab tanpa utilitas dasar, masyarakat tidak dapat memiliki kehidupan yang layak, nyaman dan aman. Sistem sanitasi adalah cara pengumpulan, pembuangan, dan pengolahan kotoran manusia dan hewan (feses dan urine) yang aman serta limbah lainnya, seperti sampah dan limbah industri berbahaya. Sistem ini dibuat untuk menciptakan serta menjaga lingkungan, baik itu tanah, air, maupun udara, agar tetap bersih dan higienis. Dengan lingkungan yang bersih, tubuh pun akan menjadi lebih sehat. Pengelolaan sampah juga merupakan hal utama dalam mencapai kehidupan yang sehat selain sistem sanitasi, serta ketahanan air menjadi kunci penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

2.3.3.8. Akses Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia, yang mana fasilitas sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan. Pada Gambar 2.68 terlihat bahwa untuk kategori perkotaan, Kota Bogor selalu memiliki capaian terendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Angka capaian Kota Bogor tahun 2023 sebesar 74,36 persen, sementara Kota Depok dan Kota Bekasi sebagai pembanding memiliki nilai > 95 persen, masing-masing sebesar 97,43% dan 98,52%. Hal ini berarti rumah tangga di Kota Bogor masih belum optimal dalam mengakses sarana prasarana sanitasi yang layak dan aman. Namun demikian, apabila dibandingkan Kabupaten Bogor, persentase Kota Bogor sedikit lebih tinggi, dimana Kabupaten Bogor hanya mencapai 71,49%.

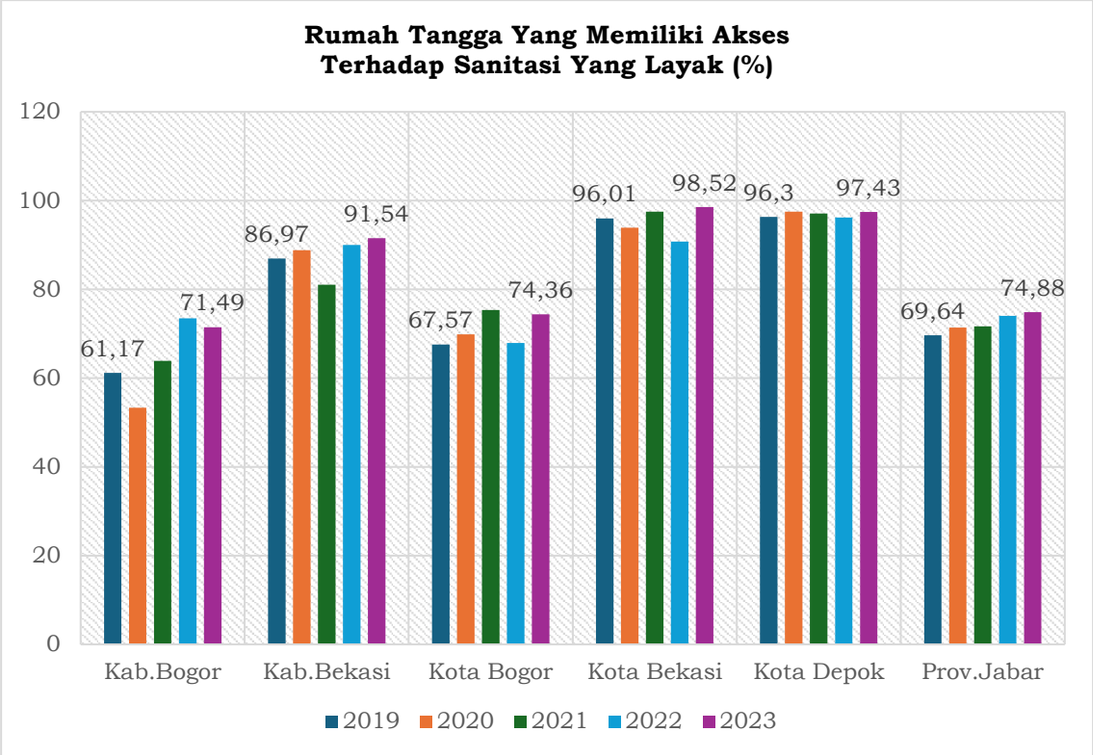

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Gambar 2.68. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen)

2.3.3.9. Pengelolaan Persampahan

Permasalahan sampah terus menjadi persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor. Timbulan sampah merupakan tempat penumpukan sampah yang ditangani oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat terdiri dari beberapa tipe seperti timbunan sampah terbuka atau tertutup. Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pemerintah Kota Bogor telah berupaya optimal untuk menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak baik bagi lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 2.51. Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	77,04	84,81	88,85	89,15	86,84
Timbulan sampah yang ditangani (%)	75,37	77,20	81,00	81,32	79,03
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	6,26	7,61	7,85	7,80	7,81
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	77,04	77,20	81,19	81,39	79,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 2023

Berdasarkan Tabel 2.51, persentase jumlah sampah yang tertangani setiap tahunnya relatif meningkat dan mencapai 86,84 persen di tahun 2023. Hal ini

dikarenakan selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Adapun jumlah TPS 3R pada tahun 2023 sebanyak 30 unit, namun jumlah sampah diolah melalui 3R hingga tahun 2023 baru mencapai 7,81 persen. TPS 3R *(reduce, reuse, recycle)* melakukan pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos agar lebih efektif dan efisien dengan kapasitas tamping 5 m^3 per unit.

Pada tahun 2023, timbulan sampah di Kota Bogor mencapai 668,41 ton/hari sedikit jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 631,42 ton/hari. Dibandingkan wilayah sekitarnya yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan Rata-rata Jawa Barat, Kota Bogor ini relatif paling rendah. Sementara Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan timbulan sampah paling besar mencapai 2.287,57 ton/hari, meningkat cukup besar dibanding tahun sebelumnya (2022) yang mencapai 1.636,35 ton/hari. Angka ini relatif paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya (**Tabel 2.52**). Kota Bekasi menempati wilayah kedua terbesar penghasil timbulan sampah pada tahun 2023 mencapai 1.761,37 ton/hari, sedangkan wilayah paling rendah penghasil timbulan sampahnya adalah Kota Bogor.

Tabel 2.52. Timbulan Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2022-2023 (Ton/Hari)

Wilayah	2022	2023
Kab.Bogor	1.636,35	2.287,57
Kab.Bekasi	929,81	968,27
Kota Bogor	631,42	668,41
Kota Bekasi	1.729,68	1.761,37
Kota Depok	1.337,71	1.288,41
Prov.Jawa Barat	14.961,11	16.145,68

Sumber: Jawa Barat dalam Angka (2024)

Sementara apabila dilihat berdasarkan timbulan sampah per kapita, berdasarkan data Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024 menunjukkan bahwa Kota Bekasi sebagai penghasil timbulan sampah per kapita paling tinggi sebesar 0,68 kg/orang/hari disusul dengan Kota Bogor dan Kota Depok masing-masing sebesar 0,60 kg/orang/hari pada tahun 2023. Sementara Kabupaten Bekasi merupakan paling rendah sebesar 0,35 kg/orang/hari (**Tabel 2.53**).

Tabel 2.53. Timbulan Sampah Per Kapita (kg/orang/hari) Tahun 2022-2023

Wilayah	2022	2023
Kab.Bogor	0,34	0,47
Kab.Bekasi	0,49	0,35
Kota Bogor	0,60	0,60
Kota Bekasi	0,65	0,68
Kota Depok	0,63	0,60
Prov.Jawa Barat		

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka (2024)

Berdasarkan kecamatan di Kota Bogor **Tabel 2.54** menunjukkan bahwa Kecamatan Bogor Barat tertinggi dalam timbulan sampahnya sebesar 59.694 ton per tahun. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk Kecamatan Bogor Barat yang juga paling besar yakni sebesar 233.637 orang. Sementara kecamatan di Kota

Bogor yang timbulan sampahnya relatif paling kecil adalah Kecamatan Bogor Tengah dengan penduduknya yang paling sedikit (96.258 orang) dan timbulan sampahnya sebesar 24.594 ton/tahun.

Tabel 2.54. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
Bogor Barat	233.637	59.694
Bogor Selatan	204.030	52.130
Bogor Tengah	96.258	24.594
Bogor Timur	104.327	26.656
Bogor Utara	186.724	47.708
Tanah Sareal	218.094	55.723

Sumber: Laporan Antara KLHS RPJPD, 2023

Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Bogor masih perlu penanganan yang optimal melalui kebijakan dan kerjasama berbagai level. Adanya kesepakatan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, baik dari pemerintah yang memfasilitasi alat maupun tempat pengelolaan (meningkatkan kuantitas dan kualitas TPS dan TPA), lembaga atau komunitas dan RT/RW yang memberikan edukasi, *reward* dan wadah bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, hingga masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan sampah baik secara mandiri maupun kelompok (bank sampah). Pengelolaan sampah yang berjalan semestinya selalu mengutamakan pada sistem 3R *(reduce, reuse, recycle).*

Timbulan sampah juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Timbulan sampah merupakan volume sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Potensi timbulan sampah di Kota Bogor dihitung berdasarkan distribusi jumlah penduduk dalam setiap kecamatan dalam satu tahun. Berikut data potensi timbulan sampah di Kota Bogor berdasarkan kecam.

2.3.3.10. Ketahanan air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya sangat mudah mengalami kerusakan, baik karena faktor alam seperti kemarau berkepanjangan maupun akibat perilaku konsumsi dan konservasi yang tidak optimal. Fauzi (2010) menjelaskan bahwa alokasi air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna atau calon pengguna.

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi:

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Berdasarkan **Tabel 2.55** pada tahun 2023 persentase akses air jaringan perpipaan meningkat menjadi 76,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan akses terhadap air minum yang aman pada air perpipaan memiliki beberapa alasan, yaitu pertama air sumur sebagai sumber air minum terbesar bagi penduduk mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kedua kontaminasi air perpipaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan air sumur dan sumber-sumber lain, ketiga pencapaian akses terhadap air perpipaan sangat rendah.

Tabel 2.55. Persentase Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan Kota Bogor Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Persentase Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan (%)	70,90	68,49	68,68	76,57

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Penyedia air perpipaan diselenggarakan oleh perusahaan air minum daerah. Kota Bogor memiliki perusahaan air minum daerah (PDAM) yang bernama Perumda Tirta Pakuan. Pada tahun 2023 jumlah pelanggan air minum sebanyak 177.451 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 44 juta m^3 yang dibagi kedalam tujuh zona.

Tabel 2.56. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Zona Pelayanan di Kota Bogor Tahun 2021-2023

Zona	Pelanggan			Air Disalurkan (m^3)			Nilai (Rp)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Zona 1	20.577	15.499	15.864	4.334.778	3.856.254	3.606.263	24.924.756.000	22.443.881.800	22.857.698.900
Zona 2	4.525	6.416	4.709	1.054.841	1.069.906	1.107.766	4.813.280.500	4.829.854.400	5.313.856.700
Zona 3	48.327	38.244	38.699	12.809.198	11.599.228	10.787.736	81.420.816.900	72.189.768.400	67.901.742.200
Zona 4	83.925	66.486	67.968	20.090.479	18.062.361	17.112.535	122.652.528.200	112.222.910.600	113.250.212.300
Zona 5	4.684	4.887	5.047	1.082.268	1.114.974	1.159386	5.909.876.200	6.061.165.500	6.623.990.800
Zona 6	7.617	7.982	8.029	1.716.353	1.792.951	1.849.915	8.063.124.400	8.530.833.700	9.243.121.600
Zona 7	-	36.054	37.135	-	5.126.990	9.211.757	-	33.157.044.900	62.980.879.655
Kota Bogor	**169.655**	**173.768**	**177.451**	**41.087.917**	**42.622.664**	**44.835.357**	**247.784.382.200**	**259.435.459.300**	**288.171.502.155**

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Berdasarkan **Tabel 2.57**, zona pelayanan air Perumda Tirta Pakuan memiliki tujuh zona dengan jumlah pelanggan terbanyak pada tahun 2023 berada pada zona 4. Hal ini dikarenakan pada zona 4 mencakup sebagian besar wilayah di Kota Bogor dibandingkan zona lainnya. Terjadi peningkatan jumlah pelanggan pada zona 4 dibandingkan tahun sebelumnya, dan penurunan jumlah pelanggan pada zona 2. Menurunnya jumlah pelanggan air pada Perumda Tirta Pakuan disebabkan beberapa hal seperti seperti keberadaan sumber air lain, berlangganan PDAM mahal, pendapatan, serta layanan PDAM seperti air yang berbau, biaya pasang mahal dan air sering tidak mengalir pada jam-jam tertentu.

Tabel 2.57. Zona Pelayanan Perumda Pakuan Tirta Bogor

Zona Pelayanan	Sumber Air	Wilayah Pelayanan
Zona 1	IPA Rancamaya & Mata Air Tangkil	a) Sebagian Kecamatan Bogor Selatan b) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Timur
Zona 2	Mata Air Bantar Kambing	Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan
Zona 3	IPA Cipaku	a) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Tengah b) Sebagian Kecamatan Bogor Barat
Zona 4	IPA Dekeng	a) Sebagian Besar Kecamatan Tanah Sareal b) Sebagian Kecamatan Bogor Utara c) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Barat d) Sebagian Kecamatan Bogor Tengah
Zona 5	IPA Palasari & Mata Air Palasari	Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan
Zona 6	Mata Air Kota Batu	a) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan b) Sebagian Kecamatan Bogor Barat
Zona 7	IPA Katulampa	a) Sebagian Kecamatan Bogor Timur b) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Utara

Sumber: PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik daerah. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari nilai investasi. Nilai investasi yang ditanamkan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Investasi yang baik dilihat dari kondisi iklim investasi yang tercermin salah satunya dalam indeks kerukunan umat beragama dan indeks daya saing daerah serta indeks inovasi daerah.

Penanaman modal atau investasi sangat ditentukan oleh beragam faktor diantaranya adalah faktor keamanan, kondisi politik dan sosial. Pemerintah daerah berperan untuk menjaga kondisi tersebut agar tercipta iklim investasi yang kondusif. pemerintah merupakan fasilitator dan dinamisator bagi berkembangnya investasi. Salah satu produk peraturan pemerintah pusat yang dapat digunakan di berbagai daerah adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2.3.4.1. Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Indeks ini dibentuk dari empat (4) komponen yaitu **Lingkungan Pendukung, SDM, Pasar dan Ekosistem Inovasi**. Pada tahun 2023, Kota Bogor memiliki skor IDSD sebesar 3,74 meningkat dari tahun 2022 yang mencapai 3,42, Nilai ini sedikit lebih rendah dari IDSD Jawa Barat yang mencapai 3,76, Kota Depok (3,78) dan Kota Bekasi (3,87). (**Tabel 2.58**).

Tabel 2.58. Nilai IDSD Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Wilayah	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	4,03	5,68	2,92	3,06	3,42	3,74
Bogor	5,541	8,52	3,67	3,7	3,24	3,46
Kota Depok	0	2,97	3,44		-	3,78
Kota Tangerang	0	0	2,59		-	
Tangerang	0	0	0	-	3,45	

Wilayah	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bekasi	3,477	1,59	2,73		3,46	3,87
Bekasi	3,369	0	0	0,763	-	3,38
DKI Jakarta	-	-	3,18	3,962	4,01	
Jawa Barat	**5,04**	**11,76**	**4,18**	**4,136**	**3,64**	**3,76**

Sumber: BRIN, 2024

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menjadi motor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat terlepas dari modal baik modal fisik, sosial, dan lainnya. Dukungan investasi merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan stok modal. Peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), namun Penanaman Modal Asing (PMA) juga menjadi hal yang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan barang modal, bahan baku, dan komponen substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja yang semakin luas (Sukirno, 2004).

Gambar 2.69 menunjukkan klasterisasi hubungan nilai investasi (PMDN dan PMA) Kota Bogor serta kabupaten/ kota lainnya tahun 2023. Jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya, walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup tinggi, namun nilai investasi yang masuk ke Kota Bogor merupakan yang paling rendah. Dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Bogor seperti telah dilalui jalan tol serta jalan-jalan arteri primer dalam kondisi baik, jumlah industri kecil menengah (IKM) yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Bogor dengan variasi kegiatan industri, dan potensi pengembangan wisata tematik yang mampu memberikan nilai tambah dalam aktivitas ekonomi. Kota Bogor dapat terus dikembangkan dan dipromosikan untuk dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan visi Kota Bogor dalam RPJPD 2025-2045, Kota Bogor akan menjadi Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan yang tentunya memerlukan modal, yaitu investasi.

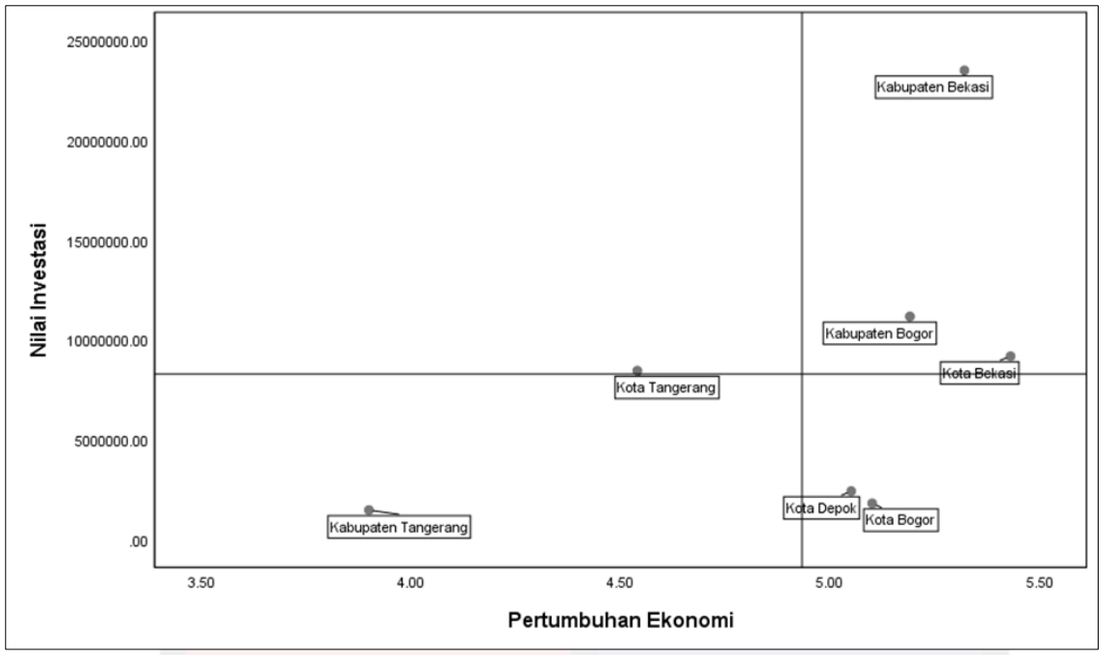

Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Banten, dan BKPM, 2024

Gambar 2.69. Klassen Nilai Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023

2.3.4.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Kontribusi PMTB Kota Bogor terhadap PDRB ADHB merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 34,62 persen pada tahun 2023. Apabila dilihat pada tabel dibawah, kontribusi PMTB Kota Bogor dari tahun 2013 hingga 2023 cenderung berfluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 35,68 persen. Semakin tinggi kontribusi PMTB mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin baik. Hal ini dikarenakan salah satu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang merupakan salah satu indikator dalam PMTB dalam pembentukan PDRB.

Tabel 2.46. Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2023

Wilayah	Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	31,03	34,25	36,11	35,65	35,68	34,44	34,22	31,92	34,01	32,96	34,62
Kabupaten Bogor	22,24	22,71	22,97	22,29	21,82	22,24	22,00	20,60	21,51	21,02	21,17
Kota Tangerang	27,58	27,68	27,64	27,27	28,36	29,99	31,14	37,58	38,65	34,86	33,84
Kabupaten Tangerang	19,96	20,91	21,34	4,92	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08	27,03
Kota Bekasi	31,35	33,34	33,98	34,99	35,65	36,80	37,88	35,11	35,06	33,79	33,92
Kabupaten Bekasi	19,75	21,44	22,29	22,68	22,70	23,31	22,98	20,30	21,65	21,55	21,73

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

2.3.4.3. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter makroekonomi yang menunjukkan rasio investasi modal/ kapital terhadap output yang dihasilkan dengan menggunakan investasi yang dimiliki. Kapital dapat diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dalam kegiatan produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Angka ICOR menunjukkan besarnya input yang dibutuhkan untuk meningkatkan setiap 1 unit output. **Gambar 2.70** menunjukkan perkembangan nilai ICOR dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor selama tahun 2011-2023. Pergerakan ICOR dan laju pertumbuhan ekonomi relatif sejalan, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor bernilai negatif sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan nilai -0.41%. Begitu pula dengan ICOR Kota Bogor pada tahun yang sama juga bernilai negatif dengan nilai -78.83. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah output dibandingkan periode sebelumnya sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan hampir seluruh sektor produksi. Penurunan ini bukan disebabkan karena berkurangnya kapital yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, namun lebih disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan dalam kegiatan produksi yang menurunkan kapasitas produksinya.

Semakin efisien suatu perekonomian maka semakin rendah nilai ICORnya yang berarti semakin sedikit penambahan kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output. Pada tahun 2021 nilai ICOR Kota Bogor mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai 9.19. Selanjutnya, nilai ICOR cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2023 nilai ICOR Kota Bogor mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari investasi di Kota Bogor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

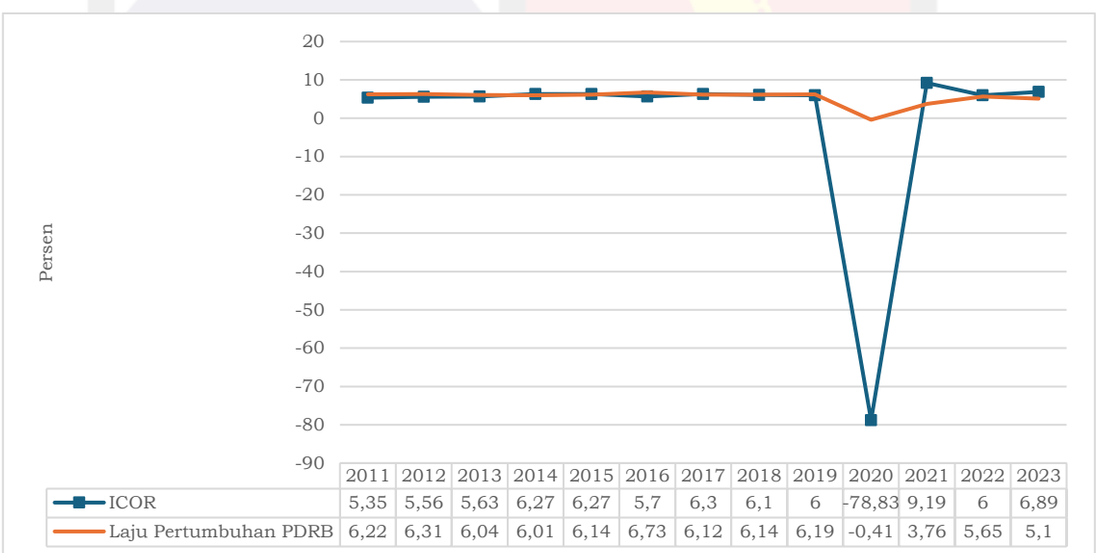

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ICOR	5,35	5,56	5,63	6,27	6,27	5,7	6,3	6,1	6	-78,83	9,19	6	6,89
Laju Pertumbuhan PDRB	6,22	6,31	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76	5,65	5,1

Sumber: BPS Kota Bogor, 2024

Gambar 2.70. Perkembangan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2011-2023

2.3.4.4. Iklim Demokrasi

Demokrasi saat ini menjadi sebuah wacana yang hampir diterima sebagai suatu konsep ideal di seluruh negara. Berdasarkan Fukuyama (2018) pada tahun 1970 hanya ada sekitar 35 negara demokrasi, sedangkan pada tahun 2000-1n, jumlah negara demokrasi mencapai 120. Penambahan negara demokrasi terbanyak berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet, Eropa Timur dan negara-negara lain bekas penganut paham komunis. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di dunia memiliki indeks demokrasi untuk mengukur kondisi demokrasi yang terjadi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara reguler apakah kondisi demokrasi Indonesia bergerak menuju negara demokrasi atau sebaliknya. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran IDI bersumber dari nilai demokrasi yang didapat pada tingkat provinsi di Indonesia.

Pengukuran IDI mencakup tiga aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan tabel di bawah diketahui bahwa Provinsi Jawa barat memiliki nilai untuk setiap aspek pada IDI cukup tinggi, hal ini memperlihatkan bahwa iklim demokrasi yang terjadi di Jawa Barat sudah cukup baik.

Tabel 2.59. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 Menurut Aspek

Wilayah Provinsi	Aspek Kebebasan		Aspek Kesetaraan		Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Jawa Barat	90,61	87,97	82,61	83,63	77,05	77,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

2.3.4.5. Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama (KUB) merupakan sebuah survei yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) atau juga dikenal dengan Indeks Kerukunan Kota Bogor merupakan sebuah indikator penilaian kerukunan, toleransi, dan kerja sama antar masyarakat di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Komponen penilaian IKUB didasarkan dari tiga dimensi. Dimensi pertama yakni dimensi kerja sama, dimensi toleransi dan dimensi kesetaraan. Indeks kerukunan umat beragama Kota Bogor memiliki nilai yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 nilai indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,51 dan pada tahun berikutnya nilai yang diperoleh semakin tinggi. Pada tahun 2023, pengukuran indeks kerukunan ini dilakukan dengan melakukan survei (data primer) ke 401 responden di enam kecamatan se-Kota Bogor selama bulan September-November. Hasilnya capaian Indeks Kerukunan Kota Bogor 2023 mengalami peningkatan dari 2022 yakni dari 79,16 menjadi 79,98. Selain itu, skor Indeks terendah yakni di Kecamatan Bogor Utara dengan poin 76. Diharapkan upaya

menjaga Marwah Kota Bogor sebagai "Kota Toleran" dapat terus diupayakan, khususnya melalui perumusan kebijakan/regulasi seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan semangat *leadership*, toleransi, dan berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat hingga pemuka agama. Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama berarti semakin baik toleransi antar umat beragama di Kota Bogor.

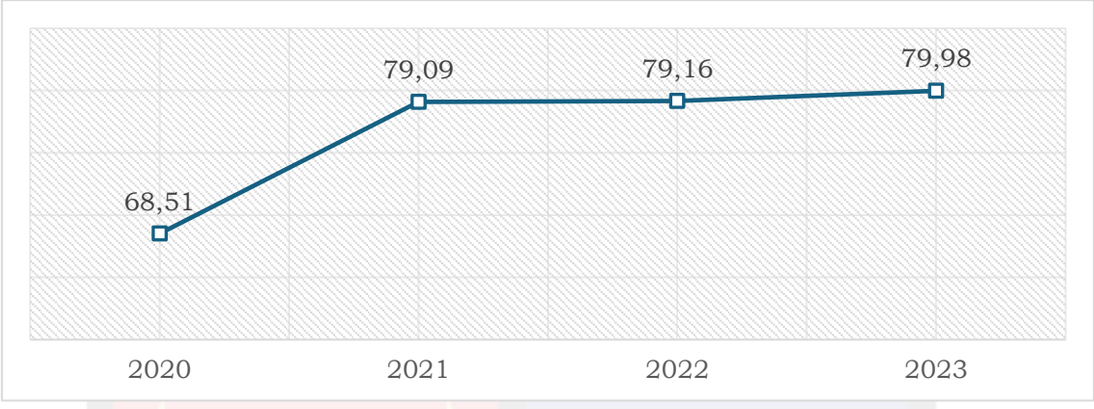

Sumber: Kesbangpol 2023

Gambar 2.71. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2023

2.3.4.6. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dan kerukunan antara umat beragama atau kelompok keagamaan yang berbeda dalam suatu Masyarakat. Pada tahun 2021, indeks toleransi Kota Bogor sebesar 72,74, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 79,88

2.3.4.7. Indeks Kerjasama

Indeks Kerjasama adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kerjasama, dialog, dan kolaborasi antara berbagai umat beragama atau kelompok keagamaan dalam suatu masyarakat. Indeks ini bertujuan untuk memahami sejauh mana berbagai kelompok keagamaan dapat bekerja sama secara harmonis, mengatasi perbedaan keyakinan, dan berkontribusi pada kerukunan sosial dan perdamaian. Pada tahun 2021, indeks kerjasama Kota Bogor sebesar 78,63 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 80,52

2.3.4.8. Indeks Kesetaraan

Indeks Kesetaraan adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan atau ketidaksetaraan di antara berbagai umat beragama atau kelompok keagamaan dalam suatu masyarakat. Indeks ini bertujuan untuk memahami sejauh mana individu atau kelompok beragama memiliki kesempatan, hak, dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, partisipasi politik, dan lainnya. Pada tahun 2021, indeks kesetaraan Kota Bogor sebesar 85,91 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 79,53

2.3.4.9. Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban merupakan hal penting dalam mendukung investasi, tanpa ada rasa aman dan nyaman, maka investor cenderung untuk tidak

ingin berinvestasi. Oleh karena itu semakin sedikit tingkat kriminalitas/kejahatan di suatu daerah merupakan hal yang diinginkan untuk meningkatkan investasi. Tingkat kriminalitas atau tindak kejahatan di Kota Bogor dari tahun ke tahun terus ada dan berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa angka tingkat kriminalitas cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga 2017 dan mulai menurun tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun berikutnya yaitu 2022 hingga 2023 angkanya kembali meningkat. Angka kriminalitas terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 909 kejadian dan yang tertangani sebanyak 644 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat terjadi pandemi Covid-19 terjadi penurunan angka kriminalitas yang disebabkan banyaknya kasus covid hingga banyak menelan korban jiwa. Berikut merupakan data tingkat kriminalitas di Kota Bogor.

Tabel 2.60. Angka Tingkat Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2014-2023 (kejadian)

Data	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka tingkat kriminalitas	1.205	1.251	1.417	1.327	1.110	919	909	978	1.479	1.366
Angka kriminalitas yang tertangani	798	815	922	874	692	589	644	687	905	853

Sumber: Reskrim Kota Bogor, 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata kelola yang baik di Kota Bogor. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah.

2.4.1. Reformasi Birokrasi

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Bogor. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum menjadi salah satu prioritas utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan (8) agenda pembangunan yang kemudian dijabarkan menjadi 17 arah pembangunan, salah satunya terkait pelayanan publik yakni "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola" yang mencakup berbagai aspek pelayanan umum.

Reformasi birokrasi Kota Bogor dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan gambar di bawah, indeks reformasi birokrasi Kota Bogor pada tahun 2019 hanya sebesar 66,01 dan

selama tiga tahun yaitu tahun 2019 hingga 2021 predikat indeks reformasi birokrasi Kota Bogor adalah B. Kemudian pada tahun 2022, indeks reformasi birokrasi Kota Bogor meningkat menjadi 70,76 dengan predikat BB dan puncaknya pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi meningkat menjadi 80,97 dengan predikat A dan merupakan capaian terbaik selama rentang waktu 2019-2023.

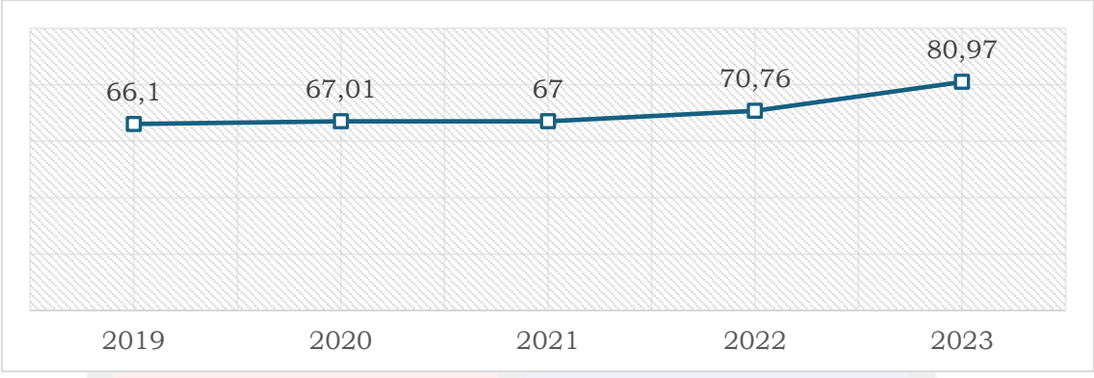

Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.72. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2019-2023

Indeks reformasi birokrasi yang semakin baik untuk Kota Bogor mengindikasikan bahwa masyarakat telah secara langsung merasakan adanya manfaat dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Namun, pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi birokrasi.

Dibandingkan dengan wilayah lainnya maka indeks reformasi birokrasi Kota Bogor tahun 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat. Predikat indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang adalah B, sedangkan Kabupaten Bekasi memperoleh predikat paling rendah yaitu CC dibandingkan kota dan kabupaten lainnya.

Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.73. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2022

Ukuran akuntabilitas kinerja dan keandalan sistem manajemen kinerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil pencapaian penyelenggaraan pengawasan *intern* pemerintah (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan

consulting). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023 terdapat 2 Perangkat Daerah dengan nilai AA, 32 Perangkat Daerah mendapat nilai A dan 2 Perangkat Daerah lainnya mendapat nilai BB. Rekapitulasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut.

Tabel 2.19. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 - 2023

No.	Kategori Nilai	Jumlah PD 2021	Jumlah PD 2022	Jumlah PD 2023
1	AA (sangat memuaskan)	-	-	2
2	A (memuaskan)	10	17	32
3	BB (sangat baik)	17	18	2
4	B (baik)	8	1	-
5	CC (cukup/memadai)	1	-	-
6	C (kurang)	-	-	-
7	D (sangat kurang)	-	-	-
Jumlah		36	36	36

Sumber: Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023

2.4.2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Indeks pelayanan publik Kota Bogor berada pada peringkat A- begitu pula dengan daerah di kota atau kabupaten lainnya yang berdekatan dengan Kota Bogor juga memperoleh peringkat A- pada tahun 2023 kecuali Kota Depok yang memperoleh peringkat B- berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun

2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan BUMN tahun 2023.

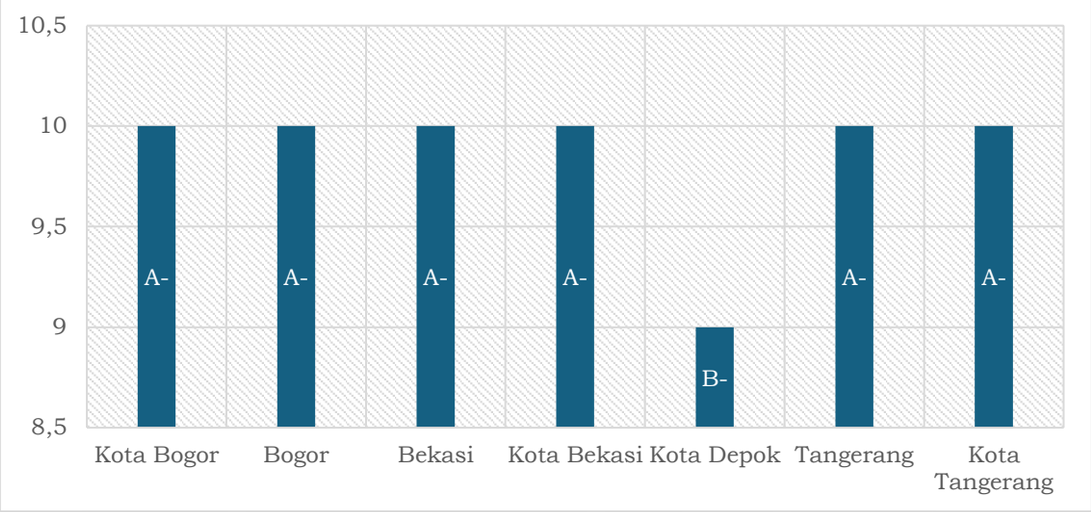

Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.74. Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023

Pelayanan publik di Kota Bogor memerlukan penguatan pada seluruh aspek agar dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan peringkat A. Penguatan yang dapat dilakukan berupa penguatan pelayanan publik dengan mengandalkan teknologi informasi. Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik semakin efisien dan efektif.

2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Nilai SPBE Kota Bogor pada tahun 2029 dan 2020 memiliki nilai yang sama yaitu 2,97. Pada tahun 2021 sebesar nilai SPBE meningkat menjadi 3,11 dengan predikat baik. Namun demikian, tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 0,36 poin menjadi hanya 2,75 dengan predikat baik. Nilai SPBE meningkat kembali pada tahun 2023, nilai SPBE meningkat menjadi 3,72 dengan predikat sangat baik. Nilai SPBE yang semakin meningkat mencerminkan bahwa layanan pemerintah Kota Bogor telah banyak memanfaatkan teknologi digital dan *big data* sehingga sistem pemerintahan telah banyak yang terintegrasi. Hal inilah yang diharapkan dari adanya penilaian SPBE di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

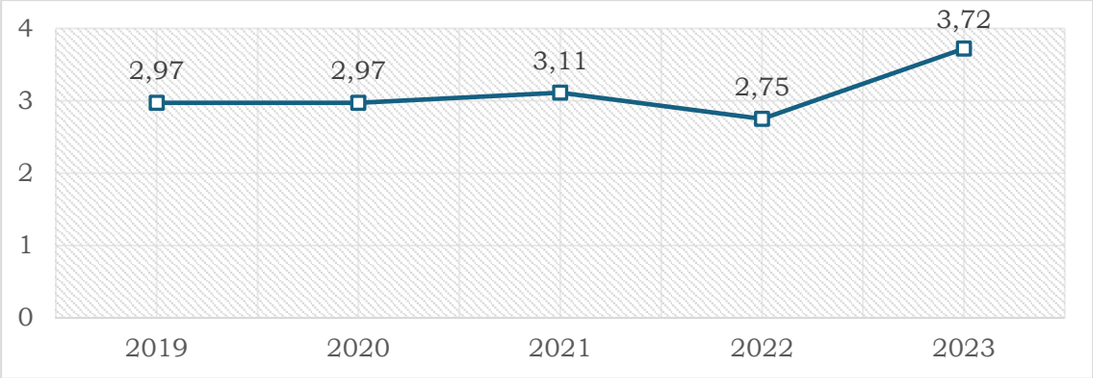

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dan Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.75. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019-2023

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kota Bogor tahun 2023 merupakan yang tertinggi dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat sangat baik untuk nilai SPBE seperti Kota Bogor adalah Kabupaten Bogor dan Kota Depok dengan nilai SPBE masing-masing 3,71 dan 3,70, sedangkan daerah lainnya hanya memperoleh predikat baik. Nilai SPBE terkecil yaitu pada daerah Kota Tangerang sebesar 2,97.

Daerah yang memiliki nilai SPBE cukup kecil perlu untuk mendorong transformasi digital agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Dampak yang dapat timbul apabila SPBE kurang diterapkan ialah pengambilan keputusan oleh *stakeholder* menjadi kurang akurat, tidak adanya kesinambungan antara instansi pusat dan daerah, kualitas layanan publik yang kurang serta timbulnya kesenjangan karena minimnya perhatian akan pentingnya SPBE. Untuk meningkatkan nilai SPBE, maka dapat dilakukan dengan mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, mewujudkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia SPBE.

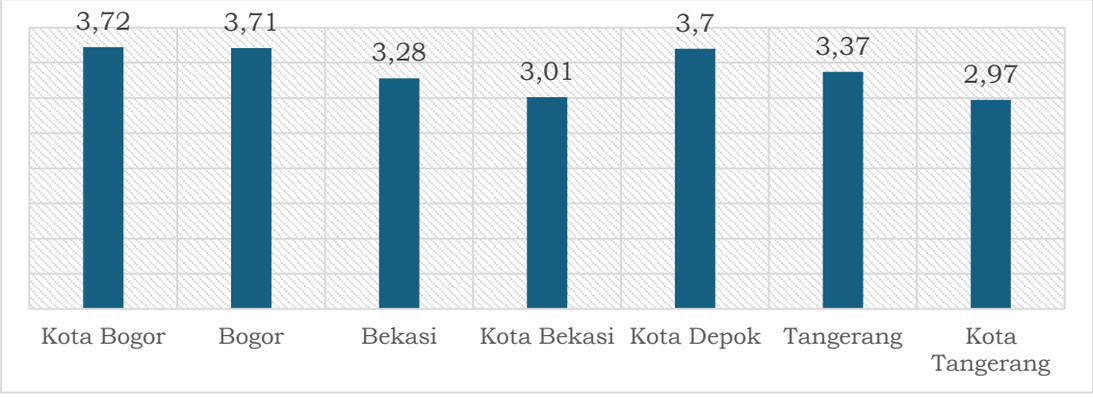

Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.76. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun 2023

2.4.4. Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah dinilai berdasarkan indeks inovasi daerah yang berlandaskan pada Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa "dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi". Landasan hukum lain dalam mendukung pengukuran indeks inovasi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah.

Berdasarkan **Tabel 2.61**, Kota Bogor memiliki indeks inovasi daerah sebesar 56,82 pada tahun 2023 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 74,77 dengan kategori sangat inovatif. Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Jabodetabek yang tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai sebesar 80,98.

Tabel 2.61. Nilai Indeks Inovasi Daerah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Nilai/ Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	Nilai	30.640	5,162	57,8	56,48	56,82
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Bogor	Nilai	36.870	13.144	72,46	87,59	80,93
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
Kota Depok	Nilai	200	1.754	41,52	48,74	51,12
	Kategori	Kurang inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Kota Tangerang	Nilai	-	10.762	62,7	53,23	60,39
	Kategori	Belum mengisi data	Sangat inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
Tangerang	Nilai	100	2.274	41,16	54,7	61,49
	Kategori	Kurang inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
Kota Bekasi	Nilai	11.170	4.669	51,74	66,26	72,74
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
Bekasi	Nilai	130	-	23,92	52,14	51,64
	Kategori	Kurang inovatif	-	Kurang inovatif	Inovatif	Inovatif
DKI Jakarta	Nilai	51.870	10.532	56,8	60,51	80,98
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
Jawa Barat	Nilai	59.350	6,88	62,82	69,15	74,77
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.5. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei

melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, serta sumber *expert* atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan lain lain. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tersebut. Terdapat tiga kategori nilai SPI, antara lain:

1. Rentan untuk nilai SPI yang berada di rentang 0-72,9;
2. Waspada untuk nilai SPI yang berada di rentang 73-77,9;
3. Terjaga untuk nilai SPI yang berada di rentang 78-100.

Berdasarkan **Tabel 2.62**, Kota Bogor di tahun 2023 memiliki nilai SPI sebesar 76,18 dan termasuk ke dalam kategori waspada. Di sisi lain, Kota Bogor memiliki nilai tertinggi dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Nilai tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 69,60. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Bogor menempati posisi tertinggi kedua untuk nilai SPI tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat sedangkan daerah yang memiliki nilai SPI tertinggi adalah Kota Sukabumi sebesar 77,01. Selama tahun 2021 - 2023 nilai SPI cenderung fluktuatif namun selalu berada di kategori waspada. Bentuk tindakan pemerintah Kota Bogor dalam menindaklanjuti hasil SPI tahun 2022 adalah sosialisasi anti korupsi, adanya rencana pendidikan anti korupsi yang berlangsung dari mulai usia dini sehingga kurikulum pelajaran bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta pembinaan dan pendampingan pemerintah kota Bogor terhadap aparaturnya juga telah berlangsung sehingga dari tingkat terbawah hingga ke dinas dan instansi lainnya dapat bersama mencegah tindak pidana korupsi.

Tabel 2.62. Nilai Survei Penilaian Integritas Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Nilai/ Kategori	Tahun		
		2021	2022	2023
Kota Bogor	Nilai	75,22	73,06	76,18
	Kategori	Waspada	Waspada	Waspada
Bogor	Nilai	71,74	64,27	69,44
	Kategori	Rentan	Rentan	Rentan
Kota Depok	Nilai	74,53	73,21	73,53
	Kategori	Waspada	Waspada	Waspada
Kota Tangerang	Nilai	76,91	71,3	74,13
	Kategori	Waspada	Rentan	Waspada
Tangerang	Nilai	73,13	71,67	73,86
	Kategori	Waspada	Rentan	Waspada
Kota Bekasi	Nilai	75,38	69,58	68,26
	Kategori	Waspada	Rentan	Rentan
Bekasi	Nilai	67,97	67,95	68,04
	Kategori	Rentan	Rentan	Rentan
Jawa Barat	Nilai	77,54	75,67	69,60
	Kategori	Waspada	Waspada	Rentan

Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK, 2024

2.4.6. Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Pada IKK terdapat dua dimensi yang dinilai, yakni Dimensi Perencanaan Kebijakan dan Dimensi Evaluasi Kebijakan. Pengukuran IKK dilakukan terhadap seluruh kebijakan Kementerian/ Lembaga/ Daerah yang implementasinya telah berusia lebih dari 1 tahun. Pengukuran dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta untuk memberikan kesempatan bagi Kementerian/ Lembaga/ Daerah dilakukannya perbaikan-perbaikan terhadap hasil pengukuran. Berdasarkan data dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Kota Bogor baru mengikuti IKK pada tahun 2023 dengan capaian nilai 65,00 termasuk ke dalam kategori baik. Sementara itu, Kabupaten Bogor meraih nilai IKK sebesar 90,53 termasuk ke dalam kategori sangat baik dan menjadi daerah dengan nilai IKK tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Di sisi lain, capaian nilai IKK Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 87,36 dan termasuk ke dalam kategori sangat baik.

2.4.7. Kemandirian Daerah

Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Kemandirian suatu daerah dapat tercermin melalui indikator rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan rasio kapasitas fiskal daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam menghasilkan penerimaan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Rasio pajak daerah terhadap PDRB menggambarkan proporsi pendapatan pajak yang diperoleh oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan nilai total produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur di tingkat daerah. Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemandirian finansial dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.63. Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023 (persen)

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	1,292	1,231	1,265	1,444	1,403	1,493	1,109	1,170	1,408	1,575
Bogor	0,748	0,765	0,825	0,889	0,898	0,946	0,787	0,987	0,969	0,971
Kota Depok	1,131	1,275	1,282	1,441	1,304	1,435	1,349	1,572	1,690	1,667
Kota Tangerang	0,959	0,941	0,955	1,051	0,961	1,093	1,460	0,992	-	-
Tangerang	-	1,139	1,189	1,544	1,475	1,538	1,254	1,416	1,802	2,014
Kota Bekasi	1,319	1,456	1,475	1,672	1,737	1,808	1,614	1,688	1,832	1,795
Bekasi	0,489	0,563	0,559	0,545	0,542	0,605	0,613	0,590	0,574	0,602
Jawa Barat	0,992	0,959	1,896	1,345	1,861	0,924	0,818	0,855	0,889	0,835

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, Kabupaten Bogor Dalam Angka, Kota Depok Dalam Angka, Kota Tangerang Dalam Angka, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, Kota Bekasi Dalam Angka, Kabupaten Bekasi Dalam Angka, dan Jawa Barat Dalam Angka (diolah)

Berdasarkan **Tabel 2.63** terlihat bahwa rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bogor berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama tahun 2014 hingga 2023. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, nilai rasio Kota Bogor pada tahun 2023 masih lebih kecil dibandingkan wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Akan tetapi, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bogor secara keseluruhan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bogor sudah cukup baik.

Tabel 2.64. Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2023

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Nilai/ Kategori	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	Nilai	0,43	0,50	1,74	2,064	1,811	1,168	1,808	1,434	1,817
	Kategori	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi
Bogor	Nilai	0,25	0,31	6,24	5,148	5,563	4,343	6,209	1,984	2,110
	Kategori	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Depok	Nilai	1,19	1,35	2,81	2,741	2,544	2,521	3,400	2,625	2,481
	Kategori	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Tangerang	Nilai	0,65	0,89	4,08	3,913	4,223	1,899	4,487	2,003	1,847
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Tangerang	Nilai	0,61	0,62	5,10	6,120	4,318	7,509	4,811	1,648	1,785
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi
Kota Bekasi	Nilai	0,53	0,68	4,87	4,349	6,916	5,873	6,448	1,505	1,658
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi
Bekasi	Nilai	0,69	0,75	5,26	4,524	4,409	4,686	4,888	1,688	1,662
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi
Jawa Barat	Nilai	0,27	0,30	2,86	3,150	3,171	4,676	3,602	2,546	2,456
	Kategori	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2015-2023)

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Berdasarkan **Tabel 2.64**, rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 masih lebih kecil dibandingkan wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang. Selama tahun 2015 hingga 2023, rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bogor memiliki tren yang berfluktuasi. Secara keseluruhan, Kota Bogor memiliki rasio Kapasitas Fiskal Daerah terkecil jika dibandingkan dengan wilayah Bodetabek. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Bogor masih perlu ditingkatkan kembali.

2.4.8. Indeks Merit Sistem

Definisi sistem merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

Kota Bogor telah menerapkan sistem merit dalam manajemen talenta ASN-nya. **Gambar 2.77** menunjukkan, dalam Peraturan Wali Kota Bogor No. 40 Tahun 2021, dijelaskan mengenai alur penyelenggaraan manajemen talenta ASN yang meliputi akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, dan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, dilakukan juga pembentukan tim manajemen talenta ASN yang bertugas untuk:

1. menetapkan calon talenta, menetapkan talenta untuk dimasukkan ke dalam Rencana Suksesi, mengevaluasi talenta dan mencalonkan talenta yang akan dipilih Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan;
2. membantu proses penilaian kinerja, penilaian kompetensi, dan pengembangan talenta;
3. menyusun standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural dan alat ukur yang digunakan, serta melakukan assessment kompetensi berdasarkan standar dan alat ukur yang telah ditetapkan;
4. mengolah, menyusun, dan mengevaluasi pemetaan talenta; dan
5. menyusun dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi.

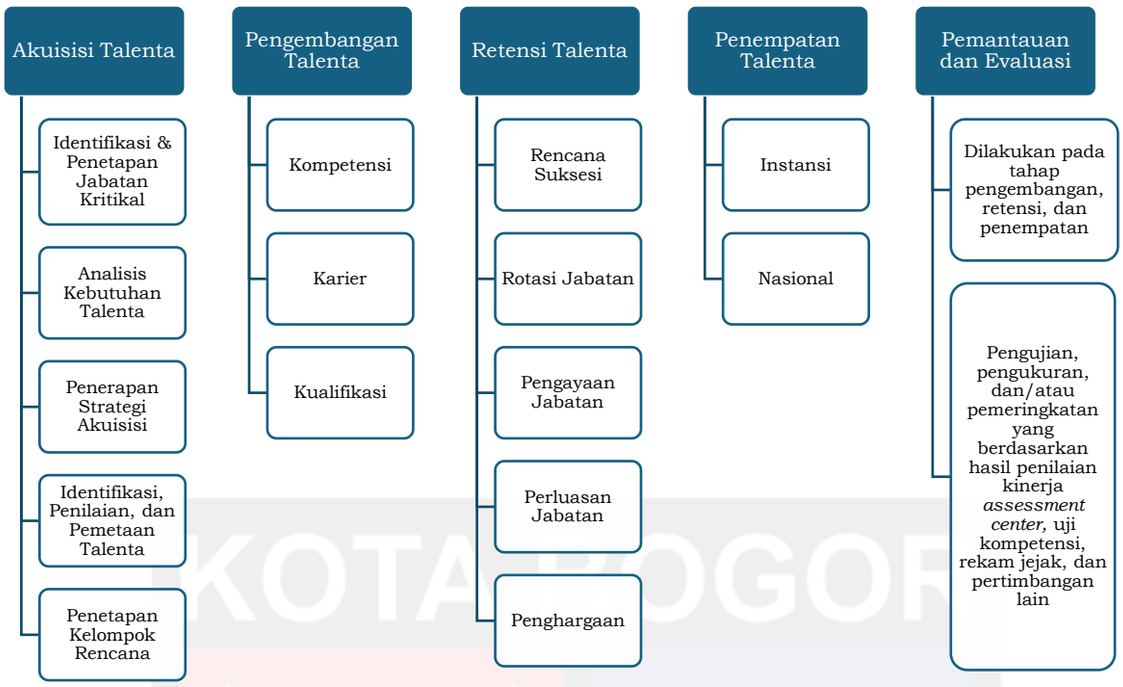

Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor No. 40 Tahun 2021

Gambar 2.77. Alur Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Kota Bogor

Penerapan sistem merit dilakukan untuk memastikan bahwa semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya. Dalam sistem merit, kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam penerapannya, Kota Bogor terus menunjukkan kematangan implementasi sistem merit. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan target dan realisasi hasil penilaian/indeks sistem merit.

Tabel 2.65 menunjukkan target dan realisasi indeks sistem merit Kota Bogor selama tahun 2022-2024. Berdasarkan **Tabel 2.65**, terlihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi indeks sistem merit yang dicapai selalu lebih lebih tinggi dari target. Selama tiga tahun tersebut, capaian indeks sistem merit selalu berada dalam sepuluh besar kabupaten/kota yang meraih nilai sistem merit tertinggi dengan predikat sangat baik (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023). Pada awal penerapan sistem merit di tahun 2020, Kota Bogor berhasil meraih nilai 266,5 dengan kategori Baik.

Tabel 2.65. Target dan Realisasi Sistem Merit Kota Bogor Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2022	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	Indeks Sistem Merit	Poin	300	333,5
2	2023	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	Indeks Sistem Merit	Poin	336	344
3	2024	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	Indeks Sistem Merit	Poin	344	344

Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2024

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota sekitar, capaian indeks sistem merit Kota Bogor termasuk yang paling tinggi. Berdasarkan **Tabel 2.66**, dapat dilihat bahwa di tahun 2023, capaian nilai sistem merit Kota Bogor sebesar 344 (Sangat Baik) berada di peringkat ketiga setelah Kota Tangerang (366,0) dan Kabupaten Tangerang (350,5). Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi provinsi dengan capaian nilai sistem merit tertinggi dengan nilai 396,5 (Sangat Baik), tentu Kota Bogor harus meningkatkan kembali upaya penyelenggaraan manajemen talenta ASN-nya. Hal tersebut tentu saja akan meningkatkan kualitas dan daya saing ASN Kota Bogor dan memastikan bahwa tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bogor benar dilakukan oleh ASN dengan kemampuan dan keahlian yang sesuai.

Tabel 2.66. Capaian Indeks Sistem Merit Kota Bogor dan Beberapa Daerah Pembanding serta Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Kota/Kabupaten/Provinsi	2023	
	Nilai	Predikat
Kota Bogor	344	Sangat Baik
Bogor	277,5	Baik
Kota Depok	234	Kurang
Kota Tangerang	366	Sangat Baik
Tangerang	350,5	Sangat Baik
Kota Bekasi	270,5	Baik
Bekasi	221,5	Kurang
Jawa Barat	396,5	Sangat Baik

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023

2.4.9. Opini BPK

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures)*; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD RI Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pada **Tabel 2.67** terlihat bahwa selama delapan tahun berturut-turut Kota Bogor berhasil meraih dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dari BPK untuk laporan keuangan

pemerintahannya. Opini WTP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal tersebut berarti pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor telah memenuhi kriteria penilaian dengan baik. Sejalan dengan yang terjadi pula dengan yang diperoleh Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Jawa Barat. Beberapa daerah pembanding masih menunjukkan penurunan capaian opini yang sebelumnya WTP menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) atau *qualified opinion* di tahun 2022 dan 2023. Beberapa daerah tersebut antara lain Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.67. Opini BPK Kota Bogor dan Beberapa Daerah Pembanding serta Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 - 2023

Tahun	Kota Bogor	Bogor	Kota Depok	Kota Tangerang	Tangerang	Kota Bekasi	Bekasi	Jawa Barat
2010	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
2011	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
2012	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
2013	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
2014	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
2015	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2016	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2017	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2018	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2019	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2020	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2021	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
2022	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
2023	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Banten, 2024

2.4.10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

IKM dibentuk dari hasil penilaian yang dilakukan dalam survei kepuasan masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan wujud komitmen pemerintah untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Mendasarkan pada aturan tersebut di atas upaya untuk mengukur kualitas pelayanan publik dilaksanakan dalam bentuk survei. Melalui pelaksanaan survei ini diharapkan akan diketahui sejauh mana perkembangan kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) maupun Unit Pelayanan Publik (UPP). Hasil pengukuran tertuang dalam nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai cerminan kualitas pelayanan. Selanjutnya nilai SKM akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan mutu layanan pada tiap-tiap PD/UPP.

Tabel 2.68 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari tahun 2023 hingga semester I-2024, Pemerintah Kota Bogor berhasil memperoleh predikat sangat baik untuk rata-rata keseluruhan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahannya. Di tahun 2023, beberapa instansi/perangkat daerah bahkan memiliki capaian indeks kepuasan masyarakat yang hampir sempurna (mendekati 4) misalnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (3,98), Kecamatan Bogor Utara (3,97), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (3,89).

Jika dibandingkan dengan tiga daerah sekitarnya, dapat dikatakan bahwa Kota Bogor merupakan daerah dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi kedua setelah Kota Bekasi yang selama tahun 2020 - 2023 memperoleh predikat Baik namun dengan capaian nilai yang sedikit lebih tinggi dari Kota Bogor.

Tabel 2.68. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bogor dan Beberapa Daerah Pembanding Tahun 2020 - 2024

Kota/Kabupaten	Kota Bogor		Bogor		Kota Depok		Kota Bekasi	
Nilai/Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
2020	3,33	Baik	3,19	Baik	3,08	Baik	3,39	Baik
2021	3,30	Baik	3,20	Baik	3,08	Baik	3,49	Baik
2022	3,50	Baik	3,23	Baik	3,33	Baik	3,63	Baik
2023	3,57	Sangat Baik	NA	-	3,37	Baik	NA	-
Semester I-2024	3,55	Sangat Baik	NA	-	NA	-	NA	-

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan Semester I-2024

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dalam upaya mewujudkan visi Kota Bogor, pembangunan di daerah Kota Bogor telah mencapai kemajuan yang berarti. Perwujudan pencapaian pembangunan penuh dengan perubahan yang kompleks karena kondisi regional, nasional dan global yang cukup dinamis. Meskipun pencapaian pembangunan ini telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat kemajuan daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus ditangani untuk memastikan bahwa kemajuan ini akan terus berlanjut.

Keberhasilan pembangunan ini juga tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 yang berhasil diterjemahkan ke dalam pembangunan 5 (lima) tahunan dalam dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Selain itu, keberhasilan pembangunan ini juga dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan sumber daya.

2.5.1. Refleksi Pembangunan

Ditengah proses pembangunan yang terus dilakukan selama dua dekade Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor tahun 2005-2025 telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan. Berbagai strategi dan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan dalam empat tahapan RPJMD sebelumnya juga telah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang bermuara pada "Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah" sesuai dengan visi RPJPD Kota Bogor 2005-2025. Pembangunan di Kota Bogor telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk dan daya saing dalam setiap aspek pembangunan.

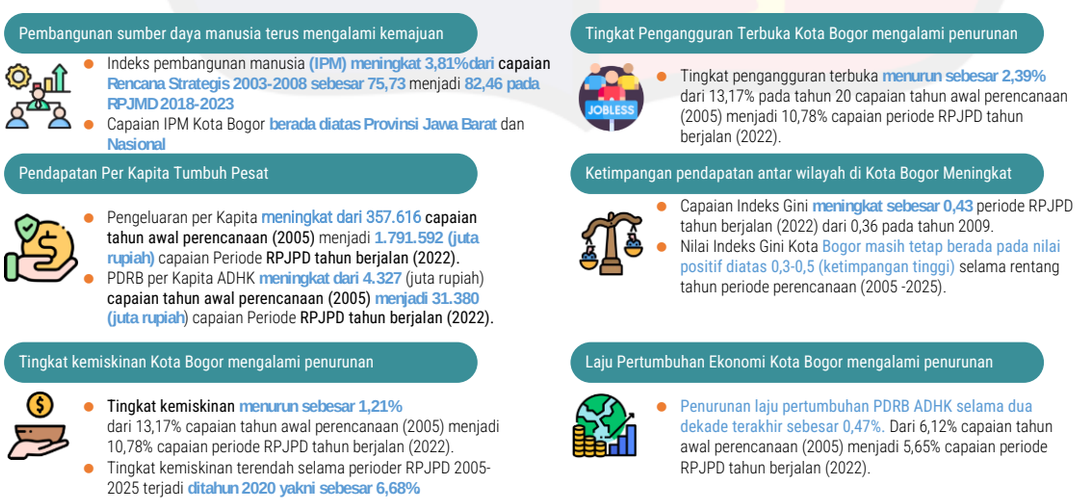

Gambar 2.78. Refleksi Pembangunan Kota Bogor 2005-2025

2.5.1. Evaluasi Pencapaian RPJPD Periode Tahun 2005 - 2025

2.5.1.1. Renstra 2005-2009

Pada Renstra 2005-2009, Kota Bogor mengusung visi "Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah". Pelaksanaan Renstra 2005-2009 ini merupakan tahap pertama dalam mencapai target-target pembangunan jangka Panjang yang tertuang di dalam RPJPD 2005-2024. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui empat misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Misi 1 : Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Misi 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
3. Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan.
4. Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Selanjutnya, keempat misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tujuan dan 62 (enam puluh dua) sasaran yang ada dalam Renstra 2005-2009. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan sebagai berikut.

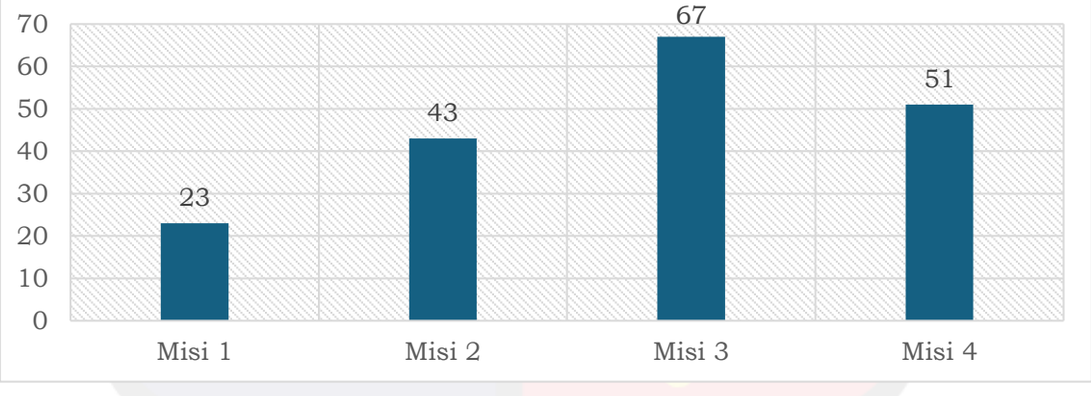

Gambar 2.79. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada Renstra Periode 2005-2009

Di antara keempat misi yang ada di Renstra Kota Bogor tahun 2005-2009, misi 3 merupakan misi yang paling banyak jumlah indikator kinerja tujuan dan sasaran, dengan jumlah total indikator yaitu 67 indikator. Sementara ketiga misi yang lain, yaitu: misi 1 (23 indikator), misi 2 (43 indikator), dan misi 4 (51 indikator). Adapun total jumlah indikator adalah 184 indikator.

Jika ditinjau dari jumlah total 184 indikator pada seluruh misi, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 107 indikator (58,2%) masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi (warna hijau tua), 14 indikator (7,6%) masuk dalam kategori pencapaian tinggi (warna hijau muda), masing-masing 2 indikator (1,1%) masuk dalam kategori rendah dan sedang. Namun, masih ada 16 indikator (8,7%) yang status pencapaian kinerjanya sangat rendah (warna merah), serta

masih ada 43 indikator (23,4%) yang data capaian kinerjanya tidak tersedia (NA, berwarna abu-abu). Rekapitulasi ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009 berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat selengkapnya pada gambar berikut ini.

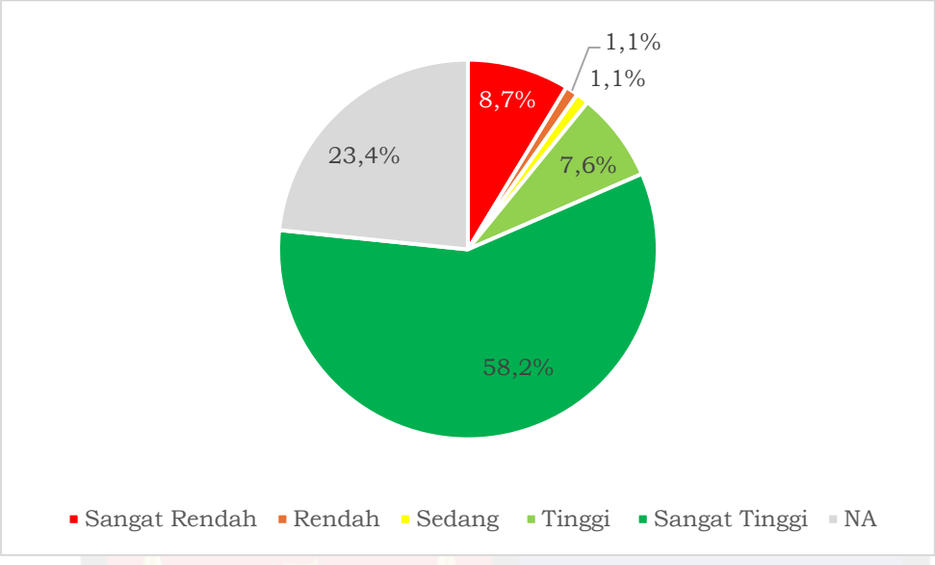

Gambar 2.80. Rekapitulasi Ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009

Ditinjau dari persentase capaian seluruh indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 pada masing-masing misi sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.81** dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi 4 yaitu "Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum". Misi 4 tersebut memiliki capaian indikator kinerja berstatus sangat tinggi yaitu 78%, indikator kinerja berstatus tinggi 2%, namun masih ada 8% indikator kinerja berstatus sangat rendah. Pada misi 1 "Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada", indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi dan tinggi masing-masing adalah 65% dan 9%. Sedangkan misi 2 "Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan", dan misi 3 "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan", indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi masih kurang dari 50%, yaitu masing-masing 44% dan 49%, namun di antara keempat misi pada Renstra Kota Bogor periode 2005-2009 tersebut, misi 3 yang capaian indikator kinerja berstatus sangat rendah masih cukup banyak, yakni 12%.

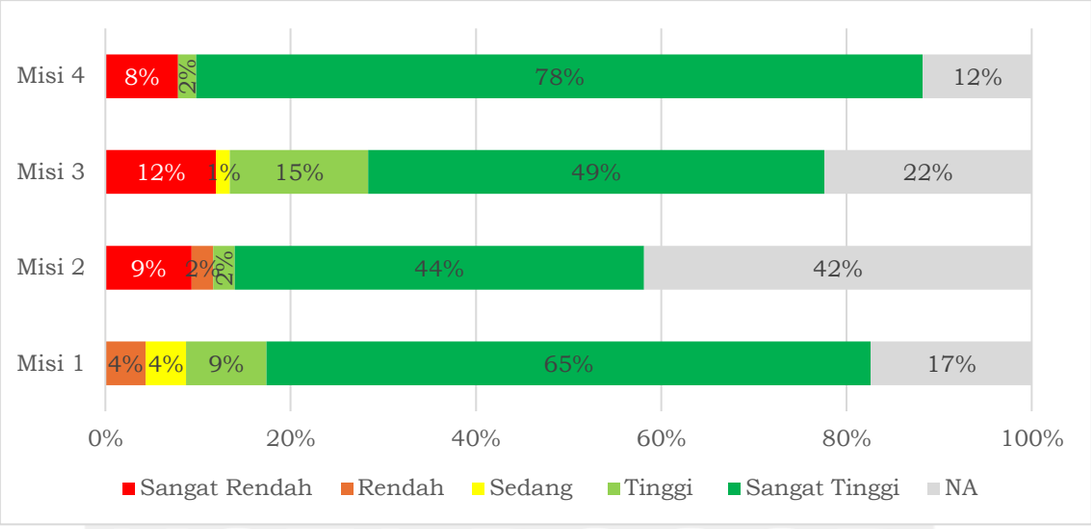

Gambar 2.81. Persentase Capaian Seluruh Indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 Pada Masing-Masing Misi.

2.5.1.2. RPJMD 2010-2014

Pada RPJMD periode 2010-2014, visi yang diusung oleh Kota Bogor adalah "Kota perdagangan dengan sumberdaya manusia produktif dan pelayanan prima". Pelaksanaan RPJMD periode 2010-2014 ini merupakan tahap kedua dalam mencapai target-target pembangunan Jangka Panjang yang tertuang di dalam RPJPD 2005-2024. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui empat misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Misi 1: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan.
2. Misi 2: Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.
3. Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat.
4. Misi 4: Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, keempat misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 30 (tiga puluh) tujuan dan 47 (empat puluh tujuh) sasaran yang ada dalam RPJMD periode 2010-2014. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.

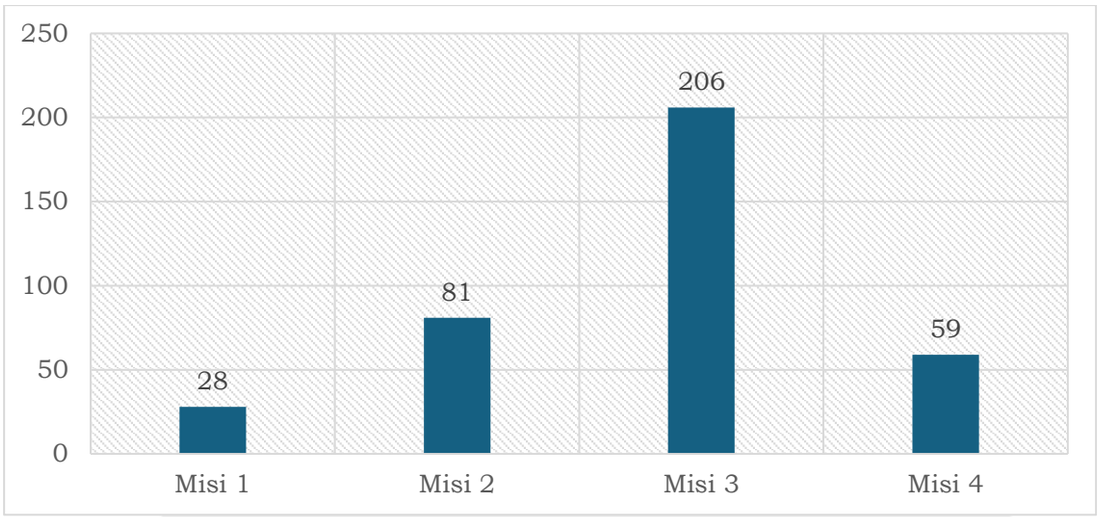

Gambar 2.82. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Periode 2010-2014

Di antara keempat misi yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2010-2014, misi 3 merupakan misi yang paling banyak jumlah indikator kinerja tujuan dan sasaran, dengan jumlah total indikator yaitu 206 indikator. Sementara ketiga misi yang lain, yaitu: misi 1 (28 indikator), misi 2 (81 indikator), dan misi 4 (59 indikator). Adapun total jumlah indikator adalah 374 indikator.

Jika ditinjau dari jumlah total 374 indikator pada seluruh misi, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 262 indikator (70,05%) masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi (warna hijau tua), 37 indikator (9,89%) masuk dalam kategori pencapaian tinggi (warna hijau muda). Indikator kinerja berstatus pencapaian sedang dan rendah, masing-masing berjumlah 16 indikator (4,28%) dan 5 indikator (1,34%). Namun, masih ada 50 indikator (13,37%) yang status pencapaian kinerjanya sangat rendah (warna merah). Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014 berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat selengkapnya pada gambar berikut ini.

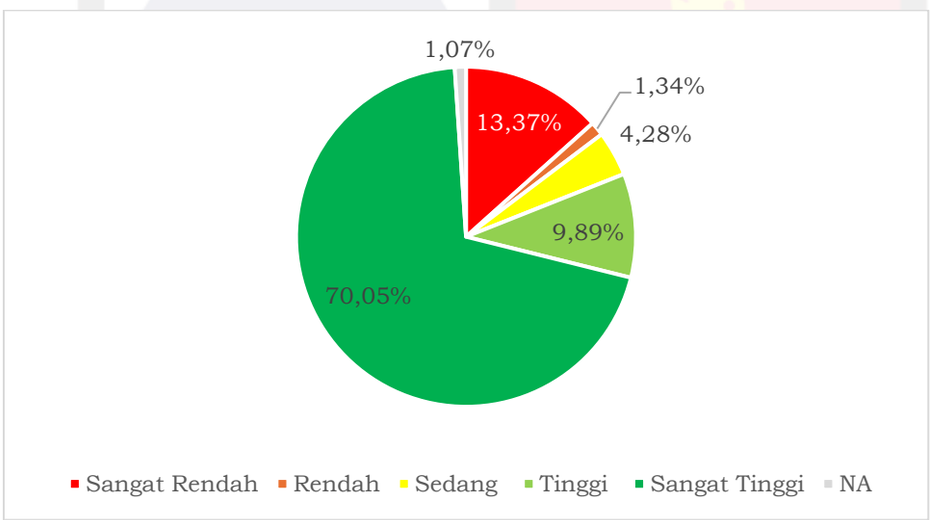

Gambar 2.83. Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014

Ditinjau dari persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada masing-masing misi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.84 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi 1 yaitu "Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan". Misi 1 tersebut memiliki capaian indikator

kinerja berstatus sangat tinggi yaitu 78,57%, indikator kinerja berstatus tinggi 10,71%, serta indikator kinerja berstatus sedang 7,14%, namun masih ada 3,57% indikator kinerja berstatus sangat rendah. Pada misi 4 "Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat", indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi dan tinggi masing-masing adalah 71,19% dan 10,17%. Misi 3 "Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat" dan Misi 2 "Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas", indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi, yaitu masing-masing 69,42% dan 67,90%, namun di antara keempat misi pada RPJMD Kota Bogor periode 2010-2014 tersebut, misi 2 yang capaian indikator kinerja berstatus sangat rendahnya masih cukup banyak, yakni 17,28%.

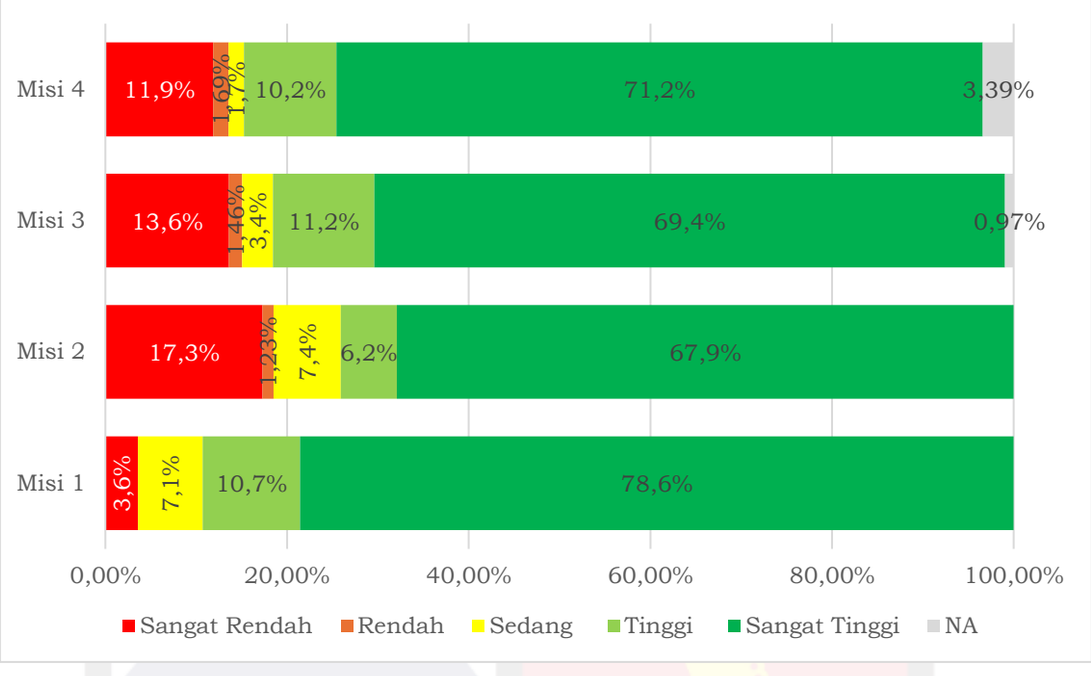

Gambar 2.84. Persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada masing-masing misi

2.5.1.3. RPJMD 2015-2019

Kota Bogor mengusung visi "Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan" pada periode RPJMD 2015-2019. Pelaksanaan RPJMD 2015-2019 merupakan tahap ketiga dalam mencapai target-target pembangunan jangka Panjang. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan jangka menengah yaitu:

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi
2. Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan makmur
3. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif
5. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan
6. Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

Selanjutnya, misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 6 (enam) tujuan dan 24 sasaran yang ada dalam RPJMD. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 65 indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.

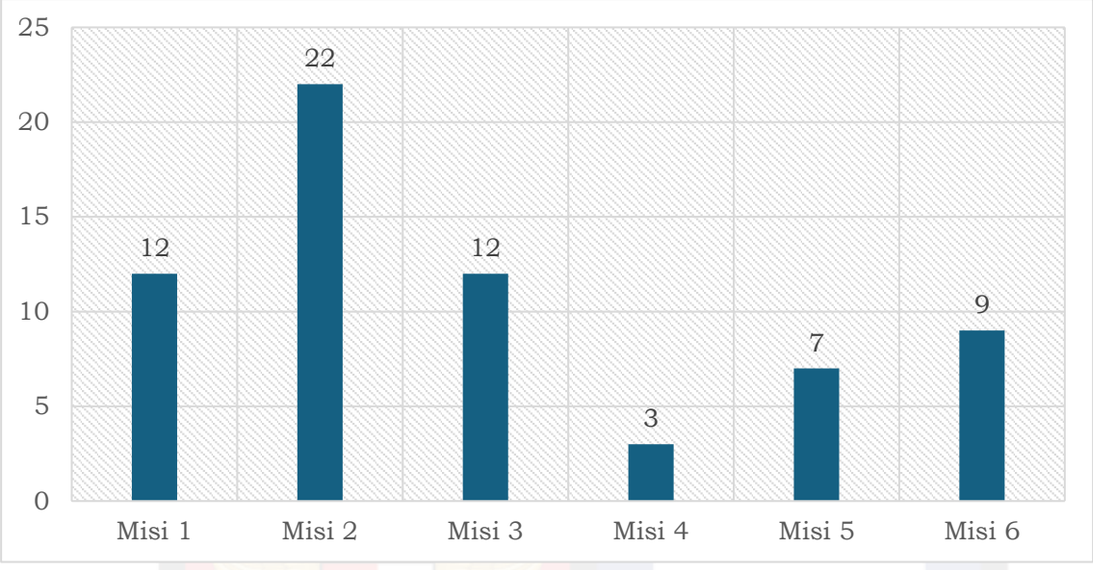

Gambar 2.85. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2015-2019

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian periode RPJMD 2015-2019 relatif tinggi. Pencapaian indikator sasaran berstatus sangat tinggi 76,92 persen mengindikasikan bahwa upaya pencapaian visi lebih baik dibandingkan RPJMD periode sebelumnya yaitu 71,51 persen berstatus capaian sangat tinggi. Proporsi terbesar kedua dan ketiga yaitu indikator berstatus sangat rendah yaitu 9,23 persen dan indikator berstatus tinggi yaitu 6,15 persen. Pada periode RPJMD 2015-2019 masih terdapat indikator dengan status NA yakni sebesar 4,62 persen. Berikut adalah hasil rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019.

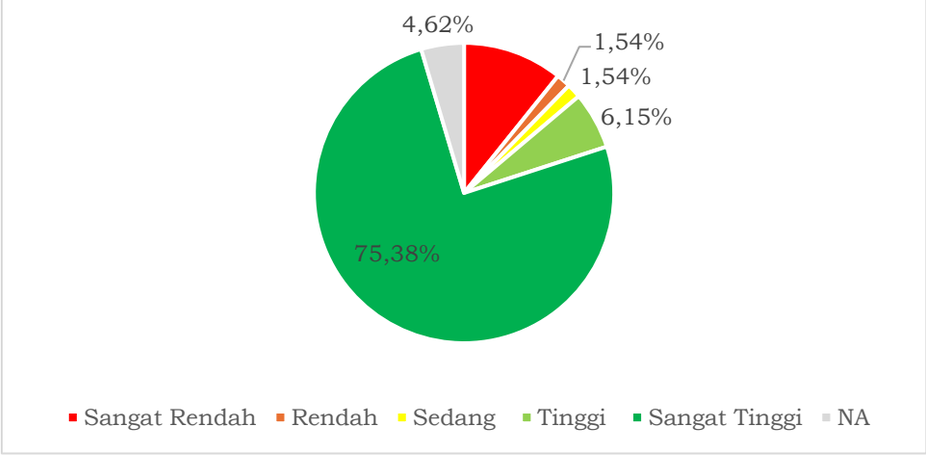

Gambar 2.86. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019

Ditinjau berdasarkan capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 pada masing-masing misi sebagaimana dilihat pada Gambar 2.87 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi satu dan tiga yaitu 1) Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan

teknologi informasi dan komunikasi dan 2) Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan. Keduanya memiliki capaian indikator kinerja 91,67 persen yang berstatus sangat tinggi. Sementara sisanya sebesar 8,33 persen berstatus capaian tinggi. Adapun misi yang memiliki capaian dengan status sangat rendah terbesar adalah misi keempat "Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif" yakni sebesar 33,33% dan misi kedua "Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan makmur" yakni sebesar 27,27%. Indikator dengan status ketercapaian pada periode ini diantaranya adalah indeks gini ratio, angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran terbuka, dan Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif. Pada periode ini masih terdapat indikator dengan capaian NA yakni pada misi keempat sebesar 33,33% dan misi keenam sebesar 22,22%. Berikut adalah hasil capaian indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019.

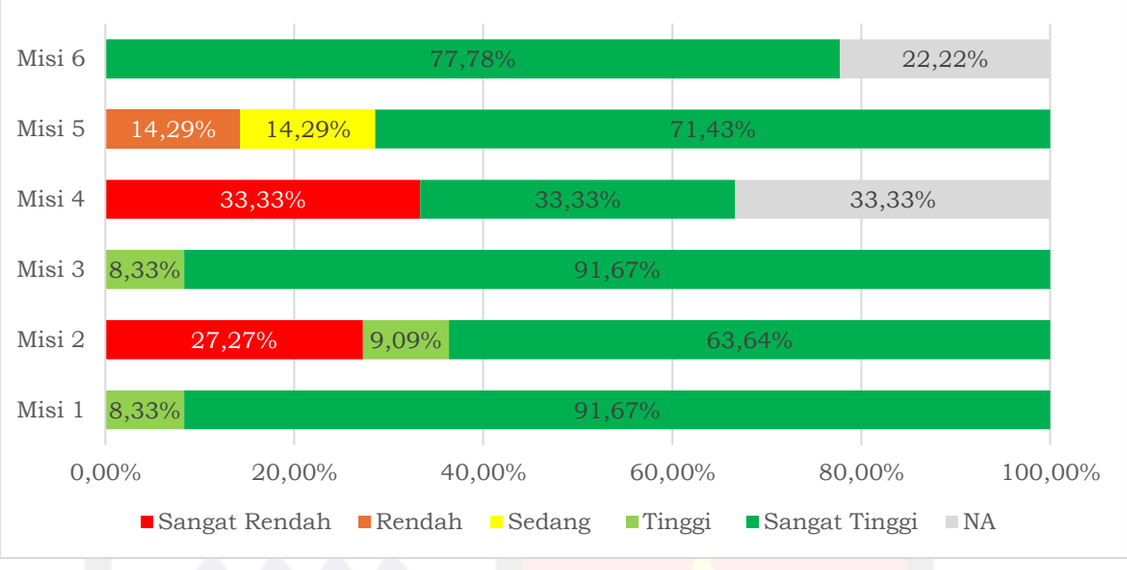

Gambar 2.87. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 Pada Masing-Masing Misi

Misi pertama berbunyi "Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi". Fokus utama pada misi pertama yaitu pemerintah Kota Bogor mendorong pengelolaan kota yang lebih efisien, transparan dan partisipatif menjadi potensi *enabler smart city*. Pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang semakin meningkat sementara memiliki luas kota yang terbatas sehingga menimbulkan berbagai persoalan di antaranya adalah kesenjangan sosial, kemacetan, kemiskinan, masalah kesehatan dan berbagai persoalan lainnya. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk menghadirkan solusi dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki melalui implementasi *smart city*. Pada berbagai kota didunia, konsep *smart city* telah menstimulasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara Pemerintah Daerah dengan warga kota. Hal ini sekaligus menggeser pola kepemerintahan menjadi *citizen centric* dan *stakeholders centric*. Hal ini juga dapat meningkat inovasi dan kreativitas masyarakat dalam menunjang visi misi Kota Bogor sehingga membawa Kota Bogor memperoleh penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* di tahun 2020.

Misi kedua berbunyi "Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan Makmur". Fokus utama pada misi kedua ini adalah i) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; ii) Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor; dan iii) Terwujudnya stabilitas perekonomian masyarakat. Kota Bogor berhasil menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 73,41 tahun pada tahun 2019, meningkat dibandingkan kondisi awal RPJMD tahun 2015 yaitu 72,58 tahun. Kota Bogor perlu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, diketahui bahwa ketimpangan kesejahteraan Kota Bogor semakin tinggi ditunjukkan dengan indeks gini yang terus meningkat yaitu 0,41 di tahun 2019, angka tersebut meningkat drastis dibandingkan kondisi awal RPJMD sebesar 0,34. Selanjutnya, Kota Bogor juga dianggap berhasil dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Misi ketiga berbunyi "Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan". Fokus utama pada misi ini adalah mempertahankan kualitas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang Kota Bogor ditunjukkan dengan indikator i) Persentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW; ii) Persentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang; iii) Indeks Kualitas Air; dan iv) Indeks Kualitas Udara. Keempat indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada misi ketiga ini pemerintah juga secara konsisten terus memantapkan Infrastruktur. Diketahui bahwa infrastruktur menjadi pondasi dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan infrastruktur yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperlancar transportasi dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pembangunan infrastruktur dapat memperkuat konektivitas antar pusat perekonomian, kawasan strategis perdagangan dan pariwisata. Kedepan Kota Bogor perlu menyusun grand desain pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar memastikan bahwa pembangunan infrastruktur telah sejalan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya.

Misi keempat yaitu "Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif". Fokus utama misi keempat adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat. Diketahui bahwa pariwisata dan Ekraf menjadi salah satu pondasi utama perekonomian Kota Bogor. Kota Bogor memiliki posisi strategis karena berada didekat Ibukota Indonesia serta Ibukota Provinsi Jawa sehingga berpotensi dalam mengembangkan pembangunan di bidang jasa pelayanan dan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 9.160.885 kunjungan, meningkat drastis sebesar 131,71 persen dibandingkan kondisi awal RPJMD tahun 2015.

Misi kelima yaitu "Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan". Fokus pada misi kelima ini adalah mewujudkan birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik

secara prima. Keberhasilan misi kelima dinilai berdasarkan indikator i) Indeks Kepuasan Masyarakat; ii) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; iv) Indeks Reformasi Birokrasi; v) Opini BPK; vi) Level maturitas SPIP; dan vii) Indeks Kepuasan Masyarakat. Sebagian besar indikator tersebut berstatus capaian sangat baik. Hanya dua indikator yang berstatus sedang dan rendah yaitu i) Indeks Reformasi Birokrasi dan ii) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Misi terakhir yaitu "Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Madan". Fokus utama pada misi keenam adalah mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebhinekaan. Keberhasilan misi kelima dinilai berdasarkan indikator i) Indeks Rasa Aman; ii) Indeks Toleransi; iii) Angka kriminalitas; iv) Prevalensi HIV/AIDS; v) Persentase penurunan kasus narkoba; vi) Persentase penanganan bencana yang sesuai waktu tanggap; vii) Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi; viii) Persentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA; dan ix) Persentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah. Dari Sembilan indikator tersebut, delapan diantaranya (89,9 persen) berstatus capaian sangat tinggi dan hanya terdapat satu indikator dengan status capaian sangat rendah yaitu prevalensi HIV/AIDS.

2.5.1.4. RPJMD 2019-2024

Kota Bogor mengusung visi "Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga" pada periode RPJMD 2019-2024. Pelaksanaan RPJMD 2019-2024 merupakan tahap keempat dalam mencapai target-target pembangunan jangka Panjang. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan jangka menengah yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Ketiga misi selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 45 indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.

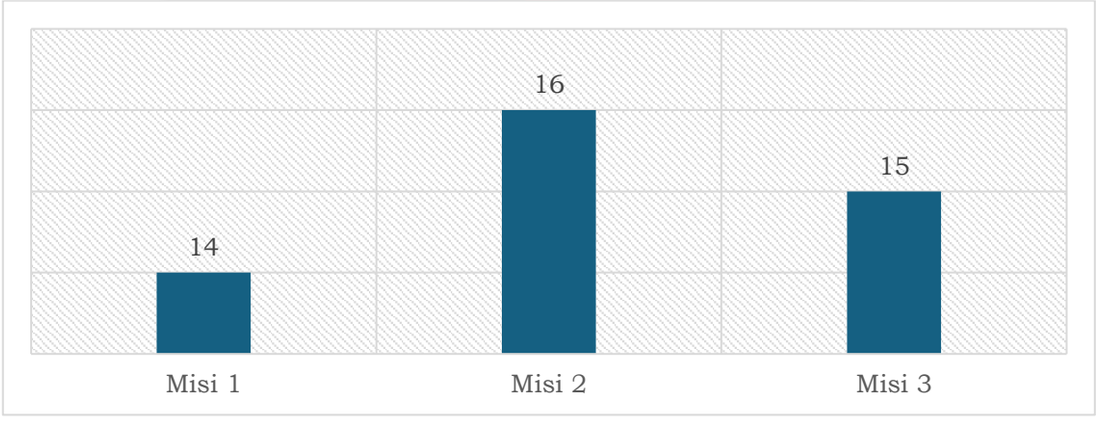

Gambar 2.88. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian periode RPJMD 2019-2024 menjadi yang tertinggi di antara RPJMD periode sebelumnya. Pencapaian indikator sasaran berstatus sangat tinggi 73,33 persen mengindikasikan bahwa upaya pencapaian visi tidak lebih baik dibandingkan RPJMD periode sebelumnya yaitu 76,92 persen berstatus capaian sangat tinggi pada periode 2015-2019. Angka capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada periode 2010-2014 yakni sebesar 70,05 persen. Pada periode ini masih terdapat indikator dengan capaian sangat rendah yakni sebesar 4,44 persen, capaian dengan status sedang 2,22 persen, dan 6,67 persen indikator berstatus capaian tinggi. Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator pada RPJMD Kota Bogor periode 2019-2024.

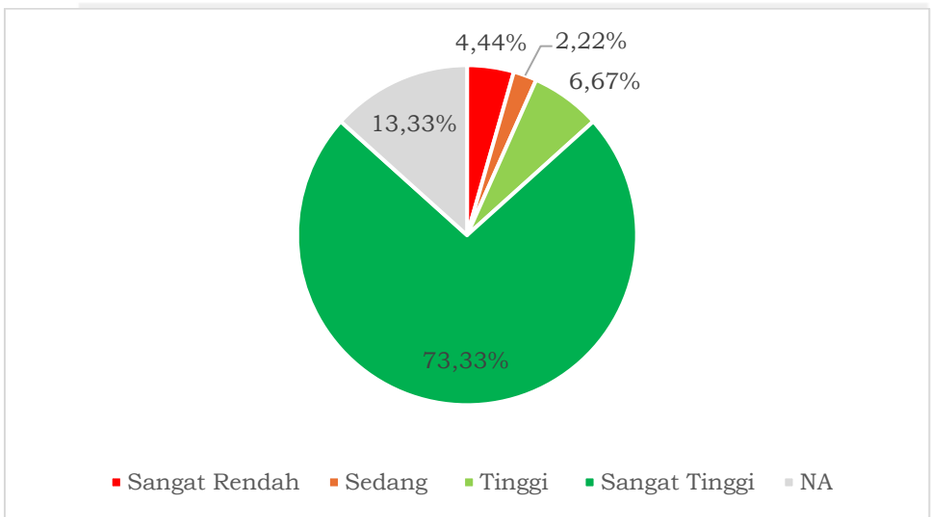

Gambar 2.89. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Ditinjau berdasarkan capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2019-2024 pada masing-masing misi sebagaimana dilihat pada Gambar 2.90 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi pertama yaitu mewujudkan Kota Bogor yang Sehat. Misi pertama memiliki capaian indikator kinerja 92,86 persen yang berstatus sangat tinggi. Peringkat kedua diraih oleh misi ketiga dengan pencapaian indikator sebesar 66,67 persen berstatus sangat tinggi. Adapun misi kedua, hanya sebesar 62,5 persen saja yang berstatus sangat tinggi. Pada periode ini masih terdapat indikator dengan status capaian sangat rendah yakni pada misi ketiga sebesar 13,33%. Indikator dengan status capaian sangat rendah tersebut adalah indikator indeks gini ratio dan angka kemiskinan. Kedua indikator tersebut juga ketercapaiannya berstatus sangat rendah pada RPJMD periode 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Bogor. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.

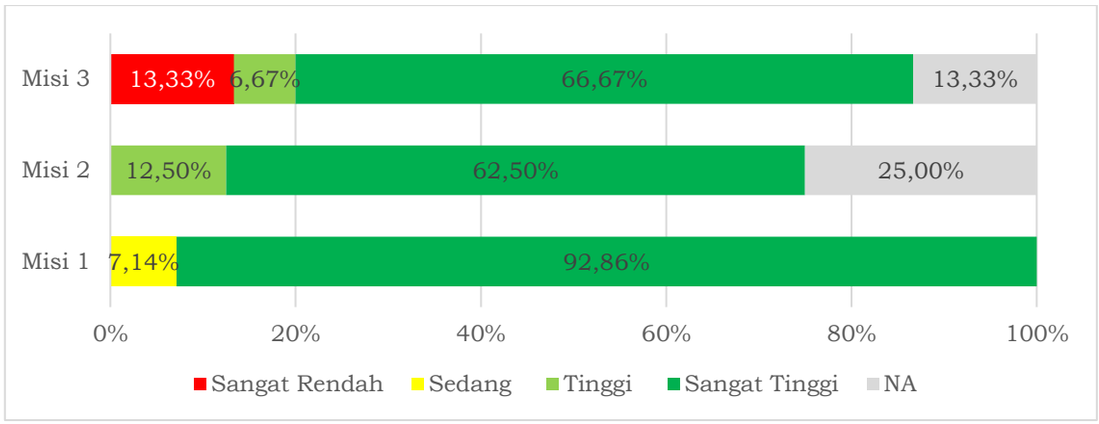

Gambar 2.90. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Pada Masing-Masing Misi

Misi pertama yaitu "Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat". Kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus utama pada misi pertama ini adalah mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas. Penciri keberhasilan pada misi pertama ini adalah melalui pencapaian Indeks Kesehatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kesehatan Kota Bogor diketahui terus menunjukkan kinerja yang meningkat mencapai 83,28, meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya yaitu sebesar 81,86. Adapun untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bogor menunjukkan angka sebesar 58,597. Kontributor utama pembentuk IKLH adalah indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yaitu masing-masing memiliki poin sebesar 51,39 dan 98,36.

Misi Kedua berbunyi "Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas". Diyakini bahwa daerah dengan kualitas SDM yang unggul akan mengantarkan pada kesuksesan pada setiap bidang pembangunan. Skill (keterampilan) dan pendidikannya dapat mempengaruhi daya saing SDM (Dessler, et al, 2004). Todaro dan Smith (2015) memperkuat argumentasi tersebut dan mendapati bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong peningkatan produktivitas. Semakin tinggi keterampilan dan tingkat pendidikan di suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing SDM di daerah tersebut. Ditinjau berdasarkan capaian seluruh indikator pada misi kedua sebagian besar menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu sebesar 62,5 persen.

Terakhir yaitu misi ketiga yang berbunyi "Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera". Sama dengan periode sebelumnya, Kota Bogor berhasil meningkatkan kinerjanya. Meski perekonomian Kota Bogor sempat terkontraksi akibat Pandemi Covid 19, namun pemerintah daerah cukup cepat beradaptasi dan merespon dengan serangkaian strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hingga akhirnya, perekonomian berangsur pulih dan terkoreksi di tahun 2022 yaitu pertumbuhannya menjadi 5,56 persen. Diketahui bahwa Kota Bogor mengandalkan sektor pariwisata dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian. Keduanya menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia belakangan ini. BPS mengumumkan telah terjadinya penurunan yang begitu tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu mencapai 99,83%. *World Tourism Organization (UNWTO)* yaitu sebuah organisasi pariwisata dunia menyebutkan bahwa Asia Pasifik

menjadi wilayah yang pariwisatanya terdampak paling parah karena paling pertama dilanda Pandemi. Akan tetapi, Kota Bogor dinilai berhasil melalui masa-masa yang sulit tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang (RPJPD) 2005-2025, dapat disampaikan beberapa Rekomendasi terkait kelanjutan pembangunan yang dirasa penting. Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain:

1. RPJPD mendatang perlu dibuat secara lebih kuantitatif dari sisi bahwa sasaran pokok yang dirumuskan perlu diturunkan ke dalam seperangkat indikator yang terukur dan dilengkapi dengan target, baik target lima tahunan maupun target akhir 2045.

   Tantangan dari penyusunan RPJPD secara lebih kuantitatif ini adalah bahwa di satu sisi RPJPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang paling makro dibanding rencana pembangunan yang lain karena horizonnya yang berjangka panjang, namun di sisi lain harus terukur secara kuantitatif sementara keterukuran relatif mudah mudah dibuat untuk substansi yang sifatnya mikro atau meso. Inilah tantangannya dari menyusun RPJPD secara kuantitatif. Hal yang dapat dilakukan oleh tim penyusun diantaranya adalah dengan mengupayakan seoptimal mungkin penyusunan indikator-indikator yang terintegrasi (*integrated indicators*) dengan indikator-indikator yang telah ada dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya indikator-indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada peraturan tersebut telah dimuat banyak sekali indikator bagi setiap level pemerintahan (level provinsi dan kabupaten/kota) serta untuk masing-masing urusan pemerintahan, baik indikator pada level output maupun indikator pada *level outcome*. Jika indikator pada RPJPD Kota Bogor mendatang hendak diintegrasikan dengan indikator-indikator evaluasi ini misalnya, maka tentunya yang lebih tepat adalah menggunakan indikator-indikator *level outcome* sehingga aras makronya tetap didapat namun juga terukur.

2. RPJPD mendatang perlu mempertahankan prestasi yang ditorehkan oleh RPJPD 2005-2025 dalam hal nilai realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk seluruh periode lima tahunan yang diraih oleh dua indikator yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Kinerja "Sangat Tinggi" pada dua indikator tersebut berbuah indikator makro yaitu PDRB per Kapita Kota Bogor yang tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

3. Untuk mempertahankan kinerja pencapaian target PDRB ini, hal yang perlu dicamkan adalah tiga faktor pendorong utama dari tumbuhnya PDRB yaitu kontribusi subsektor jasa dan industri pengolahan, meningkatnya konsumsi akhir rumah tangga, dan meningkatnya investasi. Kontribusi subsektor jasa dan industri pengolahan perlu dijaga sedemikian rupa agar dapat tumbuh secara harmonis (misalnya melalui tumbuhnya UMKM yang dapat menjadi

destinasi wisata dan produknya kemudian diserap oleh wisatawan), dan tidak berjalan dengan saling berlawanan antara kedua sektor ini.

Untuk mempertahankan kinerja pengendalian jumlah penduduk, hal yang perlu dijaga adalah pengendalian natalitas dan migrasi masuk. Kota Bogor memang tidak dapat diisolasi sepenuhnya dari migrasi masuk khususnya dari daerah-daerah *hinterland* Kota Bogor, namun tentunya dapat dituangkan strategi-strategi yang jitu pada RPJPD berikutnya untuk setidaknya memastikan bahwa para pendatang tidak menambah beban Kota Bogor dari sisi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

4. RPJPD mendatang perlu memberikan perhatian ekstra terhadap pencapaian IPM. Mengingat tingkat kemiskinan menjadi salah satu yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat ketercapaian IPM, apalagi kemiskinan adalah isu strategis yang berulang dan terdapat di seluruh RPJMD pada periode 2005-2025, maka RPJPD berikutnya perlu menuangkan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan yang cepat dan tepat sasaran, serta memiliki database yang akurat serta *up-to-date*, guna meminimalkan risiko salah penerima bantuan.

   Dari sisi indikator pendidikan, perhatian ekstra perlu diberikan pada angka Rata-rata Lama Sekolah. Upaya-upaya ekstra perlu dituangkan untuk menekan angka putus sekolah SMP dan SMA serta mengintensifkan program kejar paket A, paket B dan paket C.

   Dari sisi indikator kesehatan, beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap Angka Harapan Hidup dapat lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang. Penyediaan air bersih menjadi isu yang penting dalam waktu-waktu mendatang ketika krisis iklim dan lingkungan hidup menjadi ancaman yang nyata di masa depan.

5. RPJPD Kota Bogor mendatang perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja indikator-indikator makro khususnya IPM, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita. Meskipun secara angka masih lebih baik dibanding capaian provinsi dan nasional, namun secara pertumbuhan (membandingkan antara angka tahun 2005 dan 2022) masih relatif tertinggal dibanding pertumbuhan yang dicapai oleh provinsi dan nasional.

6. Keselarasan empat RPJMD Kota Bogor (periode 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2019-2024) terhadap RPJPD yang sudah cukup baik perlu dipertahankan pada RPJPD berikutnya. Oleh karena itu, perumusan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD berikutnya perlu mempertimbangkan juga kemungkinan penjabarannya pada tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, RPJPD berikutnya juga perlu mempertahankan kesesuaiannya (atau kontekstualisasinya) dengan kondisi dan dinamika lingkungan. Jika RPJPD

tetap kontekstual, maka niscaya RPJMD-nya akan selaras dengan RPJPD tersebut.

7. Indikator-indikator yang dinilai merupakan indikator yang penting namun kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi adalah i) penyediaan lapangan kerja; ii) penanganan sampah; iii) peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter; serta iv) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Khusus mengenai peningkatan partisipasi masyarakat ini, jika kinerjanya ditingkatkan maka akan mempengaruhi kinerja pembangunan secara signifikan sebagaimana hasil yang didapatkan melalui SEM (*Structural Equation Model*).

Hal-hal yang bersifat positif yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk pembangunan Kota Bogor ke depan adalah karakter kota Bogor sebagai kota taman yang hijau yang ekonominya digerakkan oleh sektor akomodasi dan wisata, UMKM, sektor kreatif dan sektor-sektor jasa lainnya. Adapun hal-hal yang bersifat negatif dan perlu diatasi atau diantisipasi dalam pembangunan Kota Bogor ke depan adalah kepadatan dan kemacetan, pengangguran, kemiskinan, angkot, dan keberadaan PKL.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

Secara umum proyeksi jumlah penduduk di Kota Bogor pada tahun 2045 meningkat menjadi 1,2 juta orang, dimana tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bogor 1,08 juta orang. Jika dilihat dari kondisi jumlah penduduk saat ini, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2045 sebesar 0,83 persen. Peningkatan jumlah penduduk merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga dapat menjadi suatu hal negatif dimana terjadi kepadatan penduduk yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, juga tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada.

Tabel 2.69. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bogor

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (000 Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.070,72	1.083,78	1.110,51	1.137,71	1.170,25	1.201,72

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor, terlihat bahwa angka *sex ratio* semakin menurun. Tahun 2023, *sex ratio* Kota Bogor sebesar 102,67 namun di tahun 2045 diperkirakan hanya mencapai 99,74. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan. Dengan karakteristik penduduk bekerja saat ini lebih didominasi oleh laki-laki maka rendahnya proporsi penduduk laki-laki menyebabkan produktivitas dalam bekerja akan rendah dan akan menyebabkan penurunan pada pendapatan. Hal ini dapat menjadi perhatian melalui peningkatan peran perempuan dalam aktivitas perekonomian di Kota Bogor.

Tabel 2.70. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bogor

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Orang)	Proyeksi Penduduk (Ribu Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	542,41	548,33	559,78	571,16	586,15	600,08
Perempuan	528,31	535,45	550,74	566,54	584,10	601,64
Rasio	102,67	102,41	101,64	100,82	100,35	99,74

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan komposisi umur, tahun 2045 proporsi terbesar masih berada di usia produktif. Penduduk usia produktif memiliki peran krusial dalam perkembangan wilayah. Peran ini melibatkan kontribusi ekonomi, sosial, dan kultural yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan wilayah. Tahun 2045, penduduk usia produktif mencapai 806,28 ribu orang. Penduduk usia produktif cenderung memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dimana mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan, membuka usaha kecil dan menengah, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 2.71. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bogor

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (000 Orang)	Proyeksi Penduduk (000 Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	247,47	242,79	232,99	220,51	212,59	204,35
15-64 Tahun	753,25	761,87	773,06	784,10	795,54	806,28
>65 Tahun	70,01	79,12	104,47	133,11	162,13	191,09

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Mengacu kepada data dari BPS, pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah sebanyak 537.740 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 523.200 jiwa. Apabila dibedakan berdasarkan rentang umur, maka baik laki-laki maupun perempuan paling banyak berada pada rentang umur 15 hingga 39 tahun. Artinya pada tahun 2022, penduduk di Kota Bogor baik perempuan maupun laki-laki berada pada usia produktif dengan usia relatif masih muda. Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) di Kota Bogor mencapai 70,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bogor mengalami bonus demografi karena perbandingan usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif.

Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Tingginya jumlah usia

produktif, maka pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian dalam 20 tahun ke depan pergeseran struktur usia penduduk di Kota Bogor menuju ke arah piramida stasioner. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Hal ini terjadinya biasanya dikarenakan tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Menuju kepada kondisi ini maka Kota Bogor perlu mempersiapkan infrastruktur dasar yang cukup baik dan sistem jaminan sosial yang kuat sebagai antisipasi adanya *aging communities* di masa mendatang.

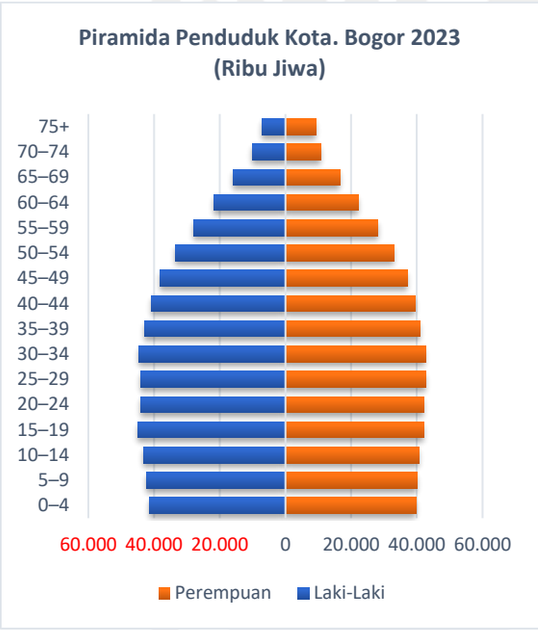

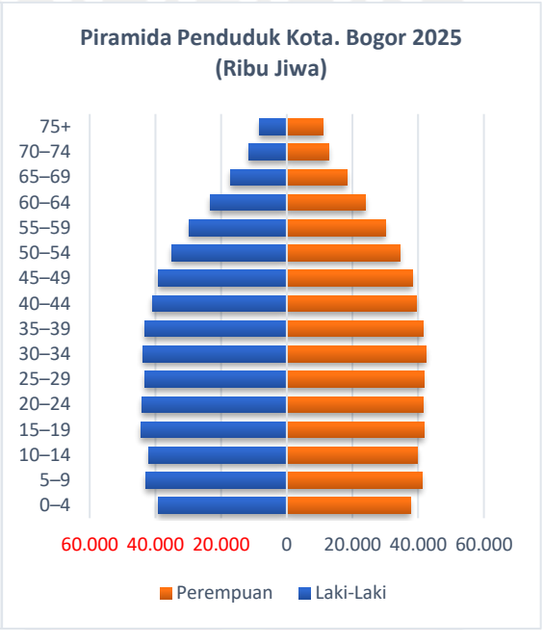

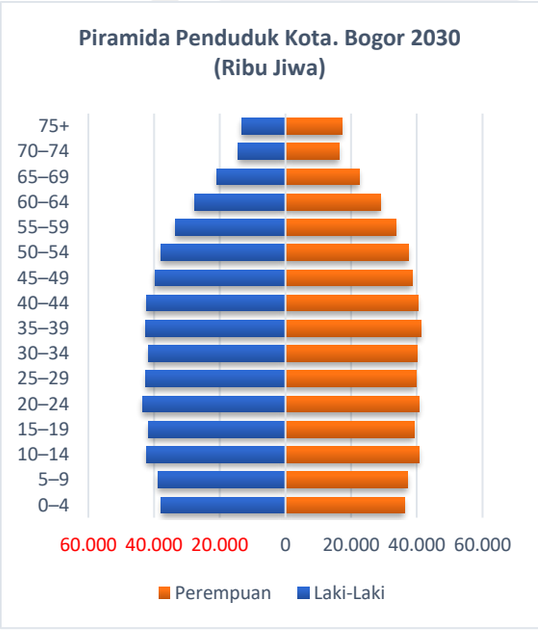

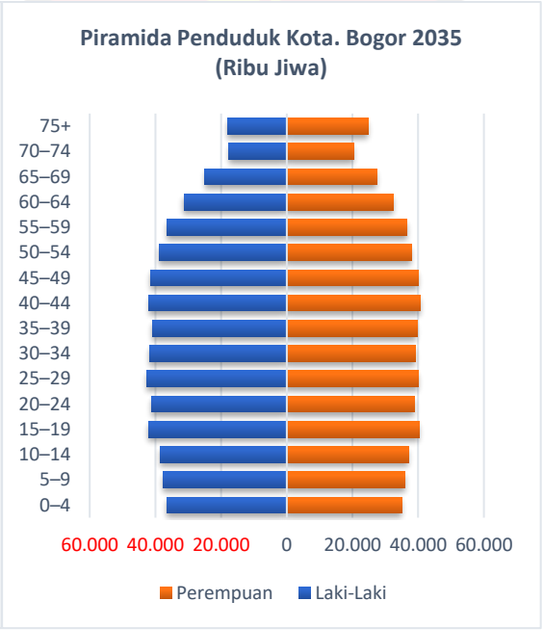

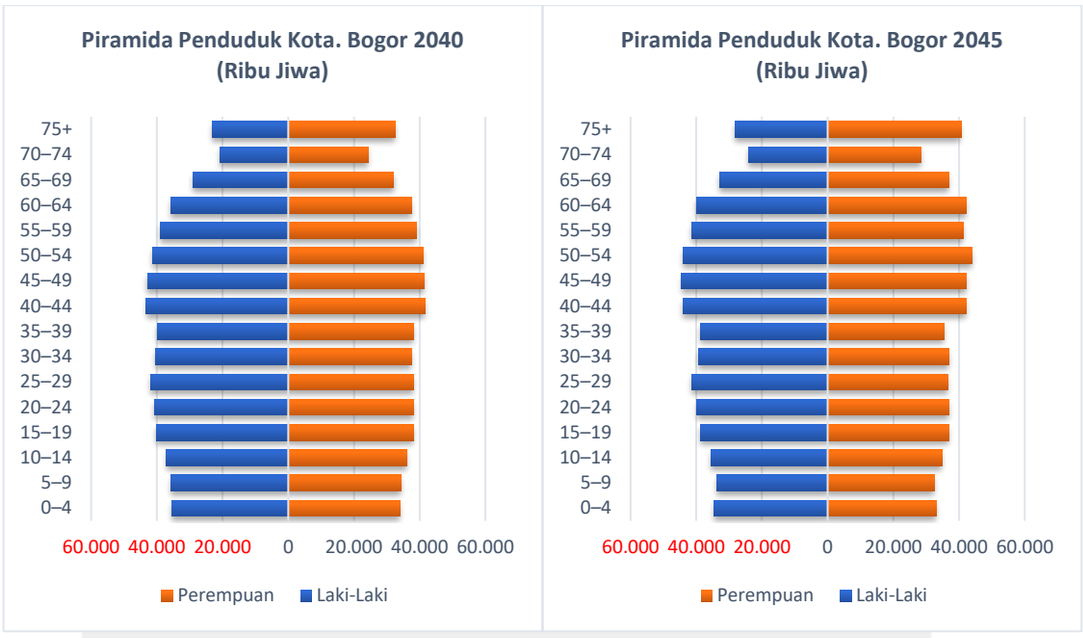

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.91. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, piramida penduduk Kota Bogor tahun 2040 juga 2045 bertransformasi dari bentuk yang ekspansif menjadi piramida stasioner, dimana jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan jumlah penduduk usia tua. Hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Proporsi penduduk ini perlu menjadi perhatian karena baik usia muda, usia produktif maupun usia tua memiliki jumlah yang seimbang sehingga segala fasilitas public baik fisik maupun pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan penduduk harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bogor untuk semua level usia.

2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.2.1. Rumah/ Tempat Tinggal

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam pembentukan karakter keluarga. Pembangunan perumahan dan permukiman utamanya di kawasan perkotaan seperti Kota Bogor selalu menghadapi permasalahan pertanahan, terlebih di daerah perkotaan terkait ketersediaan lahan yang terbatas. Aktivitas kota yang semakin meluas dan koneksi infrastruktur transportasi yang semakin baik mendorong pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (sub-urban) sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah.

Saat ini lahan untuk perumahan di Kota Bogor semakin terbatas dan belum semua rumah tangga memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu perencanaan untuk

kebutuhan permukiman perlu didukung dengan proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal bagi penduduk. Mengacu kepada perhitungan pada SNI kebutuhan kavling untuk tempat tinggal dengan asumsi anggota KK 5 orang, namun demikian berdasarkan data kependudukan Kota Bogor, anggota keluarga yang ada di Kota Bogor rata - rata sekitar 4 orang sehingga perhitungan disesuaikan dengan mengacu kepada kondisi yang ada di Kota Bogor. Proyeksi dalam RPJPD untuk kebutuhan rumah / tempat tinggal disajikan dalam satuan unit rumah. Penyediaan unit rumah untuk kawasan perkotaan dapat hunian tidak bertingkat (rumah tapak) atau hunian bertingkat (rumah susun). Proyeksi kebutuhan unit rumah/ tempat tinggal didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kota Bogor

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.721
Proyeksi Kebutuhan Rumah	302.463	306.153	313.703	321.387	330.579	339.469

Sumber: Data penduduk Long Form Sensus Penduduk 2020 (diolah)

Tahun 2023, dengan jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.070.720 jiwa maka dibutuhkan tempat tinggal sebanyak 302.463 unit, dengan asumsi rata-rata penghuni dalam 1 KK adalah 4 orang. Tahun 2025, dibutuhkan sekitar 306.153 Unit rumah/ tempat tinggal di Kota Bogor. Dalam 20 tahun ke depan, kebutuhan rumah/ tempat tinggal menjadi sekitar 339.469 unit.

2.6.2.2. Air Bersih

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang dimaksud dengan "air" adalah media air untuk keperluan sanitasi, yang meliputi parameter fisika, biologi, dan kimia, yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Standar mutu kesehatan air untuk keperluan kebersihan digunakan tidak hanya untuk mencuci makanan, piring, dan pakaian, tetapi juga untuk menjaga kebersihan diri, seperti mandi dan menggosok gigi. Selain itu, air juga dapat digunakan sebagai air baku untuk air minum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "air" dalam pengertian ini adalah semua air yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan bumi, air tanah, air hujan, dan air laut. Air permukaan mengacu pada semua air yang ada di permukaan tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah lapisan tanah atau permukaan bumi. Sumber air adalah lokasi atau wadah air alami dan buatan yang berada di atas, atau di bawah permukaan bumi.

Air bersih menjadi sarana terpenting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat karena air merupakan media penularan berbagai penyakit, terutama penyakit lambung. Kebutuhan air minum rata-rata 5 liter per hari, dan secara keseluruhan, kebutuhan air rumah tangga di Indonesia adalah sekitar 60 liter per hari. Air bersih penting tidak hanya untuk konsumsi dan kebersihan manusia, tetapi juga untuk produksi barang industri. Air bersih merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan.

Air bersih merupakan sumber daya terpenting bagi manusia untuk bertahan hidup sehari-hari. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan salah satu poin penting dalam Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, pilar pembangunan lingkungan hidup perlu didukung. Secara umum setiap rumah tangga harus mempunyai persediaan air bersih yang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk itu lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan jaringan air minum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis peraturan/ perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan tata cara perencanaan umum jaringan air minum pada lingkungan perumahan di perkotaan.

Penyediaan air bersih harus diperhatikan secara matang dalam perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan seperti di Kota Bogor. Perencanaan dan pembangunan kota membutuhkan prakiraan air bersih. Proyeksi infrastruktur dan pasokan air bersih didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Kebutuhan Kota Bogor, Tahun 2023-2045

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih						
Tahun	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.721
Kebutuhan Air Domestik						
Sambungan rumah (190 ltr/org/hr)	203.436.800	205.918.200	210.996.900	216.164.900	222.347.385	228.327.022
Hidran Umum (30 ltr/org/hr)	32.121.600	32.513.400	33.315.300	34.131.300	35.107.482	36.051.635
Jumlah Air Domestik	235.558.400	238.431.600	244.312.200	250.296.200	257.454.867	264.378.658
Kebutuhan Air Non-Domestik						
Fasilitas Pendidikan (ltr/hr)						
TK (ltr/unit/hr)	8.566	8.670	8.884	9.102	9.362	9.614
SD	6.692	6.774	6.941	7.111	7.314	7.511
SLTP	2.231	2.258	2.314	2.370	2.438	2.504
SMU	2.231	2.258	2.314	2.370	2.438	2.504
Fasilitas Kesehatan						
RS/Poliklinik (2000 ltr/uniit/hr)	428.288	433.512	444.204	455.084	468.100	480.688
Puskesmas	463.979	469.638	481.221	493.008	507.108	520.745
Fasilitas Ibadah						
Langgar/ Masjid Warga (500 ltr/unit/hr)	2.355.584	2.384.316	2.443.122	2.502.962	2.663.584	2.663.584
Masjid Kecamatan (800 ltr/unit/hr)	7.138	7.225	7.403	7.585	8.071	8.071
Masjid Kelurahan	28.553	28.901	29.614	30.339	32.286	32.286
Fasilitas Perdagangan						
Pasar (12.000 ltr/unit/hr)	2.676.800	2.709.450	2.776.275	2.844.275	3.026.800	3.026.800
Jumlah Air Non-Domestik	5.980.060	6.053.002	6.202.291	6.354.205	6.727.501	6.754.306
Jumlah Air Domestik dan non-Domestik	241.538.460	244.484.602	250.514.491	256.650.405	264.182.368	271.132.964
Kebocoran Air (20%)	48.307.692	48.896.920	50.102.898	51.330.081	52.836.474	54.226.593
Hydrant (10%)	24.153.846	24.448.460	25.051.449	25.665.041	26.418.237	27.113.296
Kebutuhan Air Bersih (ltr/hari)	**313.999.999**	**317.829.982**	**325.668.838**	**333.645.527**	**343.437.079**	**352.472.853**
Kebutuhan Air Bersih (ltr/detik)	**3.634**	**3.679**	**3.769**	**3.862**	**3.975**	**4.080**

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah

Agar terwujudnya sarana air bersih maka diperlukan adanya pengelola sarana yang dapat mengoperasikan dan memelihara sarana tersebut dengan

baik. Dengan adanya sarana dan prasarana air bersih ini dapat dipergunakan dengan baik agar menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi kebutuhan air bersih Kota Bogor berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada **Tabel 2.74.**

Tabel 2.74. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bogor, Tahun 2023-2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Air					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.720
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (ltr/hari)	313.999.999	317.829.982	325.668.838	333.645.527	343.437.079	352.472.853
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (ltr/detik)	3.634	3.679	3.769	3.862	3.975	4.080

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah

Dalam rangka mengetahui daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di setiap wilayah. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik. Total kebutuhan air di Kota Bogor dapat dilihat pada **Tabel 2.75**, dimana Kecamatan Bogor Selatan membutuhkan jumlah air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 29.433.430 m³/tahun, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 27.909.799 m³/tahun dan Kecamatan Tanah Sereal sebesar 24.464.734 m³/tahun. Sementara kebutuhan air terendah terjadi di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.998.770 m³/tahun. Dari **Tabel 2.74** tersebut dilihat juga bahwa kebutuhan air domestik terbesar sejalan dengan jumlah penduduk terbesar yakni di Kecamatan Barat sedangkan kebutuhan air untuk lahan terbesar terjadi di Kecamatan Bogor Selatan.

Tabel 2.75. Kebutuhan Air di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m³/Tahun)	Kebutuhan Air Non-Domestik (m³/Tahun)	Kehilangan Air (m³/Tahun)	Kebutuhan Air Untuk Lahan (m³/Tahun)	Total Kebutuhan Air (m³/Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	12.791.626	3.837.488	2.494.367	8.786.319	27.909.799
Kec. Bogor Selatan	204.030	11.170.643	3.351.193	2.178.275	12.733.319	29.433.430
Kec. Bogor Tengah	96.258	5.270.126	1.581.038	1.027.674	119.933	7.998.770
Kec. Bogor Timur	104.327	5.711.903	1.713.571	1.113.821	3.643.664	12.182.959
Kec. Bogor Utara	186.724	10.223.139	3.066.941	1.993.512	5.721.953	21.005.546
Kec. Tanah Sareal	218.094	11.940.647	3.582.194	2.328.426	6.613.468	24.464.734

Sumber: Dok KLHS RPJPD Kota Bogor (2023)

Bagaimana kebutuhan air Kota Bogor di tahun 2045, menurut hasil proyeksi Dinas KLHS (2023), total kebutuhan air di Kota Bogor tahun 2045 sebesar 175.439 ribu m³/tahun, Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 39.938.396 m³/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 39.616.841 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 12.777.964 m³/tahun (**Tabel 2.76**).

Tabel 2.76. Proyeksi Kebutuhan Air Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2045

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m³/tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (m³/tahun)	Kehilangan Air (m³/tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m³/tahun)	Total Kebutuhan Air (m³/tahun)
Bogor Barat	238.685	20.622.423	6.186.727	4.021.372	8.786.319	39.616.841
Bogor Selatan	210.618	18.197.376	5.459.213	3.548.488	12.733.319	39.938.396
Bogor Tengah	97.997	8.466.911	2.540.073	1.651.048	119.933	12.777.964
Bogor Timur	106.565	9.207.199	2.762.160	1.795.404	3.643.664	17.408.426
Bogor Utara	190.628	16.470.296	4.941.089	3.211.708	5.721.953	30.345.046
Tanah Sereal	222.498	19.223.790	5.767.137	3.748.639	6.613.468	35.353.034

Sumber: KLHS (2023)

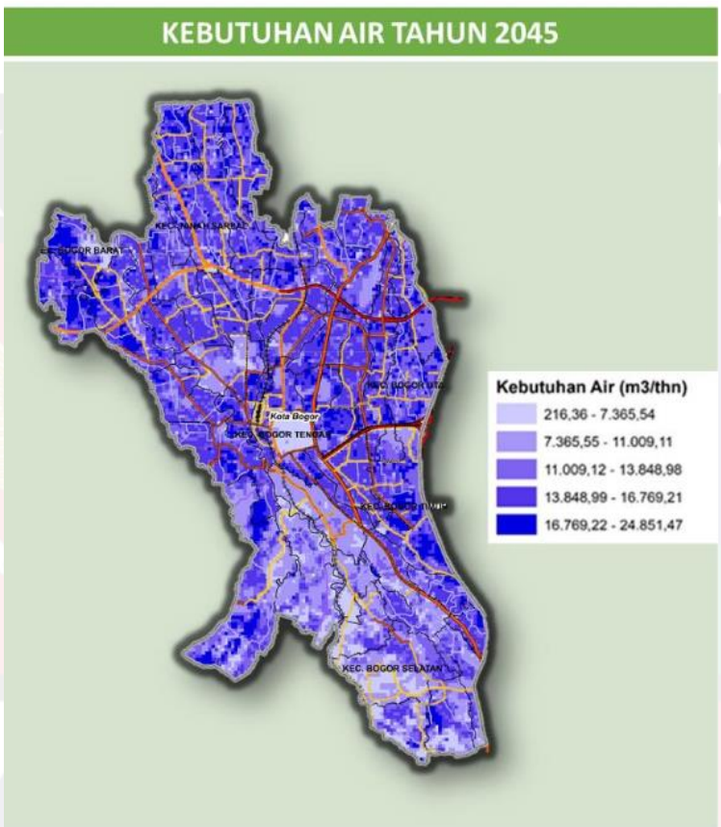

Gambar 2.92. Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2045

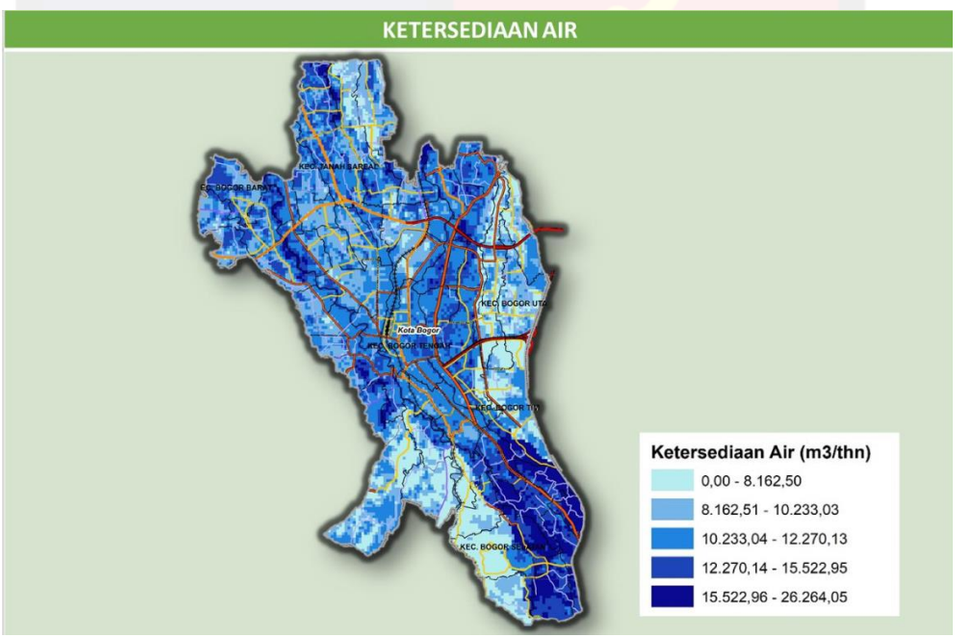

Gambar 2.93. Ketersediaan Air Kota Bogor

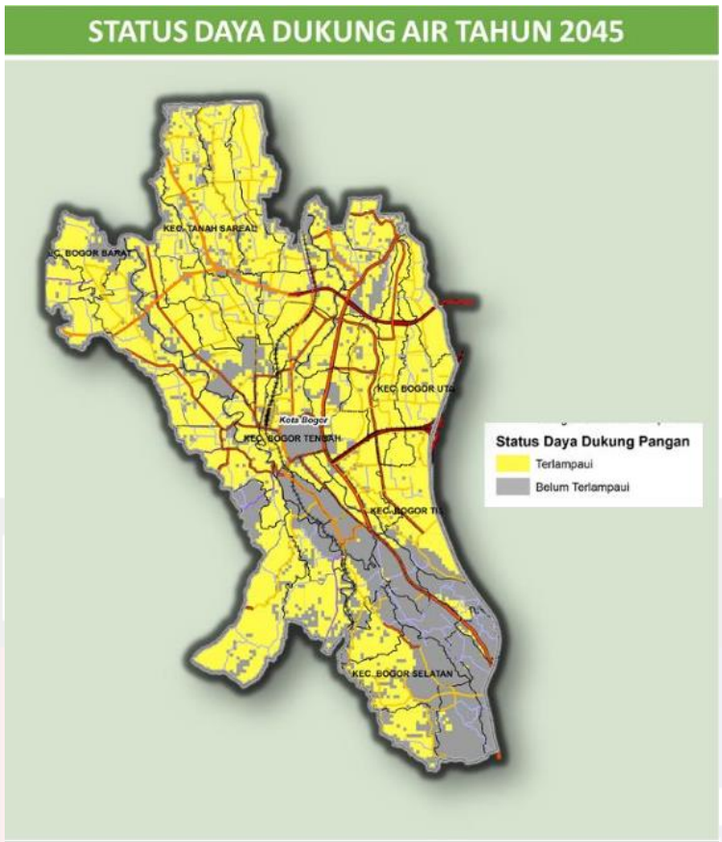

Gambar 2.94. Status Daya Dukung Air Tahun 2045

Status daya dukung air sampai tahun 2045 di Kota Bogor sudah memenuhi untuk semua Kecamatan yang ada di Kota Bogor kecuali Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh total kebutuhan air terbanyak ada di Kecamatan Bogor Selatan sebesar 39.938.395,74 m^3/tahun, namun ketersediaan air pada Kecamatan Bogor Selatan juga yang terbesar pada data yang tersedia saat ini, sehingga perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bogor untuk menjawab permasalahan kebutuhan air pada tahun 2045.

Gambar 2.95. Daya Dukung Air Tahun 2045

2.6.2.3. Energi/ Listrik

Perkembangan kebutuhan listrik di Kota Bogor akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas yang ada di masyarakat. Saat ini teknologi yang digunakan oleh masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dan melekat dengan gaya hidup penduduk sehingga kebutuhan listrik per kapita akan semakin meningkat. Rasio

elektrifikasi Kota Bogor saat ini sudah mencapai angka 99%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan listrik di Kota Bogor sudah cukup terpenuhi. Namun demikian dengan peningkatan konsumsi listrik dan pertambahan jumlah penduduk di Kota Bogor diperlukan adanya proyeksi terhadap kebutuhan listrik sampai dengan 20 tahun ke depan. Perhitungan kebutuhan listrik mencakup untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan non domestik yaitu untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang untuk aktivitas sosial ekonomi dan penerangan jalan.

Tabel 2.77. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Bogor, Tahun 2023-2045

Tahun	Perkiraan Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah/ KK (1 rumah/ KK = 4 jiwa)	Kebutuhan Domestik (kWh)	Kebutuhan Non Domestik (kWh)		Total Kebutuhan (kWh)
				Sosial Ekonomi (20%)	Penerangan Jalan (20%)	
2023	1.070.720	267.680	240.912.000	48.182.400	48.182.400	337.276.800
2025	1.083.780	270.945	243.850.500	48.770.100	48.770.100	341.390.700
2030	1.110.510	277.628	249.864.750	49.972.950	49.972.950	349.810.650
2035	1.137.710	284.428	255.984.750	51.196.950	51.196.950	358.378.650
2040	1.170.249	292.562	263.306.025	52.661.205	52.661.205	368.628.435
2045	1.201.721	300.430	270.387.225	54.077.445	54.077.445	378.542.115

2.6.2.4. Persampahan

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditangani apalagi di perkotaan. Keberadaaan lahan yang terbatas untuk Tempat Pembuangan Akhir akan menjadi masalah apabila penanganan sampah tidak dilakukan secara komprehensif dari sumber/ penghasil sampah. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya informasi mengenai potensi timbulan sampah yang akan dihasilkan selama periode 20 tahun ke depan. Kota Bogor saat ini sudah bekerjasama dengan Kabupaten Bogor untuk pengelolaan TPA Galuga dan juga bekerjasama dengan Provinsi untuk TPA Regional Nambo. Perhitungan proyeksi timbulan sampah mengacu kepada data sampah harian di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dapat dilihat pada **Tabel 2.78.**

Tabel 2.78. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bogor Tahun 2023-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.721
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	284.632	288.103	295.209	302.440	311.090	319.456

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020

2.6.2.5. Fasilitas Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2018 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tergantung pada jumlah penduduk yang dilayani. Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan ini mengacu pada dokumen SNI nomor 03-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan. Jenis fasilitas kesehatan yang dibutuhkan antara lain:

1. Posyandu, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
2. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyembuhan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit;
3. Puskesmas pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil; dan
4. Apotek, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. Kemudian untuk jumlah sarana kesehatan Kota Bogor tahun 2023 digambarkan pada **Gambar 2.96.**

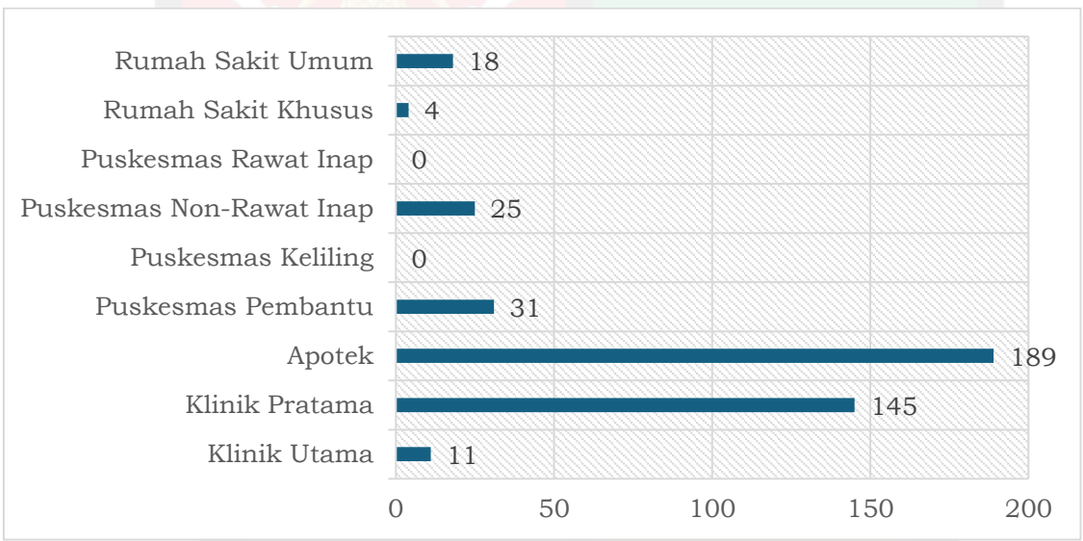

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Bogor 2023

Gambar 2.96. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah rumah sakit di Kota Bogor berjumlah 32 rumah sakit terdiri dari 18 rumah sakit umum dan 4 rumah sakit khusus. Jumlah Puskesmas di Kota Bogor berjumlah 25 Puskesmas non rawat inap. Tahun 2021 di Kota Bogor terdapat 7 Puskesmas yang melayani Rawat Inap, namun di tahun 2023 Puskesmas di Kota Bogor sudah tidak melayani rawat inap. Kota Bogor juga memiliki 31 Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Bogor. Jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2022 sebanyak 1.070.719, rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 adalah 1 : 19.120, yang artinya 1 puskesmas melayani 19.120 penduduk, rasio ini sudah ideal dimana perbandingan yang ideal yaitu 1 : 30.000 penduduk. Selain Rumah

sakit dan Puskesmas, Kota Bogor juga memiliki sarana Kesehatan lainnya yaitu 11 Klinik Utama, 145 Klinik Pratama dan 189 Apotek.

Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tahun 2023 - 2045 Kota Bogor dilakukan dengan mengacu pada SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota terkait Kebutuhan Sarana Kesehatan. Berikut merupakan kebutuhan sarana kesehatan jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk pendukung yang ada.

Tabel 2.79. Jenis Fasilitas (Sarana/Prasarana Kesehatan)

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m²/jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m²)	Luas Lahan Min (m²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	3001	0,12	1.000 m²	Di Tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKIA/ Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000		4.000 m²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	18		-	1.500 m²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/ tempat usaha/ apotik
7	Apotik/ Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	

Sumber: Data penduduk Long Form Sensus Penduduk 2020 (diolah)

Berdasarkan aturan tersebut, maka kebutuhan sarana Kesehatan di Kota Bogor dapat diproyeksi berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor. Sebagai contoh interpretasi proyeksi Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, pada tahun 2022 terdapat kondisi existing sebanyak 32 unit.

Proyeksi kebutuhan Puskesmas Pembantu tahun 2023 sebanyak 223, sehingga jika dilihat dari kondisi existing tahun 2022 sebanyak 32 maka pada tahun 2023 dibutuhkan tambahan sarana puskesmas pembantu sebanyak 191 unit. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat berdasarkan hasil proyeksi maka tahun 2045 dibutuhkan sekitar 250 Unit Puskesmas Pembantu. Berdasarkan data ini maka diharapkan pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan sarana kesehatan sesuai kebutuhan penduduknya. Interpretasi ini sama halnya dengan hasil proyeksi untuk Tempat Praktek Dokter/ Poliklinik dimana hasil proyeksi tahun 2023 - 2045 kebutuhan sarana Kesehatan tersebut lebih besar dari sarana yang sudah ada, sehingga diperlukan adanya penambahan.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh hasil proyeksi Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan, juga hasil proyeksi Apotek. Proyeksi kebutuhan kedua sarana kesehatan ini ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sarana yang sudah ada, sehingga pemerintah Kota Bogor tidak perlu melakukan penambahan sarana Kesehatan Puskesmas dan Poliklinik. Terdapat beberapa sarana kesehatan yang belum diketahui jumlah sarananya pada tahun 2022, seperti Posyandu, Balai Pengobatan Warga dan Klinik Bersalin. Namun, proyeksi kebutuhannya untuk tahun 2023-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Bogor, Tahun 2023-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan			
		2025	2030	2035	2040
Jumlah Penduduk	1.070.719	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249
Posyandu	982	867	888	910	936
Balai Pengobatan Warga	NA	434	444	455	468
BKIA/ Klinik Bersalin	NA	226	231	237	244
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	31	226	231	237	244
Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan	25	9	9	9	10
Tempat Praktek Dokter/ Poliklinik	156	217	222	228	234
Apotek	189	36	37	38	39

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor 2023, diolah

2.6.2.6. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kunci dari kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. ketersediaan fasilitas pendidikan diharapkan dapat mendorong kemudahan masyarakat Kota Bogor dalam mengakses pengetahuan Kota Bogor.

Tabel 2.81. Jumlah Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi di Kota Bogor, Tahun 2013-2022

Tahun	MI	SD	SMP	MTS	MA	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
2013	56	286	117	38	16	49	85	11
2014	56	285	116	38	16	52	93	11
2015	56	301	110	38	16	52	96	11
2016	56	329	162	42	16	68	98	12
2017	61	324	163	45	16	69	105	12
2018	61	267	121	45	17	54	102	12
2019	61	269	121	45	17	54	102	12
2020	61	273	125	45	17	56	102	12
2021	60	276	128	46	17	55	103	12
2022	60	280	128	49	19	55	103	12
2023								

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023

Tahun 2022 jumlah Sekolah tingkat Dasar Kota Bogor sebanyak 340 sekolah yang terdiri dari 280 Sekolah Dasar (SD) dan 60 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah sekolah tingkat pertama sebanyak 177 sekolah yang terdiri dari 128 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 49 Madrasah Tsanawiyah (MTS). Jumlah Sekolah tingkat atas sebanyak 177 sekolah yang terdiri dari 55 Sekolah Menengah Atas (SMA), 19 Madrasah Aliyah (MA) serta 103 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah perguruan tinggi di Kota Bogor sebanyak 12 Universitas.

Dalam kurun waktu 2013 hingga 2022 jumlah sekolah di Kota Bogor terus mengalami peningkatan di setiap jenjang.

Tabel 2.82. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.060.940	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.720
Proyeksi Fasilitas Pendidikan							
SD/ MI	340	338	336	325	303	291	279
SMP/ MTs	177	176	174	167	164	157	151
SMA/ MA/ SMK	177	177	175	164	168	159	154

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah

Dengan demikian, proyeksi kebutuhan SD/ MI tahun 2023 sebanyak 338 sehingga jika dilihat dari kondisi existing tahun 2022 sebanyak 340 maka pada tahun 2023 sarana SD/ MI sudah terpenuhi. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Begitu juga dengan kebutuhan sarana SMP/MTs tahun 2023 sebesar 174, dimana kondisi tahun 2022 sudah terdapat 174 Unit. Hal ini menunjukkan secara kuantitas, jumlah sarana SMP/ MTs sudah terpenuhi begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Hal yang sama ditunjukkan oleh kebutuhan sarana SMA/MA/SMK tahun 2023 sebesar 175 Unit dimana tahun 2022 terdapat 177 Unit sehingga secara jumlah sarana pendidikan untuk jenjang SMA/MA/SMK sudah terpenuhi. Begitu juga pada tahun selanjutnya. Jika dilihat berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2045 maka sarana pendidikan di Kota Bogor cukup memadai secara kuantitatif, hal ini sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2045 yang memiliki laju stasioner. Meskipun secara jumlah sudah terpenuhi, namun hal ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal kualitas yang juga memadai. Ketersediaan sarana pendidikan merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Prespektif Nasional

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana struktur ruang dalam RTRWN sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang sesuai dengan konteks Kota Bogor meliputi: a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; d. mengembangkan

pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, secara berkelanjutan; dan e. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi; b. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim; b. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak; c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; e. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;

PKN diterapkan dengan kriteria a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. PKW diterapkan dengan kriteria a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKL diterapkan dengan kriteria a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Wilayah Jabodetabek (termasuk didalamnya Kota Bogor) diarahkan menjadi aglomerasi wilayah perkotaan Jakarta dengan fungsi konektivitas keseimbangan pertumbuhan terpadu. Arah Kebijakan secara nasional ini menekankan

pentingnya kolaborasi antara kota-kota di wilayah Jabodetabek, (termasuk Kota Bogor), untuk menciptakan ekosistem perkotaan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Fokus utamanya adalah pada peningkatan konektivitas, baik dalam hal transportasi maupun infrastruktur lainnya, untuk memfasilitasi mobilitas penduduk, barang, dan jasa antar kota-kota di wilayah tersebut. Kota Bogor, dengan posisinya yang strategis dan potensi ekonomi serta sumber daya alamnya, diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan alternatif yang membantu mengurai tekanan perkotaan di Jakarta. Melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, Kota Bogor diarahkan menjadi tujuan investasi baru yang menarik serta menawarkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Selain itu, dalam konteks keseimbangan pertumbuhan terpadu, penting bagi Kota Bogor untuk menjaga harmoni antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan serta warisan budayanya. Perlindungan terhadap lahan hijau, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan pelestarian situs-situs bersejarah.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Arah Kebijakan Kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045 yang menjadi bahan masukan bagi penyusunan RPJPD Kota Bogor diacu pada dua hal yaitu arah kebijakan kewilayahan terkait isu perkotaan dan arah kebijakan wilayah Jawa. Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045. Pada tahun 2045, sebagian besar Wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).

Kawasan perkotaan menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan", melalui 5 (lima) prioritas yang salah satunya sangat terkait dengan Kota Bogor adalah penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, serta penguatan

ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Dalam mendukung Transformasi Ekonomi, Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor "**Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi**" yang diupayakan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang dapat terkait dengan pengembangan Kota Bogor ke depan antara lain adalah:

- Pengembangan kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi - Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri *consumer goods* dan *general manufacture*). Walaupun tidak masuk ke dalam klaster secara langsung, namun keberadaan kawasan-kawasan strategis tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan Kota Bogor saat ini maupun di masa yang akan datang.
- Pengembangan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI)) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan.
- Pengembangan kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical tourism seperti Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang.
- Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan *Internet of Things* (IoT), pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*.
- Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*), yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember.

Selain arah kebijakan kewilayahan yang mendukung Transformasi Ekonomi, arah kebijakan kewilayahan terkait perkotaan dan Kota Bogor pada transformasi lain adalah pada Arah Kebijakan Landasan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana. Arah kebijakan ekologi terkait antara lain adalah (i) Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta; dan (ii)

Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan. Untuk arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yang terkait dan menjadi perhatian adalah Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan.

Salah satu arah kebijakan Transformasi Ekonomi yang terkait dengan perkotaan adalah Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi. Peran perkotaan dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia, sangat diharapkan dapat mendorong wilayah-wilayah di sekitarnya mendapat dampak positif dari sebuah perkembangan. Pada proses perkembangannya, RPJPN 2025-2045 memperhatikan bahwa hubungan aglomerasi kota-kota besar menjadi metropolitan dapat memiliki peran yang sangat signifikan. Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, termasuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai superhub ekonomi sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Perkotaan yang responsif terhadap pertumbuhan penduduk mengantisipasi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan di Indonesia, yaitu sebesar 72,9 persen pada tahun 2045, diperlukan tata kelola pembangunan termasuk dalam pembangunan perkotaan yang dapat mengimbangi tuntutan peningkatan kualitas pelayanannya. Tingkat kompleksitas di Wilayah Metropolitan (WM) seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya memerlukan tata kelola yang lebih andal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi Kawasan sekitarnya. Penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan.

Posisi Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan Jabodetabekpunjur tentu sangat berkaitan dengan arah kebijakan di atas. Integrasi sistem transportasi dengan mobilitas yang tinggi di kawasan Jabodetabekpunjur jika tidak disikapi dan antisipasi dengan baik hanya akan mendatangkan dampak negatif terhadap mobilitas internal di Kota Bogor. Begitu pun dengan upaya menjadikan Kota Bogor sebagai kota layak huni, inklusif, dan berbudaya, yang diimbangi dengan upaya mendorong kota hijau dan berketahanan. Perwujudan kota maju dengan mengedepankan kesejahteraan melalui penerapan *compact city*, serta pengembangan kelembagaan dan regulasi pengelolaan perkotaan, menjadi arahan yang dapat dijadikan acuan bagi Kota Bogor di masa yang akan datang. Sedangkan dalam rangka Pembangunan IKN sebagai Superhub Ekonomi, secara langsung Kota Bogor tidak memiliki keterkaitan, namun secara prinsip dan konsep pengembangan, seperti halnya menuju wilayah yang berdaya saing dan inovatif, tetap dapat menjadi acuan untuk diterapkan.

Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak

ekonomi kawasan sekitarnya. Pembangunan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan peran strategis masing-masing kawasan. Pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang terutama memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya; hijau dan berketahanan; serta maju menyejahterakan.

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru. Pengembangan pusat- pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan RPJPN 2025-2045 difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan. Dalam hal ini yang dapat berkaitan dengan pengembangan Kota Bogor ke depan yaitu (i) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; dan (ii) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

Dalam mewujudkan RPJPN 2025-2045, Kota Bogor masih memiliki tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas. Maka dari itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar lainnya melalui:

1. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kualitas rumah tinggal serta lingkungannya yang layak huni bagi keluarga, terutama bagi korban bencana dan korban relokasi.
2. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal melalui program pengembangan dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
3. Peremajaan Kota Bogor terutama pada kawasan permukiman padat tidak teratur seperti Kelurahan Panaragan, Kelurahan Paledang, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Gudang, Kelurahan Empang, Kelurahan Tegallega dan Kelurahan Sempur.
4. Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi untuk pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif.
5. Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi serta retikulasi untuk meningkatkan daerah pelayanan air siap minum dan air bersih.

Peningkatan komitmen daerah dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah dengan berorientasi ekonomi sirkuler dan nilai ekonomis melalui pembentukan Dewan Sekretariat bersama pengelolaan sampah regional, pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (*Reuse*, *Reduce*, *Recycle*), metode bank sampah, dan metode kemitraan pengolahan

2.7.2. Perspektif Provinsi Jawa Barat

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ialah pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan. pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi wilayah pengembangan (WP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (RTRWP Jawa Barat) yang salah satunya menetapkan Kota Bogor dimasukkan dalam lingkup kewilayahan Bodebekpunjur dengan fungsi kewilayahan sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah daerah provinsi dengan fungsi dan peran Kawasan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur serta antisipasi terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur.

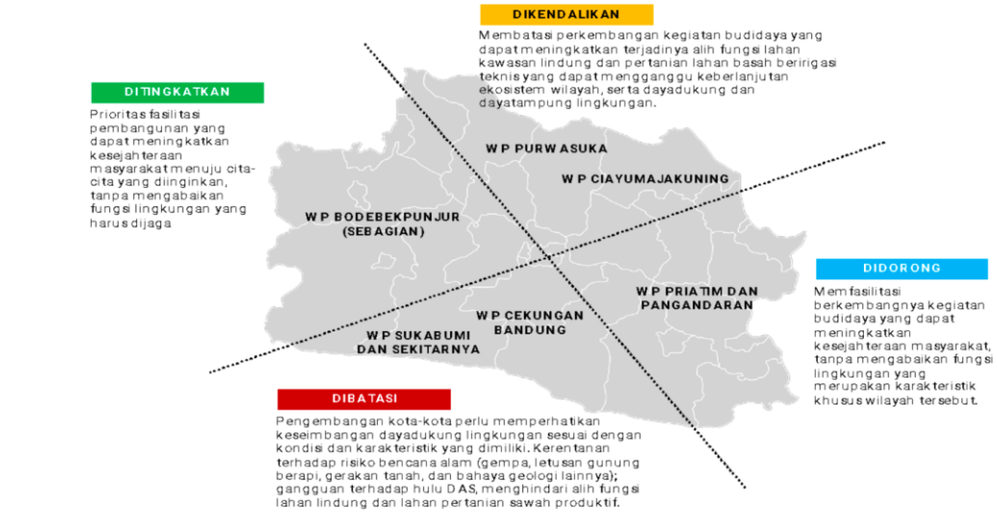

Sumber: : Perda Jawa Barat No.9 Tahun 2022

Gambar 2.97. Tema pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat (Termasuk Kota Bogor)

Arah Pengembangan WP Bodebekpunjur (Termasuk Kota Bogor) diarahkan untuk melengkapi fasilitas pendukung pusat kegiatan lokal (PKL); mengembangkan infrastruktur strategis, mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan, dan industri kreatif serta pariwisata. selanjutnya investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, dan non polutif. Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, dan peningkatan SDM.

Arah Kebijakan WP Bodebekpunjur

FOKUS	ARAH KEBIJAKAN
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di WP Bodebekpunjur diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah serta pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pusat pertumbuhan baru yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi digital, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.
SDM	Pengembangan SDM berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di WP Bodebekpunjur diarahkan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan kerja, meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan sistem perlindungan sosial.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan; mendorong investasi yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi dan non polutif; mendorong pembangunan industri padat karya dan penyerapan tenaga lokal; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor perekonomian; meningkatkan produktivitas, daya saing dan pengembangan IKM/UMKM; meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; meningkatkan produksi dan distribusi pangan; meningkatkan stabilitas daerah; membangun kolaborasi dan kemitraan dengan swasta, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Lingkungan	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.

Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan arahan tersebut berikut adalah daftar proyek strategis yang berada di lingkup Kota Bogor:

1. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin-Salabenda).
2. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

2.7.3. Perspektif Aglomerasi Jabodetabek

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif kota adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah Kota Bogor. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah. Namun demikian, pengembangan Kota Bogor harus sejalan dengan pengembangan daerah sekitar. Semakin eratnya hubungan daerah Jabodetabekpunjur mengarah pada perencanaan membentuk wilayah megapolitan. Dalam RTRW DKI Jakarta 2030 ditambahkan beberapa muatan baru yaitu:

a. Pengenalan sistem baru dari sistem kebebasan kebijaksanaan untuk menentukan dan memilih sesuatu (*Discretionary System*) menjadi sistem taat peraturan dan perundangan di dalam menentukan dan memilih sesuatu (*Regulatory System*);
b. Penetapan secara khusus struktur ruang dan pola ruang di dalam pengembangan penataan ruang
c. Penyesuaian pola penyebaran pusat kegiatan, berdasarkan nomenklatur pola ruang
d. Perumusan muatan khusus untuk Kawasan Strategis
e. Penetapan muatan tentang Pemanfaatan Ruang yang berisi Indikasi Program dan Pembiayaan 5 tahunan
f. Penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
g. Pentingnya keterpaduan dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Bodetabekpunjur);
h. Memasukan muatan sistem transportasi umum, pedestrian, ruang evakuasi bencana, ruang untuk sektor informal, dan ruang terbuka hijau (RTH).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta maka perlu dibentuk satu kawasan aglomerasi. Adapun tujuan dari pengembabangan kawasan aglomerasi yaitu untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar (Pasal 51 ayat 1). Kawasan Aglomerasi di sekitar Daerah Khusus Jakarta minimal melingkupi Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dengan pengembangan kawasan aglomerasi tersebut, maka perlu untuk dilakukan sinkronisasi dokumen rencana Tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan Kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota Yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi. Selanjutnya, sinkronisasi dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah kawasan aglomerasi. Dokumen rencana tata ruang tersebut memuat fungsi dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada kawasan aglomerasi.

Dokumen rencana pembangunan selanjutnya dituangkan dalam rencana induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Kebijakan strategis Pemerintah Pusat serta Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global. Adapun program dan kegiatan minimal yang perlu dilakukan mencakup:

a. Transportasi;
b. Pengelolaan sampah;
c. Pengelolaan lingkungan hidup;
d. Penanggulangan banjir;
e. Pengelolaan air minum;

f. Pengelolaan B-3 dan limbah B-3;
g. Infrastruktur wilayah;
h. Penataan ruang; dan
i. Energi

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Rencana induk di Kawasan Aglomerasi tentunya diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan mempertimbangkan Kapasitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, diperlukan juga kerjasama yang baik dari wilayah yang masuk pada kawasan aglomerasi. Kerja sama wajib antardaerah dengan daerah berbatasan minimal melingkupi:

a. Perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian jaringan prasarana perkotaan meliputi drainase, air limbah, dan persampahan di Kawasan Aglomerasi;
b. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di Kawasan Aglomerasi;
c. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya air, serta pemantapan program pengendali banjir dan rob secara terintegrasi di Kawasan Aglomerasi;
d. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pencemaran udara dan air di Kawasan Aglomerasi;
e. pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan perkotaan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7.4. Perspektif Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No.6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, bahwa tujuan penataan ruang Kota Bogor yaitu "Mewujudkan Ruang Kota Bogor sebagai Kota Jasa dan Permukiman dengan tetap Mempertahankan Ciri Khasnya sebagai Kota Pusaka yang Berwawasan Lingkungan". Penataan Kota Bogor dilakukan pada luas administrasi kota Bogor sebesar 11.138 Hektar. Dalam mewujudkan Kota Jasa dan Permukiman, terdapat beberapa hal yang dilakukan Kota Bogor dalam penataan ruang, yaitu:

1) Mewujudkan **pusat pertumbuhan baru** di 4 wilayah pelayanan melalui pengembangan guna campuran
2) Mengembangkan **rumah vertikal dan horizontal**, serta **rumah terstruktur** dan **rumah swadaya/kampung**
3) **Meningkatkan kualitas permukiman kumuh** secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana, peremajaan, dan perbaikan kawasan
4) **Mengembangkan perumahan vertikal dengan KDB rendah** pada kawasan PPK, Sub PPK, simpul-simpul TOD, jalan arteri dan kolektor yang sudah memenuhi kriteria teknis, kawasan perumahan padat tidak teratur yang direvitalisasi, dan permukiman padat sekitar sempadan sungai

5) **Mengembangkan perumahan baru** yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Selain itu, perwujudan Kota Pusaka melalui perencanaan tata ruang kota dilakukan melalui:

1) **Pelestarian** kawasan dan bangunan cagar budaya
2) PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk **mempertahankan dan meremajakan** kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota
3) Menetapkan **kawasan pusaka** sebagai **kawasan strategis kota**

Penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan harus dapat memperhatikan keberlanjutan agar penciptaan ruang kota dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang hingga generasi di masa yang akan datang. Perwujudan Kota Berkelanjutan dalam penataan ruang kota dilakukan melalui hal sebagai berikut:

1) Pengembangan transportasi umum
2) Pengembangan transportasi ramah lingkungan dan pedestrian
3) Mengembangkan infrastruktur dan bangunan hijau
4) Mengembangkan ruang terbuka hijau
5) Menata kawasan situ dan sungai
6) Memperketat KDB

Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, sedangkan strategi penataan ruang adalah penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat definisi dari kebijakan penataan ruang yang disebutkan sebelumnya maka kebijakan penataan ruang dirumuskan dengan kriteria:

a. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku untuk Kota Bogor
b. Arahannya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan
c. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul pada masa yang akan datang

2.7.4.1. Struktur dan Pola Ruang

A. Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

a. **WP Samida** meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur,

dan Kelurahan Tegallega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);

b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);

c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curug Mekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanah Sareal);

d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil); dan

e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).

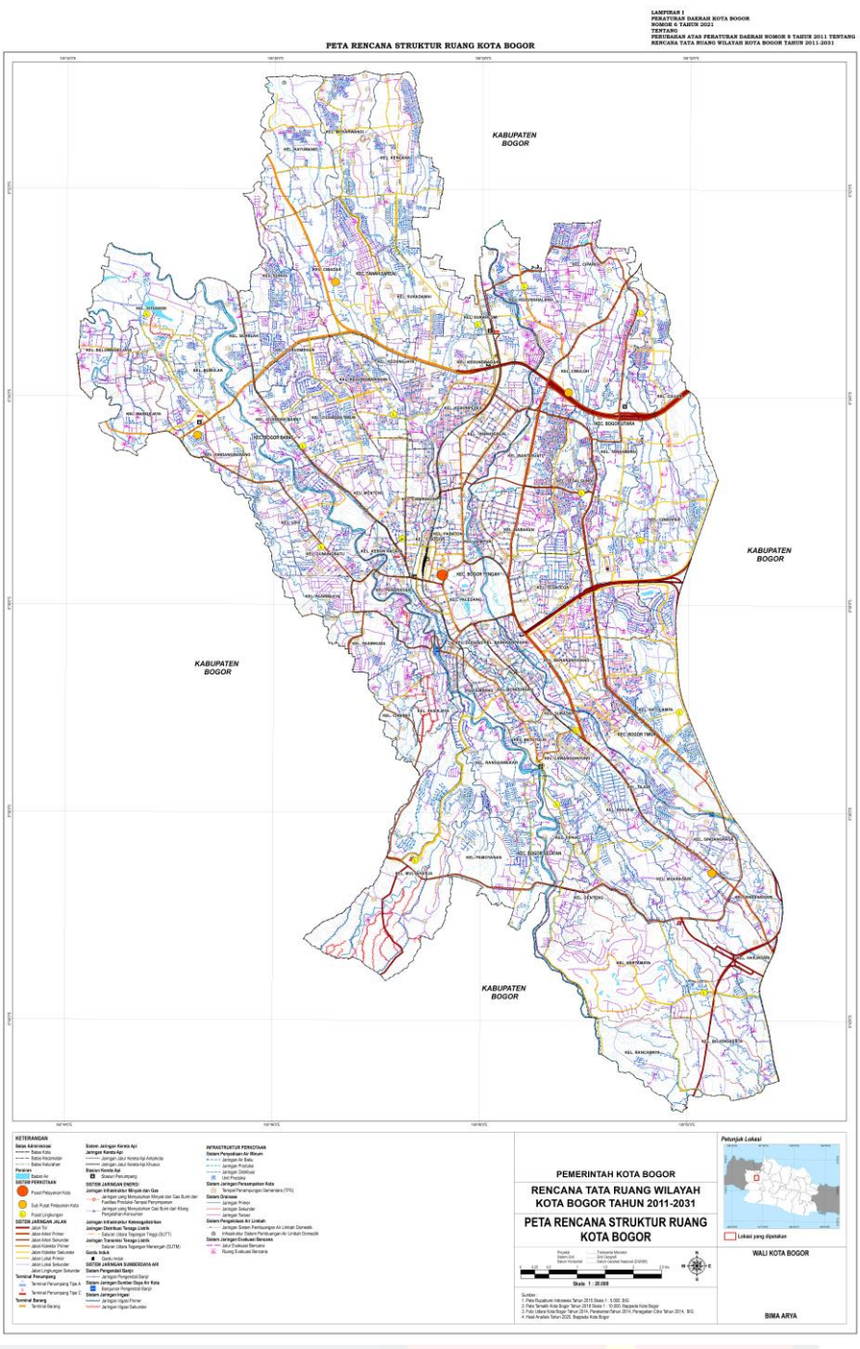

Sumber: RTRW Kota Bogor, 2011-2031

Gambar 2.98. Rencana Struktur Ruang Kota Bogor 2011-2031

Penetapan WP dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.83. Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Ket.
1	WP Samida (WP A)	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersial di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	Pusat Kota Sub-Pusat Kota (Pusat WP A)	Seluruh Kota, WP	273.811	-

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Ket.
2	WP Pasima (WP B)	Daerah Bubulak-Sindangbarang	Sub Pusat Kota (Pusat WP B)	WP	186.424	Melayani penduduk perbatasan
3	WP Utara (WP C)	Daerah Yasmin-Pasar TU Kemang	Sub Pusat Kota (Pusat WP C)	WP	456.499	-
4	WP Purwa (WP D)	Daerah Warung Jambu-Jl. Adnawijaya	Sub Pusat Kota (Pusat WP D)	WP	295.188	-
5	WP Daksina (WP E)	Daerah Tajur & sekitar rencana akses Toll Ciawi-Sukabumi-Inner Ring Road	Sub Pusat Kota (Pusat WP E)	WP	324.509	Melayani penduduk perbatasan

Sumber: Perda Kota Bogor No.6 Tahun 2021, Bappeda Kota Bogor

Arahan pengembangan setiap Wilayah Pelayanan (WP) sebagai berikut. Adapun arah pemanfaatan ruang WP Kota Bogor terlampir pada

PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota;

1. Sub PPK Pasima sebagai pusat WP Pasima diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan kegiatan utama jasa akomodasi, perdagangan dan pengembangan TOD Bubulak;
2. Sub PPK Utara sebagai pusat WP Utara diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru dengan kegiatan utama perdagangan jasa dan pasar induk;
3. Sub PPK Purwa sebagai pusat WP Purwa diarahkan sebagai gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran dengan kegiatan utama perdagangan, jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner;
4. Sub PPK Daksina sebagai pusat WP Daksina diarahkan sebagai wilayah perkembangan ekonomi terbatas, dengan kegiatan utama sentra otomotif, wisata belanja, *Meeting - Incentive - Convention - and Exhibition* (MICE), jasa akomodasi dan ekowisata; dan
5. PL pada masing-masing SWP akan dilengkapi dengan sarana prasarana skala lingkungan

B. Pola Ruang

Apabila dilihat dari RTRW Kota Bogor, pola ruang Kota Bogor terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan lindung berdasarkan pola ruang terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan kawasan budidaya diperuntukan untuk kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Peruntukan kawasan lindung dan budidaya selengkapnya ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.84. Peruntukan kawasan lindung dan budidaya RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

Peruntukan	Luas (ha)	Lokasi
A. Kawasan Lindung		
1. Kawasan Perlindungan setempat	411	
a. Sempadan Sungai		Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran
b. Kawasan sekitar danau atau waduk		Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya, Situ Panjang
2. Kawasan konservasi	85	kawasan perlindungan plasma nutfah Kebun Raya Bogor
3. RTH Publik	2.230	
a. Rimba Kota		Hutan Penelitian Dramaga di Kelurahan Situ Gede
b. Taman kota dan taman lingkungan		Skala WP, Kecamatan, Kelurahan dan RW) menyebar di seluruh kecamatan;
c. Tempat Pemakaman Umum		Kelurahan Empang (Tempat Pemakaman Umum Dreded) untuk WP Samida, Kelurahan Situ Gede (Tempat Pemakaman Umum Situ Gede) untuk WP Pasima, Kelurahan Kebon Pedes (Tempat Pemakaman Umum Blender) dan Kelurahan Kayumanis (Tempat Pemakaman Umum Kayumanis) untuk WP Utara, Kelurahan Cimahpar (Tempat Pemakaman Umum Cimahpar) untuk WP Purwa, Kelurahan Mulyaharja (Tempat Pemakaman Umum Mulyaharja), Kelurahan Genteng (Tempat Pemakaman Umum Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (Tempat Pemakaman Umum Cipaku) untuk WP Daksina;
d. kawasan konservasi		Kebun Raya Bogor
e. kebun penelitian		Kelurahaan Menteng, Pasirjaya dan Pasirkuda Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah dan Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Tanah Sareal
f. Sempadan Sungai		Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran;
g. kawasan sekitar danau atau waduk		Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya; Situ Panjang;
h. Jalur Hijau		jalur hijau jalan tol, jalur hijau jalan, jalur hijau rel api, dan alur hijau dibawah tegangan tinggi.
i. RTH Privat		• RTH pekarangan rumah • RTH pekarangan industri, perkantoran, perdagangan jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pertahanan keamanan, kawasan transportasi dan tempat usaha lainnya
B. Kawasan Budidaya		
1. Kawasan Pertanian		
Kawasan Tanaman Pangan	127	Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Pasirjaya, Sindangbarang, Situgede Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Cikaret, Pakuan, Rancamaya, Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur.
2. Kawasan Peternakan	3	Rumah Potong Hewan sebagai Rumah Potong Hewan regional di Bubulak
3. Kawasan Industri		• Kelurahan Cibuluh, Ciluar, Ciparigi, Kedunghalang, Tanahbaru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Cilendek

Peruntukan	Luas (ha)	Lokasi
		Barat Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Sindangrasa, Sindangsari, Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Batutulis, Empang, Harjasari, Lawanggintung, Muarasari, Pakuan, Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Kayumanis, Kebonpedes, Kedungbadak, Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sarea. • Sentra industri kecil dan menengah diarahkan menyebar di setiap WP
4. Kawasan Pariwisata	46	• wisata ilmu pengetahuan dan teknologi di Pusat Kota atau WP Samida; • wisata budaya di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima dan Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa; • wisata kuliner dan belanja di PPK (kawasan Bogor lama), Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur/WP Daksina (kawasan Tajur); • wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau Meeting, Incentive, Convention, Exhibition di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina; • wisata agro dan rekreasi alam di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina; dan • wisata taman rekreasi di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina.
5. Kawasan Permukiman		
a. Kawasan Perumahan	7.103	• peruntukan kawasan perumahan tersebar di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Tanah Sareal; • pengaturan kepadatan perumahan ditentukan berdasarkan karakteristik kawasan dan daya dukung lingkungan dan akan didetailkan pada rencana detail tata ruang; • perumahan kepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima yaitu di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Situgede Kecamatan Bogor Barat serta sebagian WP Daksina di Kelurahan Bojongkerta, Genteng, Harjasari, Kertamaya, Muarasari, Mulyaharja, Pamoyanan, Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan; • Perumahan kepadatan sedang diarahkan di sebagian Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida di Kelurahan Babakan, Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur, Tegallega, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; • Perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Barat/WP Pasima, dan Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara
b. Kawasan Perdagangan dan Jasa	895	• kawasan PPK dan masing-masing Sub PPK dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu; • koridor Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Sholeh Iskandar, Jalan paralel Jalan Tol Lingkar Bogor, Jalan

Peruntukan	Luas (ha)	Lokasi
		Adnawijaya, dan rencana jalan R3; • pasar induk di Kecamatan Tanah Sareal; dan • TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang; • sub PPK dan dikembangkan secara terpadu; • jalan arteri sekunder dan kolektor; dan • sekitar kawasan TOD skala sub kota Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya
c. Kawasan Perkantoran	128	• kantor Pemerintah Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota menyebar di seluruh kecamatan; • kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota menyebar di seluruh kecamatan; dan • kawasan perkantoran pemerintahan baru kota di WP Pasima, WP Utara, WP Daksina, dan WP Purwa.
d. Kawasan Fasilitas Umum dan Sosial	253	
• Kawasan Pendidikan	102	• kawasan pendidikan dasar menyebar di seluruh kelurahan; • kawasan pendidikan menengah menyebar di seluruh kecamatan; • kawasan pendidikan tinggi di menyebar di seluruh kecamatan; • penambahan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; dan • pengembangan pendidikan tinggi di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina.
• Kawasan Kesehatan	34	• rumah sakit yang menyebar di seluruh kecamatan; • pelayanan kesehatan dasar berupa puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, dan sarana kesehatan lainnya yang menyebar di seluruh kecamatan; dan • penambahan puskesmas pembantu ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara
• Kawasan Peribadatan	6	Seluruh Kecamatan
• Kawasan Olahraga	111	• GOR Pajajaran; • sarana olah raga skala WP dan lingkungan di setiap WP; dan • kawasan olahraga skala kota atau skala nasional di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina
e. Kawasan transportasi	1	• stasiun kereta api di kawasan stasiun Bogor; • stasiun kereta api perkotaan di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya; dan • kawasan terminal dan stasiun kereta api perkotaan Baranangsiang.
f. Kawasan Infrastruktur Perkotaan	25	• Gardu Induk Listrik di Kelurahan Tanahbaru, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Sindangbarang dan Kelurahan Sempur;

Peruntukan	Luas (ha)	Lokasi
		• Instalasi Pengolahan Air di Cipaku, Dekeng dan Rancamaya; • Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kelurahan Tegalgundil dan Kelurahan Kayumanis; dan • kolam retensi di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan.
g. Kawasan campuran	295	• kawasan campuran di koridor Jalan KH Sholeh Iskandar, rencana jalan arteri Tol Lingkar Bogor, jalan lingkar dalam (inner ringroad); • kawasan TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang; dan • TOD skala sub kota di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya serta TOD skala lingkungan
h. Kawasan pertahanan dan keamanan	113	Kelurahan Cilendek Barat, Gunungbatu, Loji, Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Lawanggintung, Pakuan Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Cibuluh, Ciparigi, Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Kedungbadak Kecamatan Tanah Sarea

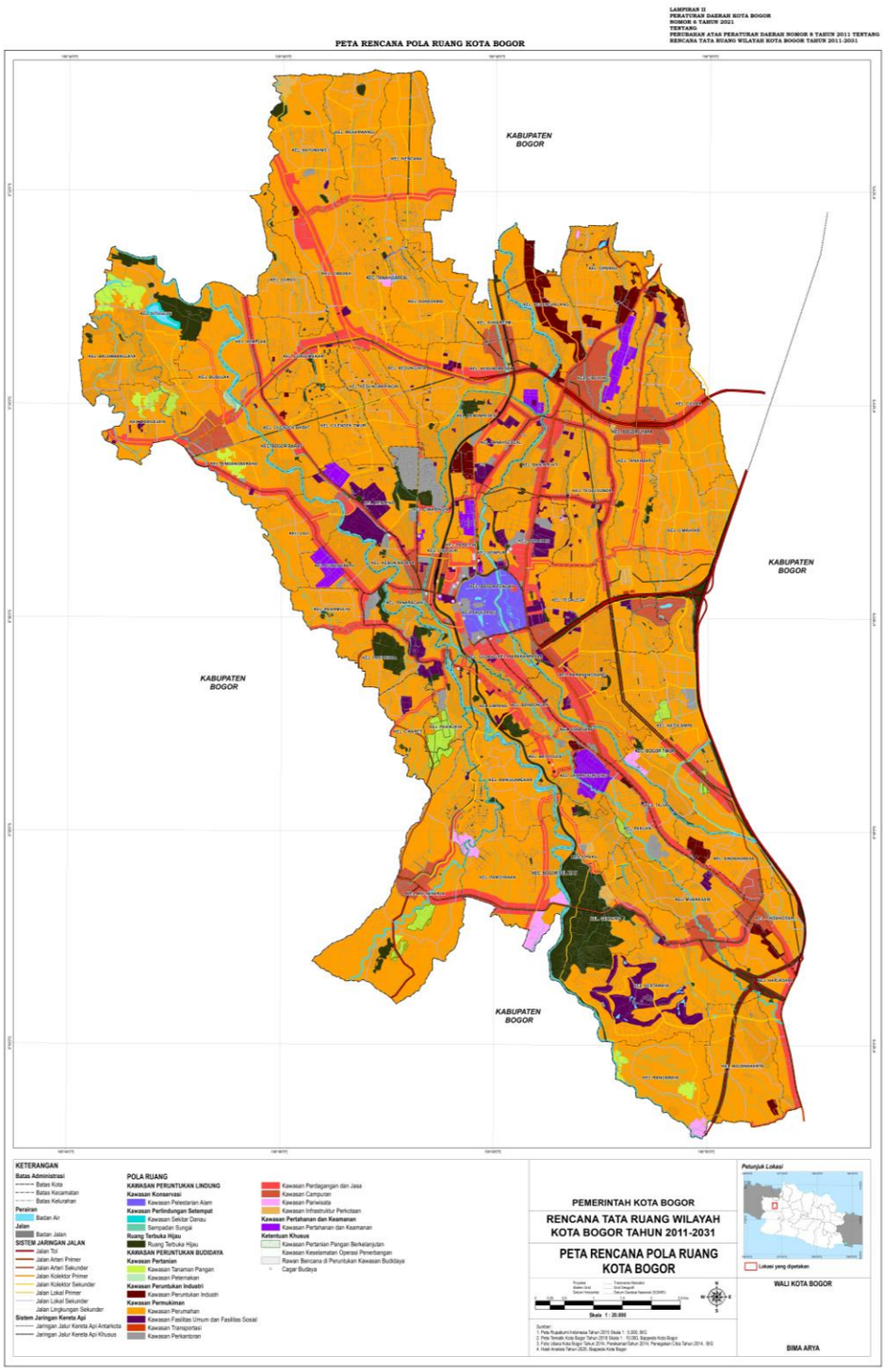

Sumber: RTRW Kota Bogor, 2011-2031

Gambar 2.99. Rencana Pola Ruang Kota Bogor

2.7.4.2. Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan area yang memiliki nilai penting bagi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, atau pertahanan dan keamanan negara. Kawasan ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diatur dan dikelola secara khusus guna mencapai tujuan tertentu. Kawasan strategis berdasarkan RTRW Kota Bogor terdiri KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK sudut kepentingan sosial-budaya, dan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis Kota Bogor selengkapnya dijabarkan pada poin berikut:

A. Perwujudan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan strategi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2) Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi kota;
3) Memiliki potensi ekspor;
4) Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5) Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6) Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
7) Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
8) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
9) Memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kp2b);
10) Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
11) Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
12) Strategi pengembangan ksk dari sudut kepentingan ekonomi adalah:
13) Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar ksk sudut kepentingan ekonomi;
14) Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
15) Mengembangkan kawasan tematik; dan
16) Mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok dan TOD dengan kegiatan ekonomi.
17) Kawasan strategis kota bogor dari sudut kepentingan ekonomi adalah:
18) Kawasan pasar kebon kembang dan sekitarnya;
19) Kawasan perdagangan lama dan sekitarnya; dan
20) Kawasan TOD dan kawasan Sub PPK.

Pengembangan kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

1) Menata kawasan perdagangan yaitu kawasan Pasar Kebon Kembang dan kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka;
2) Membangun taman kota di lahan Taman Topi dan Lembaga Pemasyarakatan Paledang;
3) Penataan sektor informal di sekitar Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Kawasan Stasiun Kereta Api Bogor; dan
4) Pengembangan konsep *Transit Oriented Development* Stasiun Bogor.

Pengembangan kawasan perdagangan lama dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

1) Menata kawasan perdagangan yaitu kawasan sepanjang Jalan Suryakencana, Jalan Padasuka, Jalan Gudang, Jalan Lawang Seketeng, Jalan Roda, Jalan Ranggagading;
2) Membangun taman kota; dan
3) Penataan sektor informal di sekitar Kawasan perdagangan lama.
4) Pengembangan kawasan TOD dan kawasan Sub PPK adalah:
   a. Pengembangan sistem angkutan massal;
   b. Meningkatkan nilai tambah kawasan terbangun;
   c. Meningkatkan aksesibilitas dalam mencapai lokasi aktivitas;
   d. Meningkatkan pengembangan perkotaan di stasiun dan kawasan sekitarnya;
   e. Membangkitkan aktivitas ekonomi dan finansial serta memberikan manfaat terhadap aspek sosial dan lingkungan; dan
   f. Mendorong terbentuknya sub ppk dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.

B. Kawasan strategis Kota Bogor dari sudut kepentingan sosial budaya

Kawasan Pusaka Bogor, meliputi kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat.

1) Perwujudan KSK sudut kepentingan sosial budaya;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:

1) Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2) Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
3) Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4) Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5) Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
6) Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
7) Hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point, landmark)* budaya kota;
8) Tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
9) Kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:

1) Mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
2) Mempertahankan nilai sejarah kawasan;
3) Menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
4) Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata.

C. Perwujudan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria:

1) Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3) Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4) Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5) Menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6) Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
7) Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:

1) Mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar ksk sudut kepentingan lingkungan;
2) Menata kawasan ksk dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
3) Menata kawasan hijau istana bogor dan kebun raya bogor beserta zona penyangganya;
4) Menata kawasan sempadan sungai ciliwung dan sungai cisadane;
5) Menata kawasan situ; dan
6) Mengembangkan ekowisata.

Kawasan strategis Kota Bogor dari sudut kepentingan lingkungan, meliputi:

1) Kawasan Hutan Penelitian Dramaga
2) Kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor
3) Kawasan Situ Gede
4) Kawasan Sungai Cisadane
5) Kawasan Sungai Ciliwung

Penanganan kawasan strategis Kota Bogor dari sudut kepentingan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar kawasan tersebut.

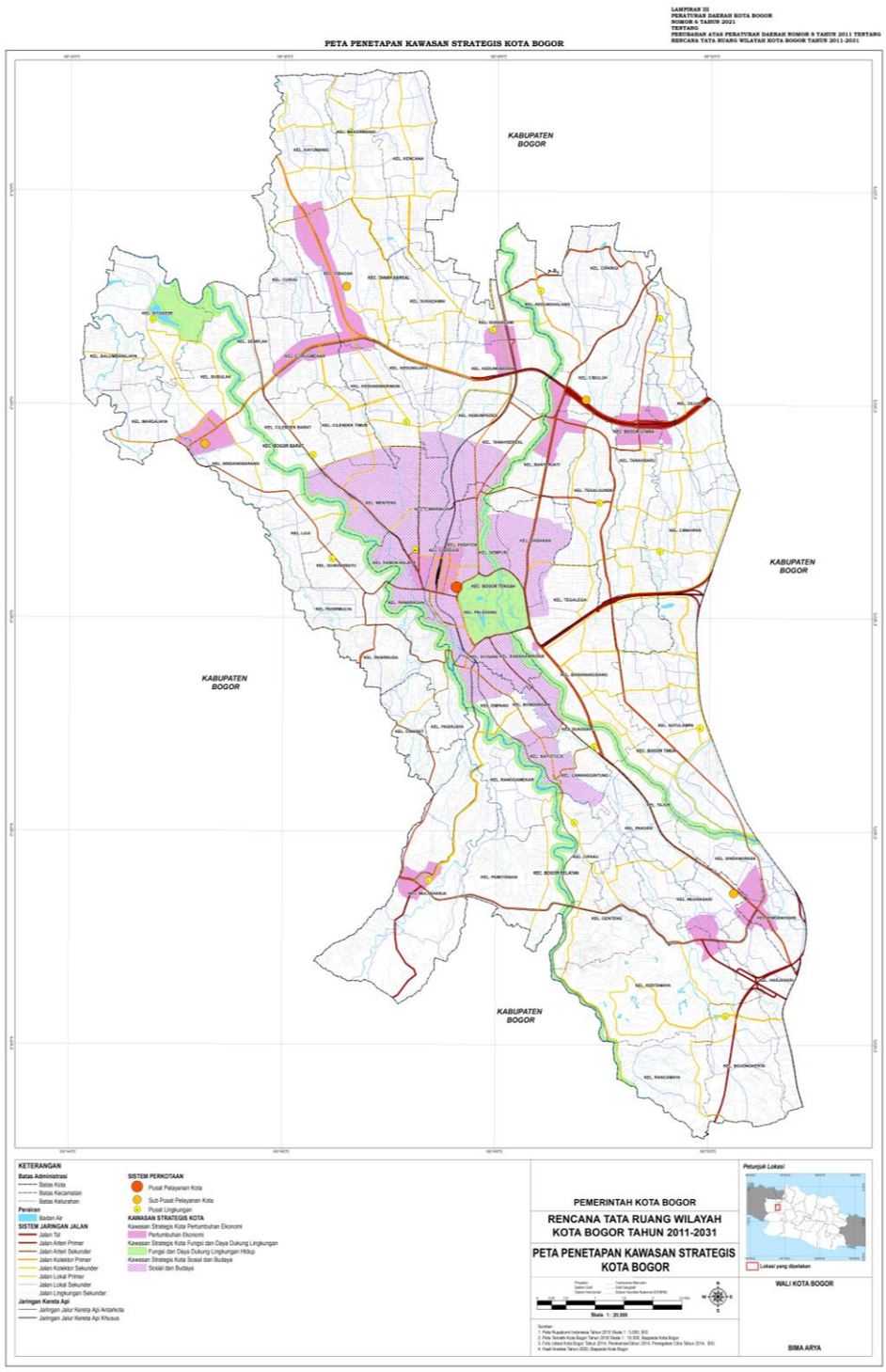

Sumber: RTRW Kota Bogor, 2011-2031

Gambar 2.100. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kota Bogor

2.7.4.3. Program Strategis

Program prioritas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah upaya konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan penataan ruang yang ditetapkan dalam dokumen RTRW. Program-program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan fungsi kawasan, serta untuk mengatasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah program prioritas dalam RTRW Kota Bogor.

Tabel 2.85. Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kota Bogor dan Lokasinya

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
A.	PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	
I.	WP Samida	
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)
2	Penyusunan Rencana Rinci/ Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Samida (WP A)	Pusat Kota Bogor/ PPK Kota Bogor
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Stasiun Bogor, TOD Baranagsiang
4	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor
		TOD Baranangsiang
5	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)
6	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)
7	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegallega dan Kel Sempur
8	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)
9	Penataan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari
10	Penataan sekotor informal (PKL)	WP Samida (WP A)
II.	WP Pasima	
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)
2.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
5	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang
6	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang
7	Pembagunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Pasima (WP B)
8	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu
III.	WP Utara	
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin - Pasar TU Kemang
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
5	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin - Pasar TU Kemang
6	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)
7	Pembagunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Utara (WP C)

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
8	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat
IV.	WP Purwa	
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi	
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu - Jalan Adnawijaya
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
5	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta
6	Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota	Simpang Pomad-Perbatasan kota
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK D, Warung Jambu - Jalan Adnawijaya
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)
9	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Purwa (WP D)
10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegalgundil
V.	WP Daksina	
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi - Sukabumi - *Inner Ring Road*
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Dasina (WP E)
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota
5	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur - Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur - Jalan Raya Ciawi Sukabumi
6	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) Koridor *Inner Ring Road*	Koridor *Inner Ring Road*
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi - Sukabumi - *Inner Ring Road*
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina
9	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Daksina (WP E)
10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja
11	Pembangunan Pusat Agro Eduwisata Organik	Kelurahan Mulyaharja
B.	SISTEM JARINGAN PRASARANA	
B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	
I.	Studi dan Kajian	
1	Kajian pola ditribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor
2	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor
3	Penyusunan Masterplan Transportasi	Kota Bogor
4	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor
5	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
II	**Jaringan Jalan**	
A.	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor
B	Peningkatan Jalan	
1	Jalan Arteri Primer	Jalan Pajajaran
		Jalan Raya Kedung Halang/ Jalan KS Tubun;
2	Jalan kolektor sekunder	Jalan Bukit Cimanggu Villa - Kel Mekarwangi
		Jalan Pangeran Shogiri
		Jalan Tumenggung Wiradiredja;
		Jalan Parung Banteng
		Jalan Kayumanis-Cilebut
		Jalan Cibeureum
		Jalan Kapten Yusuf
		Jalan Cipaku
		Jalan Warung Nangka
		Jalan Mandala Ciluar
3	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor
4	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar - Jalan Johar
		Simpang Jalan Tentara Pelajar - Jalan Manunggal
		Simpang Jalan R. Saleh Bustaman - Jalan Pahlawan
		Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun
		Simpang Jalan Raya Pemda - Jalan KS Tubun (Talang)
		Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun
		Simpang Jalan Pajajaran - Jalan KS Tubun - Jalan Adnawijaya (Warung Jambu)
		Simpang Jalan Raya Pajajaran - Jalan Lodaya - Jalan Salak
		Simpang Jalan Raya Pajajaran - Jalan Pangrango
		Simpang Tol Lingkar Bogor - Jalan Pangeran Sogiri
		Simpang Ahmad Syam - Cimahpar
		Simpang Jalan Ahmad Syam - Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)
5	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan MA Salmun
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat
		Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya
6	Peningkatan Jembatan	Jembatan Satu Duit di Jalan Ahmad Yani
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat
		Jembatan jalan MA Salmun
		Jembatan Jalan Veteran
		Jembatan Batu Tulis - Pamoyanan
		Jembatan ruas jalan lainnya
C	**Pembangunan jalan**	

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
1	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas dari jalan Parungbanteng (R3) ke Jalan Tol Jagorawi (KM 42,5)
		Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BoRR)
		Akses konektivitas dari jalan R3 (Kolonel Ahmad Syam) ke Jalan Jagorawi (Baranangsiang)
		Akses konektivitas dari rencana jalan Bogor Inner Ring Road ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)
2	Pembangunan jalan non tol	
a	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan arteri paralel dengan jalan tol Bogor Ring Road / Frontage R2
b.	Pembangunan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Dalam (Bogor Inner Ring Road)
c.	Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan R3 segmen Parung Banteng - Wangun/ Tajur
		Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa
		Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi - Jalan KH Sholeh Iskandar
d.	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;
		Jalan tembus Ahmad Sobana - Ahmad Yani
		Rencana ruas jalan: Pertigaan Salabenda- kel Kayumanis - Kel Mekarwangi - Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar - Bukit Cimanggu Villa - Jalan Cilebut Raya
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi - Jalan Raya Pemda (Kedung Halang)
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) - Perum Pondok Aren - Jalan P Aoghiri
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya - Jalan P Asogiri - Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);
		Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana - Jalan P Shogiri - samping jalan Toll Jagorawi
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 - Kampung Cokondang - samping jalan Toll Jagorawi - Jalan Parung Banteng
		Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri - Jl. Tentara Pelajar
		Rencana ruas jalan frontage Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor (kelurahan mulyaharja)
		Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor
4	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP
5	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
II	**Terminal**	
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang
2	Revitalisasi terminal penumpang Merdeka sebagai terminal penumpang Tipe C	Terminal Merdeka
3	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya
4	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi
5	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD
6	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan
7	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal
8	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru
III	**Parkir**	
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan
		PPK
		Sub PPK
		Kawasan pengembangan TOD
		Terminal Penumpang
		Stasiun KA
		Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor
		Kawasan pasar Bogor
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota
2	Pembangunan prasarana "*park and ride*"	Kawasan pengembangan TOD
		Kawasan Suryakencana
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya
		Pool bis wisata Baranangsiang
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor
IV	**Angkutan Umum Massal**	
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal
2	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor - Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta
4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor
6	Penerapan manajemen rekayasa lalulintas dan angkutan jalan	Kota Bogor
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
V	**Jaringan Lintas**	
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor
VI	**Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota**	
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor
VII	**Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota**	
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor
VIII	**Jaringan Kereta Api**	
1	Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor - Jakarta
2	Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi	Jalan KA Bogor - Sukabumi
3	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan umum massal berbasis rel yang terintegrasi dengan angkutan umum massal berbasis rel Cawang - Bogor	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor
4	Pembangunan jalur angkutan umum massal berbasis rel dalam kota	Kota Bogor (Trase berdasarkan hasil kajian)
5	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	TOD Stasiun Bogor, TOD Baranagsiang
6	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Tanah Baru
		Sukaresmi
		Bubulak
		Kertamaya
		Mulyaharja
7	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Kota Bogor
8	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang
9	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut
B.2	**SISTEM JARINGAN ENERGI**	
I	**Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**	
1.	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota
2.	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota	
a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota
3.	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota
4.	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota
5.	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota
6.	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota
7.	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota
II	**Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Gas**	
1.	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota
2.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota
3.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota
4.	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota
B.3	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
2	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
3	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
4	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
6	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
7	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
8	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
9	Pengembangan micro cell	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
10	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
B.4	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan
		Sungai Cibalok
		Sungai Ciangke
		Sungai Ciomas
		Sungai Cigede
		Sungai Cisindangbarang
		Sungai Ciapus
		Sungai Cibalok
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor
B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	
I.	Sistem Jaringan Air Minum	
	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan	
1	Pengembangan SPAM Zona 1 : a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	Zona 1
2	Pengembangan SPAM Zona 2 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	Zona 2
3	Pengembangan SPAM Zona 3 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	Zona 3
4	Pengembangan SPAM Zona 4 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	Zona 4
5	Pengembangan SPAM Zona 5 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	Zona 5
6	Pengembangan SPAM Zona 6 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	Zona 6
7	Pengembangan SPAM Zona 7 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	Zona 7
8	Pengembangan SPAM Zona baru	Kota Bogor

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
	a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan *District Metering Area* (DMA)	
	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan	
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat
2	Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor
3	Pengembangan fasiiltas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor
4.	Membangun SPAM bukan jaringan pipa di daerah yang memiliki potensi air tanahdan tidak terlayani jaringan perpipaan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan jaringan perpipaan. Prioritas Daerah Pelayanan bukan jaringan pipa
5	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor
6	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan Layanan PDAM
II.	**Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	
1	Optimalisasi dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik komunal beserta jaringannya pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Donestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota dan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota	Kelurahan Kayumanis
3	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan/ WP Daksina
4	Optimalisasi dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman menjadi Skala Kota dan IPLT	Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara
5	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor
6	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	Seluruh Kota Bogor
7	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor
8	Pembuatan Rencana Induk Air Limbah Domestik yang dilengkapi dengan rencana detail (DED)	Seluruh kota Bogor
9	Penyusunan regulasi terkait air limbah domestik	Seluruh Kota Bogor
III	**Persampahan**	
1.	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga
2.	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Nambo

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
3.	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan TPA Regional Nambo	Kota Bogor
4.	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar
5.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, *Reduce, Recycle)* melalui pembangunan TPS 3R	Kota Bogor
6.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor
7.	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru
8.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor
9.	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan
10.	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor
IV	**Pengembangan Sistem Jaringan Drainase**	
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi, S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis.
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkar luar, JL,raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari.
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal.
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai
5.	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Kota Bogor
6.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Kota Bogor
7.	Normalisasi sungai dan saluran	Kota Bogor
8.	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai
9.	Mengamankan embung - embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
10.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal
11.	Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep *zero run off, eco drainage*, dan *Low impact development*	Kota Bogor
V	**Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana**	
1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor
2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor
3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor
4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor
5	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi	Kota Bogor
6	Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana	Kota Bogor
7	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor
8	Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci	Kota Bogor
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Kota Bogor
10	Penanganan kawasan rawan bencana banjir	Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Cibuluh
11	Penanganan kawasan rawan bencana longsor	Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane Empang, saluran Cidepit, saluran Cibalok, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan
12	Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.
13	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor
14	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor
VI	**Pedestrian/ Jalur pejalan kaki**	
1	Kajian pengembangan prasrana pejalan kaki	Kota Bogor
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor
4	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor
5	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking
		Jalan MA Salmun
		Jalan Merdeka
		Jalan RE Martadinata
		Jalan Paledang
		Jalan Kapten Muslihat
		Jalan KS Tubun
		Jalan KH Sholeh Iskandar
		Jalan KH Abdullah Bin Nuh
		Jalan Brigjen Saptaji

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
		Jalan Dr. Sumeru
		Jalan Mawar
		Jalan Sempak
		Jalan Ir. H. Djuanda
		Jalan Jenderal Sudirman
		Jalan Jenderal Ahmad Yani
		Jalan Dadali
		Jalan Jalak Harupat
		Jalan Pemuda
		Jalan Suryakencana
		Jalan Siliwangi
		Jalan Pajajaran
		Jalan Otto Iskandardinata
		Jalan Adnawijaya
		Jalan Ahmad Sobana
		Jalan Ahmad Syam
		Jalan-jalan lainnya
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum
6	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki	
	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor
	Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD
	Fasilitas integrasi yang menghubungkan TOD	Jl. Suryakacancana - TOD Baranangsiang
		Kawasan TOD
VII	**Jaringan Prasarana Kota Terpadu**	
1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu	Kota Bogor
2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu	Kota Bogor

Selain itu, terdapat pula indikasi perwujudan rencana pola ruang sesuai dengan RTRW Kota Bogor. Indikasi perwujudan rencana pola ruang tersebut ditampilkan sebaai berikut.

Tabel 2.86. Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kota Bogor dan Lokasinya

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
A	**KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**	
I	**Kawasan Perlindungan Setempat**	
1	Penataan kawasan sempadan sungai	Menyebar di kota Bogor
2	Penataan kawasan sempadan danau/situ	Menyebar di kota Bogor
3	Penataan sempadan kawasan sekitar mata air	Menyebar di kota Bogor
4	Pembebasan lahan di sempadan sungai, danau dan mata air	Menyebar di kota Bogor
5	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air	Menyebar di kota Bogor
6	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	Menyebar di kota Bogor
7	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor
8	Naturalisasi sempadan sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
9	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima	Kelurahan Balumbangjaya, Kelurahan Situgede, Kelurahan Margajaya
10	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina	Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Harjasari Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Genteng
11	Pembangunan Taman-taman resapan dengan konsep water harvesting untuk konservasi air dan mengoptimalkan konsep zero run off	Tersebar di Kota Bogor
12	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat	Kota Bogor
II	**Kawasan konservasi**	
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi	Kebun Raya Bogor
2	Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor	Kawasan Sekitar Kebun Raya
III	**Ruang Terbuka Hijau**	
1	Pendataan RTH Publik (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi, sistem informasi)	Kota Bogor
3	Penyusunan Masterplan RTH Kota	Kota Bogor
	Penyusunan dokumen pendukung pengadaan lahan dan pembangunan RTH	Setiap WP
6	Pengadaan tanah untuk RTH melalui program *land banking*	Setiap WP
7	Peningkatan kualitas RTH	Kota Bogor
8	Perencanaan dan pembangunan Alun-alun Kota	Taman Topi dan sekitarnya
9	Perencanaan dan pembangunan hutan kota, taman Kehati (keanekaragaman hayati)	WP Pasima (WP B)
		WP Utara (WP C),
		WP Purba (WP D)
		WP Daksina (WP E)
10	Perencanaan dan pembangunan taman kota	Di pusat kota dan di setiap Sub PPK
11	Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan	Menyebar di seluruh Kota Bogor Permukiman padat penduduk (kawasan kumuh)
12	Perencanaan dan pembangunan taman tematik	Menyebar di seluruh Kota Bogor
13	Pembangunan sempadan jalan / Jalur hijau jalan	Menyebar di seluruh Kota Bogor
14	Revitalisasi sempadan jalan, sempadan rel kereta api, sempadan SUTT yang mengalami menurun fungsi	Kota Bogor
15	Membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi	Daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi
17	Pendataan TPU	Kota Bogor
18	Penyusunan Perencanaan TPU	Kota Bogor
19	Penataan dan pengembangan TPU pemerintah	Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida
		Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima
		Kelurahan Kebon Pedes (TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara
		Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
		Kelurahan Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina
20	Pendataan kondisi pohon pelindung dan pemeliharaan pohon pelindung di RTH publik wilayah Kota Bogor	Jalur protokol tersebar di Kota Bogor, jalur hijau kawasan perumahan yang terdapat pohon pelindung berusia tua/rawan tumbang
B	**Kawasan Peruntukan Budidaya**	
I	**Kawasan pertanian**	
1	Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan	Kota Bogor
2	Pendataan kawasan pertanian, LP2B	Kota Bogor
3	Kegiatan dukungan keberlanjutan kawasan pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);	Kota Bogor
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian	Kota Bogor
5	Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik	Kota Bogor
6	Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional	WP Pasima (WP B)
7	Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor
8	Pengembangan kegiatan agrowisata	Kota Bogor
II	**Industri**	
1	Pendataan kawasan peruntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan	Kota Bogor
3	Monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan	Kota Bogor
4	Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menegah	Kota Bogor
5	Pengembangan sentra pemasarana hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor
6	Fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kota Bogor
III	**Kawasan Pariwisata**	
1	Penyusunan RIPDA Kota Bogor	Kota Bogor
2	Pengembangan kluster-kluster wisata Kota Bogor	Kota Bogor
3	Sosialiasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor	Kota Bogor
4	Pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya	Kota Bogor
5	Pengembangan wisata agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)
6	Pembangunan gedung kesenian	WP Pasima (WP B)
7	Pengembangan wisata perkemahan	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)
8	Penataan wisata kuliner dan belanja	Di PPK (kawasan Bogor lama), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)
9	Penataan wisata sejarah	Kawasan Pusaka
10	Pembangunan kampong Sunda	WP Purwa (WP D)
IV	**Perumahan**	

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
1	Pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor, setiap Kecamatan
2	Penyusunan Review Rencana Induk Perumahan Permukiman	Kota Bogor
3	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	Kota Bogor
4	Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan	Kota Bogor
5	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan rumah susunl	Berdasarkan pemutakhiran data kawasan permukiman kumuh Kota Bogor
6	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	Kota Bogor
7	Pembangunan rumah susun umum	Kawasan yang terakses dengan angkutan umum Tersebar di Kota Bogor
8	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman	Tersebar di Kota Bogor
V	**Perdagangan Jasa**	
1	Pendataan Kawasan Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor
2	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Bogor dsk Pasar Kebon Kembang dsk Pasar Sukasari dsk Pertokoan di kawasan jalan Merdeka - Jembatan Merah
3	Revitalisasi Plaza Bogor	Plaza Bogor
4	Revitalisasi Pasar Sukasari	Pasar Sukasari
5	Revitalisasi Pasar Bogor	Pasar Bogor
6	Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Pasar Bogor dan Plaza Bogor
7	Revitalisasi Pasar Jambu Dua	WP Purwa
8	Pengembangan Pasar Teknik Umum menjadi Pasar Induk	WP Utara (WP C)
9	Revitalisasi pasar rakyat	Tersebar di kota Bogor
10	Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)
11	Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)
12	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/ regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Purwa di sepanjang jalan arteri/frontage Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP
13	Penataan kawasan perdagangan dan jasa di koridor *Inner Ring Road*	koridor *Inner Ring Road*
VI	**Kawasan Perkantoran**	
1	Pemeliharaan dan revitalisasi kawasan perkantoran pemerintahan eksisting	
a	Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
b	Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor
2	Penataan kawasan perkantoran	PPK
3	Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Pasima (WP B) dan WP Daksina (WP E)
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pemerintahan	Kota Bogor
5	Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah	Kota Bogor
6	Pengembangan fasilitas sosial	Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina
7	Pengembangan untuk panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah	Tersebar di Kota Bogor
VII	**Kawasan pendidikan**	
1	Pendataan Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan)	Kota Bogor
2	Penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor	Kota Bogor
3	Revitalisasi prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK	Setiap WP
4	Penambahan TK negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)
5	Penambahan SD negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)
6	Penambahan SMP negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)
7	Penambahan SMA/ SMK negeri	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)
8	Pengembangan pendidikan tinggi	WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina diutamakan pada jalan-jalan arteri dan kolektor
7	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi	Kota Bogor
VIII	**Kawasan kesehatan**	
1	Pendataan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor
2	Revitalisasi pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan	Kota Bogor
3	Pembangunan RSUD	Kota Bogor
4	Penambahan Puskesmas dan atau Puskesmas Pembantu	WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina
5	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan	Kota Bogor
IX	**Kawasan peribadatan**	
1	Pendataan Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadtaan)	Kota Bogor
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan	Kota Bogor
3	Revitalisasi fasilitas peribadatan	Kota Bogor
4	Pembangunan fasilitas peribadatan	Kota Bogor
X	**Kawasan Olahraga**	
1	Pendataan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan	Kota Bogor
2	Penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran	GOR Pajajaran
3	Penataan fasilitas olahraga yang ada	Tersebar di kota Bogor

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
4	Pembangunan fasilitas olahraga	Di setiap kecamatan
4	FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala regional	Kota Bogor
5	Pembangunan fasilitas olahraga terpadu skala kota atau skala nasional	WP Utara, WP Daksina
6	Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan	Di setiap kecamatan
XI	**Kawasan transportasi**	
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang
2	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi
4	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD
5	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan
6	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal
7	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru
8	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor	Stasiun Bogor
9	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang
10	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut
11	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	Stasiun Bogor Terminal Baranangsiang
12	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Sukaresmi Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya
13	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Menyebar di Kota Bogor (sesuai hasil kajian lebih lanjut)
XII	**Kawasan Infrastruktur Perkotaan**	
1	Pengembangan Gardu Induk Listrik	Kota Bogor
2	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum	Kota Bogor
3	Pengembangan Instalasi Pengolahaan Air Limbah	Kota Bogor
4	Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu	Kota Bogor
5	Pengembangan kolam retensi	Kota Bogor
6	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan infrastruktur	Kota Bogor
XIII	**Kawasan Campuran**	
1	Penataan kawasan campuran	Kota Bogor
2	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan campuran	Kota Bogor
XIV	**Kawasan Pertahanan Keamanan**	
1	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang militer	Kota Bogor

Tabel 2.87. Indikasi Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis dalam RTRW Kota Bogor dan Lokasinya

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
A.	**Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**	
I.	**Kawasan Pasar Kebun Kembang dan sekitarnya**	
1.	Penataan kawasan	Kawasan Pasar Kebon Kembang, kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka
2.	Penataan sektor informal	Di sekitar Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Kawasan Stasiun Kereta api Bogor
II.	**Kawasan Perdagangan Lama di Pasar Bogor, Pecinan di Suryakencana dan Kampung Arab di Empang**	
1	Penataan kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)
3	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)
III.	**Kawasan TOD dan Kawasan Sub PPK**	
1	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sub PPK	Pusat WP Pasima, Utara, Purwa dan Daksina
2.	Pembangunan infrastruktur penunjang pusat	Pusat WP Pasima
		Pusat WP Utara
		Pusat WP Purwa
		Pusat WP Daksina
3	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan TOD	TOD skala kota TOD skalal sub kota
4	Penataan kawasan TOD	Kawasan TOD
B.	**Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**	
I.	**Kawasan Pusaka Bogor**	
1	Penataan KSK Kawasan Pusaka Bogor	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana
2	Penataan jalur pedestrian, sektor informal (PKL) dan *street furniture*	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana
3	Penyusunan panduan rancang kota (UDGL)	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pusaka	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana
5	Identifikasi dan pemetaan bangunan dan kawasan cagar budaya	Menyebar di kota Bogor
6	Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya	Kota Bogor
7	Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya	Kota Bogor
8	Restorasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kota Bogor
9	Pemanfaatan bangunan cagar budaya	Kota Bogor
10	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Bogor
C.	**Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**	

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi
I.	**Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor**	
1.	Pengembangan paket wisata terpadu	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor
2.	Penataan kawasan hijau Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor beserta zona penyangganya	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor
II.	**Kawasan Situgede dan Hutan Penelitian Dramaga**	
1.	Penataan koridor jalan terminal Bubulak - Hutan Penelitian Dramaga - Situgede	koridor jalan terminal Bubulak - Hutan Penelitian Dramaga - Situgede
2.	Penataan kawasan ekowisata Situgede	Kawasan danau Situgede
3.	Pengemangan Hutan Penelitian Dramaga	Hutan Penelitian Dramaga - Kel Situgede
III.	**Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane**	
1.	Identifikasi Pemetaan Kondisi Eksisting Sempadan Sungai Ciliwung-Cisadane (pemanfaatan, potensi pengembangan, permasalahan)	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane
2.	Penyusunan rencana rinci tata ruang penanganan kawasan sempadan sungai	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane
3.	Penataan kawasan sempadan sungai	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih
4.	Pengadaan tanah publik (sempadan sungai) untuk penataan kawasan	Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane
5.	Perencanaan dan pembangunan taman dan jalan sepanjang sempadan	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih

Secara umum, RTRW Kota Bogor mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Bogor melalui beberapa aspek. Pertama, dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kedua, dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pembangunan sekolah, perguruan tinggi, dan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata. Ketiga, dengan pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi, meliputi angkutan umum massal dan peningkatan konektivitas antar wilayah.

Selain itu, RTRW juga mendorong pelestarian lingkungan di Kota Bogor dengan fokus pada pengelolaan sampah terpadu, pelestarian hutan dan air, dan pengendalian polusi udara. Untuk mendukung perkembangan Kota Bogor, RTRW mendorong pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan tol, angkutan massal, infrastruktur air bersih, dan infrastruktur energi terbarukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini akan menguraikan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor untuk periode 2005-2023. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Bogor didasarkan atas beberapa komponen yang telah dianalisis terkait hasil pembangunan yang ada di periode sebelumnya, seperti, telaah atas dokumen RPJMN 2020 - 2025, RPJPN 2025 - 2045, RPJMN 2020 - 2024, dokumen RPD Provinsi Jawa Barat 2023 - 2026, dokumen RPJPD Kota Bogor 2005 - 2025, dokumen RPJMD Kota Bogor 2020 - 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu global, nasional, regional.

3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kinerja pembangunan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pembangunan sumber daya manusia (SDM) permasalahan Pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan daerah Kota Bogor ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Rumusan permasalahan terpilah kedalam empat dimensi yaitu i) sosial budaya, ii) infrastruktur dan lingkungan, iii) ekonomi dan iv) tatakelola.

3.1.1. Aspek geografi dan demografi

3.1.1.1. Geografi

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berlandaskan sumber daya alam telah memberikan peluang berbagai usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam tersebut, dan jika hal tersebut diteruskan maka kondisi lingkungan hidup akan mencapai titik kritis sehingga tidak mampu lagi memulihkan diri secara alami dan tidak lagi mampu memberikan jasanya secara optimal.

Bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini di Kota Bogor seperti banjir, longsor, pencemaran sungai, kekurangan air bersih, kerusakan tanah, dan peningkatan pencemar udara (lokal) mengindikasi bahwa daya dukung lingkungan

hidup telah terlampaui. Peningkatan frekuensi bencana lingkungan hidup tersebut terjadi seiring dengan pembangunan yang terus berlangsung. Untuk itu, sangat penting melakukan perbaikan kebijakan, rencana maupun program pembangunan secara terus menerus dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk lingkungan hidup.

Beberapa isu strategis mulai dari sumber daya air dan penurunan kualitas air, pengelolaan persampahan (pengelolaan yang belum optimal sehingga masih terdapat sampah tidak terkelola yang menyebabkan pencemaran air maupun penyebab banjir), kebencanaan dan perubahan iklim terkait banjir, keterbatasan air/ kekeringan, alih fungsi lahan terutama di bantaran sungai untuk permukiman yang menjadi pressure bagi pencemaran air, dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan wilayah perbatasan.Kondisi sumberdaya air dan kualitas air yang tidak baik akan dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas keanekaragaman hayati yang ada.

Hasil perhitungan indeks daya dukung air di Kota Bogor tahun 2020 menunjukkan bahwa Daya Dukung Air Kota Bogor masih belum terlampaui, dengan nilai 2,14. Sementara itu bila kita melihat lebih detail untuk setiap bulannya terlihat bahwa di beberapa bulan kering daya dukung air di tiap kecamatan mengalami defisit, yaitu pada bulan Juni hingga September, mengingat pada bulan-bulan tersebut angka curah hujan rata-rata bulanan sangat kecil dibandingkan bulan-bulan lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 2024).

Isu pokok Pengelolaan tata guna lahan yang berwawasan lingkungan terkait dengan beberapa isu strategis diantaranya yaitu persampahan yang tidak terkelola dengan baik yang dapat mencemari lahan (tanah), alih fungsi lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun menyebabkan berkurangnya media penyerap pencemar udara sehingga berkontribusi pada isu pencemaran udara, alih fungsi lahan di daerah/ lahan kritis menjadi lahan terbangun mengakibatkan bencana banjir dan longsor yang dapat mengurangi kualitas lahan (kesuburan tanah), alih fungsi lahan di bantaran sungai menjadi permukiman menyebabkan pencemaran air sungai oleh air limbah domestik dan sampah juga mengurangi peresapan air. Pengurangan lahan pertanian terkait rencana tata ruang dan pertumbuhan penduduk menyebabkan makin menurunnya daya dukung pangan yang berpengaruh pada ketahanan pangan Kota Bogor.

2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Isu pokok kebencanaan dan perubahan iklim meliputi bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran. Terkait bencana banjir, sebagian penanganannya sudah diantisipasi pada isu pokok sumber daya air. Terkait bencana longsor antisipasi penanganan dan pencegahannya sebagian terkait dengan isu pengelolaan tata guna lahan. Sementara bencana kebakaran terkait dengan perubahan iklim. Masalah lingkungan hidup daerah perkotaan salah satunya berupa semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan kota. Hilangnya RTH menjadi munculnya *heat island* dan hilangnya pengendali emisi (gas buang) kota.

Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, perubahan sifat-sifat radioaktif termal, aerodinamik dan hidrologi, terjadi perubahan iklim setempat, sampai perubahan ekosistem alami.

Isu pokok kebencanaan dan perubahan iklim terutama ditargetkan untuk mewujudkan masyarakat dan lingkungan Kota Bogor yang tangguh bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan dan memicu alih fungsi lahan dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan terbangun baik di lahan-lahan yang memang diperuntukkan untuk budidaya, maupun di lahan kritis, sempadan sungai, sempadan rel kereta api dan kawasan resapan air sehingga mengakibatkan makin berkurangnya lahan yang mampu meresapkan air yang mengakibatkan meningkatnya limpasan air hujan.

3. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor pembangunan di Kota Bogor telah berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang semakin masif. Hal ini lebih jauh mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti semakin banyaknya lahan terkedapkan akibat pembangunan gedung/ perumahan, semakin besar potensi beban pencemar yang masuk ke lingkungan, semakin banyak jumlah kendaraan pribadi yang berkontribusi pada kemacetan di beberapa ruas jalan Kota Bogor yang menjadi sumber pencemar udara skala mikro, dan lain-lain.

4. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor.

Terdapat suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menghasilkan skor komposit terkait kondisi ketahanan pangan suatu wilayah yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Angka IKP terdiri dari beberapa dimensi penyusun, antara lain ketersediaan pangan, keterjangkauan/ aksesibilitas pangan, serta pemanfaatan pangan. Skor IKP dan peringkat ketahanan pangan Kota Bogor cenderung meningkat selama tahun 2018 - 2023. Selama 5 tahun terakhir angka IKP tertinggi Kota Bogor tercapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 83,78 peringkat 47 naik dari tahun 2022 yang mencapai 76.38. Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya Kota Bogor masih relatif lebih rendah seperti Kota Bekasi (93,55;3), Kabupaten Bekasi (88,05;13), Kota Depok (89,47;19) dan Kota Tangerang (86,39;36). Kota Depok merupakan satu-satunya Kota/Kabupaten di Jawa Barat

yang termasuk dalam skor dan peringkat 5 Kota/Kabupaten IKP terbaik di Indonesia.

Relatif masih rendahnya IKP Kota Bogor, salah satunya disebabkan karena lahan pertanian di perkotaan yang terus menurun karena dikonversi menjadi lahan pemukiman dan industri. Tantangan dari sisi penyediaan pangan yaitu tingkat ketergantungan pangan dari daerah produsen yang menyebabkan kerentanan terhadap ketidakstabilan pasokan dan harga pangan. Sementara itu, tantangan dari sisi permintaan berasal dari pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang cenderung meningkat terutama disebabkan arus urbanisasi dan migrasi. Fenomena urbanisasi ini menyebabkan permintaan pangan semakin meningkat di Kota Bogor. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kuantitas serta kualitas komoditas pangan untuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.2. Demografi

1. Laju pertambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi

Laju pertambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka migrasi dan tingkat kelahiran. Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian yang layak, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah.

Penduduk yang semakin bertambah berimplikasi terhadap rasio ketersediaan ruang untuk menopang aktivitas penduduknya. Apabila mengacu kepada perkembangan data kepadatan penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di wilayah Jabodetabek semakin meningkat dari tahun ke tahun. Wilayah kabupaten seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor tingkat kepadatan penduduknya secara keseluruhan lebih rendah daripada Kota Bogor karena luas wilayah kedua kabupaten tersebut cukup besar. Kota Bogor berada di tengah - tengah dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.512 jiwa/ km^2 selama periode tahun 2005 - 2023. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bekasi.

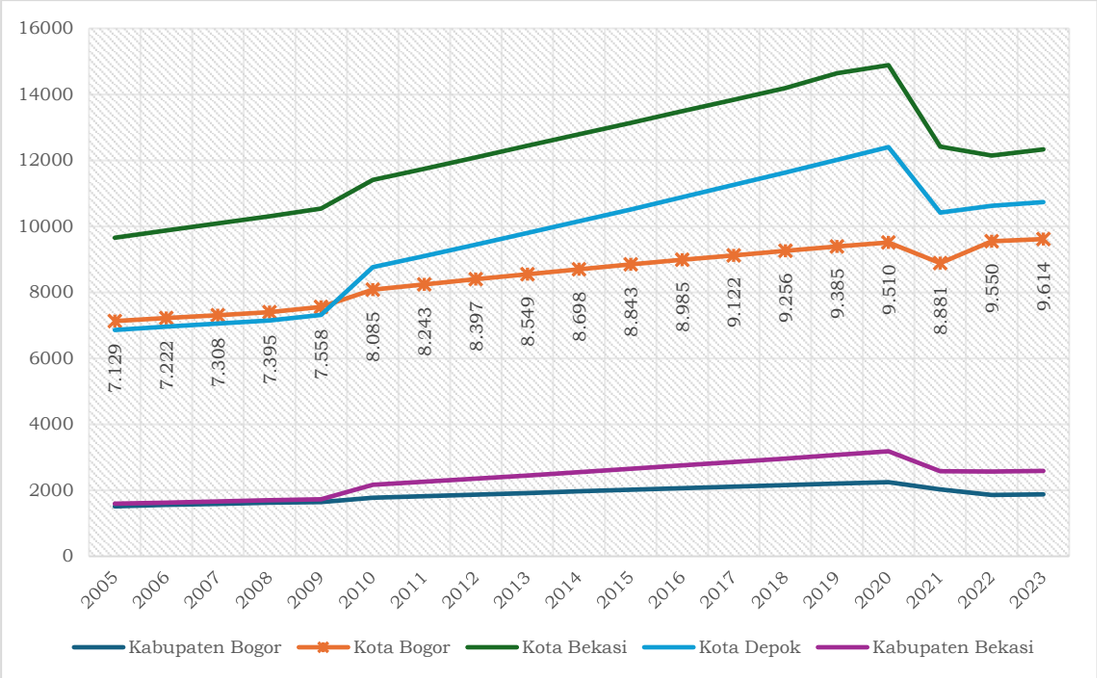

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.1. Kepadatan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2005 - 2023

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Masih tingginya angka kemiskinan

Berdasarkan **Tabel 3.1** terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Bogor relatif masih tinggi masih di atas 6,5% atau sebesar 6,57% di tahun 2023. Walaupun persentase penduduk miskin Kota Bogor tidak lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin Indonesia, namun nilai yang masih tinggi ini perlu mendapatkan perhatian bagi pemerintah Kota Bogor. Persentase penduduk miskin Kota Bogor yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa masih cukup tingginya ketimpangan pendapatan dan belum meratanya dampak pertumbuhan ekonomi Kota Bogor.

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019-2023

Deskripsi	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Kota Bogor	63,97	75,04	80,09	79,15	75,00
Persentase penduduk miskin (%) Kota Bogor	5,77	6,68	7,24	7,10	6,67
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Jawa Barat	3.399,2	3.920,2	4.195,3	4.071,0	3.888,6
Persentase penduduk miskin (%) Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Indonesia	24.785,87	27.549,69	26.503,65	26.363,27	75.000
Persentase penduduk miskin (%) Indonesia	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber: bogorkota.bps.go.id (2023), jabar.bps.go.id (2023), bps.go.id (2023)

2. Masih Tingginya Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan di Kota Bogor yang ditunjukkan dengan gini ratio Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar 0,460. Nilai gini rasio Kota Bogor relatif paling tinggi dibanding dengan kota/kabupaten sekitarnya (Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Artinya, Kota Bogor memiliki ketimpangan ekonomi yang paling tinggi di antara wilayah-wilayah tersebut. Angka gini ratio ini meningkat sejak tahun 2020 sejalan dengan terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami penurunan daya beli. Gini ratio paling rendah adalah Kabupaten Tangerang yang mencapai 0,286. Hal lainnya yang menyebabkan ketimpangan dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah.

3. Masih Tingginya Angka Pengangguran

Tingginya angka pengangguran menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah yang kurang memadai serta belum optimalnya pemulihan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran dikarenakan indikator tersebut merepresentasikan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selama tahun 2010 - 2023, capaian TPT Kota Bogor menunjukkan besaran yang cenderung tinggi dengan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2023 TPT Kota Bogor sebesar 9,39, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 10,78%. Namun demikian angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Kab/Kota lainnya (Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi). Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja, serta masih rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran. Selain dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah, tingginya pengangguran juga disumbang oleh angka putus sekolah jenjang SMA.

3.1.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Peran pemuda dan Perempuan dalam pembangunan perlu dioptimalkan

Peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Keterlibatan dan kontribusi aktif dari kedua kelompok ini memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Pemuda seringkali diidentifikasi sebagai sumber energi, kreativitas, dan inovasi. Partisipasi aktif mereka dalam pembangunan dapat membawa gagasan segar dan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu juga dengan perempuan, merupakan kontributor ekonomi yang signifikan. Perempuan terlibat dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, dan seringkali menjadi tulang punggung keluarga. Peningkatan partisipasi perempuan di tingkat keputusan, baik di sektor publik

maupun swasta, membawa perspektif yang beragam dan mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

Perempuan memegang peran penting sebagai pendukung inklusi gender. Pemberdayaan perempuan dan pemberlakuan prinsip kesetaraan gender mendukung pembangunan yang lebih adil. Peran Perempuan dalam Pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor tahun 2022 sebesar 90,97 dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya masih lebih rendah dibandingkan Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Depok.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik serta IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan Keputusan. Idg Kota Bogor tahun 2022 sebesar 72,56 dimana angka ini lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di sekitar Kota Bogor, namun masih di bawah Kota Depok. IDG Kota Bogor juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Barat.

Dengan memberikan dukungan dan peluang kepada pemuda, kota Bogor dapat memanfaatkan potensi generasi muda untuk menciptakan lingkungan yang berkembang dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemuda sendiri adalah kunci untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

4. **Perlindungan bagi kelompok rentan termasuk ibu dan anak yang perlu ditingkatkan**

Perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk ibu dan anak, merupakan prioritas penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kelompok ini sering kali lebih rentan terhadap berbagai risiko, baik secara kesehatan maupun sosial. Berdasarkan data dari data.kotabogor.go.id menyatakan bahwa jumlah kekerasan terhadap Perempuan di Kota Bogor pada tahun 2023 sebanyak 69 kasus terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 5 kasus, kekerasan psikis sebanyak 11 kasus, kekerasan fisik dan psikis sebanyak 19 kasus, kekerasan seksual sebanyak 1 kasus, KBGO sebanyak 5 kasus, pelecehan seksual sebanyak 6 kasus dan kasus lainnya sebanyak 22 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap perlu mengupayakan bahwa Perempuan menjadi pelayanan perlindungan public yang diprioritaskan. Berdasarkan data dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Desember 2023 terdapat total 76 kasus kekerasan terhadap anak diantaranya 1 kasus kekerasan fisik pada anak laki-laki, 1 kasus kekerasan fisik pada anak perempuan, 7 kasus anak bermasalah, 8 kasus pelecehan seksual terhadap anak, 21 kasus

pencabulan pada anak, Oleh karena itu, kasus kekerasan pada anak harus menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, Kota Bogor memiliki cita-cita sebagai kota layak anak. Tentu, keamanan bagi anak-anak menjadi hal utama dan prioritas.

Angka difabel (atau disabilitas) dan ketahanan sosial saling terkait dalam konteks inklusi sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang mungkin lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Angka difabel mencerminkan sejauh mana masyarakat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu dengan disabilitas. Ketahanan sosial melibatkan membangun masyarakat yang tidak hanya tahan terhadap tekanan dan risiko, tetapi juga inklusif terhadap berbagai kelompok, termasuk difabel. Berdasarkan data tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 44 orang cacat tubuh, 3 orang cacat netra, 9 orang cacat mental dan 13 cacat lainnya yang terdapat di Kota Bogor. Hal ini menuntut pemerintah memberi perhatian dalam peningkatan akses difabel terhadap sarana dan prasarana publik, seperti akses terhadap Pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan rehabilitas, keterlibatan dalam Angkatan kerja, perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, akses terhadap infrastruktur dan layanan umum, serta kesejahteraan mental dan emosional.

Ketahanan sosial Kota Bogor dapat dilihat juga dari rasio ketergantungan atau usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif. Tahun 2022, rasio ketergantungan di kota Bogor sebesar 42,62 persen dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, angka ketergantungan di Kota Bogor sedikit lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya maka angka ketergantungan Kota Bogor paling tinggi.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

3.1.3.1. Daya Saing Ekonomi

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Potensial

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Pada tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor menjadi yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya walaupun tetap bernilai negatif yaitu sebesar -0.41 persen (Gambar 2.28). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor sudah cukup berhasil mengatur laju pertumbuhan ekonominya di situasi Covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB ADHK kota Bogor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.10%. Walaupun laju pertumbuhan PDRB Kota Bogor mengalami penurunan, namun masih menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah pembandingnya yang berada di sekitar Kota Bogor (Gambar 2.28). Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,62 persen.

Struktur perekonomian Kota Bogor tahun 2016 - 2023 didominasi oleh beberapa sektor lapangan usaha antara lain, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor konstruksi (Tabel 2.20 dan 2.21). Meskipun sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki tren yang menurun setiap tahunnya, sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Bogor selama tahun 2016 - 2023. Selain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menjadi sektor unggulan, Kota Bogor juga memiliki sektor yang potensial untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis LQ seperti sektor perusahaan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor unggulan tersebut memiliki keterkaitan dengan industri ekonomi kreatif yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu sektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan adalah kuliner yang tercermin dalam sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, akan tetapi pengembangan sektor tersebut belum optimal dikarenakan keterbatasan bahan utama, kurangnya penelitian terhadap bahan baku, adanya kesenjangan antara pendidikan dengan industri, dan belum adanya sertifikasi yang dilakukan. Untuk mendukung sektor tersebut agar dapat berkembang dan maju perlu dilakukan investasi pada sumberdaya manusia agar melahirkan gagasan yang inovatif dan kreatif. Investasi sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan kemampuan untuk menguasai teknologi.

2. Belum Optimalnya Bogor Sebagai Tujuan Wisata dan MICE Ibukota

Kemudahan akses dari Kota Bogor ke Ibukota menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu destinasi favorit untuk pariwisata. Selain itu, Kota Bogor tidak jarang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara *Meeting, Incentive, Convention,* dan *Exhibition* (MICE). Berkembangnya Kota Bogor sebagai Mice City (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) memberi dampak positif terhadap perekonomian Kota Bogor melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan penggunaan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan pengeluaran dan belanja, serta promosi destinasi wisata.

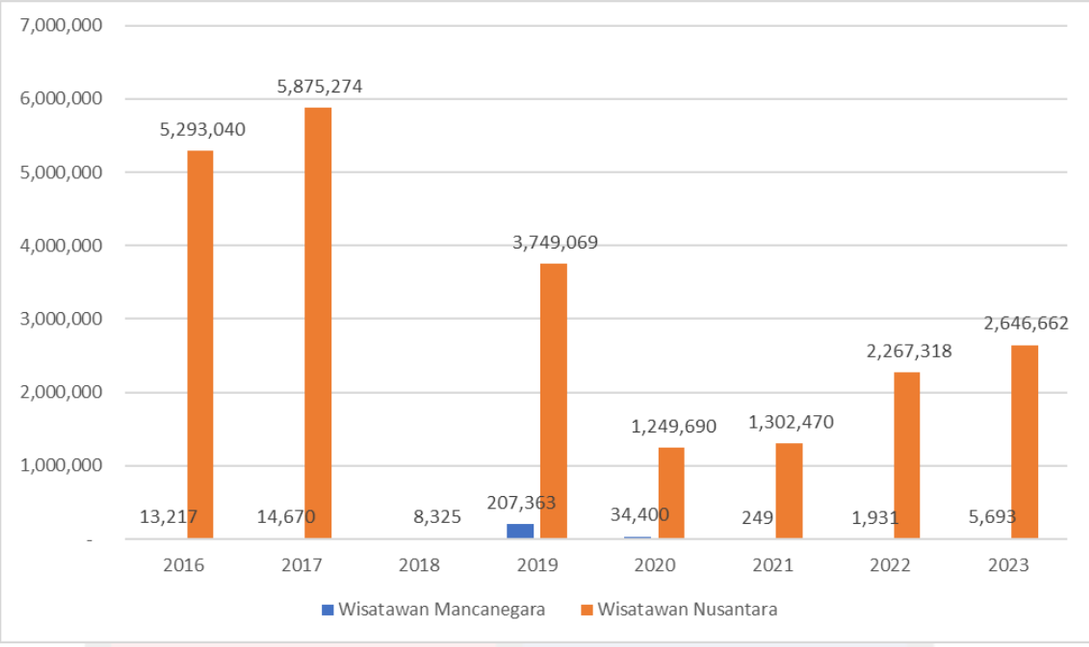

Sumber: BPS Jawa Barat

Gambar 3.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota Bogor Tahun 2016 - 2023

Berdasarkan **Gambar 3.2**, dapat terlihat bahwa kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kota Bogor didominasi oleh wisatawan nusantara. Selama tahun 2016 - 2023 perkembangan kunjungan wisatawan di Kota Bogor memiliki tren yang berfluktuasi. Pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi mulai kembali di Kota Bogor. Dengan lokasi Kota Bogor yang secara geografis dekat dengan Jakarta sebagai Ibu Kota negara, sehingga banyak mendapat keuntungan secara ekonomi dari Jakarta. Ada tiga keunggulan perhotelan di Kota Bogor, yaitu: keunggulan geografis, kuliner, dan jarak tempuh dekat dari Jakarta.

Bisnis Hotel di kota Bogor sangat dipengaruhi oleh para tamu dari kota Jakarta. Para tamu yang datang dari Jakarta ke kota Bogor kebanyakan untuk melakukan kegiatan MICE dengan asal dari berbagai Instansi, baik perusahaan maupun pemerintahan. Hampir semua hotel di kota Bogor yang mempunyai *meeting room* yang memadai dan saling berebut pangsa pasar MICE terutama dari pemerintah. Pangsa pasar MICE-*government* terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara merupakan penyumbang terbesar dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di kota Bogor. Pemerintah menjadikan kota Bogor sebagai tujuan utama penyelenggaraan kegiatan MICE adalah karena jarak yang dekat, akses yang mudah dijangkau, dapat menghemat biaya dan menghemat waktu.

Selain sebagai tujuan utama MICE, Kota Bogor juga menjadi tujuan pariwisata favorit masyarakat sekitar Kota Bogor. Kota Bogor memiliki pusat kuliner yang unik dan khas membuat masyarakat sekitar Kota Bogor gemar menghabiskan akhir pekan untuk berkunjung ke Bogor hanya untuk menikmati kulinernya. Keunggulan lain dari kota Bogor adalah mempunyai suhu udara yang sejuk antara 23'C - 26'C dikarenakan dekat dengan pegunungan. Hal ini semakin menambah keunggulan kota Bogor untuk selalu dipilih menjadi tempat penyelenggaraan MICE oleh *Government*. Adapun pangsa pasar MICE-

government yang paling banyak melakukan kegiatan di kota Bogor adalah hampir semua Kementerian dan Lembaga Negara.

Berbagai potensi sektor pariwisata yang dimiliki Kota Bogor belum dapat dioptimalkan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan data persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bogor tahun 2022 hanya sebesar 1,06 persen (BAPENDA Kota Bogor, 2023). Nilai tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan pajak hiburan, hotel, dan restoran Kota Bogor. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata termasuk ke dalam salah satu sektor penyumbang PDRB terkecil di Kota Bogor.

3. Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal

Produktivitas yang rendah dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, integrasi rantai nilai yang belum optimal, seperti keterbatasan koordinasi antara produsen, distributor, dan pengusaha dapat menghambat aliran efisien barang dan informasi dalam sistem ekonomi. Hal tersebut tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi tetapi juga dapat menurunkan daya saing di pasar global yang semakin terintegrasi.

Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor terlihat dari data *share* net ekspor terhadap PDRB. Komponen *share* net ekspor barang dan jasa Kota Bogor bernilai negatif selama tahun 2013 - 2023. Meskipun *share* net ekspor terhadap PDRB Kota Bogor lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Bekasi, komponen ini memiliki nilai yang paling kecil jika dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Sementara itu, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kota Bogor yaitu secara rata-rata nilainya lebih besar dari 30 persen selama tahun 2013 - 2023 dan rata-rata memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Nilai *share* PMTB terhadap PDRB Kota Bogor yang selalu di atas 30 persen menunjukkan telah cukup besarnya investasi fisik di Kota Bogor selama tahun 2013-2023.

3.1.3.2. Daya saing sumber daya manusia

1 Kualitas dan Akses Pendidikan yang Belum Merata

Akses Pendidikan yang memadai dapat dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang tersedia dan mencukupi bagi penduduk. Pada tahun 2024, sebaran sarana Pendidikan Kota Bogor menunjukkan masih belum merata antar kecamatan. Jumlah sarana pendidikan Kota Bogor masih berpusat pada Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan pada Kecamatan Bogor Timur memiliki fasilitas pendidikan yang sedikit di Kota Bogor.

Tabel 3.2. Jumlah Sarana Pendidikan Kota Bogor Tahun 2024

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kec. Kota Bogor Barat	**210**	28	3	0	39	7	1	66	30	11	22	3
2	Kec. Tanah Sareal	**208**	28	11	1	58	11	0	49	23	9	18	0
3	Kec. Kota Bogor Selatan	**183**	23	2	0	41	7	0	52	26	10	19	3
4	Kec. Kota Bogor Utara	**154**	32	1	1	28	7	0	41	15	8	18	3
5	Kec. Kota Bogor Tengah	**145**	23	3	0	22	8	0	42	21	10	14	2
6	Kec. Kota Bogor Timur	**103**	15	1	0	17	5	0	31	13	8	13	0
Total		1.003	149	21	2	205	45	1	281	128	56	104	11

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kemendikbud (2024)

Selanjutnya, kualitas pendidikan yang menjadi tolak ukur kualitas suatu individu yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), menunjukkan bahwa di Kota Bogor RLS terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 - 2023. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik, dimana pada tahun 2023 jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan formal rata-rata 10,82 tahun meningkat 0,14 tahun dari tahun 2022 (10,68 tahun), dimana laki-laki memiliki angka rata-rata lama sekolah 11,40 tahun dan perempuan memiliki angka rata-rata lama sekolah 10,24 tahun. Dengan kata lain, angka rata-rata lama sekolah Kota Bogor menunjukkan bahwa target Pendidikan utama selama 9 tahun bagi penduduk Kota Bogor tercapai dengan baik. Namun demikian, jika dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor masih relatif rendah dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi, dengan rata masing-masing sebesar 11,59 tahun dan 11,91 tahun, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat (8,83 tahun).

Berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS), Pada tahun 2023, Kota Bogor memiliki angka harapan lama sekolah (HLS) rata-rata 13,45 tahun, dimana laki-laki 13,36 tahun dan Perempuan 13,54 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dimana laki-laki 13,14 tahun dan Perempuan 13,42 tahun. Angka harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah di Kota Bogor masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi dengan rata-rata masing-masing sebesar 14,02 tahun dan 14,23 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor tahun 2023 untuk jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTS/Paket B masing-masing sebesar 99,59 dan 87,68, dimana angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan APM Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 98,20 dan 83,61. Namun jika dilihat untuk jenjang SMA/MA/ Paket C sebesar 58,63, lebih rendah dibanding Jawa Barat yang sebesar 59,01.

Tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bogor untuk jenjang SD/MI/Paket A hampir mendekati 100 yakni sebesar 99,90. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan pada jenjang tersebut sudah mampu memfasilitasi kebutuhan Pendidikan. APK Kota Bogor untuk jenjang SMP/MTS/ Paket B sebesar 95,32, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan APK Provinsi

Jawa Barat sebesar 94,69. Begitu juga APK Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/Paket C yang masih relatif rendah yakni sebesar 63,50, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 79,07.

Untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara digunakan apa yang disebut Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indeks ini mencerminkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan memahami informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan sosial. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat mencakup berbagai aspek literasi, seperti literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi ilmiah.

Lloyd (2010) berpendapat bahwa literasi dipandang sebagai hubungan membaca dan belajar. Perspektif ini dapat dimaknai bahwa awareness/kemelekan berhubungan dengan kemampuan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan dengan cara tertentu, diantaranya melalui membaca dan menulis. Belajar dari apa yang dibaca baik dari bacaan atau lingkungan, kemudian memahami, dan mampu menuliskan kembali merupakan aspek penting berliterasi. Kemudian menurut UNESCO (2018) menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, serta menghitung menggunakan materi cetak, tertulis, dan visual yang berkaitan dengan berbagai konteks; termasuk didalamnya memahami praktik dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya.

Dalam Upaya Menuju Indonesia Emas tahun 2045 peran literasi sangat penting terutama bagi Gen Z. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pada Tahun 2045, tentu akan sangat berbeda dengan Indonesia hari ini. Dimana persaingan akan sangat ketat, teknologi semakin canggih dan sosial budaya semakin bebas. Sedangkan, pada saat ini cukup banyak Gen Z yang terlibat dalam kriminalitas, narkoba, pergaulan seks bebas, kenakalan remaja dan putus sekolah. Padahal, Kota Bogor memiliki bonus demografi dengan jumlah Gen Z yang cukup banyak sebagai potensi pembangunan. IPLM Kota Bogor sebesar 52.00 berada dalam kategori sedang. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan IPLM Kota Depok sebesar 74,44 dan rata-rata Jawa Barat sebesar 60,2 (kategori sedang). Namun IPLM Kota Bogor masih lebih tinggi dibandingkan Kota Bekasi (51,79), Kabupaten Bogor (38,19) dan Kabupaten Bekasi (36,40). Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memiliki indeks paling rendah di Jawa Barat. IPLM ini merupakan indeks yang merangkum indikator-indikator yaitu UPLM1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan), UPLM2 (Pemerataan Koleksi Perpustakaan), UPLM3 (Pemerataan Tenaga Perpustakaan), UPLM4 (Tingkat Kunjungan Pemustaka), UPLM5 (Perpustakaan Ber-SNP), UPLM6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan), dan UPLM7 (Jumlah Pemustaka).

2 Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Pelayanan dan Akses Kesehatan Masyarakat

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu program sosial yang masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memudahkan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan penduduk meliputi (1) BPJS kesehatan penerima bantuan iuran, (2) BPJS kesehatan non penerima bantuan iuran, dan (3) Jamkesda, asuransi swasta dan perusahaan. Fasilitas JKN bagi masyarakat merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan fasilitas jaminan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Selama tahun 2020-2023 BPJS kesehatan penerima bantuan iuran terus meningkat dari 40,08 persen tahun 2020 menjadi 48,57 persen di tahun 2023. Sementara untuk BOJS kesehatan non penerima bantuan iuran dan jamkesda-asuransi swasta dan perusahaan berfluktuatif lebih rendah dibanding BPJS kesehatan penerima bantuan iuran. Bahkan untuk jamkesda, asuransi swasta dan perusahaan pada tahun 2023 jauh terus menurun dibandingkan tahun 2020 dari 10,12 persen menjadi 5,47 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Masyarakat, dalam hal kesehatan.

Beberapa kasus di bidang kesehatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu masih tingginya kasus HIV, dimana secara kumulatif hingga September 2022 terdapat sebanyak 6.058 kasus HIV dan sebanyak 1.865 kasus AIDS. Penanganan kasus HIV harus bersifat holistik dan melibatkan pendekatan multidisiplin. Kerja sama antara penyedia layanan kesehatan, konselor, dan dukungan masyarakat menjadi kunci untuk memberikan perawatan yang efektif dan mendukung individu yang hidup dengan HIV. Demikian halnya dengan penanganan kasus TBC di Kota Bogor masih harus menjadi perhatian. Tahun 2023, temuan kasus TBC di Kota Bogor mencapai 10.096, jauh lebih tinggi dibanding Kota Depok (7.519).

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah, termasuk dalam hal ini Kota Bogor. UHH Kota Bogor dan wilayah sekitarnya berdasarkan jenis kelamin. Tahun 2022, UHH laki-laki di Kota Bogor sebesar 72,25 tahun dan Perempuan sebesar 75,96 tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok, namun masih lebih tinggi dibandingkan UHH Provinsi Jawa Barat, dimana laki-laki sebesar 71,77 tahun dan perempuan sebesar 75,48 tahun. Dalam rencana Pembangunan suatu wilayah, UHH dapat dijadikan acuan pemerintah dalam mengadakan program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Indeks kesehatan dapat menunjukkan kondisi pelayanan publik di bidang kesehatan. Indeks kesehatan Kota Bogor mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dari tahun 2018-2022. Namun, di tahun 2022 indeks kesehatan Kota Bogor masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

Meskipun indeks kesehatan Kota Bogor mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, upaya peningkatan pelayanan dan akses kesehatan masyarakat masih belum optimal. Hal ini salah satunya terlihat dari fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum. Berdasarkan data BPS, ditunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah unit rumah sakit umum di Kota Bogor yaitu sebanyak 19 unit di tahun 2020 menjadi hanya 17 unit di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi jumlah tersebut masih lebih sedikit (Kota Depok: 22 unit; Kota Bekasi: 44 unit). Situasi ini mengindikasikan keterbatasan fasilitas kesehatan yang memadai di Kota Bogor. Selain itu, program-program kesehatan yang ada belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata. Perlu adanya strategi yang lebih terencana dan terkoordinasi seperti peningkatan investasi di sektor kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyebaran informasi yang efektif kepada masyarakat tentang layanan kesehatan yang tersedia.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah responden yang tidak memahami kriteria dan tata cara pengisian form instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah tahun 2022, sehingga capaian Hasil survei Kepuasan masyarakat seharusnya mendapatkan nilai 4,30 hanya mendapatkan nilai 3,56 dan pemilihan target nilai yang tinggi untuk Nilai pembangunan Zona Integritas yang seharusnya kategori C (unit kerja melakukan pencanangan zona integritas) menjadi tidak sesuai dan mendapatkan nilai akhir yang tidak maksimal.

2. Perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan publik

Kinerja aparatur dan pelayanan publik dicerminkan melalui nilai akuntabilitas pemerintah lingkup perangkat daerah dan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat, ditemukan bahwa Kota Bogor mengalami perbaikan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup daerah menunjukkan capaian A (kategori nilai memuaskan dengan kriteria nilai >80-90) pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun 2021 dengan capaian BB (kategori nilai sangat baik dengan kriteria nilai >70-80).

3. Perlu ditingkatkannya kinerja SPBE

Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah dengan penerapan SPBE terbaik di Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional, tahun 2022 merupakan fase penguatan layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu meningkatkan tata kelola untuk mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023.

Capaian SPBE tahun 2022 sebesar 3,3 tersebut terkonstruksi dari beberapa aspek penilaian yang meliputi: nilai aspek kebijakan internal tata kelola SPBE sebesar 3,4; nilai aspek perencanaan strategis SPBE sebesar 1,7; nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi sebesar 2,50; nilai aspek penerapan manajemen SPBE sebesar 1,0. Berdasarkan capaian tersebut, Kota Bogor harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerja pada seluruh aspek, terutama pada penerapan manajemen SPBE dan aspek perencanaan strategis SPBE.

4. Perlu Ditingkatkannya Inovasi Daerah

Pemerintah Kota Bogor sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota, perlu secara proaktif untuk dapat melahirkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan nasional maupun global. Untuk dapat mencapai hal tersebut, diperlukan upaya mendorong penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah sebagai input kebijakan yang menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah Kota Bogor.

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang menjadi penghambat inovasi Kota Bogor, diantaranya (1) Belum teridentifikasi nya Produk Unggulan Daerah Kota Bogor, (2) Belum ada kejelasan kebijakan dari Kemendagri dan BRIN dalam pembentukan BRIDA, (3) Sumber dana untuk pelaksanaan riset dan inovasi dari Non APBD masih sangat sedikit, (4) Belum memiliki standar tata kelola forum Pelaku Inovasi Daerah, (5) ASN Pemkot Bogor yang memiliki kompetensi periset sangat kurang, (6) Belum ada rencana induk

peta jalan untuk pengembangan riset dan inovasi dalam lingkup Kota Bogor, dan (7) Belum ada keterlibatan industri dalam pemanfaatan riset tersebut (Bapperida Kota Bogor, 2022). Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu untuk dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen pentahelix yang ada di Kota Bogor.

5. Level Maturitas SPIP

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Level Maturitas SPIP adalah tidak terpenuhinya implementasi pada unsur SPIP (Penilaian Risiko, IEPK) yang disebabkan belum terupdatenya regulasi terkait dengan penilaian risiko dan IEPK, Penilaian risiko tingkat kota belum dilaksanakan dan IEPK belum diimplementasikan dengan optimal.

Berikut beberapa upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, menginisiasi dan mempercepat pembaruan regulasi terkait penilaian risiko dan Implementasi Efektivitas Pengendalian Kinerja (IEPK). Kedua, mengoptimalkan implementasi IEPK dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaannya. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait mengenai pentingnya penilaian risiko dan implementasi IEPK dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penilaian risiko dan implementasi IEPK. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan level Maturitas SPIP juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

a. Gap Analisis Kompetensi

Berdasarkan Pasal 162 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi PNS merupakan salah satu mata rantai dalam manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit, artinya harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. PP Nomor 11 Tahun 207 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi 20 paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, kursus, penataran, sekolah kader/pelatihan kader dan magang. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis, Seminar dan Diklat Sertifikasi Profesi. Penyelenggaraannya menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan pengawasan (Pusdiklatwas BPKP dan lembaga pendidikan lainnya).

Pengembangan kompetensi tersebut bertujuan serta meningkatkan pengetahuan *(knowledge)*, keterampilan *(skill)* dan juga sikap *(attitude)* sehingga terwujud profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Setelah dilakukan pengembangan kompetensi gap kompetensi mengalami penurunan

dari 21,62% menjadi 14,70%. Capaian yang cukup baik tersebut menunjukkan adanya efektivitas dari program pengembangan dibarengi dengan partisipasi aktif dari peserta diklat.

b. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"

Ukuran akuntabilitas kinerja dan keandalan sistem manajemen kinerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil pencapaian penyelenggaraan pengawasan *intern* pemerintah (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan consulting). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 memperoleh nilai rata-rata 80,30% dengan predikat "BB" (Sangat Baik), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memperoleh nilai rata-rata 78,56% dengan predikat "BB" (Sangat Baik). Rekapitulasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 - 2023

No.	Kategori Nilai	Jumlah PD 2021	Jumlah PD 2022	Jumlah PD 2023
1	AA (sangat memuaskan)	-	-	2
2	A (memuaskan)	10	17	32
3	BB (sangat baik)	17	18	2
4	B (baik)	8	1	
5	CC (cukup/memadai)	1	-	
6	C (kurang)	-	-	
7	D (sangat kurang)	-	-	
Jumlah		36	36	36

Sumber: Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023

Tahun 2023 jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP "AA" ada 2 Perangkat Daerah, nilai SAKIP A ada 32 Perangkat Daerah dan nilai SAKIP "BB" sebanyak 2 Perangkat Daerah. Beberapa catatan berkaitan dengan kelemahan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan belum seluruhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
2. Rencana aksi kinerja belum seluruhnya berjalan dinamis karena belum seluruhnya dipantau secara berkala.
3. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi e-SAKIP.
4. Pengukuran kinerja belum seluruhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
5. Belum seluruh pegawai memahami atas hasil pengukuran kinerja.
6. Belum dilakukan reviu atas laporan kinerja.
7. Informasi dalam laporan kinerja belum seluruhnya mengungkap seluruh informasi kinerja sesuai standar.
8. Informasi dalam laporan kinerja belum seluruhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
9. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

10. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi berbagai kondisi tersebut.

1. Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan agar seluruhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
2. Rencana aksi kinerja agar seluruhnya berjalan dinamis dengan cara dipantau secara berkala tiap bulan/triwulan/semester/tahunan.
3. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi /aplikasi e-SAKIP.
4. Pengukuran kinerja agar mempengaruhi penyesuaian strategi dan penyesuaian anggaran untuk mencapai target kinerja dengan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja sebelumnya.
5. Memerintahkan kepada seluruh pegawai masing -masing untuk berperan aktif dalam memberikan informasi/data untuk pengukuran kinerja.
6. Agar melakukan reviu berjenjang atas penyusunan laporan kinerja
7. Agar menyajikan informasi terkait kinerja secara lengkap dalam laporan kinerja sesuai standar pelaporan yang berlaku.
8. Informasi dalam laporan kinerja agar seluruhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi pada pegawai terhadap target sasaran yang belum tercapai sebagai dasar perbaikan dalam penyusunan perencanaan di tahun berikutnya sehingga seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen.
9. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar seluruhnya ditindaklanjuti.
10. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

3.1.5. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

3.1.5.1. Penyediaan utilitas dasar pendukung permukiman yang belum optimal

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Kota Bogor, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, akses terhadap sanitasi layak yang terbatas, dan akses terhadap sumber air minum layak yang belum optimal.

1. **Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah

yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi rumah layak huni dan terjangkau adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk dikatakan rumah layak huni maka harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, terutama untuk kecukupan minimum luas bangunan juga harus memperhatikan dari jumlah penghuninya.

Data capaian Rasio rumah layak huni dan Cakupan ketersediaan rumah layak huni RPJMD 2020-2024 sudah berstatus tercapai dari target tetapi untuk pemukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Bogor masih belum tercapai. Permukiman kumuh menjadi salah satu gambaran bahwa penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat belum optimal. Sehingga ke depan perlu ada upaya peningkatan terhadap akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat serta penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan.

2. Terbatasnya Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Aman

Komponen rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah salah satu dari empat kriteria rumah layak huni. Menurut Kementerian PUPR, sanitasi layak terdiri dari bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septic tank* yang layak, saluran pembuangan air kotor, hingga sistem pembuangan air limbah. Sanitasi yang dimaksud dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau komunal. Asalkan jaraknya yang terjangkau (dekat dari rumah) dan dapat melayani seluruh anggota keluarga. Kota Bogor selalu memiliki capaian terendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Angka capaian Kota Bogor tahun 2022 hanya sebesar 67,93 persen, padahal dua wilayah perkotaan lainnya yang sebagai pembanding memiliki nilai > 90 persen. Hal ini berarti rumah tangga di Kota Bogor masih belum optimal dalam mengakses mengenai sarana prasarana sanitasi yang layak.

Belum optimalnya kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dilihat dari akses terhadap sanitasi layak yang juga belum optimal. Akses terhadap sanitasi layak menjadi salah satu tantangan utama, selain itu kebutuhan atas akses air minum rumah tangga yang aman dan berkelanjutan juha menjadi tantangan bagi wilayah perkotaan. Ke depan Kota Bogor perlu berupaya untuk melakukan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar terutama pada sanitasi dan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.

3. Belum Optimalnya Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Rumah tangga dengan akses sumber air minum layak adalah rumah tangga dengan sumber air minum yang memenuhi standar kesehatan dan kualitas air, serta mudah diakses oleh masyarakat. Sumber air minum layak bisa berasal dari air minum dalam kemasan, air isi ulang, mata air terlindungi, sumur terlindungi, sumur bor/pompa, atau pipa. Pada Gambar 3.2, terlihat bahwa

persentase rumah tangga di Kota Bogor telah memiliki akses sumber air yang layak dengan capaian Kota Bogor tahun 2023 sebesar 93,6 persen. Angka ini mampu bersaing dengan wilayah perkotaan lainnya seperti Kota Bekasi (98,28%) dan Kota Depok (99,44). Harapannya, Kota Bogor terus dapat meningkatkan persentase akses sumber air yang layak, aman, dan terjangkau sehingga dapat mencapai 100 persen seperti Kota Depok di tahun 2020 dan Kota Bekasi di tahun 2021.

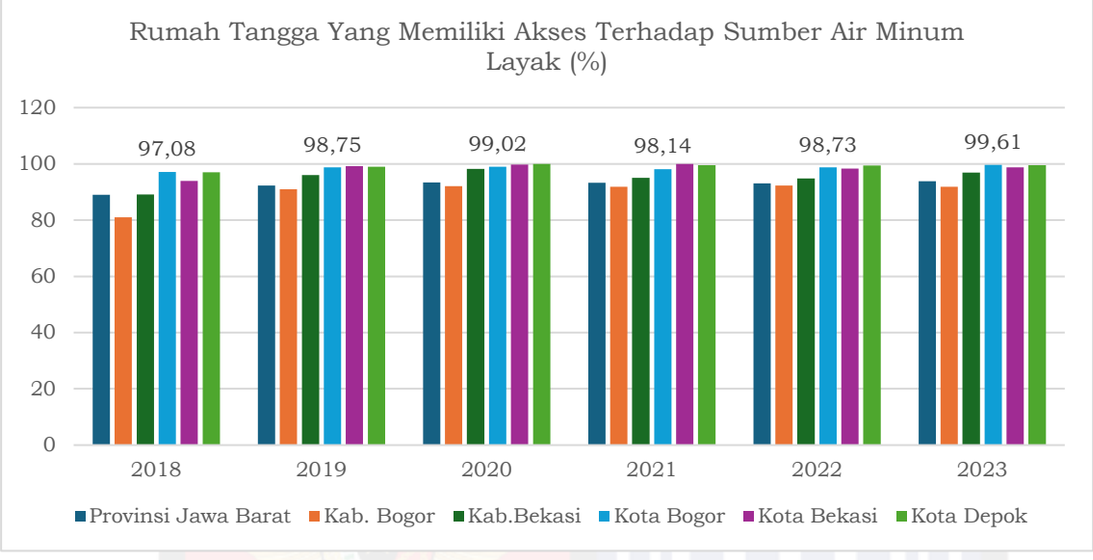

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Gambar 3.3. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2018-2023 (Persen)

Pelayanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata wajib dilakukan oleh sebab itu perlu upaya yang dilakukan diantaranya percepatan penyediaan air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang layak.

3.1.5.2. Belum optimalnya kinerja *smart city*

Konsep *smart city* kota bogor pertama kali disusun tahun 2017 sebagai bagian dari program kepesertaan dalam Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia (GM100SCI) dengan 6 (enam) dimensi *smart city platform* GM100SCI yang terdiri dari: *Sector Governance* (6 program), *Economy* (7 program), *Branding* (7 program), *Society* (6 program), *Living* (17 program), dan *Environment* (13 program). Selanjutnya sebagai tahap lanjutan Kota Bogor telah menyiapkan anggaran untuk Menyusun *Masterplan E-Government* (SPBE) dan *Masterplan Smart City* 2022-2027 yang bersifat terintegrasi, sinergis, dan inklusif dengan RPJMD, RKPD, Renstra, Gerakan Reformasi Birokrasi, Stranas PK (penanggulangan Korupsi) dan Aspirasi *stakeholders penta-helix smart city*. Kedua *masterplan* saat ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor tahun 2022. Penilaian dari pelaksanaan smart city didasarkan pada indeks *smart city* yang mana pada tahun 2019 Kota Bogor memiliki capaian 3,12, tahun 2020 sebesar 3,33, dan tahun 2021 sebesar 3,46. Apabila dilihat, capaian indeks *smart city* Kota Bogor terus mengalami peningkatan.

Salah satu bentuk program Kota Bogor adalah layanan *multimedia green room* yang digunakan sebagai sarana Pemerintah Kota Bogor dalam

implementasi konsep *smart city*. Layanan ini memanfaatkan integrasi teknologi informasi yang mampu memfasilitasi kegiatan kedinasan pimpinan daerah, perangkat daerah ataupun *Non Government Organization* (NGO) dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Penanggungjawab dari layanan multimedia ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil pelaksanaan layanan multimedia di Bogor *Green Room* mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebelumnya sebanyak 672 kegiatan menjadi 803 kegiatan pada tahun 2022, kegiatan ini tersebar di 7 Ruang Rapat Lingkungan Balaikota dan Non Lingkungan Balaikota. Meskipun demikian, total penggunaan ruangan kegiatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Pengembangan *smart city* membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur digital, biaya ini bisa menjadi hambatan bagi pemerintah atau pengembang untuk menerapkan *smart city*. Pengembangan infrastruktur digital yang kuat adalah salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan *smart city*. Hal ini meliputi penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan publik, transportasi, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, keberadaan universitas, lembaga riset, dan industri kreatif dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor. Selain itu, mendorong keterbukaan dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil perlu dilakukan. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan pengalaman untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah perkotaan yang kompleks.

3.1.5.3. Kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim

Permasalahan terkait geografi dan lingkungan hidup Kota Bogor diantaranya terkait rawan bencana, kualitas lingkungan hidup, energi fosil, dan sistem pangan. Struktur geologi Kota Bogor yang kompleks menjadikan wilayah Kota Bogor rawan terhadap bencana alam. Relatif masih tingginya risiko bencana, hal ini disebabkan diantaranya kurangnya antisipasi dan belum optimalnya penanggulangan bencana. Belum optimalnya penanggulangan bencana diantaranya pada aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan pasca bencana. Pada masa yang akan datang, tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai dampak dari perubahan iklim

Antisipasi terhadap terjadinya bencana alam dan anomali cuaca/iklim dapat dipetakan melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks ini merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat kebencanaan dengan akibat berupa kerusakan atau kerugian di suatu wilayah. IRBI dihitung secara rutin oleh BNPB sebagai wujud monitoring dan pemantauan di daerah. IRBI disusun dari tiga komponen, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. IRB Kota Bogor sejak tahun 2018-2020 relatif stagnan, namun sejak tahun 2021-2023 cenderung berfluktuatif (**Gambar 2.15**). Apabila

dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok, Kota Bogor memiliki indeks relatif paling rendah, yakni 63,49 pada tahun 2023 sementara paling tinggi adalah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, masing-masing sebesar 118,85 dan 11,58.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi, meskipun berdasarkan data dari BNPB Kota Bogor memiliki tren yang menurun terhadap risiko bencana. Berdasarkan data BNPB, Kota Bogor memiliki risiko sedang-tinggi untuk bencana banjir. Kerugian ekonomi akibat bencana banjir diperkirakan mencapai rata-rata 23,2111 miliar dengan luas risiko yang terdampak seluas 1.538 ha. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan di kawasan hulu yang mulai menurun sebagai daerah tangkapan air hujan. Sehingga perlu ada upaya kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menerapkan pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam mengantisipasi bencana dan perubahan iklim.

3.1.5.4. Kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan

Kinerja pengelolaan sampah Kota Bogor perlu dioptimalkan karena biasanya terdapat hubungan lurus antara jumlah penduduk dengan produksi atau timbulan sampah. Beberapa indikator dipetakan untuk melihat potensi persampahan di Kota Bogor dan kota pembanding lainnya. Pengukuran timbulan sampah diambil dari lokasi pengambilan terpilih, untuk diukur volumenya dan ditimbang beratnya dan diukur komposisinya. Pada **Gambar 3.4** disajikan beberapa indikator persampahan Kota Bogor sejak tahun 2019-2023. Keterbatasan data yang disajikan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK membuat data-data wilayah lain tidak disajikan sebagai pembanding. Terlihat bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari 240.205,33 Ton menjadi 264.631,60 Ton pada tahun 2023.

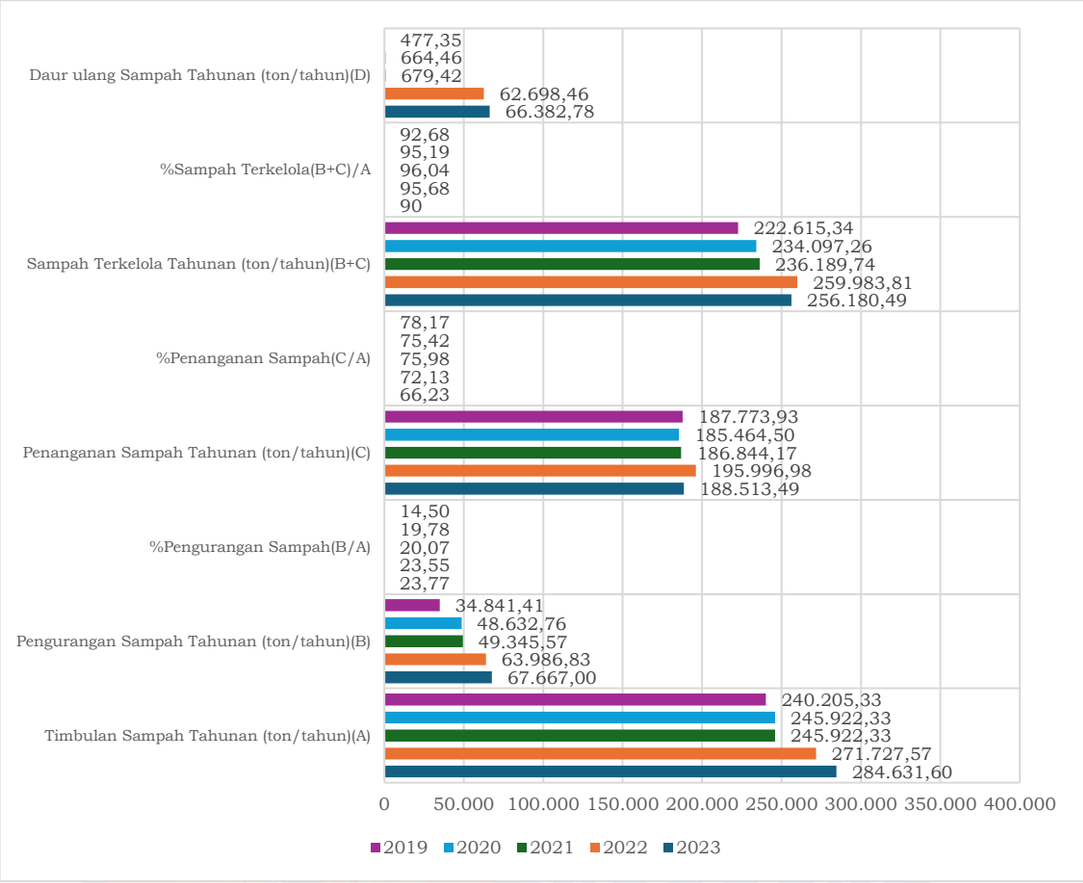

Sumber: SIPSN KLHK (2023)

Gambar 3.4. Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019-2023

Walaupun demikian, terlihat pada indikator lainnya yang juga mengalami tren peningkatan untuk mengimbangi produksi sampah tahunan Kota Bogor. Hal ini terlihat pada indikator pengurangan sampah Kota Bogor di tahun 2023 sebesar 67.667 ton meningkat dibanding tahun 2022 yang mencapai 63.986,83 ton. Indikator penanganan sampah dan pengelolaan sampah tahun 2023 mengalami penurunan 188.513,49 ton dibandingkan tahun 2022 195.996,98 ton. Akan tetapi untuk indikator daur ulang sampah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 66.382,78 ton dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 62.968,46 ton.

Jumlah timbulan sampah di Kota Bogor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menandakan bahwa kebijakan *Reduce, Reuse & Recycle* (3R) yang belum efektif. Selain itu, Keberadaan tempat pengolahan sampah di wilayah Kota Bogor menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah dan belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu pada sumber, TPS, TPA dan pengangkutan dari hulu ke hilir juga menjadi masalah bagi pengelolaan sampah di Kota Bogor. Pasalnya, volume sampah di Kota Bogor dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk. Kedepan perlu adanya peningkatan teknologi terpadu dalam pengelolaan sampah dari hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat dinilai dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH setiap daerah pasti berbeda dan tergantung berapa banyak komposit yang digunakan. Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi tolak ukur bagaimana kualitas air di Kota Bogor. Pada **Gambar 3.5** disajikan IKA Kota Bogor pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 51,11 di bawah Kabupaten Tangerang.

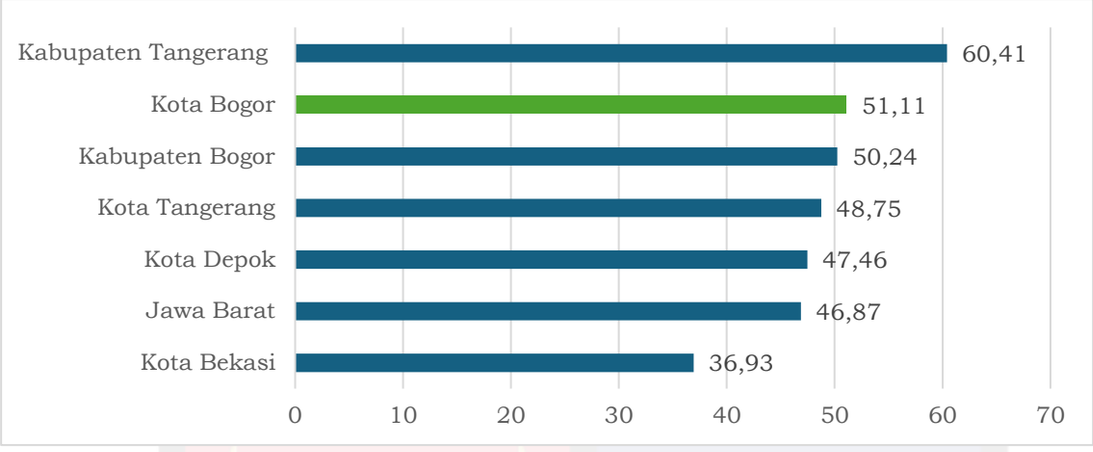

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)

Gambar 3.5. Indeks Kualitas Air Tahun 2023

Selain kualitas air, kualitas udara yang diukur melalui Indeks Kualitas Udara (IKU) menjadi salah satu komponen yang penting untuk menggambarkan kondisi pencemaran udara di Kota Bogor. Pada **Gambar 3.6** disajikan IKU Kota Bogor tahun 2023 dengan nilai sebesar 82,94. Apabila dilihat secara *time series*, maka Kota Bogor sejak tahun 2015-2023 cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat. Capaian IKU Kota Bogor tahun 2015 (70,56); tahun 2016 (78,56); tahun 2017 (85,3); tahun 2018 (85,86); tahun 2019 (81,76); dan tahun 2020 (80,09). Jika melihat capaian tahun 2020, maka Kota Bogor memiliki kualitas udara yang paling baik diantara wilayah pembanding lainnya, tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat yang ingin hidup di wilayah perkotaan namun tetap dapat memiliki kualitas udara yang prima.

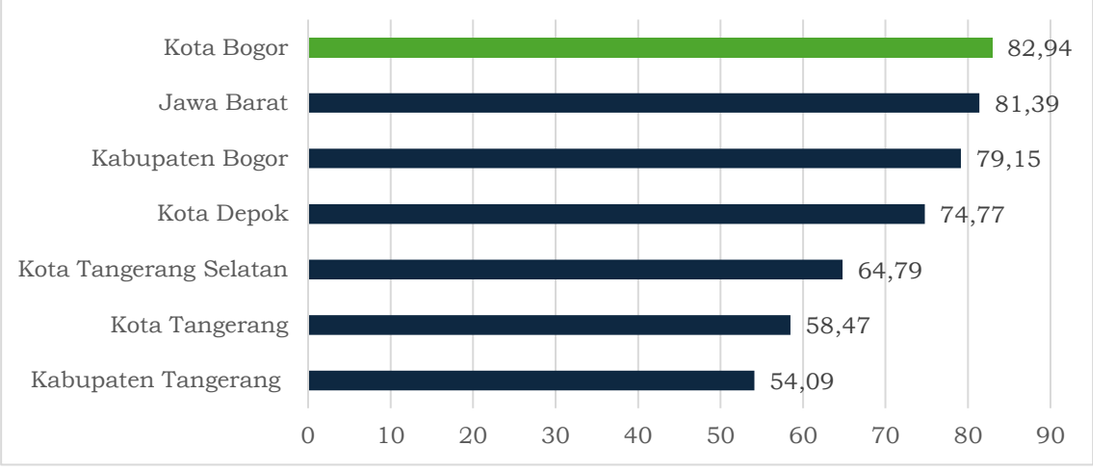

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)

Gambar 3.6. Indeks Kualitas Udara Tahun 2023

Relatif masih rendahnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh masih tingginya pencemaran sungai dan laut, pencemaran udara di perkotaan, kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah yang masih terbatas, serta berkurangnya

kualitas tutupan lahan. Pencemaran sungai semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas perkotaan di sektor industri dan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dan sektor industri dalam pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian dan pengawasan masih rendah, serta teknologi pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal. Pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh kegiatan transportasi dan industri, serta pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pembakaran yang tidak sempurna dan kebijakan *Reduce, Reuse & Recycle* (3R) yang belum efektif. Menurunya kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari timbulan pencemaran air limbah. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2045 rata-rata peningkatan beban pencemar untuk masing-masing parameter adalah 2,29%. Peningkatan ini perlu diantisipasi terutama karena kualitas air akan semakin menurun di masa mendatang jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Aspek keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam pengembangan Kota Bogor ke depan. Upaya yang perlu dilakukan diantaranya pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, desain bangunan yang ramah lingkungan, pelestarian ruang terbuka hijau dan habitat alami, pengendalian polusi udara melalui kebijakan transportasi ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup melalui pendidikan sejak dini.

Relatif masih tingginya emisi gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, disebabkan masih rendahnya upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan pupuk kimia, masih adanya pembakaran sampah, dan proses industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Permasalahan emisi gas rumah kaca menyangkut dua aspek yaitu pengurangan emisi dari sumber emisi dan potensi serapan GRK. Berdasarkan IPCC, GRK mencakup 6 (enam) jenis gas, yaitu: karbondioksida (CO_2), dinitro oksida (N_2O), metana (CH_4), sulfur heksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCs), dan hydrofluorocarbon (HFCs). Secara umum menurut IPCC guidelines (2006), kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri dari 4 (empat) sektor yaitu sektor energi, *Industrial Process and Product Uses* (IPPU), *Agriculture, Forest and Land Use* (AFOLU) dan limbah.

Masih rentannya sistem pangan terhadap perubahan faktor internal dan eksterna. Hal ini disebabkan oleh proses produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat, stok cadangan pangan belum terpenuhi, perubahan iklim yang berdampak pada turunnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian, meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun banjir dan kekeringan, pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim belum optimal, implementasi *Research & Development*, sistem logistik dan distribusi belum tertata dengan baik sehingga belum dapat menjangkau wilayah rentan pangan serta masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan beras. Terlebih lagi keterbatasan Kota Bogor dalam hal lahan pertanian.

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kota Bogor dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

3.2.1. Isu Global

Globalisasi, liberalisasi dan hubungan internasional saat ini yang terus berkembang turut mewarnai isu global diantaranya geopolitik dan geoekonomi, disrupsi teknologi berbasis AI, urbanisasi dunia, perdagangan internasional, perubahan iklim global (*global warming*) dan demografi global (Gambar 3.8).

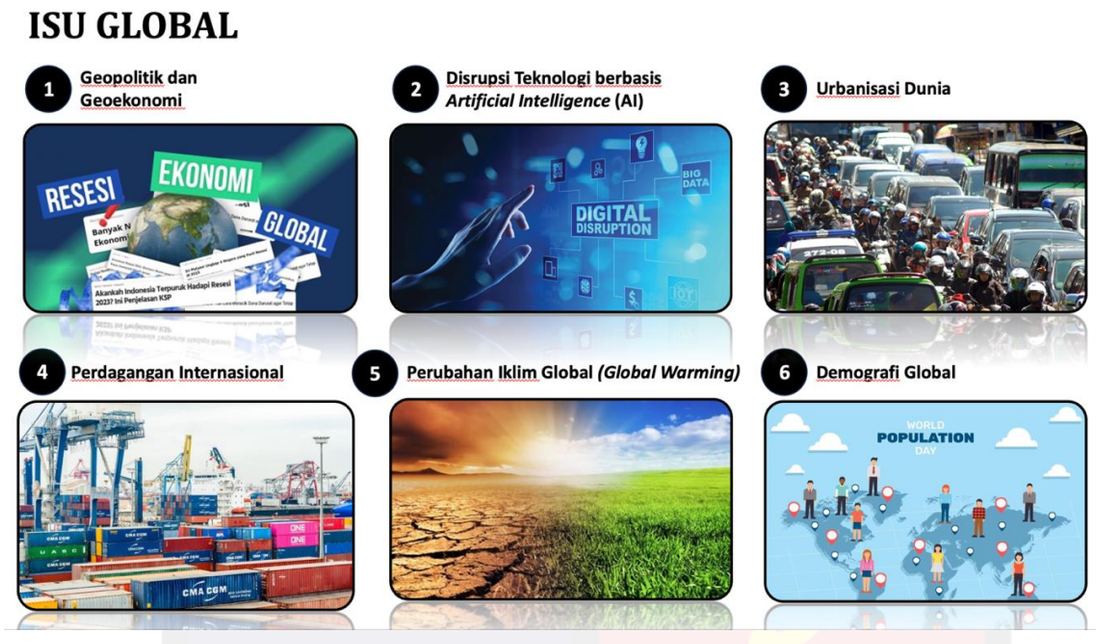

Gambar 3.7. Isu Global

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan - Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong de-globalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi

windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

2. Disrupsi Teknologi Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

3. Urbanisasi Dunia

Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

4. Perdagangan Internasional

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

5. Perubahan Iklim Global *(Global Warming)*

Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam

penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

6. Demografi Global

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing- masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

3.2.2. Isu Nasional

Isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam rencana pembangunan daerah adalah perpindahan ibukota negara (IKN), bonus demografi, konektivitas dan infrastruktur dasar, perubahan iklim dan bencana, ekonomi hijau dan biru serta isu desentralisasi dan otonomi daerah (Gambar 3.9)

Gambar 3.8. Isu Nasional

1. Perpindahan Ibukota Nusantara (IKN)

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian.

2. Bonus Demografi

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

3. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Kedepannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan

infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

4. Perubahan Iklim dan Bencana

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

5. Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai "tulang punggung" nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3.2.3. Isu Regional

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.

Gambar 3.9. Isu Regional Kawasan Jawa-Bali

1. Perubahan Peran Jakarta Sebagai Kota Global

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah

sekitarnya. Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Peralihan peran Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global membawa dampak signifikan bagi wilayah sekitarnya, termasuk Jawa Barat dan kawasan Jabodetabek. Transformasi ini menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah sekitarnya, karena Jakarta memerlukan dukungan regional untuk memperkuat posisinya sebagai kota global.

Jawa Barat dan kawasan Jabodetabek dapat mengalami peningkatan investasi, terutama dalam sektor transportasi, perumahan, dan fasilitas publik, untuk mengakomodasi hubungan yang lebih dinamis dengan Jakarta. Kota-kota di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dapat menjadi pusat aktivitas bisnis dan permukiman yang lebih maju, mengurangi tekanan urbanisasi di Jakarta dan menciptakan kawasan metropolitan yang lebih terintegrasi. Selain itu, peningkatan mobilitas dan konektivitas regional dapat memperkuat kolaborasi ekonomi dan sosio-kultural, mempromosikan pertumbuhan inklusif yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah. Sementara itu, tantangan terkait lingkungan dan pengelolaan sumber daya kali ini menjadi agenda bersama yang harus dihadapi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung semakin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat. Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi kedepannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan.

2. Daya Saing SDM

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan isu strategis penting bagi kawasan Jawa-Bali dalam periode 2025-2045. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin terpacu dan tuntutan globalisasi yang semakin kuat, kesiapan dan kualitas SDM menjadi faktor penentu bagi kesuksesan

pembangunan regional. Di tengah dinamika ini, Jawa Barat dan kawasan Jabodetabek menempati posisi krusial dalam meningkatkan daya saing SDM guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin kompleks dan beragam.

Di Jawa Barat, fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghadapi tantangan industri yang bergerak menuju otomatisasi dan digitalisasi. Provinsi ini harus mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0 dan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk memastikan pembelajaran yang relevan dan aplikatif. Pelatihan keterampilan teknologi dan inovasi menjadi prioritas untuk menjembatani kesenjangan antara tenaga kerja yang ada dan kebutuhan industri masa depan.

Sementara itu, kawasan Jabodetabek, sebagai pusat ekonomi dan bisnis, menghadapi tantangan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar global. Penguasaan bahasa asing, keterampilan manajerial, dan pemahaman teknologi informasi menjadi keterampilan utama yang perlu diperkuat. Selain itu, Jabodetabek harus meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan profesional untuk mendukung mobilitas sosial dan ekonomi dalam menghadapi tantangan urbanisasi yang pesat.

Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, Jawa Barat dan Jabodetabek dapat meningkatkan daya saing SDM mereka, yang sekaligus memperkuat posisi regional Jawa-Bali sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

3. Perubahan Iklim dan Bencana

Perubahan iklim dan bencana alam merupakan tantangan strategis utama bagi kawasan Jawa-Bali, khususnya dari 2025 hingga 2045. Dampak perubahan iklim, seperti meningkatnya suhu dan perubahan pola curah hujan, mengancam ekosistem serta kehidupan manusia. Jawa Barat dan kawasan Jabodetabek menghadapi tantangan ini dengan kompleksitas tambahan berupa kepadatan penduduk dan urbanisasi yang cepat.

Di Jawa Barat, sering terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir diperburuk oleh perubahan iklim. Ini menuntut strategi mitigasi yang mencakup pembangunan infrastruktur tahan bencana dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Penanaman kembali hutan juga diperlukan untuk mengurangi risiko longsor dan melindungi mata pencaharian masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Sementara itu, kawasan Jabodetabek menghadapi meningkatnya risiko banjir yang diperparah oleh pengelolaan air dan drainase yang kurang optimal. Fokus diperlukan pada penataan ruang kota berkelanjutan, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sungai terintegrasi.

Partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana penting untuk meningkatkan resiliensi komunitas, memastikan ketahanan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang bagi penduduk.

4. Pusat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Kawasan Jawa-Bali berfungsi sebagai pusat utama bagi industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif Indonesia, memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2045. Sebagai tulang punggung aktivitas manufaktur dan perdagangan, kawasan ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam konteks persaingan global dan regional yang semakin ketat, Jawa Barat dan Jabodetabek memegang peranan kunci dalam meningkatkan kontribusi masing-masing sektor strategis ini.

Jawa Barat telah lama dikenal sebagai pilar industri nasional, terutama dalam bidang tekstil, otomotif, dan elektronik. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan akan praktik industri yang berkelanjutan, ada potensi yang signifikan untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja guna mendongkrak efisiensi dan daya saing industri di wilayah ini. Di sisi lain, sektor pariwisata Jawa Barat, yang menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya, memerlukan upaya promosi yang intens serta pengembangan infrastruktur pariwisata untuk memperkuat daya tarik destinasi.

Sementara itu, Jabodetabek, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, menyediakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, yang ditunjukkan oleh berkembangnya start-up dan komunitas kreatif. Dukungan berupa akses ke permodalan, fasilitas inkubasi bisnis, dan pengembangan jaringan internasional sangat penting untuk mempercepat perkembangan sektor ini. Selain itu, posisi strategis Jabodetabek sebagai gerbang internasional untuk pariwisata bisnis dan rekreasi memerlukan integrasi sistem transportasi dan peningkatan fasilitas pariwisata untuk memberikan pengalaman berkualitas bagi pengunjung lokal maupun internasional.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih erat dan penerapan inovasi yang berkelanjutan, Jawa Barat dan Jabodetabek dapat memperkuat kedudukan mereka sebagai pusat industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif terkemuka, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah Jawa-Bali.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu strategis penting di kawasan Jawa-Bali, mengingat perannya sebagai pusat ekonomi dan sosial di Indonesia. Tata kelola yang efektif dan transparan adalah fondasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan

efisiensi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Di Jawa Barat, pelaksanaan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam mengelola dinamika sosial-ekonomi yang kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dan penggunaan anggaran daerah dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam e-governance dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat, memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan publik.

Sementara itu, kawasan Jabodetabek menghadapi tantangan dalam koordinasi antar-pemerintah daerah yang berbeda. Pengelolaan isu-isu lintas batas, seperti transportasi, lingkungan, dan penyediaan infrastruktur, memerlukan kerangka kerja kolaboratif yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan, dapat mendorong pendekatan yang lebih holistik dan integratif terhadap pembangunan regional.

Dengan menetapkan standar tinggi untuk praktik tata kelola pemerintahan di Jawa-Bali, pemerintah daerah dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan ini.

6. Perubahan Tatanan Sosial dan Budaya

Perubahan tatanan sosial budaya menjadi isu strategis mendasar dalam perencanaan pembangunan regional di kawasan Jawa-Bali, mengingat perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya di Indonesia. Globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi adalah faktor utama yang mendorong perubahan ini, menuntut adaptasi cepat dan strategi koheren untuk mengelola dampaknya pada kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Sebagai wilayah dengan keanekaragaman budaya yang tinggi, Jawa-Bali menghadapi tantangan dalam menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai budaya tradisional di tengah arus modernisasi yang kuat.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, Jawa Barat, perubahan tatanan sosial budaya terlihat dalam pergeseran pola interaksi sosial, dimana masyarakat semakin berorientasi pada kehidupan perkotaan yang mengutamakan efisiensi dan individualisme. Tantangan ini memerlukan strategi kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan modern tanpa mengabaikan elemen budaya tradisional yang menjadi identitas masyarakat setempat. Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal, melalui pendidikan dan penyertaan kearifan lokal dalam kurikulum serta promosi seni dan budaya, menjadi kunci dalam mempertahankan warisan budaya sambil mendorong inklusivitas sosial.

Lebih rinci, kawasan Jabodetabek, sebagai pusat urbanisasi dan migrasi penduduk, juga mengalami tekanan sosial budaya dengan meningkatnya keragaman etnis dan budaya. Perubahan demografis ini memerlukan kebijakan yang mendukung integrasi sosial dan harmonisasi budaya, mencegah potensi konflik, dan memperkuat kohesivitas sosial. Pembentukan ruang publik dan kegiatan budaya yang mendorong interaksi positif antar kelompok masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk menjembatani perbedaan dan memperkokoh persatuan di tengah keragaman. Diperlukan pendekatan yang tepat agar wilayah regional Jawa-Bali dapat tetap mempertahankan identitas budayanya yang kaya, sekaligus beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan sosial yang menantang.

7. Ketimpangan Utara dan Selatan

Ketimpangan antara wilayah utara dan selatan merupakan isu strategis yang signifikan di kawasan Jawa-Bali, mencerminkan disparitas dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap layanan publik. Wilayah utara umumnya lebih maju dan berkembang pesat, terutama di sepanjang pantura (pantai utara), yang menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi. Keberadaan pusat-pusat industri dan ekonomi di utara menjadikannya lebih terurbanisasi dan menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas, sedangkan wilayah selatan sering kali tertinggal dalam hal infrastruktur dan kesempatan ekonomi.

Di wilayah utara, akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya telah mendukung perkembangan ekonomi yang pesat. Ini menciptakan magnet bagi investasi dan tenaga kerja terampil. Sebaliknya, di wilayah selatan, yang topografinya lebih berbukit dan bergantung pada sektor pertanian, terbatasnya akses transportasi dan infrastruktur dasar menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya adalah adanya ketimpangan pendapatan dan kualitas hidup antara penduduk di kedua wilayah tersebut, yang memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi pembangunan yang berfokus pada pemerataan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah selatan. Investasi dalam transportasi yang menghubungkan wilayah selatan dengan pusat ekonomi di utara, serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata di selatan dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah selatan penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial ekonominya. Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif, Jawa-Bali dapat mengurangi kesenjangan utara-selatan, memastikan pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

3.2.4. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.10. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga kedepannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu. Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat. Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang kedepannya juga semakin kompleks permasalahan yang dihadapi.

Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa Bali. Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis Provinsi Jawa Barat untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. *Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor- sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu

pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

2. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga

meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

5. Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

3.2.5. Modalitas Kota Bogor

1. Jatidiri Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains

Dalam UU No 11 Tahun 2010, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya yang berbentuk benda materi seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang memerlukan pelestarian karena memiliki nilai yang penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Cagar budaya dapat menjadi simbol identitas suatu wilayah. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui fungsi cagar budaya penting bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Cagar budaya perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena wujudnya berupa benda maupun kawasan yang kemudian akan bisa hilang tergerus waktu atau karena ulah manusia apabila tidak dilindungi. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat penting dalam menjaga fungsi cagar budaya agar dapat menjaga warisan budaya yang menjadi tonggak sejarah.

Pada tahun 2011, Kota Bogor masuk dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia. Pada 2013, telah menyusun perencanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Kota Bogor, dan menetapkan kawasan Kebun Raya Bogor (KRB) dan Istana Bogor, permukiman Eropa, Kawasan Empang, kawasan Karsten Plan, dan Kawasan Pecinaan sebagai Kawasan pusaka.

Kota Bogor merupakan kota pusaka ilmu pengetahuan dengan berbagai pusat-pusat penelitian botani, satwa, dan geologi serta museum yang dimiliki. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memilih Bogor sebagai kota untuk keperluan penelitian dan riset terutama riset hayati tropika. Kota Bogor memiliki kebun raya tertua kedua di dunia setelah kebun raya di Inggris. Itu kenapa Kota Bogor sejak dahulu menjadi kota tujuan beberapa peneliti dan ilmuwan dunia. Penamaan Kota Bogor sebagai Kota Ilmu Pengetahuan tertera dalam buku Buitenzorgh Scientific Center.

Berstatus sebagai kota pusaka ilmu pengetahuan namun diketahui bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Persoalan utamanya adalah masih lebarnya jarak antara berbagai ilmu pengetahuan dengan masyarakat. Kondisi semakin tidak terjembatani terjadi karena minimnya ruang bersama yang mengakomodir berbagai komunitas sains, teknokrat dan masyarakat di Kota Bogor.

Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami kebesaran dan pengaruh pusaka-pusaka beserta pemaknaannya. Pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai sosial budaya ekonomi kedepan perlu ditingkatkan sehingga Kota Bogor sebagai kota pusaka ilmu pengetahuan pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bonus Demografi

Bonus demografi di Kota Bogor memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi ini terlihat dari populasi usia produktif yang tinggi dan populasi usia muda yang signifikan. Kota Bogor memiliki proporsi penduduk usia produktif yang cukup besar. Hal ini berarti terdapat potensi tenaga kerja yang melimpah yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagian besar dari populasi usia produktif di Kota Bogor adalah kaum muda yang berusia antara 15 hingga 35 tahun. Ini menciptakan peluang untuk inovasi dan dinamika dalam berbagai sektor, seperti industri kreatif dan teknologi.

Hal lain yang mendukung bonus demografi Kota Bogor sebagai modalitas Kota Bogor yaitu akses pendidikan yang meningkat. Kota Bogor memiliki akses pendidikan yang relatif baik, dengan banyaknya sekolah dan institusi pendidikan tinggi. Namun, kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja masih perlu terus ditingkatkan untuk memastikan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Pentingnya pengembangan program pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi semakin mendesak untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.

Populasi usia muda yang besar bisa menjadi motor penggerak industri kreatif dan teknologi di Kota Bogor, yang berpotensi menjadi sektor unggulan di era ekonomi digital. Kota Bogor memiliki potensi kewirausahaan di kalangan generasi muda bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan, akses ke modal,

dan dukungan kebijakan untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari bonus demografi.

Kota Bogor dapat memanfaatkan bonus demografi ini sebagai modalitas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan bonus demografi, diantaranya: peningkatan keterampilan dan pendidikan SDM, pelatihan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif dan teknologi, inovasi dalam sektor UMKM, pengembangan infrastruktur yang mendukung, kemitraan dengan sektor swasta, reformasi kebijakan dan regulasi pro-bisnis, peningkatan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, penguatan sektor ekonomi unggulan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Kondisi bonus demografi di Kota Bogor memberikan peluang besar, tetapi juga menuntut upaya serius dalam peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi ini bisa menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor.

3. Kota Bogor dalam Kontelasi Kawasan Aglomerasi Jabodetabek

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang kawasan aglomerasi, Kota Bogor menjadi salah satu wilayah sekitar yang menjadi fokus/ prioritas pembangunan yang perlu untuk disinkronisasi. Dengan demikian, perlu didorong peningkatan layanan dan sarana prasarana. Hal ini mengingat bahwa aglomerasi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, industri, perdagangan, dan transportasi. Salah satu tantangan yang harus dipersiapkan baik oleh Kota Bogor maupun daerah aglomerasi lainnya di sekitar DKI Jakarta yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang layak, serta layanan transportasi publik ramah lingkungan dan memperbanyak kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tidak hanya itu, dari sisi kebijakan pun perlu untuk disinkronisasi agar setiap wilayah yang masuk dalam kawasan aglomerasi untuk menyelesaikan berbagai isu/ permasalahan wilayah secara bersama-sama.

Letak geografis Kota Bogor sebagai *hinterland* atau penyangga Jakarta sebagai *epicentrum* dalam sisi pertumbuhan dan dinamisasi ekonomi di Indonesia sedikit banyak juga memberikan pengaruh. Konektivitas Kota Bogor juga memiliki keunggulan dibandingkan wilayah sekitar Jakarta lainnya, dimana transportasi berbasiskan jalan (raya maupun tol) maupun berbasis rel (Kereta Rel Listrik/ KRL) telah masif digunakan. Setiap harinya terdapat 50 ribu hingga 75 ribu *commuter* yang bergerak dari Kota Bogor ke Jakarta menggunakan kereta rel listrik (KRL), dimana jumlah tersebut masih belum termasuk masyarakat dan warga yang menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan darat lainnya.

Dari total luas wilayah pemukiman yang masuk dalam RTRW Kota Bogor, 45 persen sudah padat oleh pemukiman-pemukiman, baik yang tertata dan dibangun oleh *developer* maupun pemukiman yang tidak teratur dan dibangun

oleh warga sendiri. Jika melihat kasus kota hampir di seluruh dunia pada negara lain, sekitar 70 persen perkotaan menjadi wilayah urban terlepas karena faktor urbanisasi atau memang wilayah tersebut yang membentuk kotanya sendiri menjadi urban. Persoalan ini pun dihadapi oleh Kota Bogor saat ini dimana pertumbuhan penduduk meningkat akan berdampak pada meningkatnya wilayah wilayah *slum area*. Dalam menghadapi tingginya pergerakan masyarakat dengan peningkatan jumlah kendaraan namun akses jalan tidak banyak bertambah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kota Bogor diantaranya dengan melakukan penataan pedagang kaki lima dengan pembinaan, pembenahan sistem transportasi, menata kota dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta melakukan mitigasi dan survei untuk mengantisipasi bencana alam sehingga mempunyai ketahanan terhadap bencana alam.

Dalam rangka mempermudah mobilitas warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bogor juga perlu untuk terus meningkatkan kerjasama bidang transportasi. Mengingat bahwa kapasitas moda transportasi yang ada seperti kereta komuter masih terbatas dan masih banyak masyarakat yang menggunakan tol Jagorawi, sehingga jika didukung dengan penyediaan bus sambungan akan sangat efektif. Pemerintah Kota Bogor yang memiliki Perumda Trans Pakuan bersama dengan PT Transjakarta perlu untuk terus melakukan koordinasi untuk peningkatan efektivitas penggunaan transportasi melalui jalan tol dengan penyediaan transportasi umum yang nyaman dan aman agar dapat menurunkan penggunaan kendaraan pribadi.

3.2.6. Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Bogor

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD merujuk pada masalah atau tantangan utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Isu ini biasanya terkait dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dapat muncul akibat kegiatan pembangunan. Identifikasi isu strategis bertujuan untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dipertimbangkan dalam setiap rencana pembangunan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah isu strategis KLHS RPJPD Kota Bogor 2025-2045.

Gambar 3.11. Isu strategis KLHS RPJPD Kota Bogor 2025-2045

Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan, Kesehatan, dan Pendidikan Masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pilar utama yang harus diperkuat dalam pembangunan Kota Bogor. Hal tersebut mencerminkan tantangan yang kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan komprehensif. Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Bogor menunjukkan tren penurunan dari tahun 2005 hingga 2022, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan kemiskinan hingga 7,24 persen. Meskipun upaya pemulihan berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,67 persen pada tahun 2022, tantangan besar masih ada, terutama dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya. Ketidakmampuan untuk menyediakan layanan dasar ini secara merata mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan ekonomi, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan masih membutuhkan perhatian serius. Pada aspek

Dalam aspek kesehatan, beberapa indikator menunjukkan kondisi yang memerlukan perbaikan segera. Penurunan skor pola pangan harapan di Kota Bogor mencerminkan akses dan kualitas gizi yang belum memadai bagi sebagian masyarakat. Selain itu, peningkatan angka kematian bayi serta pelayanan kesehatan yang belum optimal bagi ibu hamil dan bersalin menggarisbawahi perlunya peningkatan layanan kesehatan yang lebih efektif. Untuk menghadapi tantangan ini, Kota Bogor perlu menerapkan kebijakan yang terintegrasi dan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara merata, terutama bagi kelompok rentan. Belum optimalnya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan

Anak Usia dini (PAUD) juga masih menjadi permasalahan yang terjadi di Kota Bogor

Peningkatan dan Pemerataan Layanan Akses Air Bersih dan Sanitasi. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis tersebut mencerminkan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius. Meskipun akses layak terhadap air bersih dan sanitasi telah mencapai 70,9%, masih ada banyak permasalahan yang harus dilakukan untuk memastikan layanan ini optimal bagi seluruh masyarakat. Salah satu masalah yang signifikan adalah rendahnya capaian akses aman terhadap air limbah domestik, yang baru mencapai 3,8%. Sementara itu, 26,1% warga Kota Bogor masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yang menunjukkan masih tingginya kebutuhan akan layanan sanitasi yang memadai. Ketidakmerataan akses ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan yang serius jika tidak segera ditangani.

Selain itu, upaya peningkatan layanan air bersih dan sanitasi perlu dibarengi dengan strategi pengelolaan sampah yang efektif. Mengingat kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas di masa mendatang, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pengurangan sampah dari sumber melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pendekatan ini tidak hanya akan membantu mengurangi tekanan pada TPA tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Unggulan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi tujuan penting bagi Kota Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Bogor mengalami penurunan negatif selama masa pandemi Covid-19, dengan angka -2,32% pada tahun 2020 dan -1,57% pada tahun 2021. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 2,57%, angka ini masih berada di bawah target nasional Indonesia Emas 2045 yang mengharapkan pertumbuhan sebesar 5,50%. Belum optimalnya pemanfaatan sektor-sektor unggulan yang dimiliki Kota Bogor. Sektor-sektor seperti jasa pendidikan, kesehatan, real estat, serta pengadaan listrik dan gas memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengurangan Tingkat Kesenjangan di Kota Bogor. Kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi tantangan yang signifikan di Kota Bogor. Upaya pengurangan kesenjangan ini perlu dilakukan melalui kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Ketimpangan ini tercermin dalam capaian Indeks Gini, yang hingga saat ini belum mencapai target yang diinginkan. Indeks Gini yang tinggi menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bogor masih belum merata, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, sementara sebagian lainnya masih berada dalam kondisi ekonomi yang lebih lemah. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan yang berketahanan iklim dan rendah karbon di Kota Bogor menjadi sangat krusial dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin nyata. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, yang hanya mencapai 4,24%, jauh dari yang dibutuhkan untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Keterbatasan RTH ini semakin memperburuk kondisi lingkungan kota, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang diperkirakan akan semakin intensif. Kota Bogor berpotensi mengalami dampak serius dari perubahan iklim, yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warganya.

Selain itu, peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 2,50% per tahun menjadi salah satu indikasi bahwa Kota Bogor sedang menuju jalur yang tidak berkelanjutan. Hampir 90% dari total emisi GRK di kota ini berasal dari sektor energi, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Untuk mencapai pembangunan yang berketahanan iklim dan rendah karbon, Kota Bogor perlu mengambil langkah-langkah konkret, termasuk memperluas RTH, mengurangi emisi dari sektor energi melalui penggunaan energi terbarukan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung ketahanan iklim. Dengan demikian, Kota Bogor dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Pembangunan di Kota Bogor harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, agar keberlanjutan alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Peningkatan aktivitas ekonomi dan urbanisasi tidak boleh mengabaikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu masalah utama adalah defisit ketersediaan air, yang semakin memperburuk tekanan terhadap sumber daya yang terbatas dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Peningkatan permintaan terhadap air, seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, semakin memperparah defisit ini dan menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, meningkatnya daya tarik sektor-sektor jasa di Kota Bogor, seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan real estat, juga berpotensi menambah beban terhadap daya dukung lingkungan. Pertumbuhan sektor-sektor ini membawa dampak positif terhadap perekonomian, namun juga memerlukan perhatian dalam hal pengelolaan dampak lingkungan, seperti peningkatan konsumsi energi, limbah, dan penggunaan sumber daya lainnya. Untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, Kota Bogor harus menerapkan strategi yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Ini termasuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperbaiki infrastruktur pengelolaan air, serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan sektor-sektor jasa untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.

3.2.7. Isu Strategis Kota Bogor

Isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor juga diselaraskan dengan isu strategis pada level Global, Nasional, Regional Jawa-Bali, Provinsi Jawa Barat, dan KLHS RPJPD. Penyelarasan tersebut merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pembangunan Kota Bogor tidak hanya relevan secara lokal, namun juga selaras dengan kebijakan dan program yang ditetapkan pada tingkat global, nasional, dan regional. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pada tingkat diatasnya tersebut. Selain itu, penyelarasan RPJPD Kota Bogor mempertimbangkan dinamika dan isu-isu yang dihadapi oleh Regional Jawa-Bali dan Provinsi Jawa Barat. Kerjasama regional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan koordinasi dalam menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas, seperti permasalahan transportasi, lingkungan, dan spasial. Dengan mengadopsi pendekatan pembangunan yang holistik dan kolaboratif, Kota Bogor dapat berkontribusi pada penciptaan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Jawa-Bali.

Disamping itu, penyelarasan terhadap isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan mengingat KLHS merupakan alat yang krusial untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan rencana pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh, RPJPD Kota Bogor dapat dirumuskan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Melalui proses penyelarasan isu strategis yang efektif ini, diharapkan Kota Bogor dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah matriks penyelarasan isu strategis.

Tabel 3.3. Penyelarasan Isu Strategis Global, Nasional, Regional Jawa-Bali, Provisi, dan KLHS RPJPD

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Jawa-Bali	Isu Provinsi	KLHS RPJPD	Rumusan Isu Strategis RPJPD
Demografi Global	Bonus Demografi	Daya saing SDM	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan, Kesehatan, dan Pendidikan Masyarakat	1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Persaingan Sumber Daya Alam					
Urbanisasi Dunia		Perubahan tatanan sosial dan budaya			
Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Bencana	Perubahan Iklim dan Bencana	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan		2. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global
Persaingan Sumber Daya Alam	Ekspansi Pembangunan	Tekanan pembangunan	Keberlanjutan Penataan Ruang	Pembangunan yang berketahanan iklim dan rendah karbon	3. Optimalisasi Penataan Ruang dan Sistem Permukiman yang Cerdas dan Berkelanjutan
				Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
Tata Kelola Keuangan Global	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Tata kelola pemerintahan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		4. Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik
Disrupsi Teknologi					
Pertumbuhan Kelas Menengah	Ekonomi hijau dan Biru	Pusat industri, pariwisata dan ekonomi kreatif	Green dan blue economy serta pembangunan inklusif	Pengurangan Tingkat Kesenjangan di Kota Bogor	5. Sistem Ekonomi Sirkuler Perkotaan
Geopolitik dan Geoekonomi					
Disrupsi Teknologi	Pemindahan Ibukota	Perubahan Peran Jakarta	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Unggulan Berkelanjutan.	6. Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial
Perdagangan Internasional	Konektivitas dan infrastruktur dasar	Ketimpangan utara dan selatan		Peningkatan dan Pemerataan Layanan Akses Air Bersih dan Sanitasi	7. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat pada masa depan daripada yang pernah dialami sebelumnya. Megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi memicu terjadinya perubahan tersebut. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Situasi yang lebih menantang juga perlu diantisipasi dengan semakin berkembangnya teknologi dan berpotensi menggantikan peran manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong sumberdaya manusia terutama di Kota Bogor untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Perkembangan teknologi harus dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia secara strategis untuk dapat mendorong kemajuan dalam peningkatan sumberdaya manusia. Dengan mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi membuat perolehan informasi menjadi semakin bervariatif dan mudah yang berguna untuk dijadikan sumberdaya intelektual bagi masyarakat. Namun tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan sumber informasi dalam jumlah yang besar secara efektif dan andal.

Kota Bogor memiliki bonus demografi, yang dicirikan dengan dominasi penduduk usia produktif dan rendahnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan, periode bonus demografi akan lebih panjang untuk dinikmati karena hingga tahun 2045. Bonus demografi memiliki periode waktu (*window of opportunity*) yang terbatas sehingga perlu manfaatkan secara optimal. Situasi bonus demografi dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor namun juga bisa memberikan dampak negatif jika tidak mampu menyiapkan secara optimal. Bonus demografi tidak serta merta mewujud pada manfaat riil yang diterima melainkan membutuhkan upaya sehingga bonus ini dapat benar-benar berbuah positif seperti pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Menggunakan bahasa (Chen et al. (2023), bonus demografi perlu dikapitalisasi untuk dapat meraih manfaat yang ditawarkannya.

Adapun hal yang perlu disiapkan dalam rangka menyambut bonus demografi yakni meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan daya saing pun menjadi keniscayaan bagi Kota Bogor karena hanya melalui tenaga kerja yang berdaya saing maka bonus demografi dapat benar-benar menjadi bonus.

Daya saing sumber daya manusia di suatu daerah dicirikan dengan nilai IPM yang tinggi. IPM Kota Bogor saat ini berada di rentang status IPM tinggi menunjukkan bahwa penduduk Kota Bogor dapat mengakses dengan baik hasil pembangunan Kota Bogor dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan

pendapatan. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Bekasi (83,06); Kota Depok (82,53); dan Kota Tangerang (80,98), Kota Bogor masih perlu meningkatkan kinerjanya.

Dari sisi sektor ketenagakerjaan, masalah utama yang teridentifikasi adalah masih rendahnya daya saing tenaga kerja. Masalah ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas tenaga kerja akibat keterampilan dan pengetahuannya yang terbatas. Rendahnya daya saing ini kemudian menyebabkan tenaga kerja menggeluti sektor informal yang tidak menuntut keterampilan dan pengetahuan khusus. Terdapat korelasi antara pendidikan dan daya saing tenaga kerja. Pencari kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan memberikan akses ke jaringan profesional yang lebih luas.

2. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global

Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global menjadi masalah yang *urgent* di tengah tantangan yang dihadapi oleh berbagai faktor. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kendala dalam pemakaian sumber daya energi konvensional tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi krusial untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan kota yang berkelanjutan.

Tingkat kesadaran yang masih rendah di kalangan para pihak terhadap perubahan dan kelestarian lingkungan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan resiliensi. Diperlukan edukasi yang lebih intensif dan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan urgensi perlindungan lingkungan.

Di sisi lainnya, kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi risiko yang perlu segera diatasi. Meskipun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 memiliki tren yang menurun, artinya Kota Bogor relatif aman. Sebagai upaya untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi maka Kota Bogor juga perlu mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*), infrastruktur tangguh, dan perencanaan tata kota yang adaptif menjadi langkah penting dalam memitigasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan resiliensi bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi juga merupakan investasi dalam menjaga keberlanjutan kota-kota kita di tengah tantangan bencana dan perubahan iklim global yang semakin kompleks.

3. Optimalisasi Penataan Ruang dan Sistem Permukiman yang Cerdas dan Berkelanjutan

Masalah optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan menjadi sangat relevan seiring dengan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan utilitas dasar bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih, pasokan listrik, serta pengelolaan limbah yang efisien merupakan elemen fundamental yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Namun, fenomena pertumbuhan populasi yang pesat mengingat jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2022 mencapai 1.114.018 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07 persen sering kali tidak diimbangi dengan investasi infrastruktur yang memadai, sehingga berpengaruh pada keterbatasan dalam pemenuhan utilitas dasar. Dalam konteks ini, penataan ruang yang cerdas dapat memastikan distribusi yang merata dari utilitas dasar ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan infrastruktur serta penerapan teknologi inovatif dalam penyediaan utilitas yang berkelanjutan, agar permukiman di Kota Bogor dapat memenuhi standar hidup yang layak.

Selanjutnya, penerapan konsep *smart city* di Kota Bogor belum sepenuhnya optimal, meskipun telah ada beberapa inisiatif yang diimplementasikan. Kinerja *smart city* yang kurang optimal menunjukkan perlunya sebuah integrasi yang lebih baik dari teknologi informasi dalam pengelolaan kota, khususnya dalam bidang transportasi, pemantauan kualitas lingkungan, dan pengumpulan data waktu nyata untuk pengambilan keputusan yang informasional. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang inovatif dan responsif terhadap tantangan-tantangan perkotaan yang kompleks. Pengelolaan kota dengan pendekatan menggeser pola pemerintahannya menjadi *citizen centric* dan *stakeholders centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dengan warga kota. Pola tersebut melahirkan interaksi dua arah yang akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.

Selain itu, isu lingkungan yang terkait dengan pengurangan tutupan lahan hutan sebesar 1,16% (2014) dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya mencapai 4,24% (2022) di Kota Bogor menambah dimensi vital pada permasalahan penataan ruang. Pengurangan luas hutan tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga memperburuk kualitas udara serta berpotensi meningkatkan risiko *urban flooding*. Oleh karena itu, perlunya perlindungan dan rehabilitasi RTH dalam perencanaan tata ruang menjadi krusial. RTH tidak hanya berkontribusi pada estetika kota, tetapi juga penting untuk kesehatan mental dan fisik masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH menjadi sangat diperlukan.

Kurangnya pengembangan ruang untuk *new town* dan infrastruktur transportasi massal yang efektif memperlihatkan terdapatnya kesenjangan dalam strategi penataan ruang yang holistik. Proses pengembangan kawasan baru yang

berkelanjutan harus disertai dengan pemetaan yang cermat serta peningkatan infrastruktur transportasi publik yang komprehensif. Optimalisasi pengembangan jalur transportasi massal akan mendukung pengurangan kemacetan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Kota Bogor dapat mencapai visi pembangunan berkelanjutan dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

4. Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik

Wilayah Kota Bogor yang luas dengan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang kian kompleks. Pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena orientasi utama pelaksanaan pemerintahan adalah pelayanan prima kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi menjadi dua hal yang harus ada dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya dinamisme kehidupan masyarakat.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan selalu masuk dan menjadi isu strategis yang dicermati oleh setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025 - 2045, kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi hal yang dicermati dengan seksama. Dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola, dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah dengan penerapan SPBE terbaik di Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional, tahun 2022 merupakan fase penguatan layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu meningkatkan tata kelola untuk mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023.

Meskipun demikian, tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan SDM, resistensi terhadap perubahan, hingga tantangan teknologi dan partisipasi publik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan pemerintahan serta kerjasama yang erat dengan masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, Kota Bogor dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Sistem Ekonomi Sirkuler Perkotaan

Urgensi sistem ekonomi sirkuler perkotaan semakin penting mengingat beberapa kendala yang perlu segera diatasi. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini karena jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatkan kesadaran tersebut, dapat tercipta siklus ekonomi yang lebih efisien dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan daur ulang. Namun, tantangan muncul ketika penyediaan sarana dan prasarana persampahan masih belum optimal akibat terbatasnya lahan. Diperlukan upaya serius dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan untuk mendukung transisi menuju sistem ekonomi sirkuler.

Selain itu, kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan juga menjadi perhatian utama. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang efektif melibatkan peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah, seperti penggunaan metode daur ulang yang lebih efisien dan pengurangan sampah di sumbernya, menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan ekonomi sirkuler. Oleh karena itu, sistem ekonomi sirkuler Kota Bogor bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Wujud dukungan pemerintah Kota Bogor dalam pengembangan ekonomi sirkuler dibangun 30 (tiga puluh) Tempat Pengolahan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (TPS3R) yang berfungsi untuk mengurangi timbulan sampah Kota

Bogor dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Keberadaan TPS3R ini merupakan upaya Pemerintah kota (Pemkot) Bogor dalam menangani sampah dari hulu ke hilir untuk terus mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kerjasama Pemkot Bogor untuk mengolah sampah plastik terus dilakukan beberapa tahun terakhir, diantaranya dengan kolaborasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan WWF, *Plastic Smart Cities A Global city initiative to keep plastic out nature by 2030*, Rekan Nusantara Foundation, dan Sumpah Sampah. Contohnya pada TPS3R Mekarwangi Kota Bogor, sampah plastik yang dikumpulkan dipilih kembali untuk dipisahkan jenisnya, kemudian dicacah menggunakan mesin pencacah, sehingga berbentuk seperti serpihan plastik, setelah itu masuk pada proses pencetakan produk menggunakan mesin yang dibuat oleh Sumpah Sampah hasil karya pemuda di Bogor. Untuk tahap awal ini, TPS3R Mekarwangi sudah menghasilkan papan plastik yang bisa digunakan untuk *furniture* atau dekorasi dalam ruangan dan balok yang juga bisa menjadi kontruksi produk sudah melakukan MoU antara PT Jauhar Hidro Mekatron dengan Rekam Nusantara Foundation untuk pembelian produk dari TPS3R Mekarwangi sebagai bahan utama untuk pembuatan sumur resapan. Harapannya, dengan pemisahan sampah yang dapat didaur ulang menjadi produk baru yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dapat diduplikasi dan diadopsi menjadi kebijakan di daerah maupun tingkat nasional. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka dapat mendorong keberhasilan ekonomi sirkular atau keberhasilan dalam *green economy*. Namun demikian, tentunya perlu untuk dipetakan lebih lanjut pasar atau calon pembeli dari produk yang dihasilkan dari daur ulang agar masyarakat terus semangat dan konsisten menerapkan kegiatan ramah lingkungan.

Salah satu bentuk keberhasilan dari pengelolaan sampah di Kota Bogor, selama tahun 2023-2024 Kota Bogor mendapatkan Anugerah Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara berturut-turut. Anugerah Adipura di tahun 2024 tentunya merupakan penghargaan hasil kolaborasi yang terus dilakukan antara Pemkot Bogor bersama komunitas, warga, TNI-Polri, Forkopimda, sekolah-sekolah, kampus, pengusaha dan semua. Adipura itu sendiri merupakan instrumen kebijakan yang terus berkembang untuk mengapresiasi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih teduh dan berkelanjutan oleh Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Penghargaan adipura diharapkan dapat terus mendorong inovasi yang tak berhenti untuk menguatkan konsep *green economy*, sirkular ekonomi yang menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang betul-betul hijau dan ramah lingkungan.

6. Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial

Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang diusung dengan tagline "Indonesia Emas 2045". Indonesia menargetkan di tahun 2024 dapat menjadi negara maju dan memiliki peluang menjadi lima besar ekonomi dunia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat telah menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dengan menggunakan perencanaan, visi,

misi, dan strategi. Indonesia berkesempatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai salah satu potensi dan peluang untuk mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045. Selain itu, salah satu hal pokok yang akan menjadi acuan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan SDM yang bukan hanya unggul dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitasnya. Profil Indonesia 2045 menjadi peta jalan (*roadmap*) yang harus diimplementasikan oleh seluruh daerah, termasuk Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut. Sejalan dengan misi RPJPD Kota Bogor yaitu mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif. Produktif memiliki makna pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi sedangkan inklusif memiliki makna bahwa Pemerintah Kota Bogor tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan ekonomi.

Pemerintah pusat mengarahkan transformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan daya saing internasional yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi menjadi prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, Kota Bogor akan bertransformasi melalui pengembangan sektor ekonomi potensial. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam mencapai target perekonomiannya, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial, dampak pemindahan ibukota negara terhadap perekonomian Kota Bogor, masih tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran, pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi di bidang ekonomi yang perlu ditingkatkan, produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal, serta penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan.

Kota Bogor memiliki persoalan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial ditunjukkan dengan adanya 4 sektor yang memiliki pertumbuhan lambat dengan daya saing yang kurang baik pada profil pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Bogor. Sektor-sektor tersebut antara lain, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Akan tetapi, jika dilihat dari analisis LQ Kota Bogor menunjukkan bahwa terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis. Sektor basis terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor-sektor jasa seperti sektor perusahaan, keuangan, transportasi, kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu, Kota Bogor juga perlu mempertimbangkan upaya mempersiapkan transformasi di bidang ekonomi dengan mengoptimalkan kinerja UMKM dan ekonomi kreatif di masa mendatang.

Masih tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran menjadi persoalan lain di Kota Bogor mengingat upaya pemerintah daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan ekonomi. Kota Bogor selama tahun 2011 - 2023 dikategorikan memiliki ketimpangan rendah dan

sedang dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2023, gini ratio Kota Bogor sebesar 0,46. Permasalahan ketimpangan salah satunya dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah. Sementara itu, tingginya angka pengangguran terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor selama tahun 2010 - 2023 menunjukkan besaran yang sangat tinggi. Capaiannya selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam 3 wilayah dengan TPT tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2023. Capaian TPT Kota Bogor pada tahun 2023 yaitu sebesar 9,39 persen. Dalam mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bogor perlu berfokus pada peningkatan daya saing UMKM serta ekonomi kreatif agar mampu menciptakan lapangan kerja baru mengingat peluang kerja di sektor-sektor industri pengolahan dan jasa lainnya masih sangat terbatas.

Persoalan lainnya yaitu produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor terlihat dari data *share* net ekspor terhadap PDRB yang bernilai negatif. Selain itu, masih perlunya penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan di Kota Bogor. Transformasi ekonomi dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi potensial yang didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan yang berkualitas sehingga memiliki daya saing tinggi. Melalui kemampuan ini, Kota Bogor dapat memecahkan berbagai persoalan khususnya persoalan ekonomi dan mampu menghadapi tantangan di masa depan sebagai rangkaian upaya dalam mencapai cita-cita nasional.

Kota Bogor saat ini telah berkembang menjadi salah satu kota besar yang cukup strategis. Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 1 (satu) juta jiwa di tahun 2023, Kota Bogor memiliki juga letak yang strategis dan potensi perkembangan ekonomi yang kuat mengingat memiliki kedekatan dengan DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Indonesia. Jika melihat struktur demografi penduduk Kota Bogor yang berusia muda, dalam 10 tahun ke depan generasi muda saat ini berada di usia yang sangat produktif dan akan menempati posisi-posisi strategis sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan di Kota Bogor itu sendiri maupun Indonesia. Peluang ini tentunya perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan SDM yang produktif dapat mencapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045. Diantaranya dengan berbagai program pendidikan formal maupun non formal yang dapat dilakukan Pemkot Bogor. Ketersediaan sarana pendidikan yang merata, baik secara lokasi maupun kualitas juga dapat ditingkatkan.

Rencana pemindahan ibukota negara di Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara), tentunya turut membuat kedekatan Kota Bogor dengan ibukota negara menjadi tidak lagi dekat. Dimana hal ini tentunya dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja penduduk Kota Bogor yang biasa bekerja di Jakarta dan juga kedekatan secara administratif Kota Bogor dengan Pemerintah Pusat. Artinya bahwa, tantangan ke depan yang mungkin dihadapi adalah adanya lag lapangan pekerjaan dan juga lag administratif yang mungkin dapat menghambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kota Bogor.

7. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

Urgensi pembenahan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi semakin terasa, terutama di Kota Bogor, seiring dengan peningkatan volume pengguna kendaraan yang belum diimbangi oleh infrastruktur jalan yang memadai. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dengan menghambat laju pertumbuhan bisnis dan mobilitas, tetapi juga menciptakan kemacetan yang merugikan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kota Bogor, seperti banyak kota lainnya, menghadapi tantangan mobilitas yang kompleks, yang tidak hanya terbatas pada kepadatan lalu lintas, tetapi juga pada kurangnya integrasi dalam sistem transportasi.

Kemacetan yang terus meningkat bukan hanya menghambat produktivitas, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan yang disertai dengan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi menjadi suatu kebutuhan mendesak. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merancang solusi yang efektif, seperti peningkatan jaringan transportasi umum, pengembangan jalur sepeda, dan penerapan teknologi *smart city* untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih efisien. Hanya dengan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi, Kota Bogor dapat mengatasi tantangan mobilitasnya dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan nyaman bagi penduduknya.

Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan transportasi di Kota Bogor yaitu dengan dikembangkannya *Transit Oriented Development* (TOD) dimana pengembangan kota Bogor berfokus pada integrasi antara transportasi publik dan penggunaan lahan. Tujuan utama TOD adalah menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan transportasi publik, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kota Bogor, yang terkenal dengan kemacetan dan pertumbuhan penduduk yang cepat, penerapan TOD bisa menjadi solusi yang efektif. Sebagai salah satu tujuan utama komuter, Bogor memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan TOD. Kota Bogor memiliki akses yang baik ke transportasi publik, terutama melalui jalur kereta api (KRL Commuter Line) yang menghubungkan Bogor dengan Jakarta. Selain itu, ada rencana pengembangan LRT Jabodebek yang akan memperkuat konektivitas regional. Bogor memiliki beberapa pusat aktivitas seperti Stasiun Bogor, Kebun Raya Bogor, dan pusat-pusat komersial yang bisa dikembangkan sebagai hub TOD.

Pengembangan TOD memiliki beberapa manfaat bagi Kota Bogor, diantaranya: Dengan mengintegrasikan perumahan, perkantoran, dan fasilitas komersial di sekitar stasiun kereta api dan halte transportasi umum, TOD dapat mengurangi kebutuhan untuk perjalanan jarak jauh dengan mobil pribadi, sehingga mengurangi kemacetan, pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi juga akan menurunkan emisi polutan, TOD akan meningkatkan aksesibilitas penduduk ke berbagai fasilitas publik dan tempat kerja, sehingga mendorong partisipasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

daerah yang dikembangkan sebagai kawasan TOD biasanya mengalami peningkatan nilai properti, yang dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pengembangan TOD di Kota Bogor, diantaranya: Kota Bogor memiliki keterbatasan lahan, terutama di sekitar pusat kota dan stasiun-stasiun utama, Pengembangan TOD memerlukan investasi yang besar untuk infrastruktur transportasi dan pengembangan lahan sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah-swasta-masyarakat, TOD melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, pengembang, operator transportasi, dan masyarakat sehingga koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, serta adanya resistensi dari masyarakat terhadap perubahan besar dalam tata ruang dan penggunaan lahan.

Pengembangan TOD di Kota Bogor sebagai bagian dari inisiatif *smart city* tidak hanya akan meningkatkan efisiensi transportasi dan kualitas hidup, tetapi juga memajukan kota ke arah yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi, data, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Kota Bogor dapat menjadi contoh kota yang berhasil mengintegrasikan konsep TOD dengan prinsip-prinsip *smart city*.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Perumusan atas Visi, Misi Pembangunan Kota Bogor 20 tahun yang akan datang (2025-2045), telah melalui tahapan analisis dan forum diskusi terbatas melalui Focus Group Discussion (FGD) atas kondisi potensi atau modal dasar, permasalahan, ancaman dan peluang pembangunan Kota Bogor sampai tahun 2023 dan juga telaah pada dokumen pembangunan di level nasional maupun regional. Perumusan visi sebagai suatu pernyataan cita-cita atau impian Kota Bogor di masa depan guna menjamin kelestarian dan tujuan jangka panjang serta dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif.

4.1. Visi

4.1.1. Visi RPJPN

Visi Negara Indonesia Tahun 2025-2045 mengusung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan negara.

Gambar 4.1. Visi RPJPN 2025-2045

NKRI yang Bersatu:

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional

dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

NKRI yang Berdaulat:

1. Ketahanan: Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.
2. Kesatuan: Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai NKRI yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.
3. Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain, karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.
4. Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, kepercayaan, agama, dan politik maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

NKRI yang Maju:

1. Beradab: Indonesia memiliki karakter dan jati diri sebagai bangsa yang besar, memiliki sumber daya manusia yang unggul, berbudaya maju, serta mampu berkontribusi pada peradaban dunia.
2. Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

3. Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.
4. Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.
5. Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.
6. Adil: Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.
7. Berkarakter: Bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersumber dari jiwa Pancasila sehingga menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dalam berkebudayaan Indonesia.

NKRI yang Keberlanjutan:

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" mencakup aspirasi untuk membangun negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan sosial, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya. Implementasi visi Indonesia dijabarkan menjadi "Visi Indonesia Emas 2045" dengan mempertimbangkan modal dasar (kependudukan, modal dasar sosial-budaya, kekayaan alam serta kekuatan maritim, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 mengusung Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan.

Gambar 4.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

1. Termaju: Tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu:
   - Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian yang subur, tambang mineral yang kaya, atau potensi pariwisata yang menarik.
   - Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.
   - Investasi dalam infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang modern, energi yang handal, dan akses internet yang luas, dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
   - Memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau.
   - Menerapkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada hasil, termasuk dalam hal investasi sektor-sektor strategis, pengembangan potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdaya Saing Dunia: Memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumberdaya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang yaitu:

- Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi mencakup kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai faktor, seperti produktivitas yang tinggi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, akses yang luas terhadap pasar global, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Jawa Barat.
- Teknologi dan inovasi mampu menciptakan nilai tambah melalui penemuan baru, pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta penerapan teknologi terkini dalam berbagai sektor ekonomi. Ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, serta dukungan terhadap kewirausahaan dan ekosistem inovasi yang dinamis di Provinsi Jawa Barat.
- Sumberdaya Manusia mencakup kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat, serta pembangunan kemampuan soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, dan kolaborasi.
- Infrastruktur dalam Jangka Panjang mencakup akses yang lancar terhadap transportasi, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, serta fasilitas publik yang berkualitas. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang modern dan efisien menjadi kunci untuk menjaga daya saing suatu negara dalam jangka panjang.

3. Berkelanjutan: Kelestarian sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

   Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan, praktik pertanian dan industri yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, investasi dalam energi terbarukan, perlindungan habitat alami, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Dengan mengutamakan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, dapat dipastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Provinsi jawa Barat tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

4.1.3. Visi RPJPD Kota Bogor 2025-2045

Berdasarkan visi nasional Indonesia dan Provinsi Jawa Barat, serta mengenali karakteristik potensi wilayah (modal dasar) Kota Bogor kedepan, diperoleh sintesa keterkaitan penerjemahan visi dan misi nasional serta Provinsi Jawa Barat dengan visi dan misi Kota Bogor kedepan yaitu sebagai berikut:

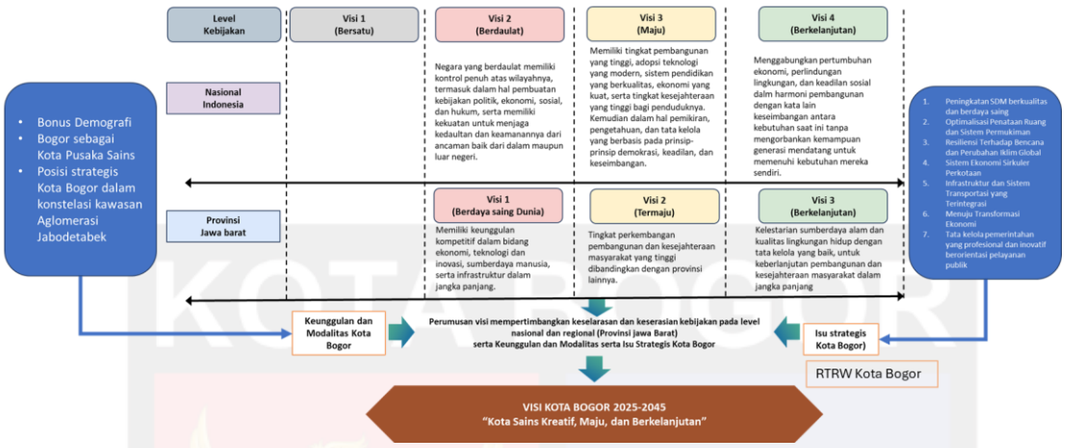

Gambar 4.3. Alur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan keselarasan dan keserasian kebijakan pada level nasional dan regional (provinsi Jawa Barat) serta faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, serta didasarkan pada permasalahan utama dan berbagai isu strategis pembangunan. Berdasarkan hasil analisa berbagai isu-isu tersebut, maka ditetapkan Visi Kota Bogor 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

"Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada tahun 2045, Kota Bogor memiliki harapan menjadi salah satu kota sains yang mengandalkan potensi ekonomi kreatif untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat menyamai taraf hidup di negara maju dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Visi Kota Bogor 2025-2045 sebagai "Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan" dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif

Konsep Kota Sains Kreatif umumnya mengacu pada sebuah kota yang memprioritaskan dan mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan ilmiah sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam visi ini, Kota Bogor berperan sebagai pusat yang menginspirasi, mendukung, dan memberdayakan para pemikir, peneliti, dan pengusaha untuk menciptakan

solusi-solusi baru yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kota Bogor menguatkan modalitas sebagai kota pusaka dan awal berkembangnya ilmu pengetahuan modern Indonesia. Berbagai pusat-pusat penelitian botani, satwa, dan geologi serta museum yang dimiliki menjadi modal dasar dalam pembangunan selama 20 tahun mendatang. Pemerintah Kota Bogor menjadi lokomotif untuk memastikan tidak adanya jarak antara ilmu pengetahuan dengan masyarakat dengan menciptakan berbagai ruang bersama yang mengakomodir berbagai komunitas sains, teknokrat dan masyarakat di Kota Bogor. Kedepan Kota Bogor semakin memahami kebesaran dan pengaruh pusaka-pusaka beserta pemaknaannya sehingga pada gilirannya jati diri Kota Bogor sebagai kota pusaka ilmu pengetahuan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Bogor juga fokus pada penciptaan lingkungan yang mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga ilmiah, universitas, industri kreatif, dan bisnis. Mereka menciptakan ruang-ruang kolaboratif, inkubator, dan pusat inovasi untuk memfasilitasi pertukaran ide, penelitian bersama, dan pengembangan produk atau layanan yang inovatif. Kota Bogor menjadi supporting sistem yang mendukung agenda-agenda provinsi dan Kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.

Pengembangan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif didukung dengan adanya berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang mewadahi dan menunjang perkembangan sains. Langkah ini memastikan adanya akses terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan penemuan baru.

Selanjutnya, dalam bidang kreativitas, Kota Bogor diunggulkan dengan berbagai potensi yang sudah ada. Selama beberapa tahun terakhir, Kota Bogor telah menunjukkan potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, terutama pada subsektor kuliner, kriya, dan fesyen. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif.

Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan memanfaatkan platform digital, media sosial, dan teknologi informasi lainnya, mereka dapat meningkatkan visibilitas produk dan layanan mereka serta memperluas jangkauan pasar.

Dengan demikian, ekonomi kreatif Kota Bogor diarahkan untuk terus memegang prinsip berkeadilan dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik yang modern, serta sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan dan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian di Kota Bogor. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, Kota Bogor dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal dan menyumbang pada pembangunan yang berkelanjutan secara nasional.

Gambar 4.4. Elemen Pendukung Kota Bogor Sebagai Kota Sains Kreatif

Dalam melanjutkan upaya untuk mengembangkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, beberapa langkah strategis dapat diambil:

- Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi: Investasi dalam infrastruktur riset dan inovasi seperti laboratorium modern, pusat inovasi, dan inkubator bisnis akan memfasilitasi kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri. Hal ini akan mempercepat lahirnya ide-ide baru dan produk inovatif.
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Memperluas akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kota Bogor. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis, manajemen bisnis, dan kewirausahaan.
- Pengembangan Ekosistem Kreatif: Mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif dengan menyediakan ruang kerja bersama, galeri seni, pusat pertunjukan, dan pasar kreatif. Hal ini akan memberikan peluang bagi para seniman, desainer, dan pelaku industri kreatif lainnya untuk berkumpul, berkolaborasi, dan memamerkan karya-karya mereka.
- Dukungan Kebijakan dan Regulasi: Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif pajak, dan fasilitasi perizinan usaha. Kebijakan yang progresif dan ramah-inovasi akan mendorong investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
- Promosi dan Pemasaran Berbasis Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan dari sektor ekonomi kreatif Kota Bogor ke pasar lokal, nasional, dan internasional. Hal ini akan membuka peluang ekspansi pasar dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kreatif.
- Kolaborasi Antar-sektor dan Pihak-pihak Terkait: Mendorong kolaborasi aktif antara sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan ekonomi kreatif Kota Bogor. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat upaya bersama untuk mencapai visi Kota Sains Kreatif yang berkelanjutan.

2. Kota Bogor sebagai Kota Maju

Kota Bogor sebagai Kota Maju diwujudkan dalam Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi berbasis sains kreatif, masyarakat yang produktif dan kreatif berbasis teknologi serta berdaya saing global, infrastruktur berkualitas (*green and smart infrastructure*) yang terintegrasi dan inklusif, resilien, adaptif dan inovatif dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian budaya dan lingkungan. Kota Bogor sebagai *smart city* telah dikembangkan dalam beberapa dimensi, diantaranya:

1) *Smart Governance* yang diwujudkan melalui perbaikan pelayanan publik, transparansi, keamanan, dan ketertiban umum;
2) *Smart Branding* yang dilakukan melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah secara lokal, nasional, dan global;
3) *Smart Economy* melalui berbagai kemudahan untuk meningkatkan peluang usaha, sumber daya dan permodalan;
4) *Smart Living* dengan tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien;
5) *Smart Society* melalui penciptaan ekosistem masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, dan interaktif, dan
6) *Smart Environment* yang diwujudkan dengan pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan pelestarian alam.

Kota Bogor akan terus dikembangkan menjadi Kota Pintar (*Smart City*) inovatif, tangguh, modern, dan berbudaya dengan mengedepankan pengembangkan infrastruktur yang berkualitas (*green and smart infrastructure*) serta sistem transportasi terintegrasi. Hal ini menjadi modal bagi Kota Bogor untuk dapat terus berkembang dan menjamin kemudahan bagi masyarakat Kota Bogor. Selain itu, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi Kota Bogor untuk terus mengembangkan perekonomian yang lebih baik dan maju.

3. Kota Bogor sebagai Kota Berkelanjutan

Bogor sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkomitmen mendorong pembangunan daerah berkelanjutan. Aspek keberlanjutan menjadi penting untuk menjaga agar setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan selalu memperhatikan keberimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan tetap mengedepankan sumberdaya kepusakaan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kota juga telah mempertimbangkan agar tidak mengganggu generasi berikutnya dalam menjalankan kehidupannya. Kota Bogor terus memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga keberadaannya generasi di masa kini dan masa yang akan datang.

Visi RPJPD Kota Bogor tahun 2025-2045 telah selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031. Komponen Visi Kota Sains Kreatif dan Maju merupakan penjabaran dari kota jasa dan permukiman dimana ke depannya Kota Bogor mengalami transformasi dan pengembangan dari kota jasa menjadi kota Sains Kreatif. Kota Sains Kreatif yang dimaksud akan memberikan nilai tambah dari kota jasa. Kemudian komponen Visi "Berkelanjutan" merupakan

perwujudan jati diri Kota Bogor sebagai kota pusaka yang berwawasan lingkungan. Adapun skema penyelarasan antara RPJPD dan RTRW Kota Bogor seperti pada gambar berikut ini.

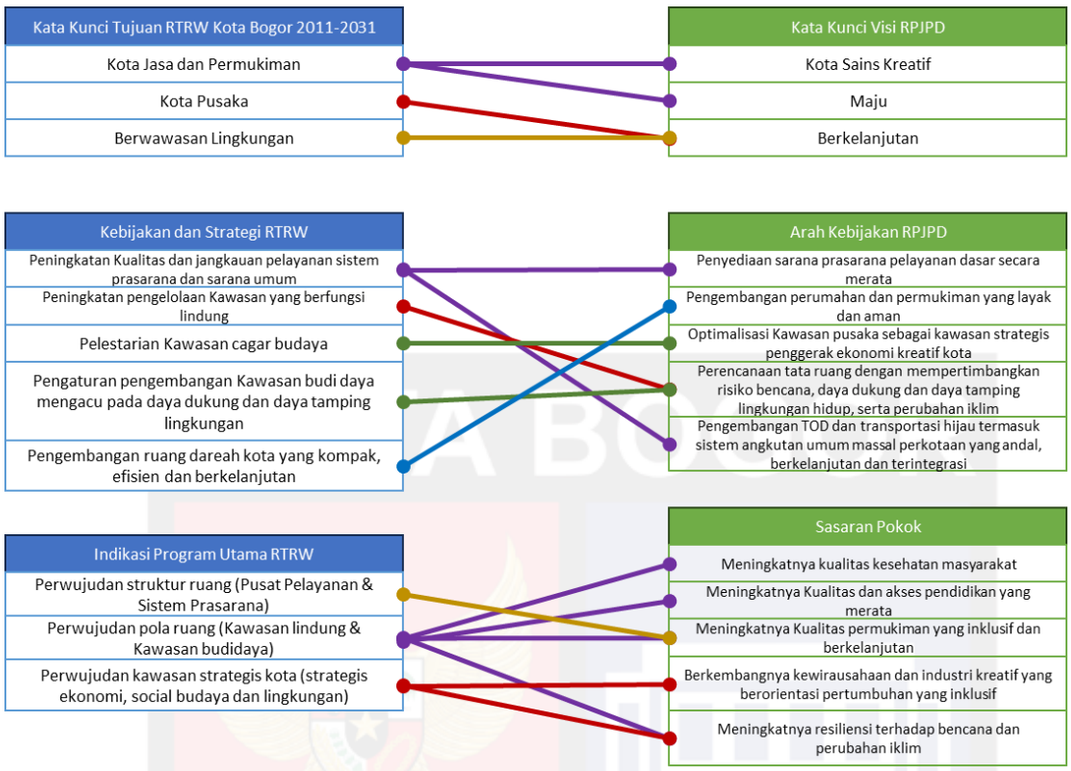

Sumber: hasil olahan Bapperida

Gambar 4.5. Keselarasan RPJPD dengan RTRW Kota Bogor

Visi Kota Bogor 2025-2045 dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa sasaran visi yang perlu dicapai yaitu (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, (3) Daya saing sumber daya manusia meningkat, (4) Daya saing kota yang meningkat dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

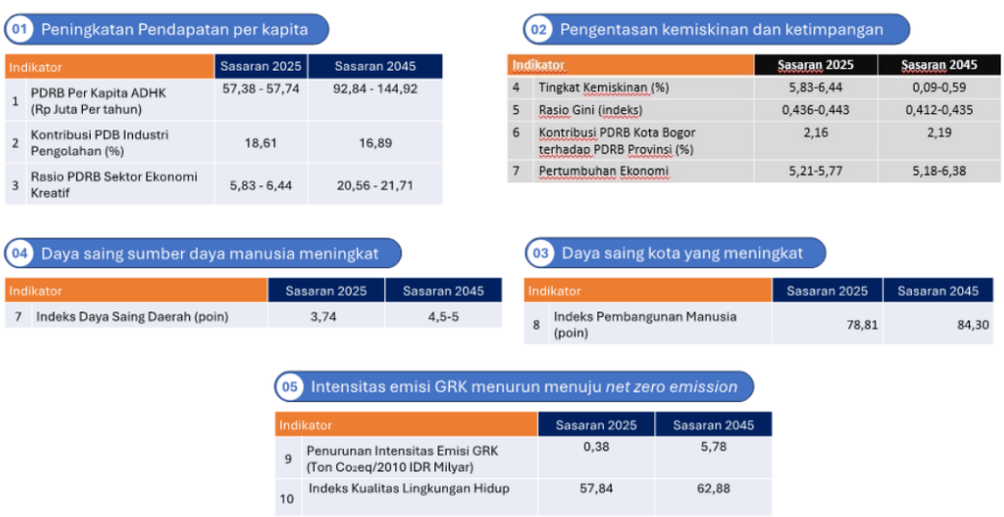

Gambar 4.6. Lima sasaran visi Kota Bogor 2025-2045

Sasaran pertama, Peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran pertama untuk menyamai pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pada level nasional ditargetkan sekitar US$ 23.000 - 30.300 pada tahun 2045 dan masuk dalam lima besar ekonomi di dunia. Kota Bogor memiliki target capaian PDRB per

kapita di tahun 2045 sebesar Rp 92,84 - 144,92 juta. Selain itu, peningkatan PDRB per kapita utamanya didorong peningkatan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 16,89 % juga didukung dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang mencapai 495,56. Dengan kekhasan dan kearifan lokal yang dimiliki Kota Bogor menjadi modal dalam pengembangan sektor industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Dalam hal ini, pendekatan pengembangan industri yang disesuaikan dengan potensi daerah juga akan dilakukan. Beberapa sentra IKM Kota Bogor yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan misalnya alas kaki di Bogor Selatan, kampung batik dan kerajinan, tepung tapioka, pakaian, tape dan sebagainya.

Sasaran kedua adalah Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Sejalan dengan perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang, maka kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat Kota Bogor juga terus meningkat. Harapannya, kemiskinan juga akan terus mengalami penurunan, dimana pada level nasional Tingkat kemiskinan di tahun 2045 menuju 0 persen pada kisaran 0,09-0,59 persen. Ketimpangan pendapatan juga akan terus mengalami penurunan dengan rasio gini Kota Bogor sebesar 0,412 - 0,435. Semakin berkembangnya ekonomi kreatif dan industri di Kota Bogor juga akan turut meningkatkan kontribusi ekonomi Kota Bogor di level provinsi yang ditunjukkan dengan target kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap PDRB Provinsi sebesar 2,19 persen di tahun 2045.

Sasaran ketiga adalah Peningkatan daya saing sumber daya manusia meningkat. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan peningkatan daya saing sumber daya manusia yaitu Indeks Modal Manusia. Indeks ini digunakan sebagai indikator yang mampu menggambarkan kualitas sumberdaya manusia yang terus meningkat dan semakin merata yang dapat ditempuh melalui peningkatan berbagai aktivitas seperti pemerataan pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, serta peningkatan kesehatan masyarakat Kota Bogor. Pada tahun 2045, Kota Bogor ditargetkan memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,3.

Sasaran keempat adalah daya saing kota yang meningkat ditandai dengan indeks daya saing daerah (IDSD). Indeks daya saing daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana Kota Bogor mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IDSD mencerminkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi daya tarik dan produktivitas suatu daerah. Pada tahun 2045, Kota Bogor ditargetkan memiliki nilai IDSD sebesar 4-4,5.

Sasaran kelima adalah Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sebagai upaya dan komitmen Kota Bogor dalam mendorong Pembangunan berkelanjutan dengan penerapan prinsip ramah lingkungan, Kota Bogor berprinsip untuk menurunkan intensitas emisi GRK. Pada tahun 2045, emisi GRK yang dihasilkan Kota Bogor turun menjadi 75,84 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor meningkat menjadi 62,88. Hal ini menunjukkan komitmen dan kontribusi konkrit Kota Bogor untuk mendukung net zero emission Indonesia pada tahun 2060.

Tabel 4.1. Penyelarasan sasaran Visi Kota Bogor 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KAB/KOTA 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran 2025	Sasaran 2045	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran 2025	Sasaran 2045	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran 2025	Sasaran 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB Per Kapita ADHK (Rp Juta Per tahun)	57,38 - 57,74	92,84 - 144,92
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19	186,06				
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,87 - 42,00	46,43 - 47,60		b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	18,61	16,89
										c. Rasio PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	5,83 - 6,44	20,56 - 21,71
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	0,09 - 0,59	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,83-6,44	0,09 - 0,59
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383-0,390	0,357 - 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0,436 - 0,443	0,412 - 0,435
						c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	10,77		c. Kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap PDRB Provinsi	2,16	2,19
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,96-5,37	5,07-6,27		d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21 - 5,77	5,18 - 6,38
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index(peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,87	5	Daya saing kota yang meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,74	4,5-5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	78,81	84,3
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK ((Ton Co2eq/2010 IDR miliar)	0,38	5,78
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,84	62,88

Tabel 4.2. Keterkaitan Visi, Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kota Bogor

Visi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
			Sasaran 2025	Sasaran 2045
Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	**1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)**	75,93	80,19
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
		b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	19	3
		c. Prevalensi Stunting	15,93	4,19
		3. Penanganan Tuberkulosis:		
		a. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	91	98
		b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	91	98
		c. Incidence rate HIV/ AIDS	31	10
		4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,57	100
	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang merata	**5. Hasil pembelajaran**		
		Rata -rata Nilai PISA (Membaca, Matematika dan Sains)		
		a. Kemampuan Literasi	63,272	80-85
		b. Kemampuan numerasi	51,464	80-85
		c. Rata-rata Lama Sekolah	10,65	14,16- 15,00
		d. Harapan Lama Sekolah	13,49	14,54
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	17,91	34,01
	Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja	**7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)**	88,84	95
	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan dan inklusif	**8. Tingkat Kemiskinan (%)**	5,85-6,44	0,77-1,27
		9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	68,36	80,04
		10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	3,55	70
	Berkembangnya Kota Bogor sebagai Mice City (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)	**11. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)**	18,61	16,89
		12. Pengembangan Pariwisata		
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,04	5,92
		b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	80	210

Visi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
			Sasaran 2025	Sasaran 2045
	Berkembangnya kewirausahaan dan industri kreatif yang berorientasi pertumbuhan yang inklusif	**13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)**	19,18 - 20,26	19,18 - 20,26
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
		a. Pertumbuhan UMKM (%)	4,78	20-30
		b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kota (%)	99,71	99,9
		c. Rasio Kewirausahaan	3,39	9,24
		d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,8	12,5
		e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	15,89	20-25
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,31-9,05	5,35-6,64
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,7	62,3
	Meningkatnya penerapan IPTEKIN dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah	**17. Indeks Inovasi Daerah**	57	80-85
	Meningkatnya efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan	**18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau**		
		a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	65,17	73,34
		b. Proporsi EBT dalam bauran energi primer	23	67,91
	Meningkatnya daya saing digital	**19. Indeks Daya Saing Digital**	44,1	70-80
	Meningkatnya investasi dan produktivitas perekonomian dalam daerah yang terintegrasi dalam rantai nilai nasional dan global	**20. Kinerja Investasi**		
		a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,70	35,46
		b. Nilai Investasi (PMA dan PMDN) (triliun)	1,6	32-40
		c. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	4
		21. Ekspor Barang dan Jasa (%)	8,7	44,8
	Terwujudnya kota pintar (*smart city*) yang maju, inklusif dan berkelanjutan	**22. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan**		
		a. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	52,40	100
		b. Nilai tingkat kematangan *smart city*	3,46	4-4,5
		c. Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	2,25	4-4,5
	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas	**23. Indeks Reformasi Hukum**	71,8	100
		24. Indeks Reformasi Birokrasi	83	85-90

Visi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
			Sasaran 2025	Sasaran 2045
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8	5
		26. Indeks Pelayanan Publik	4,51	5
	Terwujudnya pemerintahan yang profesional, bersih dan kolaboratif	**27. Anti Korupsi**		
		a. Nilai hasil survey penilaian integritas (SPI)	73,37	87,89-90,00
		b. Indeks Profesionalitas ASN	62,5	80-85
		c. Indeks Kelembagaan	2,85	4-4,5
	Meningkatnya keadilan hukum, keamanan dan demokrasi yang berkualitas	**28. Indeks Kualitas Kebijakan**	55	75-80
		29. Persentase penurunan angka Kriminalitas	7,64	10,56
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi (provinsi)	Tinggi
	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	**31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**	1,4 (2022)	4,6
		32. Kapasitas fiskal daerah	1,817 (2023)	3
		33. Tingkat Inflasi (%)	3,36	1,1 - 3,2
		34. Total Kredit/PDRB (%)	NA	73,8
	Meningkatnya kolaborasi kerjasama multi-helix dalam pembangunanBogor sebagai Kota Sains Kreatif	**35. Jumlah kerjasama nasional dan Internasional bidang sains kreatif**	NA	30
	Meningkatkan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju	**36. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	NA	66,08 - 66,41
		37. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,31	81,68 - 82,32
	Meningkatnya kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender	**38. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	73,18	75,81 - 76,05
		39. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33	1,37
	Meningkatnya kualitas permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	**40. Kualitas Lingkungan Hidup**		
		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,84	62,88
		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	16,37	87,87
		c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	24,93	99,53
		d.Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	90,10	100
		e. Timbulan Sampah terdaur ulang (%)	7,8	35

Visi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
			Sasaran 2025	Sasaran 2045
	Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi daerah	**41. Ketahanan energi, air, dan pangan**		
		a. Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1500	2.670,00
		b. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	2,97	0,21
		c. Skor pola pangan harapan	84,7	100
		Ketahanan Air:		
		d. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	2,29	5,95
		e. Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	73,74	100
	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	**42. Indeks Risiko Bencana Daerah**	73	50
		43. Penurunan Emisi GRK		
		a. Kumulatif (Ton Co2eq)	21.798,45	2.567.777,36
		b. Tahunan	0,38	5,78

Sumber: data diolah oleh Bapperida

4.2. Misi

4.2.1. Misi RPJPN

Gambar 4.7. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045

8 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan

transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.2.2. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat

Gambar 4.8. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

8 Misi Provinsi Jawa Barat

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang berakhlak dan berdaya saing.
2. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.
3. Menguatkan tata kelola yang dinamis, berkualitas, Akuntabel dan inovatif.
4. Mewujudkan provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah.
5. Mewujudkan masyarakat yang madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan.
6. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.
8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2.3. Misi RPJPD Kota Bogor

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Bogor 2025-2045 yaitu Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan maka dirumuskanlah misi sebagai berikut:

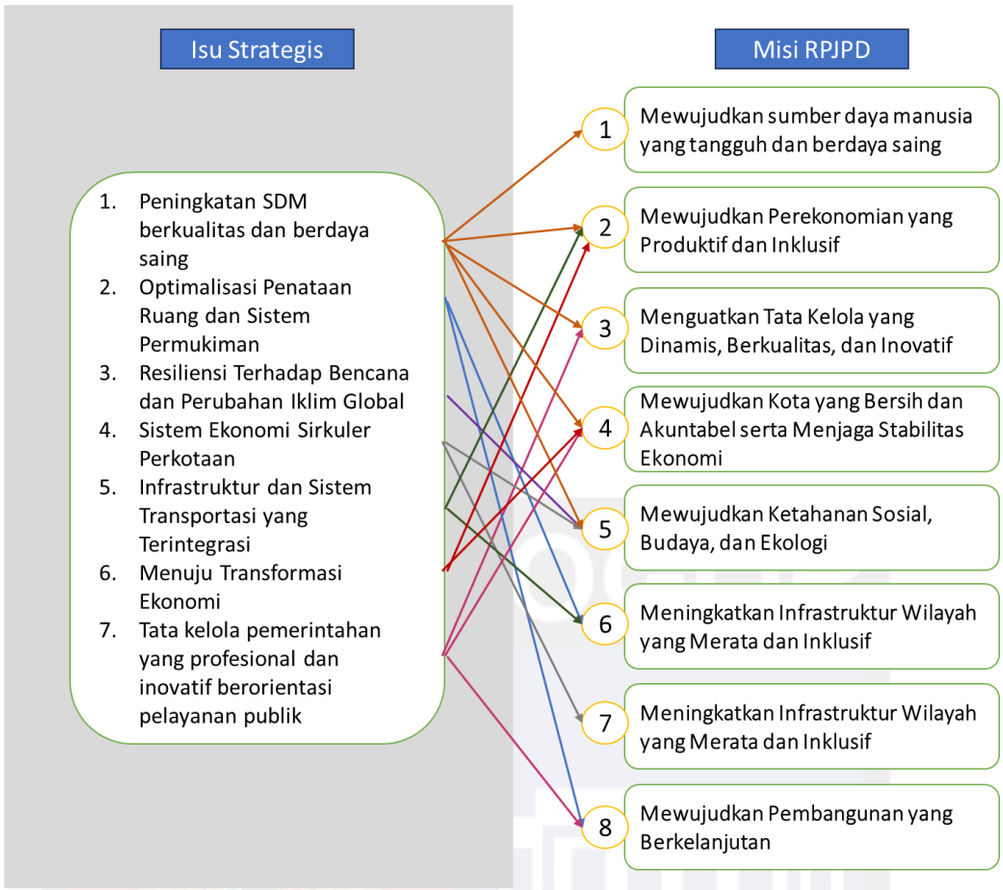

Gambar 4.9. Sandingan Isu Strategis dan Misi Kota Bogor 2025-2045

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh dan Berdaya Saing

Sumber daya manusia memegang peranan krusial dalam kemajuan suatu daerah. Misi pertama menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Perhatian pada upaya membangun SDM yang berkualitas di masa depan sejalan dengan transformasi sosial sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Kota Bogor menggagas visi Kota Sains Kreatif sehingga peningkatan SDM tidak hanya mencakup pertumbuhan IPM, tetapi juga pengembangan keunggulan Pendidikan melalui kurikulum pendidikan yang berfokus pada sains, teknologi, seni, dan inovasi. Fokus berikutnya pada misi pertama adalah peningkatan kualitas kesehatan, pengurangan kemiskinan, pengendalian penyakit, dan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan global. Diharapkan, SDM yang terbentuk dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pada akhirnya, Kota Bogor diharapkan memiliki SDM yang tangguh dan berdaya saing ditingkat regional dan global.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif

Perkembangan ekonomi adalah elemen yang sangat penting dalam mencapai visi Kota Bogor sebagai kota kreatif, maju, berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal dengan memprioritaskan manajemen sumber daya lokal dan memanfaatkan

pengetahuan, ilmu pengetahuan, inovasi, dan kreativitas yang tinggi. Upaya ini melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yang akan secara langsung berdampak pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta wilayahnya. Sejalan dengan semangat transformasi ekonomi yang diusung oleh nasional maka pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, daya saing digital, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.

3. Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif

Tata kelola pemerintahan merupakan pondasi penting dalam proses pembangunan, terutama dalam mendukung segala bentuk transformasi yang ada. Kota Bogor berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan memiliki dampak terhadap percepatan kualitas pembangunan Kota Bogor secara signifikan. Tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, dan inovatif akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan menjadi komponen pendorong penting bagi terwujudnya Kota Bogor sebagai kota sains, kreatif, maju dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

Misi ini difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga ekonomi, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Ketahanan sosial, budaya dan ekologi sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan kualitas keluarga, pemuda dan pengarusutamaan gender; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan

regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Pembangunan infrastruktur wilayah difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan visi Kota Bogor melalui pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan energi terutama. Infrastruktur wilayah yang dibangunan secara merata dan inklusif dilakukan dengan menjamin kesetaraan akses terhadap infrastruktur bagi seluruh masyarakat Kota Bogor. Membangun sistem transportasi publik yang efisien, terpadu, dan terjangkau, termasuk jaringan bus, KRL, LRT yang menghubungkan berbagai wilayah di sekitar Jabodetabek. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan mobilitas penduduk, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pembangunan ruang publik yang ramah lingkungan dan inklusif di seluruh wilayah Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mempromosikan interaksi sosial. Perluasan jaringan telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mendukung konektivitas digital dan akses terhadap informasi dan teknologi. Pembangunan infrastruktur teknologi, seperti pusat data dan laboratorium riset, untuk mendukung industri sains dan kreatif di Kota Bogor. Penerapan prinsip penataan ruang yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor, termasuk pengembangan kawasan hijau, pengendalian pertumbuhan perkotaan, dan mitigasi risiko bencana.

7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Memastikan akses yang merata terhadap sarana prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan persampahan di seluruh wilayah Kota Bogor. Menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan berkualitas dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi di seluruh wilayah Kota Bogor, mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, fasilitas pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga, serta pengadaan peralatan pendukung pembelajaran digital. Meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan membangun pusat kesehatan masyarakat, klinik kesehatan, dan rumah sakit yang terjangkau di berbagai wilayah Kota Bogor.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Proses pembangunan perlu dipandang sebagai estafet yang menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik secara gradual. Dalam perspektif ini, adanya kesinambungan dalam perumusan kebijakan pembangunan selama periodisasi 2025-2045 menjadi sangat penting untuk diciptakan. Agenda kesinambungan pembangunan setidaknya mencakup (1) sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional; (2)

sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW provinsi; (3) peningkatan akuntabilitas kinerja Pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; (4) perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko; (5) peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan (6) pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance.*

Keselarasan misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dengan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan misi RPJP-Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Penyelarasan Misi Nasional, Provinsi, Kota Bogor

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JABAR 2025-2045	RPJPD KOTA BOGOR 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif
3		Transformasi tata kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

4.3. Upaya Transformasi Super Prioritas *(Game Changers)*

RPJPD Kota Bogor 2025-2045 sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas *(Game Changer)*, yaitu:

Gambar 4.10. *Game Changers* (Upaya Transformasi Super Prioritas) RPJPD Kota Bogor 2025-2045

A. Transformasi Sosial

1. **Percepatan wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Peningkatan **partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM** berkualitas
3. **Akselerasi pendidikan vokasi berkelas dunia** dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
4. **Percepatan penuntasan stunting** melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam dan jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan
5. **Pengentasan kemiskinan** di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta pendampingan yang intensif

B. Transformasi Ekonomi

6. **Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif** fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan *teaching industry*, iii) penyelenggaraan event-event (*industry matching* dan *industry sains summit*) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan *Innovation valley* Kota Bogor
7. **Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan potensial Industri jasa berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi** fokus pada i) penataan dan penguatan pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri sains Kreatif *(Cultural Hub and Creative Science Industry (CCI)*), ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan , ii) mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer

ekonomi kreatif nasional, dan iii) Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY *(Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions)*

8. **Peningkatan keunggulan komparatif dan ekonomi bernilai tambah (*value creation*)** mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (aspiration)
9. Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada **efisiensi energi dan percepatan transisi energi** menuju pemanfaatan energi baru terbarukan
10. Pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)* dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi
11. **Pengembangan perkotaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan** difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan *Internet of Things (IoT),* penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler
12. Penguatan ekosistem dalam rangka transformasi digital

C. Transformasi Tata Kelola

13. **Pembentukan *design council*** sebagai lembaga kesatuan pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan
14. Pemantapan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi
15. **Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Kota Bogor,** menuju penyelenggaraan pemerintah Kota Bogor yang profesional dan bebas korupsi.

Landasan Transformasi

D. Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

16. **Penguatan kerjasama multi helix** dengan jaringan regional, nasional dan global khususnya di bidang sains kreatif
17. **Percepatan kapasitas fiskal daerah** melalui intensifikasi Pendapatan pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

E. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi

18. **Optimalisasi kawasan pusaka** sebagai kawasan strategis penggerak ekonomi kreatif kota

19. **Percepatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir** dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
20. **Pengelolaan risiko bencana** dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

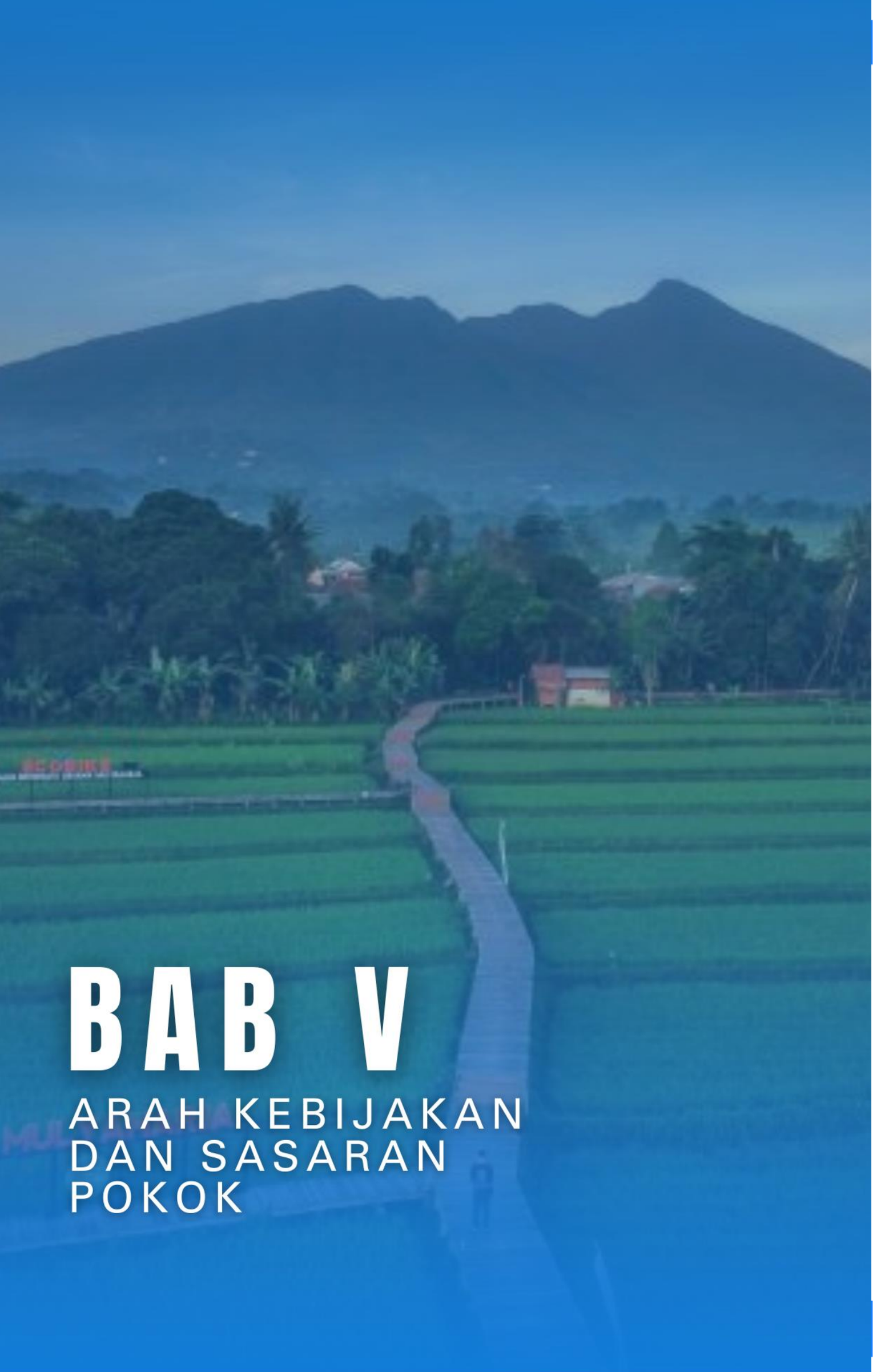

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kota Bogor dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi perencanaan pembangunan Kota Bogor maka dijabarkan dengan arah kebijakan periodik yang terbagi menjadi periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III (2035-2039), periode IV (2040-2045) sehingga visi Kota Bogor Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan dapat terwujud.

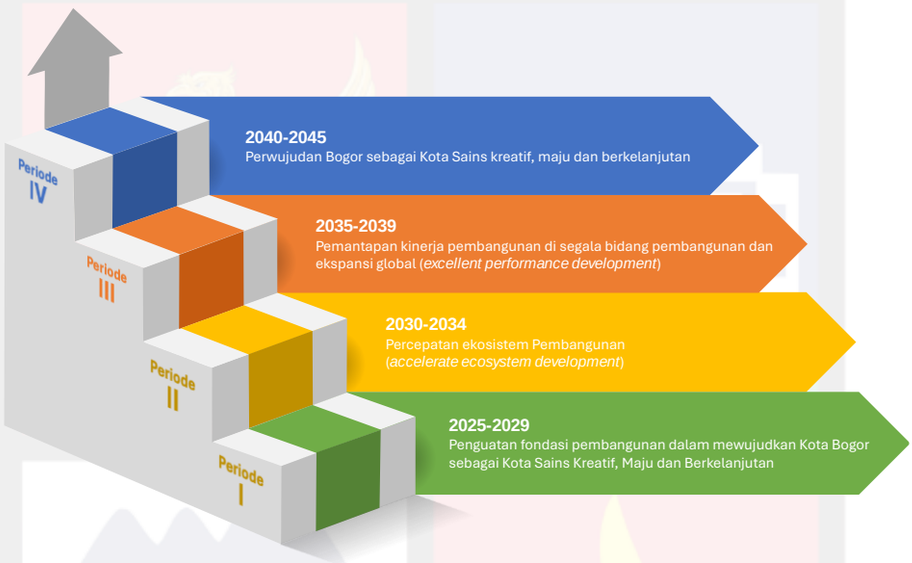

A. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode I (2025-2029)

Dalam periode I, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada *"Penguatan fondasi pembangunan dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan"*. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing Misi pembangunan Kota Bogor.

Dalam mewujudkan Misi 1 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, arah kebijakan ditujukan dalam peningkatan kualitas pendidikan bagi sumberdaya manusia di Kota Bogor melalui penumbuhan budaya masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif. Pada periode ini juga ditujukan pada peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun juga pemerataan pendidikan formal maupun non formal. Pembangunan pendidikan dasar diarahkan sesuai dengan visi daerah diantaranya dengan pengembangan kurikulum sains kreatif. Berikutnya adalah Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi pada *design thinking*; Selain peningkatan kualitas pendidikan, arah kebijakan juga ditujukan pada peningkatan kualitas kesehatan di Kota Bogor

melalui pemerataan sarana prasarana kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor. Peningkatan kualitas bagi masyarakat kota Bogor juga diarahkan melalui pengendalian penyakit menular seperti TBC, HIV juga percepatan penurunan stunting. Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal menjadi salah satu arah kebijakan pada periode ini untuk dapat mewujudkan sumberdaya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan **Misi 2**, yaitu Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif memiliki arah kebijakan fokus pada pemantapan fondasi perekonomian. Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan potensial Industri jasa berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada i) penguatan pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri sains Kreatif (*Cultural Hub and Creative Science Industry* (CCI)), ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan , ii) mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer ekonomi kreatif nasional, dan iii) Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY (*Meeting*, *Incentives*, *Conferences*, *and Exhibitions*). Berikutnya yaitu peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM industri ekonomi kreatif, pariwisata, serta kemampuan digital; memperkuat pelaksanaan *smart economy* melalui pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas dan dayasaing (*city branding*); Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; peningkatan produktivitas BUMD; penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan. Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan berbasis sains dibidang ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, II) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi *innovation valley* Kota Bogor, dan v) penguatan *linkages* dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota Bogor-*University Town*. Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi serta Pengembangan perkotaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan *Internet of Things* (IoT), penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler.

Arah kebijakan dalam pencapaian **Misi 3**, yaitu Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif fokus pada i) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan termasuk penyusunan *roadmap* Sains kreatif; ii) Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif; iii) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart government*; iv) Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik; v) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit yang berintegritas, inovatif dan profesional; vi) Pembentukan

design council sebagai lembaga kesatuan pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan; vii) Penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi diwujudkan melalui i) Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. ii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; iii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iv) Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, yaitu Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (*global city*), penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, penyediaan infrastruktur penunjang sains kreatif, pembangunan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, yaitu Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang diwujudkan melalui pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

dasar secara merata, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Misi 8, yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode II (2030-2034)

Dalam periode II, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada *"Percepatan ekosistem pembangunan (accelerate ecosystem development)"*. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Bogor. Dalam mewujudkan Misi 1, Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, arah kebijakan Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah. Keterlibatan orang tua, masyarakat dan sekolah dalam pengembangan kecerdasan spiritual, akhlak dan sosial sangat penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan juga diarahkan pada penguatan peran pendidikan tinggi dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin; pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; Selain pendidikan, kualitas kesehatan perlu diperhatikan dalam perwujudan misi pembangunan pada periode ini dimana adanya peningkatan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam aspek sosial, pada periode ini tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya.

Misi 2, yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif pada periode pembangunan ini dilakukan dengan pengembangan kawasan strategis pariwisata, percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing produk serta efisiensi usaha, mendorong percepatan smart economy, serta peningkatan ekosistem riset dan inovasi bagi ekonomi kreatif. Berikutnya adalah i) peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual; ii) Peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual; iii) Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat Kota; iv) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan *teaching industry*, iii) penyelenggaraan event-event (*industry matching* dan

industry sains summit) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan *Innovation valley* Kota Bogor dan v) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan *linkage* berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching industry, iii) penyelenggaraan event-event (*industry matching dan industry sains summit*) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan Innovation valley Kota Bogor. Beberapa kebijakan yang tetap dilaksanakan sebagai lanjutan dari periode sebelumnya yaitu peningkatan *up-skilling* SDM ekonomi kreatif di Kota Bogor, perluasan jaringan pasar nasional dan global, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif; Penguatan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan.

Arah kebijakan bagi terwujudnya Misi 3, yaitu mewujudkan tatakelola yang baik pada periode ini mencakup pemantapan implementasi *smart government*, penciptaan kelembagaan yang kolaboratif; pengaplikasian inovasi daerah; meningkatkan kualitas SDM ASN; optimalisasi pembiayaan serta penyederhanaan regulasi berbasis IT;

Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi diwujudkan melalui Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi serta melanjutkan berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iii) Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, yaitu mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif yang diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (*global city*), penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, peningkatan infrastruktur penunjang sains kreatif, peningkatan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta peningkatan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, peningkatan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Misi 8, yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui akselerasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta peningkatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

C. Kebijakan Kota Bogor Periode III (2035-2039)

Dalam periode III, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada *"Pemantapan kinerja pembangunan di segala bidang pembangunan dan ekspansi global (excellent performance development)"*. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Bogor. Misi 1, pada periode III ini diwujudkan melalui kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan berupa peningkatan daya saing dan prestasi siswa baik di lingkup nasional maupun internasional. Selebihkan kebijakan yang dilakukan merupakan kebijakan yang sama dengan periode sebelumnya seperti pelibatan tri pusat pendidikan dalam pengembangan kecerdasan siswa, penguatan pendidikan dengan fokus pada outcome dan pendekatan multidisiplin, perluasan dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pelayanan yang lebih responsif bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Perlindungan sosial tetap menjadi kebijakan dalam pembangunan Kota Bogor, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas lansia melalui pendidikan sepanjang hayat.

Misi 2, pada periode III diwujudkan dengan arah kebijakan yang sama dengan periode sebelumnya, kecuali beberapa hal yang dirasa perlu ditingkatkan Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi (cultural & heritage tourism, ecotourism, dan industri ekonomi kreatif); Perluasan jaringan

pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global *(National and Global Value Chain);*

Misi 3, fokus pada berbagai arah kebijakan pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; dan berbagai arah kebijakan melanjutkan dari periode sebelumnya

Misi 4, Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi melanjutkan berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iii) pemantapan kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, pada periode ini pembangunan diwujudkan melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, Pemantapan kualitas lingkungan hidup ruang kota, Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, Pemantapan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler sirkuler, Peningkatan ketersediaaan pangan melalui penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global *(global city),* pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, Pemantapan pengelolaan limbah dan sampah

industri, Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemantapan infrastruktur penunjang sains kreatif, Pemantapan inkubator bisnis industri kreatif, Pemantapan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta Pemantapan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, pada periode ini diwujudkan melalui Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, Pemantapan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, Pemantapan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta Pemantapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Misi 8, yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan diwujudkan melalui Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, Pemantapan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta Pengembangan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

D. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode IV (2040-2045)

Dalam periode IV, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada *"Perwujudan Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan"*. Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode ini sebagai jawaban dari tercapainya misi pembangunan Kota Bogor yaitu, terwujudnya sumber daya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing dicirikan dengan i) pelayanan kesehatan Kota yang berkualitas, tangguh, responsif dan berkeadilan, ii) pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelas dunia, iii) tenaga kerja yang kreatif, inovatif dan berdaya saing, dan iv) sistem jaminan sosial yang terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan.

Transformasi ekonomi bogor dicirikan dengan i) kota bogor sebagai kota sains kreatif yang berdaya saing global, ii) terwujudnya jati diri Kota Bogor sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan. Transformasi tatakelola dicirikan dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Dinamis, berkualitas, dan inovatif, terwujudnya Kota yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi.

Selanjutnya pada periode ini juga dapat mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, terwujudnya infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif, terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Tabel 5.1. Matriks Arah Kebijakan Kota Bogor Periode 2025-2045

<table>
<tr><th>Misi</th><th>Sasaran Pokok</th><th>2025-2029</th><th>2030-2034</th><th>2035-2039</th><th>2040-2045</th></tr>
<tr><td rowspan="7">Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing</td><td rowspan="7">Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</td><td colspan="3">Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.</td><td rowspan="7">• Perwujudan pembudayaan perilaku hidup sehat
• Perwujudan kualitas pelayanan yang berkualitas, responsif dan berkeadilan
• Perwujudan kesehatan mental masyarakat
• Perwujudan kebijakan keluarga berencana
• Perwujudan pengendalian eliminasi penyakit menular
• Perwujudan pemenuhan cakupan kesehatan masyarakat</td></tr>
<tr><td>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan.</td><td>Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal</td><td>Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.</td></tr>
<tr><td>Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan</td><td colspan="2" rowspan="2">Peningkatan pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, responsif dan berkeadilan</td></tr>
<tr><td>Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif</td></tr>
<tr><td colspan="3">Peningkatan kesehatan mental (mental health) masyarakat melalui i) peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan mental dan ii) pencegahan dan penanganan dini risiko kesehatan mental</td></tr>
<tr><td>Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia dan kesehatan mental (mental health)</td><td>Perluasan upaya promotif dan preventif, antara lain mencakup deteksi dini, vaksinasi terutama imunisasi rutin lengkap, penemuan kasus dan pengobatan secara masif, peningkatan literasi kesehatan, dan pembudayaan perilaku hidup sehat</td><td>Pemantapan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Misi</th><th>Sasaran Pokok</th><th>2025-2029</th><th>2030-2034</th><th>2035-2039</th><th>2040-2045</th></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="4"></td><td></td><td></td><td>akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Percepatan penuntasan stunting, dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV melalui 1) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, ii) Percepatan eliminasi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan, ii) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.</td><td>Pemantapan pengendalian penyakit menular p dan eliminasi penyakit menular terutama tuberkulosis, serta penuntasan penyakit tropis terabaikan</td></tr>
<tr><td>Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat</td><td colspan="2">Pemantapan pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang merata</td><td colspan="3">Penyiapan aspek religiusitas, pendidikan inklusif, dan kebudayaan Masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif</td><td rowspan="5">• Perwujudan aspek religiusitas, pendidikan inklusif, dan kebudayaan Masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif
• Perwujudan daya saing dan prestasi siswa di kancah nasional dan internasional
• Perwujudan keterlibatan tri pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam mengembangkan</td></tr>
<tr><td>Peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun (Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun)</td><td rowspan="3">Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah</td><td rowspan="4">Peningkatan daya saing dan prestasi siswa di kancah nasional dan internasional</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal difokuskan pada i) peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional; ii) peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; iii)</td></tr>
<tr><td>Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.</td></tr>
<tr><td>Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Misi</th><th>Sasaran Pokok</th><th>2025-2029</th><th>2030-2034</th><th>2035-2039</th><th>2040-2045</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, iv) pengembangan kurikulum berbasis sains kreatif dan berorientasi pada design thinking</td><td colspan="2">Penguatan pelibatan tri pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam mengembangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial</td><td rowspan="3">kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial
• Perwujudan peran pendidikan tinggi dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin
• Perwujudan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa dan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi ditingkat nasional dan internasional</td></tr>
<tr><td colspan="2">Penguatan peran pendidikan tinggi dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Peningkatan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa dan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi ditingkat nasional dan internasional</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja</td><td rowspan="4">Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI</td><td>Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).</td><td>Pemantapan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebekerjaan tinggi.</td><td rowspan="4">• Perwujudan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebekerjaan tinggi
• Perwujudan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja
• Perwujudan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peningkatan partisipasi lulusan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) yang berkualitas</td></tr>
</table>

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
					• Perwujudan partisipasi lulusan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) yang berkualitas
	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan dan inklusif	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin melalui program ekonomi produktif dan pendampingan yang intensif		• Perwujudan keberdayaan masyarakat miskin • Perwujudan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal • Perwujudan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
		Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marginal, rentan, dan masyarakat	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat	Pemantapan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi data, perencanaan dan penganggaran, penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	
		Peningkatan keterampilan dan produktivitas lansia melalui pendidikan sepanjang hayat	Peningkatan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya		
Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif	Berkembangnya Kota Bogor sebagai Mice City (Meeting, Incentive,	Peningkatan keunggulan komparatif dan ekonomi bernilai tambah (*value creation*) mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (aspiration)			• Perwujudan keunggulan komparatif dan ekonomi bernilai tambah (value creation) mengandalkan pengetahuan, inovasi,
		Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan potensial Industri jasa	Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan cultural & heritage tourism,	Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi (cultural &	

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Convention, Exhibition)	berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada i) penataan dan penguatan pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri sains Kreatif (*Cultural Hub and Creative Science Industry (CCI)*), ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan , ii) mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer ekonomi kreatif nasional, dan iii) Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY *(Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions)*	pariwisata sains kreatif, dan industri/ekonomi kreatif	heritage tourism, ecotourism, dan industri ekonomi kreatif)	dan keterampilan tinggi (aspiration) • Perwujudan kawasan pariwisata yang terintegrasi (cultural & heritage tourism, ecotourism, dan industri ekonomi kreatif) • Perwujudan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global.
			Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat Kota		
			Percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, inkubator bisnis dan pembiayaan	Pemantapan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global.	
			Peningkatan daya saing produk dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi	Peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual	
			Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi *(unique & high-value economy)*, serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal	Pemantapan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi	
	Berkembangnya kewirausahaan dan industri kreatif yang berorientasi	Penumbuhan kewirausahaan melalui i) Pendidikan dan Pelatihan, ii) Akses terhadap Modal, iii) Menciptakan ekosistem pendukung yang mendorong kewirausahaan, iv) Mendorong inovasi dan penelitian dengan mengedepankan kemitraan antara akademisi, industri, dan pemerintah, v) Memfasilitasi peluang berjejaring dan memberikan akses terhadap pasar, baik dalam negeri maupun internasional.			Perwujudan kewirausahaan, Kualitas tenaga kerja berdaya saing global dan bisnis UMKM yang berdaya saing global

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	pertumbuhan yang inklusif	Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global	dengan akses lembaga keuangan
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing global.	
		Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM industri ekonomi kreatif, pariwisata, serta kemampuan digital	Perluasan kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan		
			Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi.		
	Meningkatnya penerapan IPTEKIN dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah	Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan berbasis sains dibidang ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, II) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi innovation valley Kota Bogor, dan v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota Bogor-*university town*	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching industry, iii) penyelenggaraan *event-event (industry matching* dan *industry sains summit*) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan *Innovation valley* Kota Bogor	Pemantapan Kota Bogor sebagai kota sains kreatif dan innovation valley bertaraf nasional	Perwujudan Kota Bogor sebagai Kota sains kreatif dan innovation Valley bertaraf nasional
	Meningkatnya efisiensi energi dan	Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan			Perwujudan efisiensi energi dan transisi energi menuju

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	pemanfaatan energi baru terbarukan				pemanfaatan energi baru terbarukan
	Meningkatnya daya saing digital	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat difokuskan pada i). Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Perluasan transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat difokuskan pada i). Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Pemantapan transformasi digital pada seluruh sektor strategis	Perwujudan smart economy berbasis digital sebagai kota kreatif dan berdaya saing
		Memperkuat pelaksanaan smart economy melalui pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas dan dayasaing *(city branding)*	Mendorong percepatan *smart economy* Kota Bogor dalam membangun jati dirinya sebagai kota produktif dan berdaya saing *(city branding)*	Pemantapan *smart economy* Kota Bogor dalam membangun jati dirinya sebagai kota produktif dan berdaya saing *(city branding)*	
	Meningkatnya investasi dan produktivitas perekonomian dalam daerah yang terintegrasi dalam rantai nilai nasional dan global	Peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian melalui investasi di bidang teknologi, inovasi, dan infrastruktur	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha, diarahkan pada (i) Penyusunan regulasi yang ramah investasi; (ii) Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi; (iii) Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Perluasan promosi investasi diantaranya dengan penyelenggaraan investment summit tingkat internasional	• Perwujudan Kerjasama investasi baik skala nasional maupun internasional yang mendukung kota sains kreatif • Perwujudan kemudahan perizinan dan insentif fiskal • Perwujudan jaringan pasar domestic dan global
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost*	Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke *green/low-cost*	Optimalisasi kemudahan perizinan akses ke *green/low-*	

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif	*financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya.	*cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya.	
		Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan kemajuan teknologi	Mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor yang mempunyai potensi keuntungan tinggi dan peningkatan produktivitas	Memperkuat investasi pada sektor-sektor yang mempunyai keuntungan tinggi dan peningkatan produktivitas	
		Inisiasi jaringan pasar nasional dan global	Penguatan jaringan pasar nasional dan global serta inisiasi kontribusi pada rantai nilai nasional dan global *(National and Global Value Chain)*	Pemantapan jaringan pasar nasional dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global *(National and Global Value Chain)*	
	Terwujudnya infrastruktur yang handal dan sistem transportasi terintegrasi	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Pemantapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi.	• Perwujudan Kawasan perkotaan yang terintegrasi • Perwujudan Kerjasama multi helix dalam pembangunan Kota Bogor • Perwujudan TOD, transportasi hijau dan

<table>
<tr><th>Misi</th><th>Sasaran Pokok</th><th>2025-2029</th><th>2030-2034</th><th>2035-2039</th><th>2040-2045</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="4"></td><td>Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi</td><td colspan="2">Peningkatan kerjasama multi helix dalam pembangunan ekonomi Kota Bogor</td><td rowspan="4">angkutan umum massal yang terintegrasi
• Perwujudan hunian yang layak dan perumahan vertical</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi serta pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungan Kota Bogor dengan wilayah sekitarnya</td><td>Pemantapan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, modern dan terintegrasi</td></tr>
<tr><td>Pemantapan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Peningkatan pemenuhan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman</td><td colspan="2">Peningkatan penyediaan dan akses rumah layak huni serta optimalisasi lahan terutama untuk penyediaan hunian vertikal</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pemantapan kualitas dan pemenuhan utilitas dasar bagi seluruh masyarakat</td></tr>
<tr><td>Terwujudnya kota pintar (smart city) yang maju, inklusif dan berkelanjutan</td><td colspan="3">Pengembangan perkotaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan Internet of Things (IoT), penerapan smart city dan ekonomi sirkuler</td><td>Perwujudan jati diri Kota Bogor sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Misi 3. Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif</td><td rowspan="4">Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan kolaboratif</td><td>Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman</td><td colspan="2">Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik</td><td rowspan="4">• Perwujudan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovastif dan kolaboratif
• Perwujudan tata Kelola kelembangaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital dan beriorientasi peningkatan daya saing</td></tr>
<tr><td>Pemantapan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi</td><td>Pemantapan penciptaan kelembagaan yang kolaboratif melalui kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan</td><td rowspan="3">Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif</td></tr>
<tr><td>Peningkatan iklim inovasi daerah</td><td rowspan="2">Pengaplikasian berbagai inovasi daerah</td></tr>
<tr><td>Penyusunan roadmap Sains kreatif</td></tr>
</table>

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pembentukan *design council dan forum sains kreatif* sebagai lembaga kesatuan pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan	Pemantapan dan peningkatan peran *design council*		• Perwujudan tata Kelola dan pemanfaatan asset daerah yang optimal • Perwujudan digitaisasi dalam pelayanan publik
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Kota Bogor, menuju penyelenggaraan pemerintah Kota Bogor yang profesional dan bebas korupsi.	Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing	
		Penguatan penataan kelembagaan yang lincah dan adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah			
		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja pemerintah			
		Peningkatan penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah			
		Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart government*	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik.	
		Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
				Penguatan integritas partai politik.	
		Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	
		Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.			
Misi 4. Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	• Perwujudan keamanan dan ketertiban • Perwujudan budaya politik yang kondusif • Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang tinggi • Perwujudan akses permodalan yang mudah
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan integritas partai politik.		Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik.	
		Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		
		Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui i) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan stok dan distribusi barang, ii) Peningkatan kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur dan logistik regional, iii) Penguatan pengawasan dan pemantauan harga khususnya bahan pokok			
		Peningkatan kemudahan dan akses terhadap permodalan yang bersumber dari bank dan non perbankan			

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Meningkatnya kolaborasi kerjasama multi-helix dalam pembangunan Bogor sebagai Kota Sains Kreatif	Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif	Penguatan kerjasama multi helix dengan jaringan regional, nasional dan global khususnya di bidang sains kreatif		• Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang tinggi • Perwujudan akses permodalan yang mudah
		Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.		
Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Meningkatkan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Pelestarian dan pemantapan kebudayaan lokal, serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat berlandaskan kemajuan teknologi.	• Perwujudan kebudayaan lokal, kearifan lokal yang lestari • Perwujudan kawasan pusaka dan cagar budaya yang lestari • Perwujudan kerukunan, kemasalahan dan berkebudayaan maju
		Perencanaan, penataan dan pengembangan Kawasan pusaka sebagai Kawasan strategis kota serta pelestarian cagar budaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah			
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat.	
	Meningkatnya kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Pembangunan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri.		• Perwujudan Kualitas keluarga yang Bahagia, tentram dan mandiri • Perwujudan pemberdayaan perempuan, pemuda,
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.			

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemantapan kesetaraan gender dan inklusi sosial.	penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. • Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial
	Meningkatnya kualitas permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota	Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan kota dan ekosistem alami, pusaka alam dan pusaka saujana		• Perwujudan pelestarian Kawasan • Perwujudan pengendalian penecemaran, kerusakan serta konservasi DAS prioritas, tanah dan air
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, tanah dan air	Akselerasi Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, tanah dan air	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	
	Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi daerah	Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi Aman	Pemantapan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi Aman		• Perwujudan akses sanitasi aman • Perwujudan layanan persampahan yang terpadu hulu hilir berorientasi ekonomi sirkuler • Perwujudan ketahanan pangan dan gizi • Perwujudan pengelolaan sumberdaya air terpadu
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.			
		Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah.	Percepatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler sirkuler	
		Peningkatan konsumsi listrik digunakan untuk kegiatan ekonomi			

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan	Pemantapan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.		• Perwujudan akses air minum aman
		Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air baku			
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan			
	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.		• Perwujudan ketahanan bencana dan perubahan iklim • Perwujudan penggunaan transportasi berkelanjutan • Perwujudan ekonomi sirkuler
		Penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT	Mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi		
			Percepatan penerapan ekonomi sirkuler		
Misi 6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif		Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (*global city*)		Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (*global city*)	• Perwujudan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city) • Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri sains kreatif yang andal. • Perwujudan coverage sarana-prasarana sistem
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri sains kreatif yang andal, antara lain: *green/low- carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya;	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: *green/low- carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi	Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri sains kreatif yang andal.	

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.		transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi • Perwujudaan inkubator bisnis industri kreatif • Perwujudan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan • Perwujudan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama • Perwujudan coverage dan kecepatan akses internet untuk menjamin konektivitas area- area weak coverage di kawasan perkotaan
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi			
		Pembangunan inkubator bisnis industri kreatif	Peningkatan inkubator bisnis industri kreatif	Pemantapan inkubator bisnis industri kreatif	
		Pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan		Pemantapan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan	
		Pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama	Peningkatan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama	Pemantapan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama	
		Penataan dan pengembangan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area- area *weak coverage* dan *blank spot di* kawasan perkotaan.	Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area- area *weak coverage* dan *blank spot* di kawasan perkotaan	Pemantapan *coverage* dan kecepatan akses internet untuk menjamin konektivitas area- area *weak coverage* di kawasan perkotaan	
Misi 7. Mengembangkan		Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan,		

Misi	Sasaran Pokok	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas			penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.		• Perwujudan penyediaan akses hunian yang layak di perkotaan • Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata • Perwujudan infrastruktur air minum dan persampahaan • Perwujudan kawasan perkantoran pemerintahan
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	
		Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa	Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa	Pemantapan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa	
		Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Peningkatan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Pemantapan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	
		Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Pemantapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	
		Penataan dan pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan			
Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Akselerasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	• Perwujudan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis • Perwujudan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. • Perwujudan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan
		Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
		Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Pengembangan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP).

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2045 dirumuskan melalui penyelarasan terhadap koridor arah pembangunan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan proses penyelarasan tersebut, arah pembangunan RPJPD Kota Bogor 2025-2045 adalah 1) Pelayanan Kesehatan prima untuk semua; 2) Pendidikan Berkualitas yang Merata; 3) Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif; 4) Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; 5)Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; 6) Penerapan ekonomi hijau; 7) Penguatan Transformasi Digital; 8) Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global; 9) Pengembangan Wilayah Pelayanan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; 10) Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Inovatif dan kolaboratif; 11) Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas; 12) Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah; 13) Peningkatan kerjasama regional maupun internasional; 14) Peningkatan kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju; 15) Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender; 16) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 17) Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi; dan 18) Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional 2025-2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045		RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital.		Penerapan ekonomi hijau
		IE 6. Transformasi Digital		Pembangunan SDM berdaya saing		Penguatan Transformasi Digital

No	RPJP Nasional 2025-2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045		RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Pengembangan Wilayah Pelayanan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Inovatif dan kolaboratif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor berdasarkan Arah Pembangunan disajikan pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 - 2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Sasaran 2025	Sasaran 2045
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	**1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)**	75,93	80,19
			2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	19	3
			b. Prevalensi Stunting	15,93	4,19
			3. Penanganan Tuberkulosis:		
			a. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	91	98
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	91	98
			c. Incidence rate HIV/ AIDS	31	10
			4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,57	100
2	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	**5. Hasil pembelajaran**		
			Rata -rata Nilai PISA (Membaca, Matematika dan Sains)		
			a. Kemampuan Literasi	63,272	80-85
			b. Kemampuan numerasi	51,464	80-85
			c. Rata-rata Lama Sekolah	10,65	14,16- 15,00
			d. Harapan Lama Sekolah	13,49	14,54
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	17,91	34,01
3	Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja		**7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)**	88,84	95
4	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan dan inklusif	Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif	**8. Tingkat Kemiskinan (%)**	5,85-6,44	0,77-1,27
			9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	68,36	80,04
			10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	3,55	70

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Sasaran 2025	Sasaran 2045
5	Berkembangnya Kota Bogor sebagai Mice City (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)	Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	**11. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)**	18,61	16,89
			12. Pengembangan Pariwisata		
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,04	5,92
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	80	210
6	Berkembangnya kewirausahaan dan industri kreatif yang berorientasi pertumbuhan yang inklusif		**12. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)**	19,18 - 20,26	19,18 - 20,26
			13. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a. Pertumbuhan UMKM (%)	4,78	20-30
			b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kota (%)	99,71	99,9
			c. Rasio Kewirausahaan	3,39	9,24
			d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,8	12,5
			e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	15,89	20-25
			14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,31-9,05	5,35-6,64
			15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,7	62,3
7	Meningkatnya penerapan IPTEKIN dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah		**16. Indeks Inovasi Daerah**	57	80-85
8	Meningkatnya efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan	Penerapan ekonomi hijau	**17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau**		
			a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	65,17	73,34
			b. Proporsi EBT dalam bauran energi primer	23	67,91
9	Meningkatnya daya saing digital	Penguatan Transformasi Digital	**18. Indeks Daya Saing Digital**	44,1	70-80
10	Meningkatnya investasi dan produktivitas perekonomian dalam daerah yang terintegrasi dalam rantai nilai nasional dan global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	**19. Kinerja Investasi**		
			a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,70	35,46
			b. Nilai Investasi (PMA dan PMDN) (triliun)	1,6	32-40
			c. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	4

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Sasaran 2025	Sasaran 2045
			20. Ekspor Barang dan Jasa (%)	8,7	44,8
11	Terwujudnya kota pintar (smart city) yang maju, inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	**21. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan**		
			a. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	52,40	100
12	Terwujudnya infrastruktur yang handal dan sistem transportasi terintegrasi		b. Nilai tingkat kematangan *smart city*	3,46	4-4,5
			c. Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	2,25	4-4,5
13	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan kolaboratif	Peningkatan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas Adaptif, Inovatif dan kolaboratif	**22. Indeks Reformasi Hukum***	71,8	100
			23. Indeks Reformasi Birokrasi	83	85-90
			24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8	5
			25. Indeks Pelayanan Publik	4,51	5
			26. Anti Korupsi		
			a. Nilai hasil survey penilaian integritas (SPI)	73,37	87,89-90,00
			b. Indeks Profesionalitas ASN	62,5	80-85
			c. Indeks Kelembagaan	2,85	4-4,5
14	Meningkatnya keadilan hukum, keamanan dan demokrasi yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	**27. Indeks Kualitas Kebijakan**	55	75-80
			28. Persentase penurunan angka Kriminalitas	7,64	10,56
			29. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi (provinsi)	Tinggi
15	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah	Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah	**30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**	1,4 (2022)	4,6
			31. Kapasitas fiskal daerah	1,817 (2023)	3
			32. Tingkat Inflasi (%)	3,36	1,1 - 3,2
			33. Total Kredit/PDRB (%)	NA	73,8
16	Meningkatnya kolaborasi kerjasama multi-helix dalam pembangunan Bogor sebagai Kota Sains Kreatif	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	**34. Jumlah kerjasama nasional dan Internasional bidang sains kreatif**	NA	30
17			**35. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	NA	66,08 - 66,41

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Sasaran 2025	Sasaran 2045
	Meningkatkan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju	**36. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	79,31	81,68 - 82,32
18	Meningkatnya kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender	Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender	**37. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	73,18	75,81 - 76,05
			38. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33	1,37
19	Meningkatnya kualitas permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	**39. Kualitas Lingkungan Hidup**		
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,84	62,88
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	16,37	87,87
			c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	24,93	99,53
			d. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	90,10	100
			e. Timbulan Sampah terdaur ulang (%)	7,8	35
20	Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi daerah	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	**40. Ketahanan energi, air, dan pangan**		
			a. Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1500	2.670,00
			b. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	2,97	0,21
			c. Skor pola pangan harapan	80	100
			Ketahanan Air:		
			d. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	2,29	5,95
			e. Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	73,74	100
21	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	**41. Indeks Risiko Bencana Daerah**	73	50
			42. Penurunan Emisi GRK		
			a. Kumulatif (Ton Co2eq)	21.798,45	2.567.777,36
			b. Tahunan	0,38	5,78

Tabel 5.4. Persandingan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL		
IE1	Kesehatan untuk Semua			Kesehatan untuk Semua			Pelayanan Kesehatan prima untuk semua		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75,93	80,19
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	112	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	15	b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	19	3
b.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19	5	c. Prevalensi Stunting	15,93	4,19
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis:			3. Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	91	100	a. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	425	76
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	91	100	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	91	98
							c. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	91	98
							d. Incidence rate HIV/ AIDS	31	10
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89,31	99,5	4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,57	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran					

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	22,25-24,25	71,81-73,81			
	- Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	1,70-3,70	65,20-67,20			
	- Matematika	404	490	ii) Numerasi					
b.	- Sains	416	487				5. Hasil pembelajaran		
	Rata-rata nilai asesmen nasional			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			Rata -rata Nilai PISA (Membaca, Matematika dan Sains)		
	Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi Membaca	35,55-37,55	71,42-73,42	a. Kemampuan Literasi	63,272	80-85
	Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi	19,34-21,34	63,01-65,01	b. Kemampuan numerasi	51,464	80-85
c.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52-9,53	12,05-12,09	c. Rata-rata Lama Sekolah	10,65	14,16- 15,00
d.	Harapan lama sekolah	13,32	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87-12,88	14,24-14,29	d. Harapan Lama Sekolah	13,49	14,54
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,64	9,64-14,50	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	17,91	34,01
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,3	75	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)	88,84	95
IE3	**Perlindungan sosial yang adaptif**			**Perlindungan sosial yang adaptif**			**Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif**		
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,35-5,85	0,09-0,34	8. Tingkat Kemiskinan (%)	5,83-6,44	0,09-0,59
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	20,27 (2022)	80,04	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	68,36	80,04
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	3,55	70
TRANSFORMASI EKONOMI				**TRANSFORMASI EKONOMI**			**TRANSFORMASI EKONOMI**		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IE4	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**			**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**			**Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**		
11	Produktivitas Industri dan Pertanian			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,15-41,38	46,43-47,60	11. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	18,61	16,89
	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	Pengembangan Pariwisata			12. Pengembangan Pariwisata		
	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,2-3,4	3,3-4,2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,88	4,89	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,04	5,92
12	Pengembangan Pariwisata :			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	536,6	1.341,50	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	80	210
	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06	12. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	19,18-20,26	19,18-20,26
	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,1	100	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			13. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	110	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	12,31	20,28	a. Pertumbuhan UMKM (%)	4,78	20-30
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,3	14	b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kota (%)	99,71	99,9
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,44	5	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,5	9,86	c. Rasio Kewirausahaan	3,39	9,24
	b. Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,8	12,5	d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,8	12,5
				Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,62	5,56	*e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	15,89	20-25
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3-7,0	6,1-7,1	14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,31-9,05	5,35-6,64
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,3	62,3	15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,7	62,3
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Indeks Inovasi Daerah			16. Indeks Inovasi Daerah	57	80-85
15	**Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik**								

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00	4						
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80						
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,3	70						
17	Tingkat Penguasaan IPTEK								
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,3	2,2-2,3						
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar						
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			**Penerapan Ekonomi Hijau**			**Penerapan ekonomi hijau**		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau :			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau (%)	70,8	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,3	85,05	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	66,17	73,34
	b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,4	67,91	b. Proporsi EBT dalam bauran energi primer	23	67,91
IE6	Transfomasi Digital			**Transformasi Digital**			**Penguatan Transformasi Digital**		
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	6,4	8	18. Indeks Daya Saing Digital	44,1	70-80
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**			**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**		
20	Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,88	5	19. Kinerja Investasi		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,6	23,8	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,7	35,46
							b. Nilai Investasi (PMA dan PMDN) (triliun)	1,6	32-40
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2				b. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	4

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6	40	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26,3	44,8	20. Ekspor Barang dan Jasa (%)	8,7	44,8
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			**Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**			**Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**		
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,34	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24,63%	31.19%	21. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	a. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	52,4	100
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	4	16,25	Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	N/A			
							b. Nilai tingkat kematangan smart city	3,46	4-4,5
							c. Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	2,25	4-4,5
	TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA		
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif			**Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif**			**Peningkatan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas Adaptif, Inovatif dan kolaboratif**		
24	Indeks Materi Hukum	0,51	0,71	Indeks Reformasi Hukum	90,7	100	22. Indeks Reformasi Hukum	71,8	100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5				23. Indeks Reformasi Birokrasi	83	85-90
26	Indeks Pelayanan Publik	3,68	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,37 (2022)	5	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8	5
27	Anti Korupsi			Indeks Pelayanan Publik	4,62 (2022)	5	25. Indeks Pelayanan Publik	4,51	5
	a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98	Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89	26. Anti Korupsi		
	b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60				a. Nilai hasil survey penilaian integritas (SPI)	73,37	87,89-90,00
							Indeks Profesionalitas ASN	62,5	80-85
							Indeks Kelembagaan	2,85	4-4,5

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SUPREMASI HKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA			KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH		
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)			Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas		
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,68	0,89				27. Indeks Kualitas Kebijakan	55	75-80
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78 (2020)	69,16	28. Persentase penurunan angka Kriminalitas	7,64	10,56
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (> 80)	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	29. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi (provinsi)	Tinggi
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)			Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah		
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,2	4,6	30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4 (2022)	4,6
32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ±1	2,0 ±1				31. Kapasitas fiskal daerah	1,817 (2023)	3
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Tingkat Inflasi (%)	3,3-3,9	1,1-3,2	32. Tingkat Inflasi (%)	3,36	1,1-3,2
	a. Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
	b. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8	60	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	25,31	78,1			
	c. Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,24	2,78			
	d. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	55.162,04	302.703,47			
	e. Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90	Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8	33. Total Kredit/PDRB (%)	NA	73,8
34	Inklusi Keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03			
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan (nomenklatur dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan tetap serumpun dengan IE)			Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	Asia Power Index (*Diplomatic Influencer)*	61,54	75,0-80,0	Jumlah Kerjasama Internasional	N/A	N/A	34. Jumlah kerjasama nasional dan Internasional bidang sains kreatif	NA	30
				Jumlah Sister Province	4	N/A			
36	Asia Power Index (*Military Capability*)	16	45						
	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			**KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI**			**KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI**		
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**			**Peningkatan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju**		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09-54,1	66,08-66,41	35. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	66,08-66,41
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79-74,85	81,68-82,32	36. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,31	81,68-82,32
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**			**Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender**		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92-70,95	75,81-76,05	37. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,18	75,81-76,05
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46-0,45	0,23-0,21	38. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33	1,37
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			**Lingkungan Hidup Berkualitas**			**Peningkatan kualitas lingkungan hidup**		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741			
42	Kualitas Lingkungan Hidup :			Kualitas Lingkungan Hidup			39. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,27	57,68	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,84	62,88
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13,5	85	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	16,37	87,87
	a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74	Pengelolaan Sampah		90	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	24,93	99,53

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	87,02	88,77	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,54 (2022)		d.Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	90,1	100
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	47,77 (2022)	100	e. Timbulan Sampah terdaur ulang (%)	7,8	35
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)						
IE16	**Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**			**Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**			**Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi**		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan :			Ketahanan energi, air, dan pangan					
	a. Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			40. Ketahanan energi, air, dan pangan		
	-Indeks Ketahanan Energi	6,77	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.400	2.670	a. Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1500	2.670,00
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp miliar)	191	165			
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,21	0,77	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	6,75	1,39	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (%)	4,77	0,21
							c. Skor pola pangan harapan	80	100
	c. Ketahanan Air :			Ketahanan Air			Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampungan Air per Kapita (m^3/kapita)	65,18	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	4,93	63,12	c. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	2,29	5,95
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,2	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	e. Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	30,85	100
IE17	**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**			**Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**			**Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim**		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045 Target RPJP Nasional		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045 Sasaran RPJPD Kota Bogor	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	131,62	107,27-86,47	40. Indeks Risiko Bencana Daerah	73	50
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			41. Penurunan Emisi GRK		
	a. Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	2,66	31,65	a. Kumulatif ((Ton Co2eq))	21.798,45	2.567.777,36
	b. Tahunan	36,65	80,89	b. Tahunan	9,27	70,08	b. Tahunan	0,38	5,78

5.2.2. Arah Kebijakan Transformatif

Dalam mewujudkan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor, perlu dirumuskan juga Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor yang dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah Kota Bogor. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada **Tabel 5.5**.

Tabel 5.5. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	**Transformasi Sosial**
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas.
	Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting.
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
	Transformasi Ekonomi
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy
	Transformasi Tata Kelola
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Implementasi Transformasi
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
Pendidikan Berkualitas yang Merata	**Transformasi Sosial**
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
	Transformasi Ekonomi
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
	Transformasi Tata Kelola
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Implementasi Transformasi
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif	**Transformasi Sosial**
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Transformasi Ekonomi
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung).
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure)
	Transformasi Tata Kelola
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	**Transformasi Sosial**
	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
	Transformasi Ekonomi

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Transformasi Tata Kelola
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Implementasi Transformasi
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
Penerapan ekonomi hijau	**Transformasi Ekonomi**
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy
	Transformasi Ekonomi

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
Penguatan Transformasi Digital	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	**Transformasi Ekonomi**
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya.
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan kelurahan
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage
	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.
	Transformasi Tata Kelola
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	**Transformasi Sosial**
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
	Transformasi Ekonomi
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya.
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan kelurahan
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage
	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.
	Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
	Peningkatan produktivitas BUMD.
Peningkatan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas Adaptif, Inovatif dan kolaboratif	**Transformasi Tata Kelola**
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.
	Penguatan integritas partai politik

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	**Transformasi Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**
	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah	**Transformasi Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Implemetasi Transformasi
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
	Implementasi Transformasi
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	**Transformasi Ekonomi**
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya.
Peningkatan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju	Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender	**Transformasi Sosial**
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	**Transformasi Ekonomi**
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy
	Implementasi Transformasi
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	**Transformasi Sosial**
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
	Transformasi Ekonomi
	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism
	Peningkatan produktivitas BUMD.
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses
Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
	Implementasi Transformasi
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

BAB VI

PENUTUP

BAB 6. PENUTUP

Untuk mewujudkan Kota Bogor 2045 harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Di samping itu, juga diperlukan komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Indonesia.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi Kota Bogor 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJP Daerah harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dengan memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif sosial dalam melaksanakan strategi tujuan pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non-pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level kegiatan/sub kegiatan, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.2. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan

pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar 6.1 berikut.

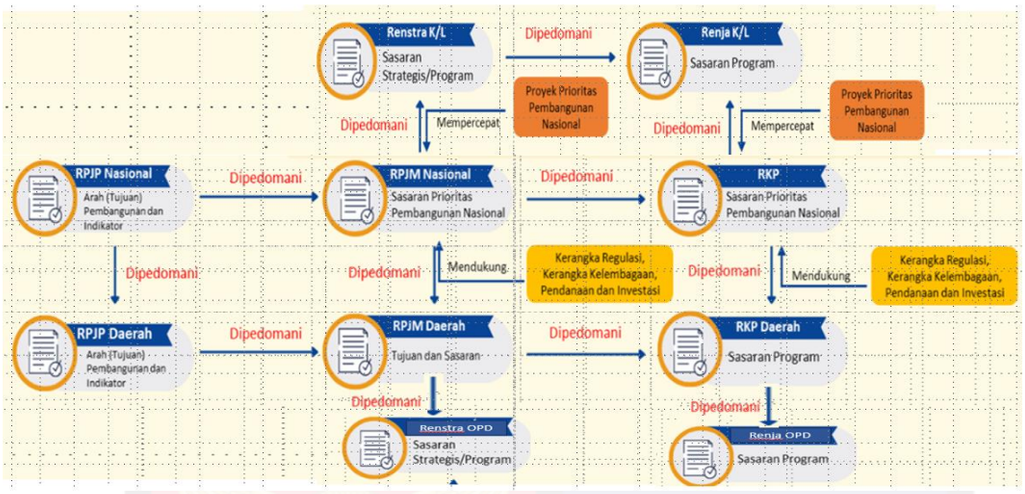

Gambar 6.1. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional

Konsistensi antara RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP Daerah ke RPJM Daerah. Periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJP Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan berikut indikator pengukurnya menjadi bagian dari muatan utama RPJP Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kota Bogor 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJM Daerah, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Organisasi Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMDaerah.
3. Tujuan Pembangunan Daerah dan indikator dalam RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJM Daerah, dan menjadi pedoman bagi RPJP Daerah untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator sasaran pokok pembangunan.
4. Sasaran pokok dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJM daerah menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah.
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan sasaran program RKP Daerah.
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD dan

sasaran program RKP Daerah. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

7. Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah (OPD atau lintas OPD) seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
8. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/kota.

6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJP Daerah dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Daerah yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah daerah maupun OPD (Gambar 6.2).

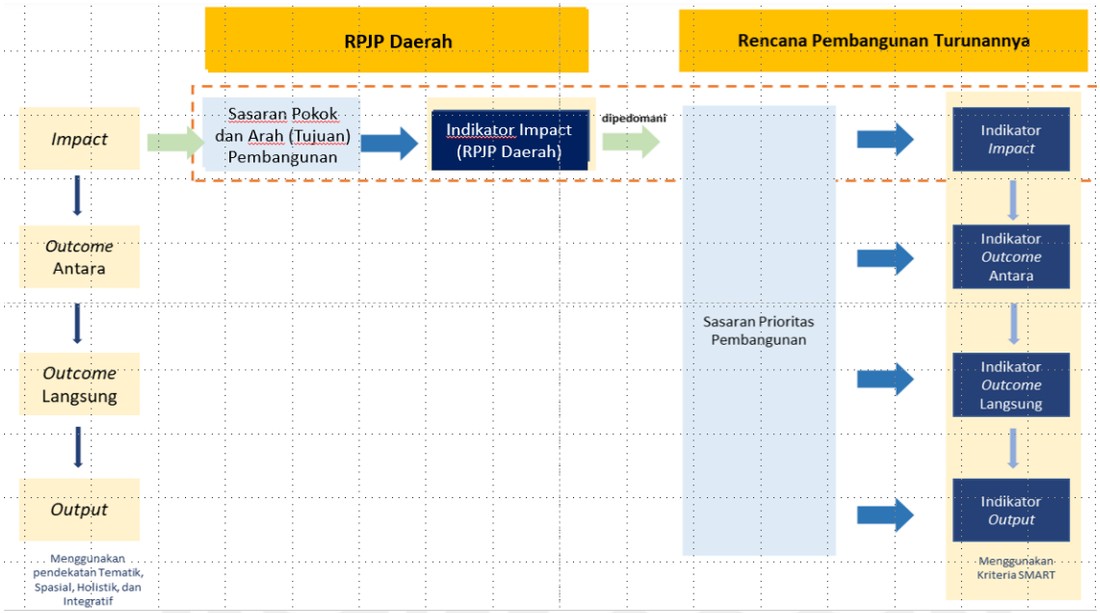

Gambar 6.2. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah - Rencana Pembangunan Turunannya

6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Daerah harus menjadi bagian dari RPJM Daerah, dan seluruh indikator RPJM Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.2. Sistem Insentif

Insentif merupakan sarana motivasi, dorongan untuk para pegawai agar muncul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi. Sebuah organisasi seperti Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada para pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Alasan sebuah organisasi memberikan sistem insentif kepada pegawai adalah:

a) Insentif dapat menarik calon pegawai yang berkualitas sehingga peluang sebuah organisasi untuk memiliki pegawai yang mempunyai produktivitas tinggi akan lebih besar

b) Insentif diberikan untuk mempertahankan pegawai yang telah bekerja saat ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah pegawai yang memiliki kompetensi baik untuk keluar dari pekerjaannya. Cara yang dapat ditempuh yaitu menyusun sistem insentif yang setara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
c) Insentif diberikan agar dapat memotivasi pegawai dalam meningkatkan kualitas kerja. Pemberian insentif ini merupakan suatu bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Melalui pemberian insentif memungkinkan antar pegawai untuk berlomba-lomba meraih prestasi yang sama dengan rekan lainnya dalam pencapaian produktivitas sehingga secara langsung dapat meningkatkan produktivitas sebuah organisasi
d) Mengendalikan biaya insentif agar tidak terdapat pegawai yang diberikan insentif lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya.

Insentif secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Insentif material yang dapat diberikan dalam bentuk uang dan jaminan sosial
b) Insentif non material yang dapat diberikan dalam bentuk diantaranya pemberian gelar, tanda jasa, piagam penghargaan, promosi dan lainnya.

Pegawai pemerintah daerah Kota Bogor diharapkan dapat meningkatkan kinerja agar pemberian insentif semakin ditingkatkan. Bentuk insentif yang biasanya diberikan kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah berupa tambahan penghasilan dan tambahan tunjangan penghasilan. Insentif berupa uang tambahan penghasilan ditentukan berdasarkan golongan dan pangkat. Pemerataan yang dimaksud adalah upaya dalam memberikan insentif kepada seluruh pegawai tanpa kecuali, namun juga dipertimbangkan faktor keadilan. Yang terakhir adalah pertimbangan kelayakan. Kelayakan yang dimaksud adalah pemberian insentif tidak terlalu kecil karena akan sangat kurang nilai manfaat yang diperoleh.

6.3. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJP Daerah 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana Gambar 6.3.

Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian RPJP Daerah 2025-2045

Pengendalian RPJP Daerah dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

   Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJP Daerah ke RPJM Daerah dan RPJM Daerah ke dokumen rencana jangka menengah OPD; (ii) kesiapan penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

   Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJM Daerah ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek OPD; (ii) kesiapan penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program

Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja K/L/D terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal OPD.

6.4. Evaluasi Manajemen Risiko

Adanya beberapa hambatan dalam implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor mengharuskan Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan evaluasi manajemen risiko. Evaluasi manajemen risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka memberikan keyakinan secara terbatas terhadap penerapan pengelolaan risiko yang dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terpisah dengan membandingkan pelaksanaan manajemen risiko dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu penerapan manajemen risiko pemerintah daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dilakukannya evaluasi manajemen risiko diantaranya adalah:

a) Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah
b) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara
c) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan rpjpd pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi Impact atau probability atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Evaluasi manajemen risiko Pemerintah Kota Bogor telah dilaksanakan guna mematuhi yang telah tertuang dalam RPJMD 2020-2024 dan juga sebagai landasan dalam membangun RPJPD Kota Bogor 2025-20245. Evaluasi manajemen risiko mengikuti lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dalam evaluasi manajemen risiko di Kota Bogor perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut agar tujuan dari meminimalisir risiko dapat terlaksana. Berikut adalah aspek yang harus diperbaiki dalam evaluasi manajemen risiko, yaitu:

a) Melekatkan proses manajemen risiko sejak penyusunan dokumen perencanaan
b) Memperkuat pemahaman sumberdaya manusia terkait manajemen risiko melalui bimtek, diklat dan sertifikasi
c) Mengelola seluruh risiko dari risiko strategis hingga operasional termasuk risiko fraud dan risiko kemitraan
d) Menggunakan informasi risiko sebagai dasar inspektorat melakukan pengawasan
e) Mengoptimalkan peran struktur manajemen risiko

6.5. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.6. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Daerah 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama,

yaitu Pemerintah Daerah, OPD, dan masyarakat. Komunikasi kepada OPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.7. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik

Pembiayaan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembiayaan sektor publik maupun non publik. Pembiayaan sektor publik merupakan pembiayaan yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Tujuan dari pembiayaan sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Pembiayaan sektor publik di Kota Bogor dapat berasal dari pajak, retribusi, laba BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi dan sumber lain yang sah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah dan lainnya. Pembiayaan sektor publik digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang dibagi kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan lainnya, serta urusan pilihan seperti pertanian, kehutanan, energi, perdagangan, pariwisata dan lainnya.

Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor publik yaitu dengan meningkatkan pelayanan publik seperti membangun kawasan wisata baru atau melestarikan tempat wisata yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata melalui pajak dan retribusi. Setiap waktu terutama di akhir pekan, Kota Bogor ramai didatangi oleh wisatawan baik domestic maupun internasional yang memiliki tujuan untuk menikmati barang atau jasa yang ada dan diproduksi di Kota Bogor, sehingga pemanfaatan barang atau jasa yang diproduksi di Kota Bogor dapat optimal meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor publik. Adanya pemanfaatan barang dan jasa yang dibuat oleh pelaku usaha Kota Bogor diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan dampak berganda bagi peningkatan sumber pembiayaan sektor publik.

6.8. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non-Publik

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kota Bogor untuk tahun 2025-2045, penting bagi Pemerintah Kota Bogor untuk tidak hanya

mengandalkan sumber daya pembiayaan dari sektor publik namun juga meningkatkan kapasitas pembiayaan dari sektor non publik. Peningkatan kapasitas pembiayaan dari sektor non publik dapat menjadi katalisator penting untuk mendukung berbagai inisiatif dan program yang dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing kota di tingkat nasional dan internasional.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mendorong kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP). Skema ini memungkinkan transfer pengetahuan, teknologi, dan investasi dari sektor swasta ke dalam proyek-proyek yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, proyek infrastruktur yang sebelumnya mungkin sulit terdanai oleh anggaran pemerintah dapat direalisasikan dengan lebih efisien dan efektif.

Selain itu, pemerintah kota dapat menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi investasi swasta, dengan cara penyederhanaan regulasi, pemberian insentif fiskal, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Penciptaan iklim usaha yang ramah dan mendukung akan menarik minat investor lokal maupun asing, memperluas basis pembiayaan kota dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.

Penting juga untuk membangun kemitraan dengan lembaga keuangan lokal maupun internasional untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan. Misalnya, dengan fokus pada pembiayaan hijau *(green financing)* untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang juga menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan mengoptimalkan kapasitas pembiayaan dari sektor non publik, Kota Bogor dapat mempercepat laju pembangunan serta memastikan bahwa rencana jangka panjang yang telah disusun dapat terealisasi dengan baik, mengarah pada masa depan kota yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

6.9. Manajemen Investasi

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kota Bogor dalam jangka panjang, manajemen investasi daerah menjadi sangat krusial. Penguatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini mengingat DPMPTSP Kota Bogor merupakan ujung tombak dalam manajemen investasi, bertugas memastikan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para penanam modal, baik dari dalam maupun luar negeri.

Memperkuat fungsi DPMPTSP dapat dimulai dengan penyederhanaan proses perizinan dan penyediaan layanan terpadu yang efisien dan transparan. Dengan demikian, para investor dapat memperoleh informasi dan menyelesaikan proses perizinan dengan cepat dan mudah, mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menjadi kendala utama dalam aliran investasi.

Selain itu, DPMPTSP Kota Bogor perlu memperkuat kapasitasnya dalam melakukan promosi investasi yang proaktif dan terfokus pada sektor-sektor prioritas yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pengembangan strategi komunikasi yang efektif, partisipasi dalam pameran investasi, dan menjalin kerjasama dengan pelaku industri dan asosiasi investasi.

Tidak kalah penting adalah peran DPMPTSP Kota Bogor dalam memberikan konsultasi dan dukungan kepada investor melalui penyediaan informasi pasar yang komprehensif dan terbaru. Layanan *aftercare* juga vital untuk memastikan keberlanjutan investasi dengan memfasilitasi kebutuhan dan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi investor.

PJ WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

KOTA BOGOR

2025 - 2045

BAPPERIDA KOTA BOGOR

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Bogor

Jl. Kapten Muslihat No.21 - Bogor 16121

bapperida@kotabogor.go.id

0251-8338052